



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025



**Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan**





**Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan**





Kementerian PPN/
Bappenas

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2024

Daftar Isi

BAB 1

Evaluasi Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024



- 1.1 Perkembangan Ekonomi Global 2
- 1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2023 5
- 1.3 Prakiraan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 14

BAB 2

Kebijakan Pembangunan



- 2.1 Tema, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2025 32
- 2.2 Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 34
- 2.3 Pengarusutamaan Pembangunan 37
- 2.4 Kerangka Ekonomi Makro 40

BAB 3

Prioritas Nasional



- 3.1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 58
- 3.2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 66
- 3.3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi 83
- 3.4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 92
- 3.5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 122
- 3.6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 136
- 3.7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 147
- 3.8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur 157

BAB 4

Intervensi Pembangunan Wilayah



● 4.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah	170
● 4.2 Wilayah Sumatera	174
● 4.3 Wilayah Jawa	199
● 4.4 Wilayah Bali – Nusa Tenggara	217
● 4.5 Wilayah Kalimantan	226
● 4.6 Wilayah Sulawesi	242
● 4.7 Wilayah Maluku	259
● 4.8 Wilayah Papua	266

BAB 5

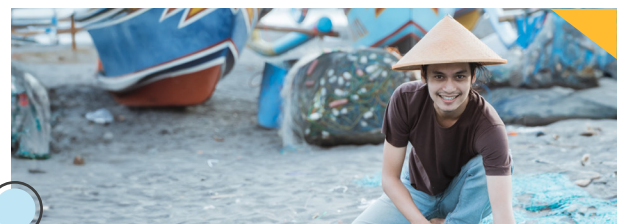
Pendanaan Pembangunan



● 5.1 Prioritas Pendanaan Pembangunan	288
● 5.2 Pengelolaan Belanja Pemerintah	291
● 5.3 Optimasi dan Sinergi Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan	299

BAB 6

Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan



● 6.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	306
● 6.2 Tata Kelola Data Pembangunan	315

BAB

2

Evaluasi Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024





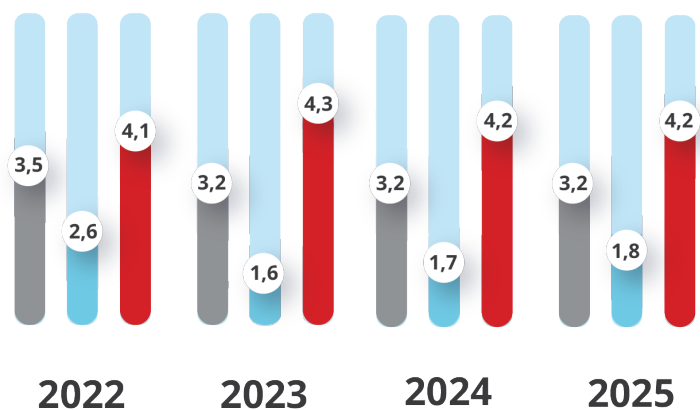
1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global melambat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari tingkat pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan

mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Aktivitas perdagangan global tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan *Baltic Dry Index* level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, dan ketegangan geopolitik. World Trade Organization dalam *Global Trade Outlook and Statistics* April 2024 memproyeksi volume perdagangan pada tahun 2023 kembali melambat dan berkontraksi sebesar 1,2 persen, setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen.

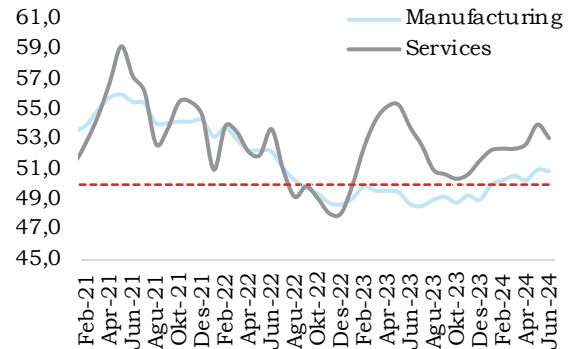
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)



Sumber: World Economic Outlook Update, April 2024.

Baltic Dry Index

Sumber: Bloomberg, Juli 2024.

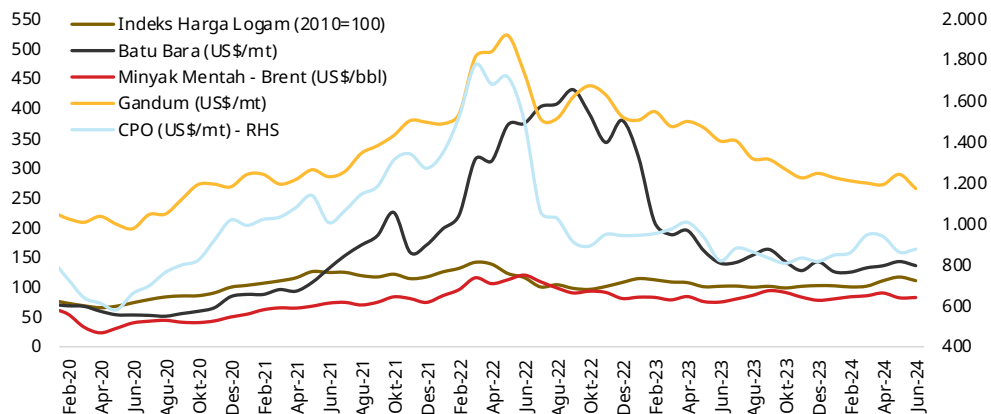
Purchasing Managers Index Global

Sumber: S&P Global, Juli 2024.

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021–2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir¹.

Sementara itu, aktivitas manufaktur tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari *Purchasing Managers Index* sektor manufaktur yang berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2023, aktivitas jasa mengalami ekspansi, tecermin dari *Purchasing Managers Index* sektor jasa yang berada di zona ekspansi. Memasuki tiga bulan pertama di tahun 2024, *Purchasing Managers Index* sektor manufaktur dan sektor jasa mengalami perbaikan dan berada di zona ekspansi.

Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan setelah kenaikan tinggi di tahun 2022. Penurunan harga komoditas tahun 2023 seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023, berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara.

Harga Komoditas Internasional

Sumber: World Bank Commodities Price Data, Juli 2024.

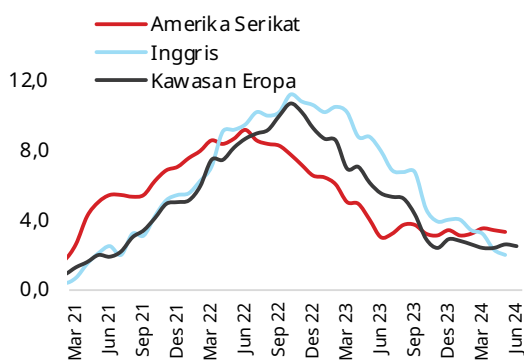
¹ Global Trade Has Nearly Flatlined, Populism is Taking a Toll on Growth. Loc. Cit.



Sejak awal tahun 2022, bank sentral dari berbagai negara di dunia juga menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga sebagai respons untuk menurunkan tekanan inflasi. Meskipun di akhir tahun 2023 inflasi di beberapa negara telah turun dan kembali ke target bank sentral, tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed dan Bank of England belum

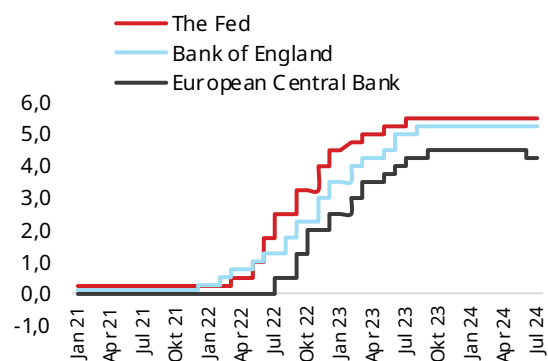
menunjukkan sinyal akan diturunkan dalam waktu dekat. Sementara itu, suku bunga acuan European Central Bank telah diturunkan sebesar 25 basis poin ke level 4,25 persen pada awal Juni 2024. Kondisi sebagian besar bank sentral global yang masih menerapkan kebijakan suku bunga tinggi dan berkepanjangan (*higher for longer*) memicu risiko perlambatan aktivitas perekonomian lebih lanjut.

Inflasi Beberapa Negara



Sumber: Bloomberg, Juli 2024.

Suku Bunga Beberapa Bank Sentral



Sumber: Bloomberg, Juli 2024.

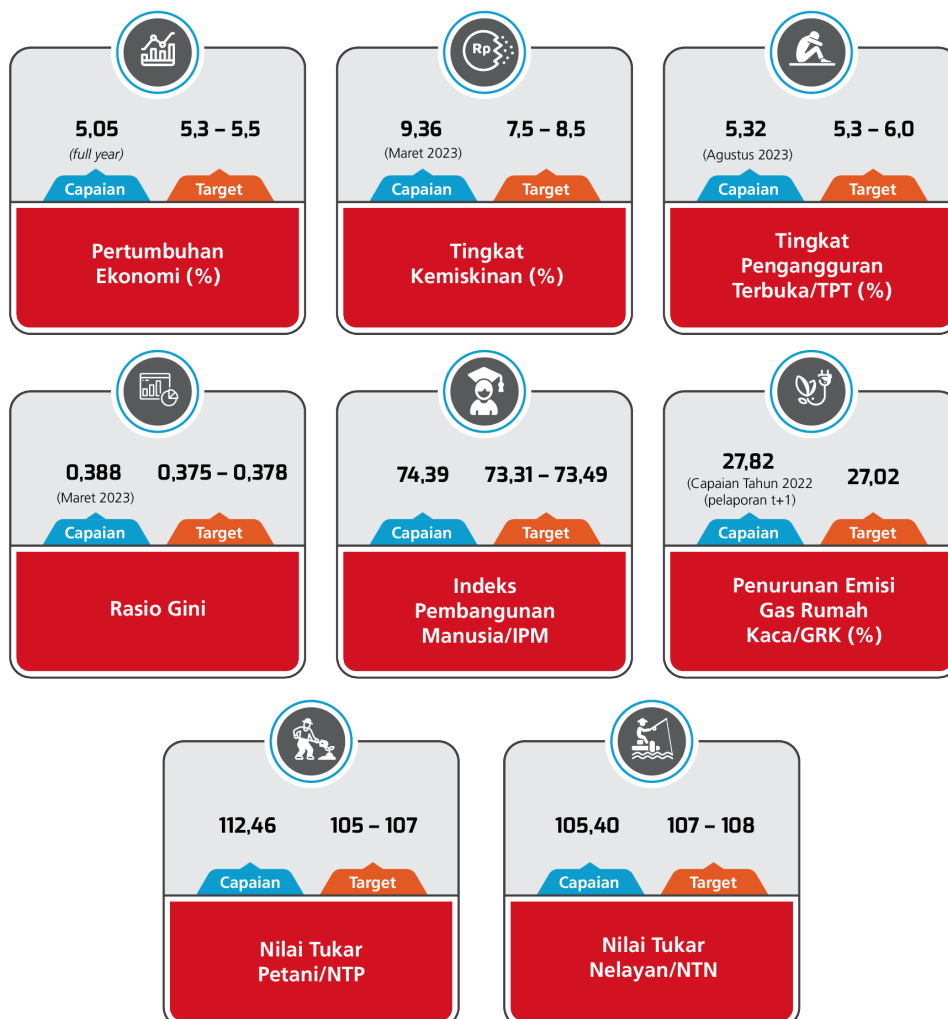
1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2023

Evaluasi RKP Tahun 2023

Kebijakan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kinerja pencapaian yang positif telah terlihat pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, namun demikian perlu

dibarengi dengan upaya akseleratif dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai target yang diharapkan pada tahun 2024. Gambaran pencapaian indikator sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.



Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional tentunya dipengaruhi oleh kinerja berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan terkait pembangunan ekonomi, kewilayahan, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, dan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

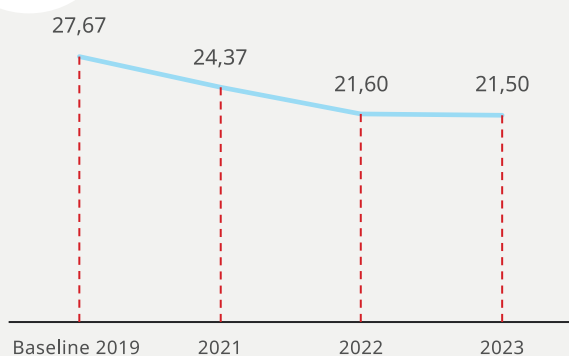
Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menunjukkan perbaikan positif, di antaranya (1) skor pola pangan harapan dari 87,20 pada tahun 2021 menjadi 94,10 pada tahun 2023; (2) nilai devisa pariwisata dari US\$0,55 miliar pada tahun 2021 menjadi US\$14,63 miliar pada tahun 2023; serta

(3) rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto dari 9,12 persen pada tahun 2021 menjadi 10,31 persen pada tahun 2023.

Sementara itu, pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional; (2) rasio kewirausahaan nasional; (3) pertumbuhan produk domestik bruto pertanian; (4) pertumbuhan dan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan; (5) kontribusi produk domestik bruto pariwisata; (6) pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto); (7) pertumbuhan ekspor industri pengolahan; serta (8) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa.



Mendorong Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*



Pencapaian pembangunan kesehatan terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi *stunting* pada balita dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 21,50 persen pada tahun 2023. Salah satu kabupaten dengan tingkat penurunan *stunting* terbaik pada tahun 2022 adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan penurunan sebesar 23,60 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antar-*stakeholders* di wilayah melalui pemanfaatan dana alokasi khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana *Corporate Social Responsibility*, serta kerja sama lintas sektor dengan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia, Badan

Amil Zakat Nasional, Bank Sumut, sekolah, media, hingga komunitas masyarakat (keagamaan) dalam penyuluhan penurunan *stunting*.

Upaya percepatan penurunan *stunting* terus dilakukan melalui (1) pendampingan setiap keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan; (2) pemenuhan alat ukur terstandar dan pelatihan rutin kepada kader; (3) penguatan layanan tata kelola gizi buruk; (4) penguatan kesiapsiagaan sistem kesehatan dan sistem pangan dalam ketahanan terhadap bencana, seperti pandemi Covid-19; (5) perluasan cakupan pemberian makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus; (6) suplementasi tablet tambah darah; (7) imunisasi dasar lengkap; serta (8) penyediaan akses air minum perpipaan dan sanitasi yang aman.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi yang menyebabkan stagnasi penurunan *stunting*. Tantangan tersebut antara lain masih belum optimalnya sinergi intervensi antar-*stakeholders*, masih rendahnya tingkat kesadaran pentingnya intervensi gizi spesifik, serta belum adanya satu data sasaran prioritas dalam pendampingan keluarga di tingkat lapangan.

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, termasuk di dalamnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif seperti (1) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial dari 86,96 persen pada tahun 2021 menjadi 95,75 persen pada tahun 2023; (2) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dari 40,39 persen pada tahun 2021 menjadi 62,13 persen pada tahun 2023; (3) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif dari 35,83 persen tahun 2021 menjadi 41,31 persen tahun 2023; (4) Indeks Pembangunan Keluarga dari 54,01 pada tahun 2021 menjadi 61,43 pada tahun 2023; dan (5) Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 72,39 pada tahun 2021 menjadi 76,02 pada tahun 2023.

Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; (2) prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita; (3) insidensi tuberkulosis; (4) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta; (5) nilai rata-rata hasil *program for international student assessment*: membaca, matematika, dan sains; (6) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (7) harapan lama sekolah; (8) Indeks Perlindungan Anak; (9) Indeks Pembangunan Pemuda; (10) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; (11) Indeks Revolusi Mental; (12) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila; (13) Indeks Pembangunan Kebudayaan; (14) Indeks Pembangunan Masyarakat; (15) nilai budaya literasi; serta (16) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun.

Pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan menunjukkan perbaikan positif pada capaian Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Barat Indonesia dari 69,90–81,11 pada tahun 2021 menjadi 71,15–82,46 pada tahun 2023. Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia; serta (2) produk domestik regional bruto dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif, seperti (1) persentase rute pelayanan yang saling terhubung (*loop*) dari 25,00 persen pada tahun 2021 menjadi 30,00 persen pada tahun 2023; dan (2) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik dari 1.123 kWh/kapita pada tahun 2021 menjadi 1.337 kWh/kapita pada tahun 2023.

Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; (2) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; (3) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau; (4) persentase capaian *on time performance* transportasi udara; (5) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan; (6) rasio elektrifikasi; serta (7) persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).



Pembangunan lingkungan hidup, termasuk ketahanan bencana dan iklim menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif seperti (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 71,45 pada tahun 2021 menjadi 72,54 pada tahun 2023; dan (2) persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari 27,07 persen pada tahun 2021 menjadi 27,82 persen pada tahun 2022. Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain penurunan potensi kehilangan produk domestik bruto akibat dampak bencana dan iklim terhadap total produk domestik bruto.

Pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan termasuk transformasi pelayanan publik menunjukkan keberhasilan pada indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif, yaitu (1) Indeks Demokrasi Indonesia dari 78,12 pada tahun 2021 menjadi 79,51 pada tahun 2023; dan (2) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah dari 77,23 persen pada tahun 2021 menjadi 85,50 persen pada tahun 2023.

Perbaikan positif yang telah dicapai pada tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, yang membutuhkan tindak lanjut dan penanganan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Adapun tantangan yang masih dihadapi, di antaranya (1) konflik global yang memengaruhi rantai pasok global dan stabilitas perekonomian nasional; (2) belum optimalnya

pelayanan dasar di wilayah timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, serta teknologi informasi dan komunikasi; (3) adanya isu perubahan iklim yang berdampak pada kelestarian lingkungan serta ketahanan pangan; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya produktivitas dan kurang terdistribusinya sumber daya manusia terampil; serta (5) rendahnya kapasitas teknologi dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Dengan demikian, pemerintah perlu menitikberatkan pada upaya menjawab tantangan sekaligus menentukan langkah perbaikan pada pencapaian pembangunan yang masih memerlukan perhatian atau belum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Evaluasi Pembangunan Daerah

Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan evaluasi tahunan yang bertujuan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi *lesson learned* bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah selanjutnya. Salah satu fokus evaluasi pembangunan daerah, yaitu evaluasi kinerja pembangunan daerah berdasarkan pencapaian indikator makro yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia di level provinsi terhadap sasaran pembangunan nasional.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Provinsi	Ketercapaian terhadap Target RKP			Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022				
	LPE	TK	TPT	LPE	TK	TPT	RG	IPM
Aceh								
Sumatera Utara								
Sumatera Barat								
Riau								
Jambi								
Sumatera Selatan								
Bengkulu								
Lampung								
Kep. Bangka Belitung								
Kep. Riau								
DKI Jakarta								
Jawa Barat								
Jawa Tengah								
DI Yogyakarta								
Jawa Timur								
Banten								
Bali								
Nusa Tenggara Barat								
Nusa Tenggara Timur								
Kalimantan Barat								
Kalimantan Tengah								
Kalimantan Selatan								
Kalimantan Timur								
Kalimantan Utara								
Sulawesi Utara								
Sulawesi Tengah								
Sulawesi Selatan								
Sulawesi Tenggara								
Gorontalo								
Sulawesi Barat								
Maluku								
Maluku Utara								
Papua Barat								
Papua								

Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Keterangan Ketercapaian Target RKP:

- Capaian <60% dari target
- Capaian antara ≥60% dan <90% dari target
- Capaian ≥90% dari target

Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022:

- Capaian < 0
- $0 \leq \text{Capaian} < 0,5 \times \text{Positif Range}$
- Capaian $\geq 0,5 \times \text{Positif Range}$

LPE: Pertumbuhan Ekonomi

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

IPM: Indeks Pembangunan Manusia

TK: Tingkat Kemiskinan

RG: Rasio Gini



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa target sasaran makro setiap provinsi cenderung belum tercapai terutama untuk indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu, dari realisasi terlihat banyak daerah yang mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke 2023. Kemudian, capaian kinerja untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua, serta capaian kinerja untuk tingkat kemiskinan Provinsi Bali masih perlu dioptimalkan.

Perekonomian Bali–Nusa Tenggara yang memiliki komoditas unggulan tembaga tertahan akibat normalisasi harga komoditas tembaga dengan tumbuh 4,0 persen pada tahun 2023. Walaupun begitu, perekonomian Bali–Nusa Tenggara tetap tumbuh tinggi ditopang oleh Provinsi Bali yang tumbuh 5,7 persen sejalan dengan pemulihan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang meningkatkan kinerja pariwisata. Namun, tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen, belum

kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 walaupun capaiannya membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 sebesar 1,80 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,95 persen dan belum mencapai target RKP Tahun 2023. Perlambatan tersebut disebabkan oleh kontraksi di sektor pertambangan akibat keterlambatan perolehan izin ekspor konsentrat tembaga pada triwulan II-2023.

Perekonomian Wilayah Papua yang memiliki komoditas unggulan tembaga dan emas tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan harga emas global. Pada tahun 2023, Wilayah Papua tumbuh 4,9 persen. Wilayah Papua didorong oleh produksi tembaga dan emas di Provinsi Papua Tengah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 4,2 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 8,97 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* yang dihadapi sektor utama Papua, yaitu pertambangan dan penggalan dalam hal ini tembaga dan emas.



Peran Penghargaan Pembangunan Daerah

Presentase Penduduk Miskin Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



Penghargaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu instrumen evaluasi pembangunan daerah mampu mengungkap kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengeksekusi program unggulan dan program inovasi. Program unggulan yang dapat memberi dampak signifikan terhadap kemajuan daerah dan peningkatan pelayanan publik tidak lepas dari peran kepala daerah dalam membangun sistem perencanaan inovatif yang memadukan kegiatan lintas perangkat daerah, disertai indikator yang terukur secara konsisten dan berkala, pemantauan yang didukung dengan *information technology* dan *dashboard*, menggerakkan keterlibatan kelembagaan nonpemerintah, sektor usaha, dan penggerak masyarakat hingga tingkat desa.

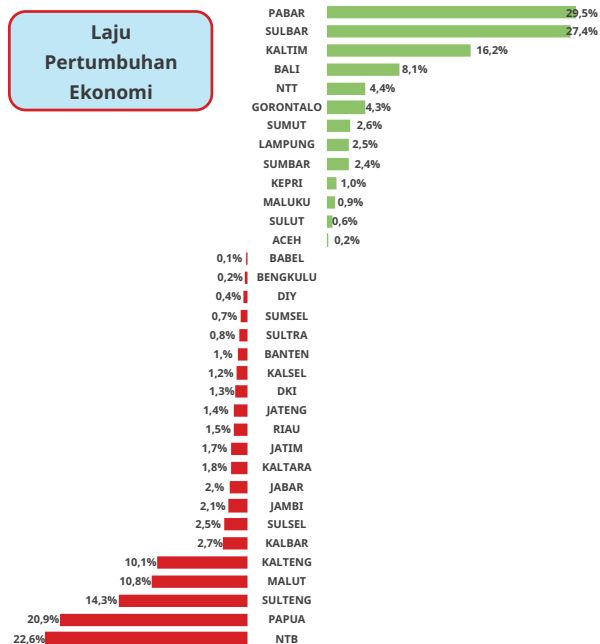
Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pembangunan daerah yang baik memperoleh kebermanfaatan dari program inovasi yang telah dilaksanakan. Pada grafik kontribusi capaian tingkat kemiskinan provinsi terhadap perubahan capaian nasional tahun 2022-2023, pelaksanaan program inovasi Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) terbukti berdampak pada penurunan tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 sebesar 8,4 persen menjadi 7,6 persen pada tahun 2023, di bawah angka rata-rata nasional sebesar 9,36 persen. Hal ini sejalan dengan terentaskannya desa tertinggal menjadi 0 desa dan kenaikan kelas menjadi desa mandiri sebanyak 1.820 desa. Semangat ketahanan pangan yang dibawakan oleh Provinsi Sumatera Selatan pada penghargaan pembangunan daerah 2023 yang mengusung inovasi gerakan Sumatera Selatan mandiri pangan berdampak pada peningkatan pola konsumsi masyarakat melalui pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta aman. Hal yang sama pada Provinsi Jawa Barat mengusung inovasi petani milenial yang berdampak pada ketersediaan pangan dan peningkatan aktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok petani milenial. Berbagai kreativitas daerah yang ditunjukkan melalui program inovasi dan program unggulan daerah harus terus didorong agar mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis nasional secara optimal.

Selain analisis ketercapaian, dilakukan juga evaluasi kontribusi capaian makro provinsi terhadap perubahan capaian nasional pada tahun 2022-2023. Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat merupakan dua daerah yang berkontribusi tertinggi terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan industri pengolahan serta pertumbuhan ekspor luar negeri yang terakselerasi terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor pada sektor migas khususnya komoditas *liquefied natural gas*. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat didorong oleh peningkatan kinerja pada pembentukan modal tetap bruto atau investasi serta akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, industri

pengolahan, dan konstruksi yang menjadi penopang utama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta adanya upaya dari daerah untuk mendorong hilirisasi kegiatan usaha primer dan pengembangan industri, seperti kawasan industri/kawasan ekonomi khusus skala besar di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku. Namun demikian, tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Nusa Tenggara Barat (22,6 persen), Papua (20,9 persen), dan Sulawesi Tengah (14,3 persen). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan lapangan usaha utama, seperti pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan.



Kontribusi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022–2023



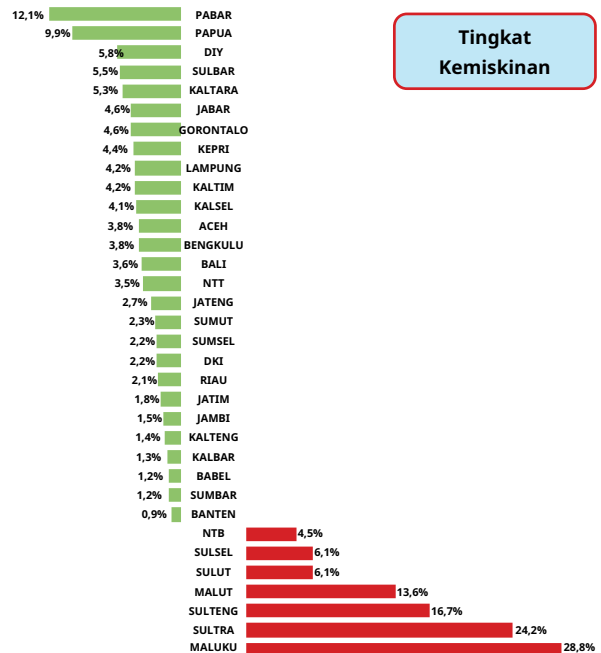
Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Keterangan:

- Berkontribusi Negatif
- Berkontribusi Positif

Provinsi Papua Barat juga merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat diindikasikan adanya dampak dari pertumbuhan sektor industri pengolahan dan pertambangan penggalan sehingga terjadi peningkatan kesempatan masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Namun demikian, tingkat kemiskinan Papua Barat merupakan yang tertinggi kedua secara nasional dan penduduk miskinnya didominasi di pedesaan. Di sisi lain, tiga provinsi yang cukup signifikan menghambat penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Maluku (28,8 persen), Sulawesi Tenggara (24,2 persen), dan Sulawesi Tengah (16,7 persen). Pada tiga provinsi tersebut terdapat kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Kontribusi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022–2023



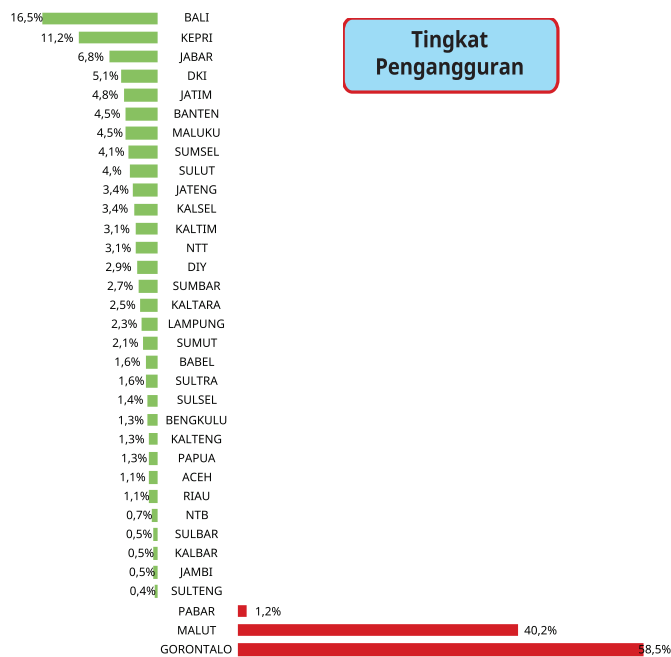
Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Keterangan:

- Berkontribusi Negatif
- Berkontribusi Positif

Untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka nasional, Provinsi Bali merupakan kontributor tertinggi (16,5 persen). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang positif pada tahun 2023 berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Bali tahun 2023 menunjukkan tren perbaikan yang terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan. Kemudian, terjadi peningkatan ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Bali khususnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum seiring pemulihan aktivitas pariwisata pascarelaksasi mobilitas dan *revenge tourism* sepanjang 2023. Namun demikian, terdapat dua provinsi yang cukup signifikan menghambat penurunan tingkat pengangguran terbuka nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Gorontalo (58,5 persen) dan Maluku Utara (40,2 persen).

Kontribusi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023



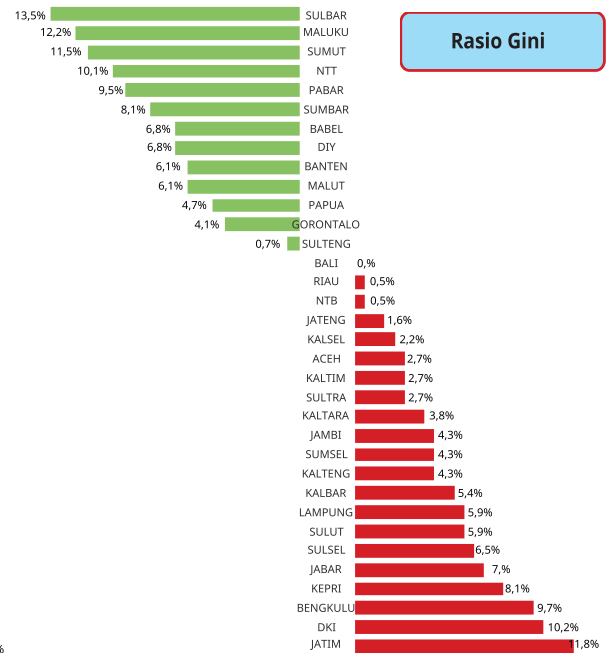
Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Keterangan:

- Berkontribusi Negatif
- Berkontribusi Positif

Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah yang paling tinggi berkontribusi pada penurunan rasio gini nasional pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan rasio gini di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh beberapa upaya, seperti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi, peningkatan skala usaha

Kontribusi Capaian Rasio Gini Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023



Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Keterangan:

- Berkontribusi Negatif
- Berkontribusi Positif

petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja. Sebaliknya, tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang peningkatan rasio gini nasional pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Jawa Timur (11,8 persen), DKI Jakarta (10,2 persen), dan Bengkulu (9,7 persen). Untuk itu, diperlukan intervensi yang lebih akurat dan efektif untuk mengoptimalkan capaian indikator makro di provinsi-provinsi tersebut.



1.3 Evaluasi Pembangunan Tahun 2023

Capaian dan Prakiraan Sasaran Pembangunan dan Ekonomi Makro Tahun 2024

No	Indikator	Capaian				Outlook 2024
		2020	2021	2022	2023	
Sasaran Pembangunan Nasional						
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82 ^{a)}
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379 ^{b)}
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03 ^{c)}
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem ^{d)} (%)		2,16	1,52	1,12	0,83 ^{c)}
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,09
6	Penurunan Emisi GRK (%)	24,46	27,07	27,82	27,02 ^{e)}	27,27
Indikator Pembangunan						
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	105–108
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22	104,69	106,45	105,42	101–105
Indikator Ekonomi Makro						
9	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% _{yoy}): Akhir Periode	1,68	1,87	5,51	2,61	3,0 ^{f)}
10	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.543	14.296	14.847	15.235	15.700-16.100 ^{f)}
11	Cadangan Devisa (miliar USD)	135,9	144,9	137,2	146,4	142,4
12	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	10,2	8,0	6,0	6,5	6,2
13	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	0,3	1,0	-0,1	-0,6
14	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34	18,67	19,60
15	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,30	3,60	4,10 ^{e)}	4,50
16	Nilai Devisa Pariwisata (miliar USD)	3,60	0,55	7,04	14,63	17,64
17	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,31	10,12 ^{g)}
18	Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,49	-0,11 ^{g)}
19	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,61	-2,29 ^{g)}

No	Indikator	Capaian				Outlook 2024
		2020	2021	2022	2023	
20	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,39	40,73	39,70	38,98	38,26 ^{g)}
21	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,96	3,80	3,87	4,40	5,30
22	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,33	901,02	1.207,20	1.418,87	1.450–1.650
23	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	662,7–731,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Keterangan: a) Angka Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2024, BPS; b) Angka Realisasi Rasio Gini Maret 2024, BPS; c) Angka Realisasi Tingkat Kemiskinan Maret 2024, BPS; d) Menggunakan US\$1,9 *Purchasing Power Parities* (PPP); e) Angka Target pada Perpres RKP Tahun 2024; f) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 6 Mei 2024; g) Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022, realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi perlambatan ekonomi global tahun 2023 yang disebabkan oleh risiko resesi, dampak ketegangan geopolitik, tekanan inflasi dan suku bunga yang tinggi, serta pelemahan permintaan global. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 meningkat menjadi sebesar US\$4.870 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi, serta restoran dan

hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi tersebut. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto utamanya didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi tersebut didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023.



Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,32 persen, utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga sepuluh besar ekspor komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,96 persen, sektor jasa lainnya sebesar 10,52 persen, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Kinerja sektor pariwisata, termasuk olahraga dan penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa

pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti rangkaian acara konferensi tingkat tinggi ke-43 Association of South East Asia Nations, Moto Grand Prix Mandalika, World Superbike Mandalika, Federation Internationale de Basketball World Cup 2023, Aquabike Jet Ski World Championship 2023, FIFA U-17 World Cup 2023, ASEAN U-16 Boys Championship 2024, TAFISA World Walking Day 2024 di Ibu Kota Nusantara, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar sebesar 14,17 persen serta industri barang logam, komputer barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah industri alat angkutan sebesar 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri.

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik, serta meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri.

Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Memasuki triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen dengan seluruh komponen pengeluaran dan seluruh sektor lapangan usaha selain pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada bulan Februari serta kepala daerah pada bulan November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,30 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 persen dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,26 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 19,60 persen dari total produk domestik bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun

2024 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada tujuh subsektor prioritas, penerapan standarisasi, dan industri hijau.

Produktivitas sektor pariwisata, termasuk olahraga dan penunjangnya akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *meeting, incentive, convention, and exhibition* berskala internasional, *multi* dan *single event* olahraga, serta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Agenda transformasi ekonomi berdampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Penurunan angka tersebut antara lain didukung oleh revitalisasi kebijakan vokasi, penyempurnaan regulasi terkait ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018.



Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka diharapkan terus mengalami penurunan. Capaian bulan Februari 2024 menunjukkan angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen, lebih rendah dari angka sebelum pandemi Covid-19. Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka terus diupayakan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja di antaranya melalui pelatihan vokasi, termasuk Program Kartu Prakerja, program sertifikasi kompetensi, dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rasio Gini

Angka rasio gini bulan Maret 2024 mencapai 0,379, lebih rendah dibandingkan Maret 2023 (0,388) dan September 2022 (0,381). Penurunan angka tersebut disebabkan oleh meningkatnya alokasi anggaran pemberian bantuan sosial pemerintah untuk memitigasi dampak bencana El Nino. Akibat bencana El Nino sejumlah harga pokok meningkat, sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Penyaluran bantuan sosial tersebut membantu mengendalikan angka rasio gini dengan menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun menunjukkan tren positif, angka rasio gini tahun 2024 masih tergolong tinggi, menurut Bank Dunia berada di kategori ketimpangan sedang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 10 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi di Indonesia menguasai 27,1 persen pengeluaran, sedangkan 10 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya menguasai 4,6 persen pengeluaran. Secara

lebih rinci, rasio gini di daerah perkotaan bulan Maret 2024 sebesar 0,399, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,306. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan.

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan rasio gini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 di angka 0,374–0,377. Namun, target tersebut belum tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan rasio gini membutuhkan upaya berkelanjutan dan sinergi dari berbagai pihak. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerataan pendapatan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pemerintah telah menjalankan beberapa strategi untuk menurunkan angka rasio gini, beberapa di antaranya (1) penggunaan data registrasi sosial ekonomi dalam proses penargetan berbagai bantuan sosial dan usaha, serta penargetan bantuan iuran jaminan sosial untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*; (2) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, serta mendorong inklusi keuangan, termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (3) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat, melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; serta (4) peningkatan penerimaan *tax ratio* dan pengurangan relaksasi pajak agar terjadi redistribusi kekayaan dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,03 persen pada Maret 2024 dari sebelumnya 9,36 persen pada Maret 2023. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin berkurang dari 25,90 juta jiwa pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta jiwa pada Maret 2024. Tingkat

kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,12 persen pada Maret 2023 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Penurunan kemiskinan dalam satu tahun ini didukung oleh beberapa faktor, baik dari stabilitas makro ekonomi maupun dari pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan. Penurunan inflasi periode Maret 2023–Maret 2024 yang sesuai *range* sasaran inflasi 1,5–3,5 persen dan konsumsi rumah tangga yang meningkat 4,91 persen (*yoy*) pada triwulan I-2024 turut membantu pengurangan kemiskinan. Penyaluran program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan memiliki realisasi pada triwulan I-2024 sebesar 99 persen dengan jumlah penerima 9,97 juta keluarga.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari reformasi sistem perlindungan sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan registrasi sosial ekonomi dengan pemanfaatan yang telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa instruksi presiden registrasi sosial ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan program komplementaritas melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan standar pelayanan minimum, khususnya di bidang sosial; serta (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,62 poin dari nilai 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Capaian tersebut disumbangkan, khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pascapandemi Covid-19.

Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Aktivitas perekonomian di tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan upaya perwujudan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Untuk itu, pemerintah akan terus memperkuat upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui implementasi ekonomi hijau yang menempatkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi ke lingkungan, termasuk menekan laju peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer.

Hingga tahun 2022, Indonesia telah berhasil mencapai 27,82 persen potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari target tahun 2022 sebesar 26,87 persen. Penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dicapai melalui implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon pada lima sektor utama, yakni pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengembangan industri hijau, penanganan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut.



Selain itu, kebijakan ekonomi sirkular diterapkan untuk mendukung pencapaian ketercapaian pembangunan rendah karbon di Indonesia.

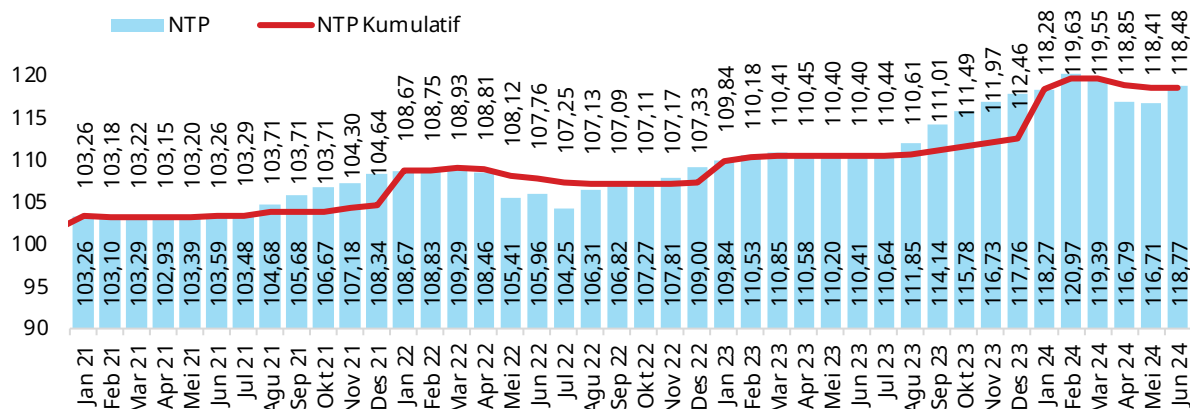
Pada tahun 2023, diperkirakan potensi penurunan emisi gas rumah kaca akan terus meningkat dengan adanya percepatan transisi energi yang lebih luas dan penguatan implementasi pembangunan rendah karbon pada tingkat provinsi. Dengan demikian, capaian tersebut menunjukkan Indonesia masih *on-track* dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yakni sebesar 27,27 persen di tahun 2024.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani dari Januari 2021–Juni 2024 mengalami tren peningkatan yang signifikan, dengan angka akhir 118,48. Pada tahun 2023, subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan angka Nilai Tukar Petani, sementara subsektor perkebunan mengalami penurunan. Peningkatan permintaan terhadap komoditas subsektor tanaman pangan dan

subsektor hortikultura menyebabkan lonjakan Nilai Tukar Petani pada kedua subsektor tersebut. Walaupun mengalami perlambatan, subsektor perkebunan masih memiliki kontribusi volume paling besar dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Juni 2024. El Nino yang terjadi di sepanjang tahun 2023 menyebabkan penurunan produksi pada sejumlah komoditas pertanian. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani masih bertumbuh positif salah satunya karena peningkatan harga komoditas, sehingga indeks yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayarkan petani. Subsektor perikanan dan subsektor peternakan menunjukkan penurunan di awal tahun 2024. Namun, subsektor lain menunjukkan peningkatan, sehingga Nilai Tukar Petani secara umum tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan tersebut, di tahun 2024 Nilai Tukar Petani diperkirakan dapat melampaui target 105–108, di mana subsektor perkebunan diperkirakan masih menjadi kontributor utama dalam peningkatan Nilai Tukar Petani.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



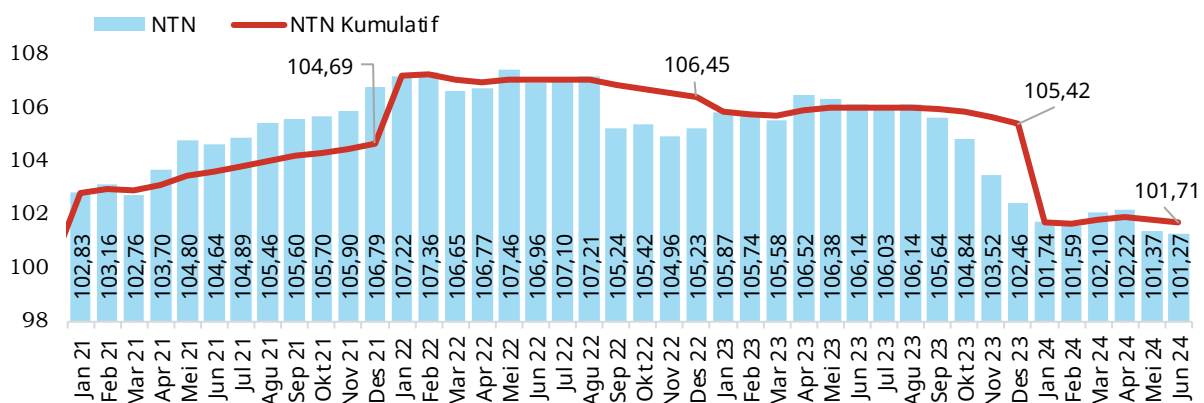
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), Juli 2024 (tahun dasar 2018=100).

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan pada periode Januari 2021–Juni 2024 mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Beberapa hal yang memengaruhi Nilai Tukar Nelayan, di antaranya (a) kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai komposisi biaya terbesar dalam usaha perikanan tangkap, seperti yang terjadi pada September 2022; (b) peningkatan harga konsumsi rumah tangga seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tarif listrik yang terjadi berkepanjangan sejak tahun 2023 hingga saat ini; serta (c) penurunan harga ikan sebagai dampak dari fenomena El-Nino yang telah terjadi dari triwulan IV-2023 hingga awal tahun 2024.

Pada tahun 2023, Nilai Tukar Nelayan mencapai 105,42 atau menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 106,45. Dalam rangka mendorong capaian Nilai Tukar Nelayan di akhir tahun 2024 senilai 101–105, diperlukan intervensi dalam menjaga inflasi harga pada komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan bakar minyak dan input produksi lainnya bagi nelayan, serta meningkatkan harga hasil tangkapan nelayan, antara lain melalui peningkatan kualitas hasil tangkapan dan pemanfaatan sistem rantai dingin.

Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN)



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Juli 2024 (tahun dasar 2018=100).

Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia di tahun 2023 mencatat kinerja yang baik. Kondisi ini tecermin dari surplus neraca keseluruhan sebesar US\$6,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu US\$4,0 miliar. Adapun kondisi cadangan devisa juga terus mengalami perkembangan signifikan mencapai US\$146,4 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 serta 2021 dengan masing-masing capaian sebesar US\$137,2 miliar dan US\$144,9 miliar. Di sisi lain, neraca transaksi berjalan mengalami defisit yang rendah sebesar 0,1 persen dari produk domestik bruto. Di tengah

ketidakpastian global yang masih tinggi, neraca transaksi modal dan finansial masih mampu membukukan surplus sebesar US\$10,0 miliar, berbalik arah dibandingkan tahun 2022 yang mengalami defisit sebesar US\$9,2 miliar. Surplus neraca transaksi modal dan finansial utamanya dikontribusikan oleh surplus investasi langsung, serta investasi portofolio yang masing-masing mencapai US\$14,8 miliar dan US\$2,3 miliar. Surplus tersebut juga mengindikasikan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang kondusif dan terus berkembang.



Capaian dan Outlook Neraca Pembayaran Indonesia 2020–2024 (Miliar USD)

Uraian	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024
Transaksi Berjalan	-4,4	3,5	13,2	-1,9	-8,7
dalam persen PDB	-0,4	0,3	1,0	-0,1	-0,6
Barang	28,3	43,8	62,7	46,5	37,6
Jasa-Jasa	-9,8	14,6	-20,0	-18,1	-17,4
Pendapatan Primer	-28,9	-32,0	-35,3	-35,6	34,8
Pendapatan Sekunder	5,9	6,3	5,8	5,3	6,0
Transaksi Modal dan Finansial	7,9	12,5	-9,2	10,0	6,6
Investasi Langsung	14,1	17,3	18,1	14,8	17,0
Investasi Portofolio	3,4	5,1	-11,6	2,3	-3,6
Investasi Lainnya	-9,6	-10,2	-15,6	7,2	-6,8
Neraca Keseluruhan	2,6	13,5	4,0	6,3	-4,0
Cadangan Devisa	135,9	144,9	137,2	146,4	142,2
dalam bulan impor	10,2	8,0	6,0	6,6	6,2

Sumber: Bank Indonesia, proyeksi Kementerian PPN/Bappenas per Juli 2024.

Pada tahun 2024, Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menjaga stabilitas eksternal Indonesia. Beberapa indikator ketangguhan tersebut sejalan dengan perbaikan perdagangan barang global dan penguatan pertumbuhan ekspor nonkomoditas, produk manufaktur, dan jasa. Neraca Perdagangan Barang dijaga untuk tetap surplus sebesar US\$37,6 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa akan mengalami sedikit perbaikan menjadi US\$17,4 miliar, ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perjalanan karena semakin tingginya kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, neraca pendapatan primer masih akan mengalami defisit sebesar US\$34,8 miliar, selaras dengan imbal hasil investasi asing yang masih tinggi. Adapun neraca pendapatan sekunder sedikit mengalami kenaikan menjadi US\$6,0 miliar, didorong oleh penempatan pekerja migran Indonesia yang meningkat. Berikutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan melanjutkan tren surplus pada tahun 2024 menjadi US\$6,6 miliar, ditopang oleh peningkatan kinerja investasi langsung

dan investasi portofolio. Meningkatnya kinerja investasi langsung sebesar US\$17,0 miliar dan investasi portofolio yang mengalami defisit terkendali mencapai US\$3,6 miliar, mencerminkan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah tahun politik. Pada akhir tahun 2024, neraca keseluruhan akan mengalami defisit rendah sebesar US\$4,0 miliar disertai cadangan devisa sebesar US\$142,4 miliar yang mampu untuk membiayai 6,2 bulan impor.

Keuangan Negara

Kinerja keuangan negara pada tahun 2023 menunjukkan peran optimal. Instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara bekerja dengan baik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal, terutama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat berbagai faktor, termasuk tekanan suku bunga acuan yang tinggi (*higher for longer*). Peran anggaran pendapatan dan belanja negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal tecermin dari (a)

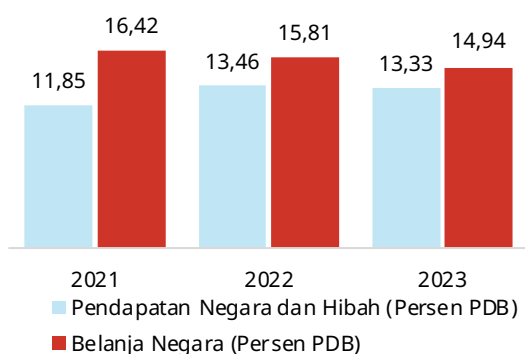
keseimbangan primer yang kembali mencapai nilai positif sebesar 0,49 persen produk domestik bruto, setelah surplus terakhir di tahun 2011; (b) defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 1,61 persen produk domestik bruto, berada jauh dari batas maksimal defisit anggaran sebesar 3,0 persen produk domestik bruto; serta (c) stok utang pemerintah sebesar 38,98 persen produk domestik bruto, menurun dibandingkan tahun 2022 dan terjaga di bawah batas maksimum rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 60 persen.

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2023 mencapai Rp2.783,93 triliun (13,33 persen produk domestik bruto), nilainya tumbuh sebesar 5,62 persen dibanding nilai realisasi pendapatan dan hibah tahun 2022. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp2.154,21 triliun (10,31 persen produk domestik bruto), tumbuh sebesar 5,88 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp612,53 triliun (2,93 persen produk domestik bruto), tumbuh 2,84 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kinerja positif pendapatan negara dan hibah di tahun 2023 sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di tengah gejolak ekonomi global, disertai aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang masih tetap kuat di tengah moderasi harga komoditas dunia.

Belanja negara mencapai Rp3.121,22 triliun (14,94 persen produk domestik bruto), menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,81 persen produk domestik bruto. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.239,78 triliun atau 10,72 persen produk domestik bruto dan transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp881,43 triliun atau 4,22 persen produk domestik bruto, didorong oleh peningkatan alokasi dana bagi hasil dan peningkatan penyaluran dana alokasi khusus. Dari sisi ukuran dan kualitas belanja, realisasi tahun 2023 belum optimal dan perlu ditingkatkan.

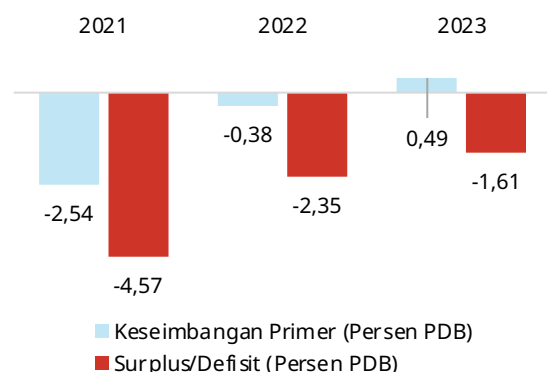
Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 mencapai Rp337,29 triliun (1,61 persen produk domestik bruto), menurun signifikan dibandingkan target tahun 2023 sebesar 2,84 persen produk domestik bruto dan realisasi tahun 2022 yaitu 2,35 persen produk domestik bruto. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp356,66 triliun (1,71 persen produk domestik bruto), utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp403,95 triliun dan pembiayaan investasi sebesar negatif Rp89,90 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp19,38 triliun, menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp130,56 triliun.

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024 (diolah).

Perkembangan Defisit Anggaran dan Keseimbangan Primer (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024 (diolah).



Moneter

Pada tahun 2024, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada (a) peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, (b) penyelesaian prioritas nasional, *major project*, dan janji presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta (c) pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diarahkan mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.802,29 triliun atau 12,27 persen produk domestik bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 13,33 persen produk domestik bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar Rp2.309,86 triliun atau 10,12 persen produk domestik bruto, serta penerimaan negara bukan pajak ditargetkan mencapai Rp492,00 triliun atau 2,15 persen produk domestik bruto.

Belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.325,12 triliun atau 14,56 persen produk domestik bruto, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,53 triliun atau 10,81 persen produk domestik bruto, dan transfer ke daerah sebesar Rp857,59 triliun atau 3,76 persen produk domestik bruto.

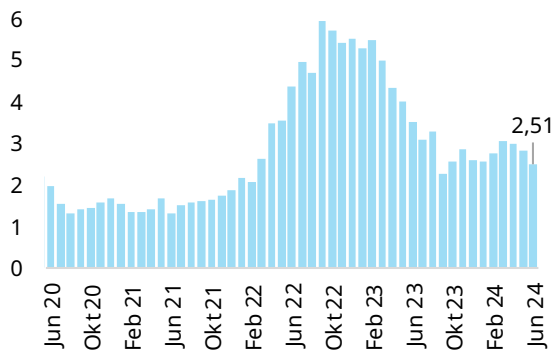
Defisit anggaran pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,29 persen produk domestik bruto atau sebesar Rp522,83 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp648,09 triliun serta pembiayaan investasi yang diperkirakan sebesar negatif Rp176,22 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar -0,11 persen produk domestik bruto, dengan stok utang pemerintah sebesar 38,26 persen produk domestik bruto.

Stabilitas moneter tahun 2023 ditopang oleh berlanjutnya perbaikan kondisi perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Capaian tersebut tecermin dari realisasi inflasi yang menurun dan terjaga dalam rentang sasaran serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya.

Realisasi inflasi umum sepanjang tahun 2023 mengalami tren penurunan. Pada akhir tahun 2023, realisasi inflasi mencapai 2,61 persen (*yoy*), berada di rentang sasaran yang telah ditetapkan pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 2,0–4,0 persen dan lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 5,51 persen (*yoy*). Dari sisi domestik, capaian tersebut didukung oleh terjaganya ketiga komponen inflasi, yakni inflasi inti yang mencapai 1,80 persen (*yoy*), bergejolak sebesar 6,73 persen (*yoy*), dan harga diatur pemerintah sebesar 1,72 persen (*yoy*). Dari sisi global, rendahnya realisasi inflasi tahun 2023 sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penurunan harga komoditas energi dan pangan global. Sementara dari sisi domestik, terjaganya inflasi dipengaruhi oleh terbatasnya penyesuaian harga energi yang dilakukan oleh pemerintah, kecukupan pasokan pangan di tengah gangguan perubahan iklim, sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta suku bunga acuan yang dijaga pada tingkat optimal.

Memasuki tahun 2024, tingkat inflasi mengalami fluktuasi. Tren inflasi sempat mengalami peningkatan pada triwulan I-2024 dikontribusikan utamanya oleh peningkatan harga pangan sejalan dengan tingginya harga komoditas global akibat eskalasi ketegangan geopolitik (konflik antara Rusia dan Ukraina, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Israel dan Iran) serta tingginya permintaan pada momen Ramadhan dan persiapan Idul Fitri. Selanjutnya memasuki triwulan II-2024 inflasi kembali menurun didorong oleh terjaganya pasokan seiring berlangsungnya musim panen, khususnya pada komoditas aneka cabai dan beras. Pada bulan Juni 2024, inflasi tercatat 2,51 persen (*yoy*), berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Inflasi umum di akhir tahun 2024

Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, yoy)

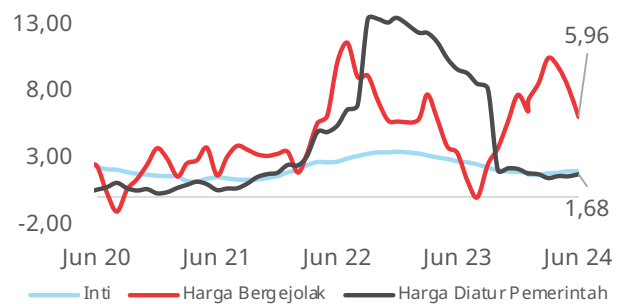


Sumber: Badan Pusat Statistik, Juli 2024.

diprakirakan pada kisaran 3,00 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen (yoy).

Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2023 cukup fluktuatif sejalan dengan tekanan yang bersumber dari eksternal utamanya penguatan mata uang dolar Amerika Serikat sejalan dengan kebijakan mempertahankan suku bunga tinggi oleh The Fed dan tingginya imbal hasil US *Treasury*. Dari sisi domestik, perbaikan fundamental ekonomi yang tecermin melalui pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, tingkat inflasi yang terkendali, serta imbal hasil aset keuangan yang menarik membantu menjaga aliran modal asing tetap masuk ke pasar keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2023 mencapai Rp15.235 per USD, tetap terjaga dalam rentang target RKP Tahun 2023, yakni Rp14.900–Rp15.400 per USD.

Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Juli 2024.

Memasuki semester II-2024, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 6,04 persen (ytd), mencapai Rp16.330 per USD pada 4 Juli 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, meluasnya fragmentasi geopolitik yang mendorong peningkatan harga energi dan pangan, serta fenomena penguatan dolar Amerika Serikat sejalan dengan masih tingginya suku bunga negara maju yang diperkirakan belum akan menurun hingga akhir tahun 2024 (*higher for longer*). Pada tahun 2024 nilai tukar rupiah diprakirakan terjaga pada kisaran Rp15.700–Rp16.100 per USD didukung oleh prospek penguatan ekonomi domestik serta berbagai upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat pendalaman pasar uang dan aliran masuk modal asing ke dalam negeri.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)



Sumber: Bloomberg, 2024.



Dalam rangka mencegah pelemahan nilai tukar Rupiah dan sebagai respons terhadap kondisi moneter global, kebijakan suku bunga tinggi masih berlanjut sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur yang telah menaikkan suku bunga Bank Indonesia-*Rate* menjadi 6,25 persen pada bulan April 2024 dan tetap dipertahankan hingga bulan Juni 2024. Keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan (a) masih tingginya inflasi global, (b) suku bunga kebijakan moneter The Fed yang diperkirakan masih tinggi, (c) ketidakpastian berakhirnya konflik geopolitik di Timur Tengah, (d) upaya menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal asing keluar; serta (e) upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Ke depan, kebijakan moneter harus terus memperhatikan perkembangan arah kebijakan moneter global, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian

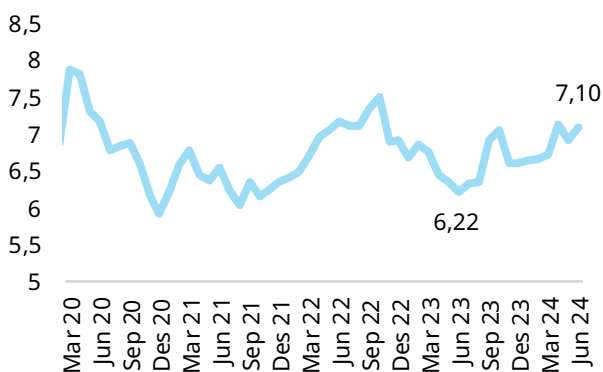
inflasi masih menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dan daerah, yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi nasional, pusat, dan daerah.

Sektor Keuangan

Pada akhir tahun 2023, sektor keuangan tercatat mengalami pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan.

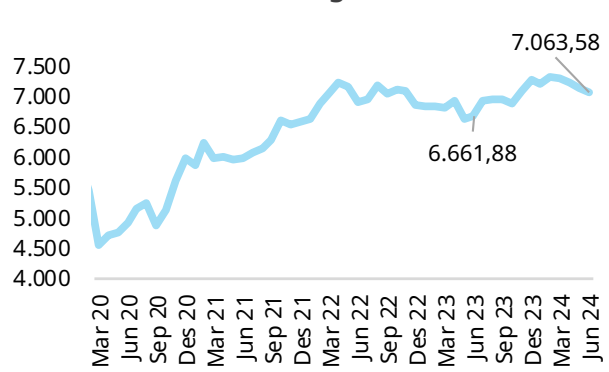
Pada pasar obligasi, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor sepuluh tahun telah mengalami kenaikan, yaitu dari 6,22 persen pada bulan Juni 2023, meningkat menjadi 7,10 persen pada bulan Juni 2024. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan berada pada level 7.063,58 atau naik sebesar 6,03 persen (*yoy*). Peningkatan indeks tersebut mendukung peningkatan kapitalisasi pasar saham yang mencapai 12.094,00 triliun atau tumbuh sebesar 27,83 persen (*yoy*). Capaian tersebut didukung oleh jumlah investor pasar modal yang meningkat signifikan dari 11,06 juta pada bulan Mei 2023 menjadi 12,83 juta pada bulan Mei 2024.

Perkembangan Yield Government Bonds



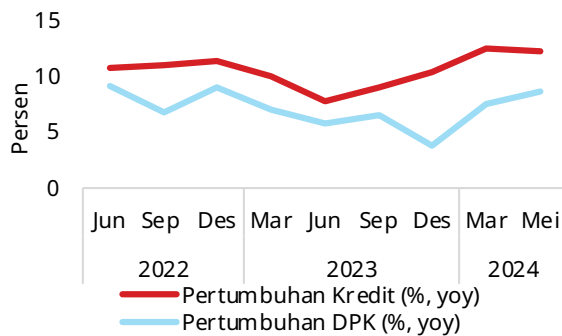
Sumber: CEIC, Juni 2024.

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan



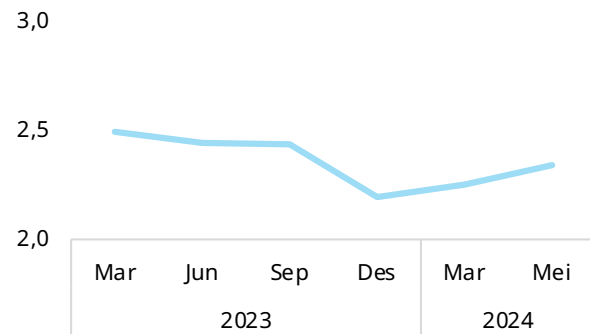
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2024.

Pertumbuhan Kredit dan DPK



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2024.

Rasio Kredit Bermasalah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2024.

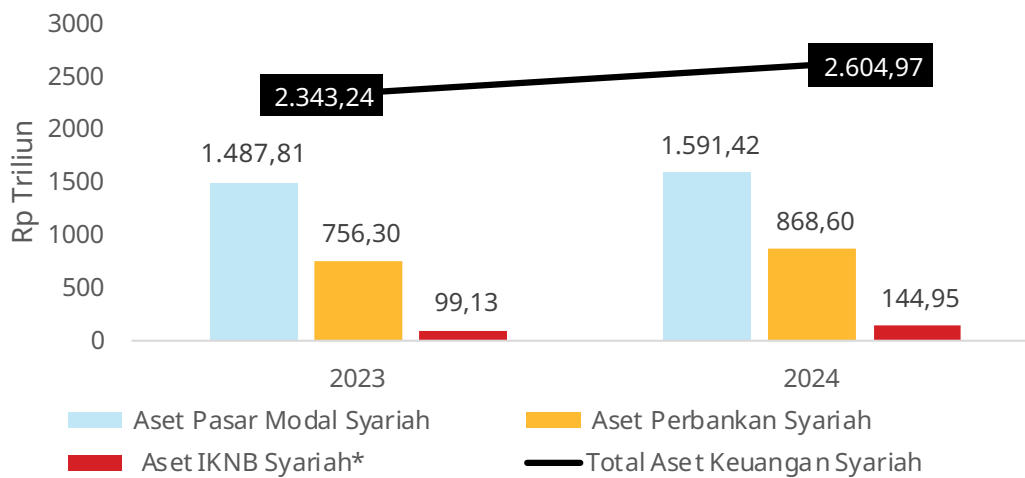
Selanjutnya pada industri perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit perbankan tercatat mengalami pertumbuhan positif. Per bulan Mei 2024, penyaluran kredit bahkan mengalami pertumbuhan *double digit*, yaitu sebesar 12,15 persen (yoy), didorong oleh pertumbuhan kredit pada hampir seluruh sektor ekonomi, terdaganya *appetite* perbankan, serta tingginya permintaan kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2024 diperkirakan akan tetap terjaga *double digit*, dan berada di kisaran 10–12 persen (yoy). Sementara itu, dana pihak ketiga juga tumbuh positif, yaitu sebesar 8,63 persen (yoy). Capaian penghimpunan dana perbankan tersebut diproyeksi akan tetap terjaga pada 2024, yaitu diproyeksi tumbuh sekitar 8–10 persen (yoy). Kinerja positif sektor perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran kredit yang terjaga di level cukup rendah yang ditunjukkan dengan rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) sebesar 2,34 persen. Pada sektor industri keuangan nonbank, per bulan April 2024, industri asuransi dan dana pensiun juga menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum, permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan *risk based capital* di atas *threshold*, yaitu masing-masing sebesar 429,76 persen dan 352,62 persen. Sementara

itu, total dana pensiun juga tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 8,74 persen (yoy) dengan nilai aset sebesar Rp1.432,73 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,35 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp371,74 triliun. Sedangkan pada program pensiun wajib, total aset mencapai Rp1.060,98 triliun atau tumbuh sebesar 9,98 persen (yoy).

Sejalan dengan hal di atas, sektor keuangan syariah juga tumbuh positif hingga bulan April 2024, ditunjukkan dengan peningkatan aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) yang mencapai Rp2.604,97 triliun atau tumbuh sebesar 11,17 persen (yoy) pada bulan April 2024. Pertumbuhan sektor keuangan syariah tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan aset pasar modal syariah, perbankan syariah, dan industri keuangan nonbank syariah yang tumbuh masing-masing sebesar 6,96 persen, 8,77 persen, dan 0,39 persen (yoy). Pertumbuhan positif ini diperkirakan akan terus berlanjut dan mendukung peningkatan *marketshare* keuangan syariah yang diproyeksikan mencapai 11–12 persen pada akhir tahun 2024, didorong oleh peningkatan *awareness* masyarakat terkait keuangan syariah dan dukungan pemerintah dalam pengembangan instrumen sukuk.



Perkembangan Keuangan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (April 2024).

Keterangan: *Data industri keuangan nonbank syariah per Desember 2022 dan 2023.

Pembangunan Wilayah

Secara kewilayahan, perekonomian Wilayah Maluku pada tahun 2024 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 13,9 persen ditopang oleh industri pengolahan nikel serta akselerasi ekspor luar negeri seiring dengan masih tingginya harga komoditas ekspor unggulan. Selain itu, perekonomian Wilayah Maluku pada tahun 2024 juga ditopang oleh meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat.

Wilayah Sulawesi diperkirakan dapat tumbuh sebesar 7,1 persen di tahun 2024. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong oleh hilirisasi industri logam dasar berupa produk olahan komoditas nikel seiring dengan peningkatan produksi industri pengolahan nikel yang diperkirakan akan terus tumbuh untuk memproduksi *nickel matte* yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perekonomian.

Perekonomian Bali-Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 5,4 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara didorong oleh meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Komodo-Labuan Bajo, dan Bandara Internasional Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata, serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa. Selain itu, seiring dengan masih tingginya harga komoditas tembaga juga diharapkan mampu mendorong kinerja pertambangan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Wilayah Papua diperkirakan tumbuh sebesar 6,6 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan Wilayah Papua diharapkan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya sektor pertambangan dan beroperasinya industri pengolahan *liquified natural gas*. Selain itu, masih tingginya proyeksi harga emas global juga diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Wilayah Papua.



Seiring dengan masih tingginya permintaan batu bara dan lignit dari negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok dan India serta berlanjutnya hilirisasi komoditas pertambangan, perekonomian Kalimantan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,8 persen. Selain itu, berlanjutnya hilirisasi komoditas perkebunan, berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur transportasi seperti pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing juga diharapkan mampu mendorong perekonomian Wilayah Kalimantan.

Pembangunan proyek strategis nasional seperti pembangunan tol di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, berlanjutnya pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu, beroperasinya Bandara Kediri, beroperasinya *smelter* tembaga di Gresik, serta peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan diperkirakan mendorong perekonomian Wilayah Jawa. Pada tahun 2024, perekonomian Wilayah Jawa diperkirakan tumbuh terjaga sebesar 5,0 persen.

Masih tingginya permintaan global untuk komoditas unggulan khususnya minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara, terkendalinya inflasi, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional, seperti Tol Trans Sumatera dan jaringan kereta api Sumatera diperkirakan akan menjaga perekonomian Wilayah Sumatera tumbuh 4,7 persen pada tahun 2024.



BAB

2

Kebijakan Pembangunan





2.1

Tema, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2025

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau

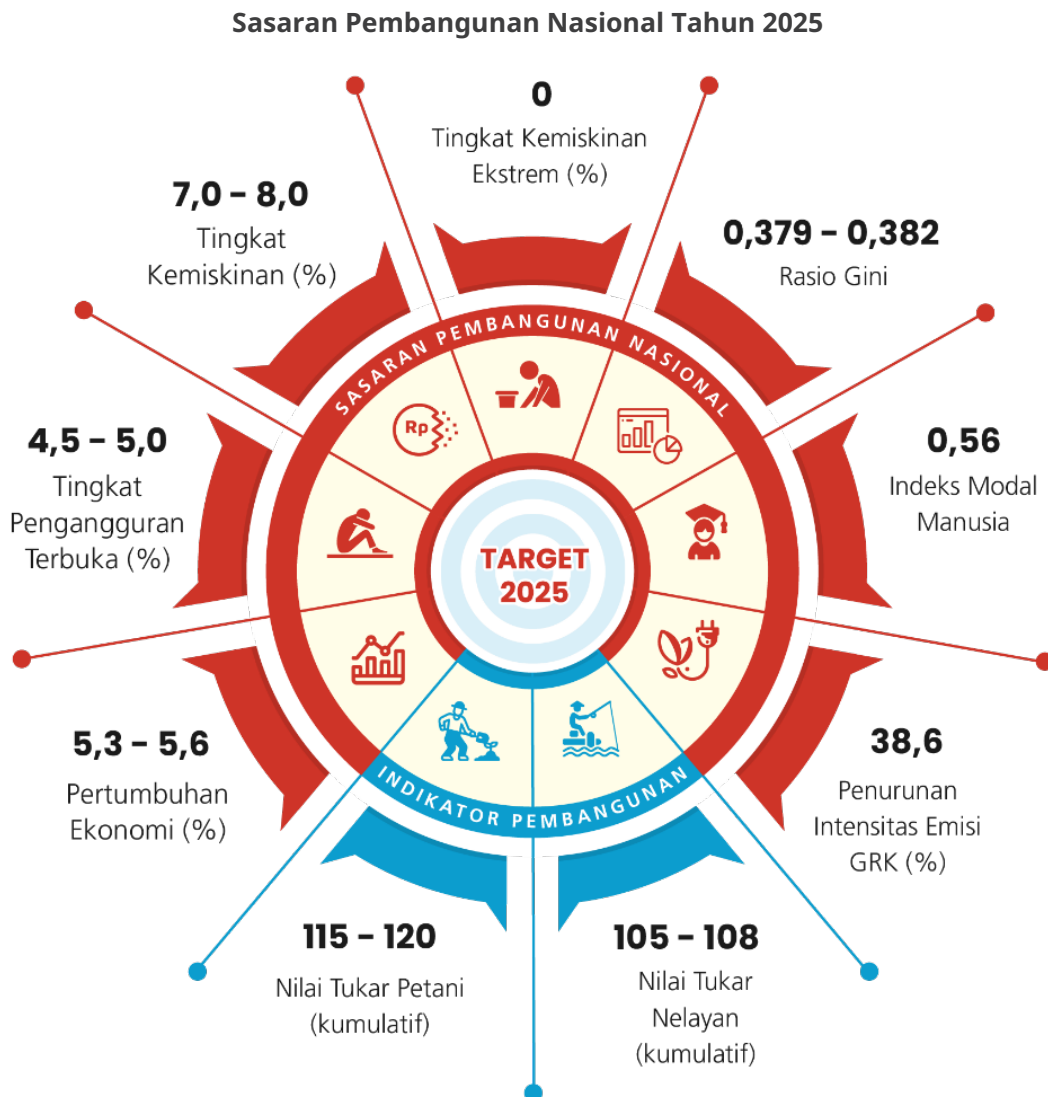
Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025



Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.



Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

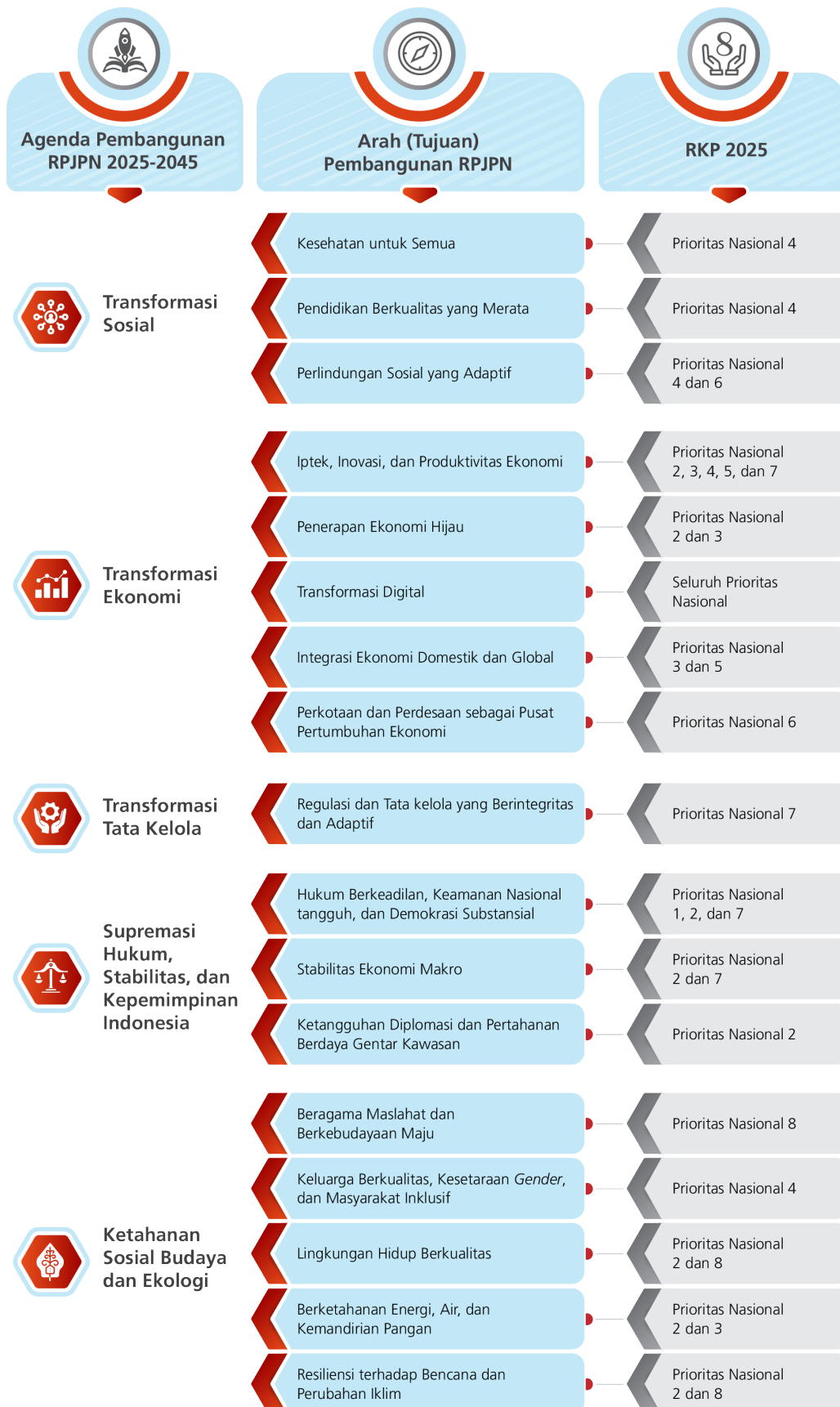
2.2

Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengawal pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan

menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional. Keselarasan prioritas nasional dengan agenda transformasi sebagai koridor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diuraikan pada infografis berikut ini.

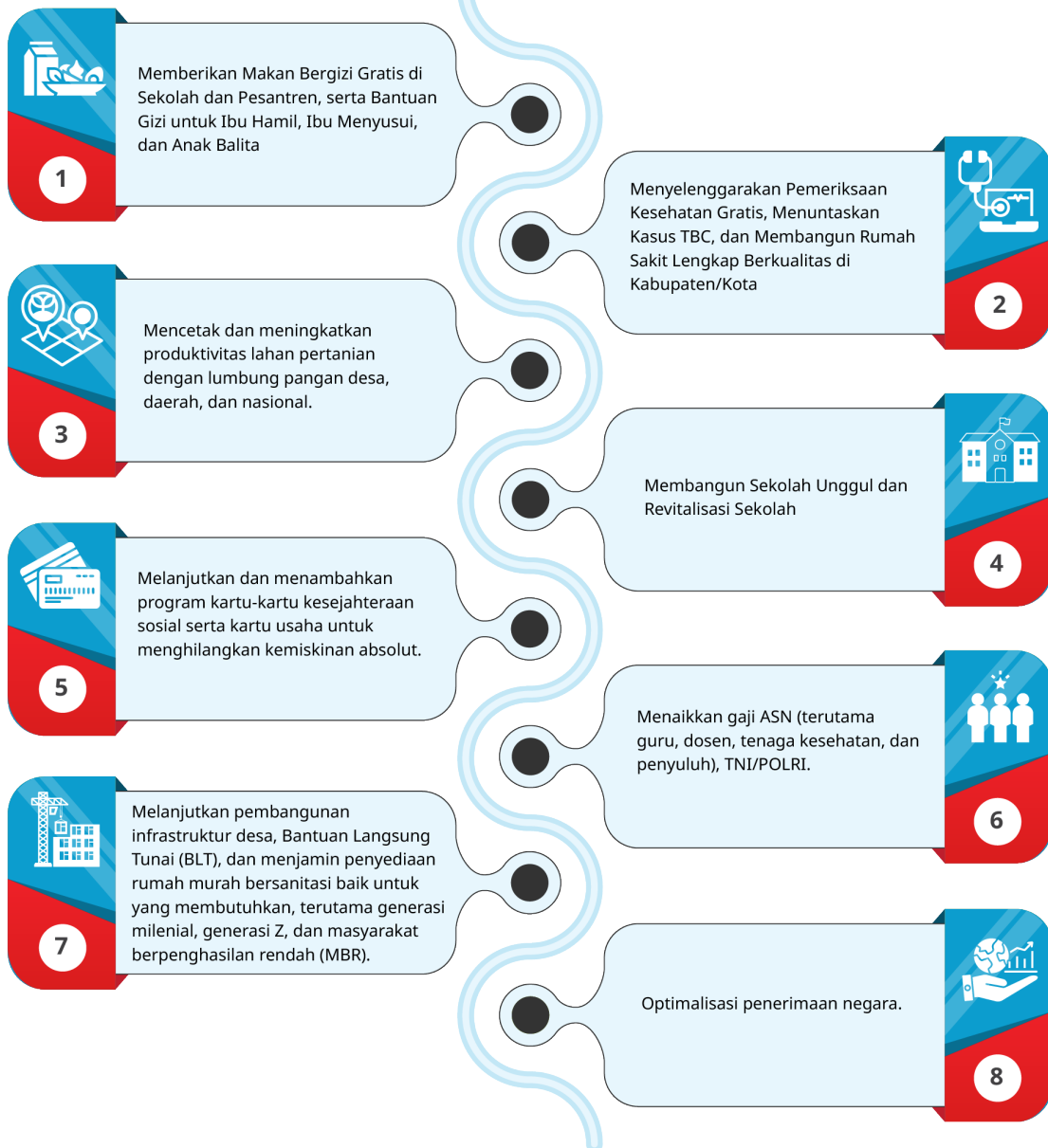
Integrasi RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RKP Tahun 2025





Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025



2.3 Pengarusutamaan Pembangunan

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses agar semua kelompok memiliki sumber daya dan mampu berpartisipasi secara bermakna dalam menyuarakan aspirasi/kebutuhan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan. Komitmen ini merupakan mandat dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat inklusif melalui integrasi perspektif gender dan perspektif inklusi sosial ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial juga menjadi bagian penting dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kerangka kerja logis, dimana perspektif gender dan perspektif inklusi sosial diintegrasikan ke dalam prioritas nasional, serta terefleksi dalam berbagai program/kegiatan/rincian output di kementerian/lembaga terkait. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap kementerian/lembaga (1) mengidentifikasi rincian output yang potensial dan relevan mendukung pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan; (2) menyusun kerangka acuan kerja dari rincian output yang responsif gender/ *gender action budget* dengan memuat hasil analisis gender; dan (3) melakukan penandaan tematik anggaran responsif gender pada rincian output responsif gender secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kesetaraan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pengarusutamaan Sustainable Development Goals

Pemerintah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2025 dengan mengintegrasikan 124 target tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut secara khusus dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025–2029. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengarusutamakan dan menggunakan sasaran dan target tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 serta menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025–2029.



Pemerintah baik pusat dan daerah mendorong, memfasilitasi dan bekerja sama dengan aktor nonpemerintah yaitu masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengembangkan dan membentuk *platform Sustainable Development Goals centers*, menciptakan *Sustainable Development Goals* taksonomi, adopsi pelaporan hijau, rancang bangun dan *piloting* antarkota/kabupaten dengan kota mitra negara lain, advokasi, publikasi dan berbagi pengetahuan, dan keterlibatan inisiatif global dan regional.

Pendanaan tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh nonpemerintah dengan membentuk dan meningkatkan mekanisme pendanaan inovatif, yaitu pendanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berasal dari nonpemerintah, maupun pendanaan gabungan dari pemerintah dan nonpemerintah. Di sisi lain, juga dilakukan penguatan data memanfaatkan sistem satu data dan penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam agenda pembangunan nasional. Tidak hanya sebagai tren, transformasi digital merupakan *enabler* yang bertujuan untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor. Pendekatan lintas dan antarsektor menjadi kunci utama dalam mengintegrasikan transformasi digital secara efektif. Hal ini mensyaratkan kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Pada tataran pemerintah, diperlukan perumusan kebijakan yang komprehensif dan strategi implementasi yang terukur dan terintegrasi. Hal ini mencakup pengembangan dan perluasan infrastruktur digital yang kokoh, literasi digital, perlindungan data pribadi dan peningkatan keamanan siber, perlindungan data pribadi dan peningkatan keamanan

siber, regulasi yang mendukung ruang digital yang kondusif, termasuk di dalamnya bagi kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, adopsi teknologi digital juga memiliki peran penting dalam menginovasi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kerja sama *multi-stakeholder* dan pendekatan lintas sektor harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap sektor untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan transformasi digital.

Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Hal ini dilaksanakan melalui aktivitas pembangunan yang rendah emisi, dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan pihak nonpemerintah terus didorong melalui penerapan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen secara aktif mengendalikan laju peningkatan pemanasan global di bawah ambang batas 1,5 derajat celsius dalam rangka mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup manusia. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada sektor yang diprioritaskan seperti energi, lahan, industri, limbah, serta kelautan dan pesisir. Pemerintah mengarusutamakan upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara holistik ke dalam perencanaan pembangunan nasional untuk dapat menangani isu *global triple planetary crisis*, mencapai target *sustainable development goals*, khususnya tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), pencapaian komitmen Paris 2030, pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dan perwujudan *Net Zero Emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Pada RKP tahun 2025, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada penanganan isu lima sektor prioritas melalui (1) peningkatan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi; (2) pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan dan pertanian berkelanjutan; (3) *resource efficiency*, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengembangan industri hijau; serta (4) pengembangan *enabler* melalui penerapan pajak karbon, investasi hijau, penciptaan lapangan kerja hijau, tata kelola, dan aksi pendukung lainnya.

Pembangunan Berketahanan Iklim

Intervensi pemerintah pada penanganan dampak perubahan iklim yang semakin meningkat dilaksanakan pada empat sektor prioritas terdampak, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian, serta sektor kesehatan. Dampak perubahan iklim yang diproyeksikan semakin intens dan parah akan menghambat pembangunan di masa mendatang, untuk itu diperlukan upaya yang lebih besar dalam menangani isu *global triple planetary crisis*, mencapai tujuan 13 (penanganan perubahan iklim) tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menekan potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita. Dampak perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang (*slow onset*) mengakibatkan kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian dan penurunan hasil tangkapan nelayan, kehilangan mata pencaharian, serta serangan penyakit sensitif iklim. Implementasi pembangunan berketahanan iklim mendorong *multi-stakeholder* untuk peningkatan infrastruktur berketahanan iklim, penerapan teknologi, peningkatan tata kelola dan pendanaan iklim, serta peningkatan kapasitas pada masyarakat dan pemerintah.

Pada tahun 2025, strategi pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui (1) peningkatan ketahanan pesisir dan laut seperti pembangunan pengaman pantai; (2) pembangunan dan konservasi sumber daya air melalui pembangunan pengendalian banjir dan pembangunan *groundsill*; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim termasuk penerapan *climate smart agriculture*, pengembangan irigasi dan embung pertanian; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, termasuk pengendalian vektor dan penyebaran penyakit sensitif iklim; serta (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim, termasuk layanan informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.



2.4 Kerangka Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	2,5±1,0 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300–15.900 ^{a)}
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	143,3–147,2
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	5,8–5,9
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,6)–(0,6) ^{b) c)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,30–12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,1–10,3 ^{d)}
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,14)–(0,61) ^{a) c)}
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,29)–(2,82) ^{a) c)}
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	37,82–38,71 ^{a)}
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7–7,8
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,23–1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2024.

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025; b) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; c) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; d) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan setelah Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk

menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh didorong oleh peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global;

(9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *free trade agreement/comprehensive economic partnership agreement*.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, (5) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standarisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah, (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.868,23–Rp1.905,60 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3–6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong transformasi ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan



harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas juga didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian pembangunan smelter di tahun 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema RKP Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas sehingga berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka

mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan terhadap produk domestik bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 20,8 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri.

Pada tahun 2025, rasio produk domestik bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US\$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen)

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2025
Pertumbuhan PDB		5,3–5,6
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran		
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,2–5,3
2	Konsumsi Pemerintah	5,6–6,0
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,7–7,8
4	Ekspor Barang dan Jasa	4,9–5,3
5	Impor Barang dan Jasa	6,7–7,8
Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,2–3,4
2	Pertambangan dan Penggalian	3,8–4,1
3	Industri Pengolahan	5,5–6,2
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	4,8–4,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,0–5,3
6	Konstruksi	6,4–6,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,1–5,4
8	Transportasi dan Pergudangan	6,4–6,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,6–5,8
10	Informasi dan Komunikasi	8,8–8,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,4–6,5
12	Real Estat	4,5–4,9
13	Jasa Perusahaan	8,0–8,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,5–4,7
15	Jasa Pendidikan	5,7–6,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,2–7,4
17	Jasa lainnya	5,4–5,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per Juli 2024.

Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.



(1) Pendapatan Negara

Pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,30–12,36 persen produk domestik bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,1–10,3 persen produk domestik bruto. Optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada transformasi kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi *core tax system*, penguatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penajaman *tax incentive* tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta mendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak kebijakan diarahkan pada reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi dan digitalisasi layanan.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

(2) Belanja Negara

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,59–15,18 persen produk domestik bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,92–11,17 persen produk domestik bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 3,67–4,01 persen produk domestik bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/

Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada implementasi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi), kesejahteraan sosial, percepatan dan pemerataan konektivitas, serta pelaksanaan transformasi ekonomi dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

(3) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,29)–(2,82) persen produk domestik bruto disertai pengendalian *primary balance*, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan baik dari utang dan non-utang yang dikelola secara *prudent* dan kredibel. Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk (a) penyediaan infrastruktur yang berkualitas; (b) mendukung proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian; (c) optimalisasi peran Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Funds untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi; (d) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pembiayaan ultra mikro (UMi), optimalisasi saldo anggaran lebih; serta (e) mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development* untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan pendapatan belanja dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2023	APBN 2024	Sasaran 2025 ^{a)}
Pendapatan Negara	13,33	12,27	12,30–12,36
Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,1–10,3 ^{c)}
Belanja Negara	14,94	14,56	14,59–15,18
Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92–11,17
TKD	4,22	3,76	3,67–4,01
Keseimbangan Primer	0,49	(0,11) ^{b)}	(0,14–0,61) ^{b)}
Surplus/Defisit	(1,61) ^{b)}	(2,29) ^{b)}	(2,29)–(2,82) ^{b)}
Pembiayaan Investasi	(0,43) ^{b)}	(0,77) ^{b)}	(0,30)–(0,50) ^{b)}
Stok Utang Pemerintah	38,98	38,26	37,82–38,71

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, 2024.

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025; b) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; c) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan setelah Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Juli 2024.

Stabilitas Eksternal

Stabilitas eksternal Indonesia akan semakin menguat pada tahun 2025 karena berhasil melewati periode krusial sebelumnya dengan baik, yaitu tahun politik dan transisi pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2025, neraca perdagangan barang ditargetkan surplus pada kisaran US\$36,5–36,3 miliar seiring dengan peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, produk industri penyerap tenaga kerja tinggi, produk jasa dan kreatif, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam. Adapun defisit neraca jasa-jasa mengalami penurunan menjadi US\$17,2–17,0 miliar, dikontribusikan oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin signifikan ke Indonesia sehingga meningkatkan surplus neraca jasa perjalanan. Adapun defisit neraca pendapatan primer berada pada rentang US\$35,5–36,5 miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal hasil investasi asing. Neraca pendapatan

sekunder terus mencatat surplus yang cukup tinggi menjadi sebesar US\$6,2–6,4 miliar, didorong oleh peningkatan keterampilan, jumlah penempatan, dan sektor lapangan penduduk migran Indonesia di luar negeri yang semakin kompetitif. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial terus mengalami perkembangan yang baik sehingga mencapai kisaran US\$12,7–16,3 miliar. Peningkatan tersebut selaras dengan investasi langsung yang konsisten mencatat surplus dan mengalami kenaikan menjadi US\$17,5–18,5 miliar, sejalan dengan keberlanjutan berbagai proyek strategis pemerintah dan iklim dunia usaha yang kondusif sehingga membuat para investor tetap percaya terhadap prospek perekonomian Indonesia. Adapun investasi portofolio diharapkan dapat terus berkembang mencapai rentang US\$1,3–3,1 miliar, sehingga membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2025, neraca keseluruhan akan berada pada rentang



US\$0,9–4,8 miliar disertai dengan perkembangan cadangan devisa mencapai US\$143,3–147,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,8–5,9 bulan impor dan berada di atas kecukupan standar internasional.

Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025

Uraian (Miliar USD)	Sasaran 2025
Transaksi Berjalan dalam persen PDB	(9,9)–(9,7) ^{a)} (0,6)–(0,6) ^{a) b)}
Barang	36,5–36,3
Jasa-Jasa	(17,2)–(17,0) ^{a)}
Pendapatan Primer	(35,5)–(36,5) ^{a)}
Pendapatan Sekunder	6,2–6,4
Transaksi Modal dan Finansial	12,7–16,3
Investasi Langsung	17,5–18,5
Investasi Portofolio	1,3–3,1
Investasi Lainnya	(6,2)–(5,3) ^{a)}
Neraca Keseluruhan	0,9–4,8
Cadangan Devisa dalam bulan impor	143,3–147,2 5,8–5,9

Sumber: Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2024.

Keterangan: a) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif dan b) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Stabilitas Moneter

Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD. Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran).

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk menjaga empat aspek pokok, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan

pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (1) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi belanja negara dan daerah; (2) peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan serta pengelolaan cadangan dan tata niaga pangan; (3) penguatan infrastruktur dan konektivitas pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan; serta (4) perbaikan kualitas data pangan, penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah sejak proses perencanaan, serta koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi *timing* maupun *sequencing* sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap kenaikan inflasi.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya melalui (1) penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market* untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (2) menetapkan tingkat suku bunga Bank Indonesia-*rate* yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing masuk; (4) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara; serta (5) menerapkan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembiayaan perbankan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran terus didorong dan diperluas untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan rupiah digital. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

Pemerataan Pembangunan

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,0–5,3 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,4–6,9 persen.

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2025 akan didorong dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, penyiapan pangan lokal sagu, jagung, ubi, dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan juga diharapkan dapat mendukung perekonomian Wilayah Papua. Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas juga akan mendorong perekonomian Wilayah Papua melalui pengembangan Bandara Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan Jalan Trans Papua. Pengembangan kawasan pariwisata juga akan terus didorong, seperti pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari premium yang berkelanjutan serta penyiapan kawasan pariwisata rintisan baik berbasis pariwisata budaya, berbasis minat khusus, maupun berbasis pariwisata bahari. Di sisi industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua ditargetkan mencapai 5,3–5,8 persen.

Berlanjutnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi pada tahun 2025 ditargetkan akan mendorong perekonomian wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 11,2–11,9 persen. Selain itu, penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata rintisan Banda Neira, penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas pala dan kelapa), serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas cakalang-tongkol, udang, tuna, dan lobster) diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah Maluku.



Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7,3–7,9 persen pada tahun 2025. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring dengan peningkatan kinerja industri melalui penguatan industri logam dasar serta hilirisasi industri nikel, kelapa, kakao, dan rumput laut. Implementasi proyek strategis nasional di Wilayah Sulawesi, seperti penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas juga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan. Peningkatan produktivitas pertanian di beberapa provinsi juga terus didorong melalui pengembangan kawasan komoditas pertanian jagung, cabai, padi, bawang merah, serta tebu. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Sulawesi, seperti penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang.

Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,8–6,1 persen pada tahun 2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di beberapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri bauksit, nikel, rumput laut, sawit, dan karet; penguatan industri dasar seperti industri kimia dasar; serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi seperti industri elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan.

Perekonomian di Wilayah Bali–Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,4–6,2 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta peningkatan nilai tambah sektor primer.

Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut di Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor primer. Kinerja industri juga diharapkan dapat meningkat didorong percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut. Selain itu, perekonomian Wilayah Bali – Nusa Tenggara diharapkan dapat didorong dengan peningkatan aktivitas sektor jasa bernilai tambah tinggi melalui penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem film, animasi, *visual arts*, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif di Bali. Pengembangan aktivitas pariwisata juga akan terus didorong, utamanya penataan bangunan kawasan destinasi wisata di Kawasan Danau Lebo Taliwang serta percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pada kawasan pariwisata premium Labuan Bajo.

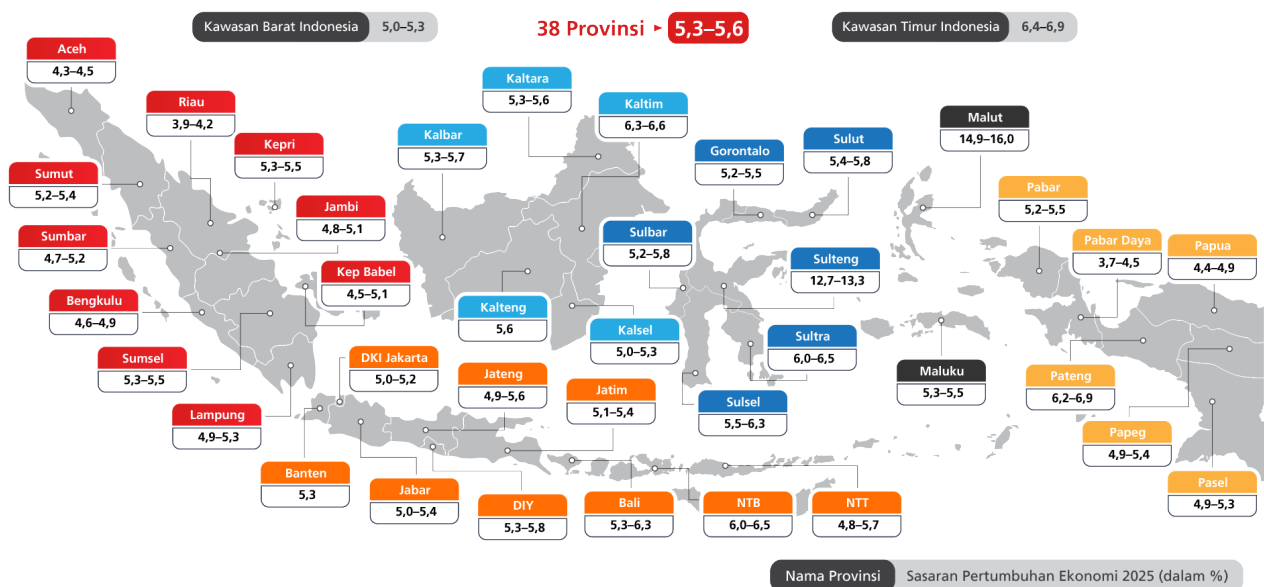
Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,8–5,1 persen sebagai pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan (bauksit, kakao, kelapa, sawit, dan karet), pengembangan industrialisasi perikanan, penguatan produktivitas industri makanan dan minuman, penguatan industri logam dasar, serta penguatan industri kimia dasar. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatera serta pengembangan Bandara *Hub* dan *Aerocity* Kualanamu diharapkan dapat menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta perdagangan internasional yang mengurangi biaya logistik serta meningkatkan daya saing investasi di Sumatera.

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa untuk mengatasi tingginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi di Jawa, seperti pembangunan Jalan Pansela Jawa Timur, pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, serta pengembangan Bandara *Hub* Soekarno-Hatta, Bandara *Hub* Juanda, dan Bandara *Hub*

New Yogyakarta International Airport Kulon Progo). Selain itu, aktivitas jasa juga terus ditingkatkan melalui penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan serta penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta ekonomi kreatif. Industrialisasi juga akan terus didorong melalui hilirisasi industri komoditas (tembaga,

bauxit, sawit, kelapa, karet, dan rumput laut), pengembangan industri alat angkut termasuk *electronic vehicle* dan kedirgantaraan, pengembangan industri elektronik dan digital, hingga pengembangan industri kimia hilir dan farmasi. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,0–5,4 persen.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2024.

Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun 2025

Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, dibutuhkan investasi total sebesar Rp7.627,13–7.694,60 triliun dengan rincian sebagai berikut.

Kebutuhan Investasi Tahun 2025 (Persen)

No	Uraian	Share (Persen)	Nilai (Triliun Rp)
1	Investasi Pemerintah	7,09–7,60	540,44–584,77
2	Investasi BUMN	5,48–5,73	417,91–440,76
3	Investasi Swasta/Masyarakat	87,44–86,67	6.668,78–6.669,07
Total Kebutuhan Investasi			7.627,13–7.694,60

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2024.



Sumber Pembiayaan Investasi

Kebutuhan investasi akan dipenuhi oleh sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi pemerintah, pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara, dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara bersumber dari dana internal Badan Usaha Milik Negara dan pembiayaan

investasi swasta/masyarakat yang berasal dari pembiayaan kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi korporasi, dan dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025

Uraian	Share (Persen)
(1) Pembiayaan Investasi Pemerintah	7,09–7,60
(2) Pembiayaan Investasi BUMN	
(2.1) Dana Internal BUMN	3,62–3,78
(3) Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat	89,30–88,62
(3.1) Kredit Perbankan (<i>flow</i>)	9,69–10,59
(3.2) Penerbitan Saham	2,02–2,06
(3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi	2,22–2,21
(3.4) Dana Internal Masyarakat	75,36–73,76

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2024.

Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan tema RKP Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan melalui peningkatan kinerja dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan hal di atas, Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis yaitu

kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, dalam upaya menyelaraskan Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan arah pembangunan nasional, telah diidentifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara diklasifikasikan mendukung prioritas pembangunan nasional

dalam RKP Tahun 2025 jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Rencana investasi Badan Usaha Milik Negara sebagai aksi korporasi yang mendukung prioritas nasional;
- (b) Rencana investasi Badan Usaha Milik Negara sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung prioritas nasional. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan;
- (c) Rencana investasi melalui Penyertaan Modal Negara sebagai penugasan dari pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.

Adapun rencana investasi yang tidak dapat mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

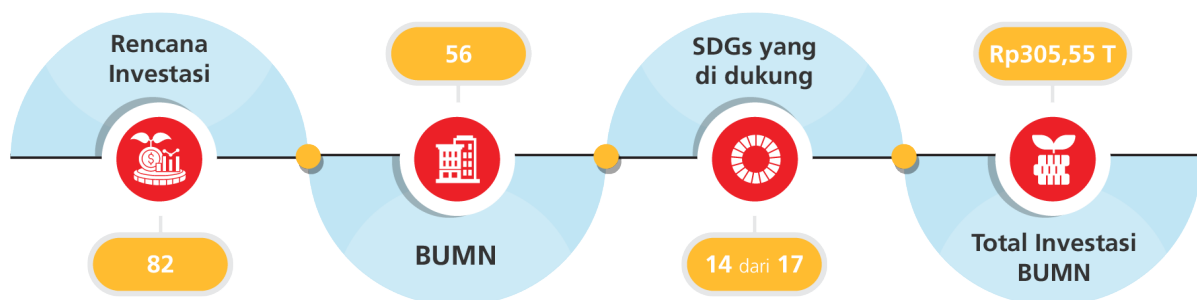
- (a) Rencana investasi yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan sumber pendanaan sepenuhnya (100 persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (b) Rencana investasi di mana Badan Usaha Milik Negara hanya berperan sebagai kontraktor bukan investor ataupun *project owner*.

Selanjutnya, dalam mendukung rencana investasi Badan Usaha Milik Negara, pemerintah akan memberikan berbagai dukungan sebagai berikut:

- (a) Koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan investasi Badan Usaha Milik Negara, seperti dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
- (b) Koordinasi lintas lembaga untuk mendukung penyelesaian *debottlenecking* dalam pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara;
- (c) Dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penerusan Surat Berharga Syariah Negara kepada Badan Usaha Milik Negara, *joint financing*, *viability gap fund*, dan *availability payment*.

Saat ini, terdapat 82 rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025. Rencana investasi tersebut merupakan kelanjutan investasi pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi berlanjut pada tahun 2025 serta penambahan usulan rencana investasi dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan pada tahun 2025, dengan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sebanyak 56 Badan Usaha Milik Negara. Rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional juga mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Gambaran Umum Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional



Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, 26 Juli 2024.

Catatan: Data bersifat sementara.



Penjelasan rinci terhadap masing-masing rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional ini akan dituangkan pada dokumen investasi Badan Usaha Milik Negara dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2025.

Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia



Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, 26 Juli 2024.

Catatan: Data bersifat sementara.

Selain tersebar di berbagai wilayah, rencana investasi Badan Usaha Milik Negara juga mendukung Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, dan 6 di dalam RKP Tahun 2025.

Identifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Jumlah Investasi BUMN (Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Swasembada Pangan	4
	Swasembada Energi	14
	Pemenuhan Akses Air Minum Aman	3
	Ekonomi Digital	3
	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	1
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	18
	Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik	15
	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	3
	Rencana Investasi BUMN Selaras dengan PN 3	4

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Jumlah Investasi BUMN (Proyek)
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	1
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	9
	Rencana Investasi BUMN Selaras dengan PN 5	2
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	1
	Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
Total		82

Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas, 26 Juli 2024.

Catatan: Data bersifat sementara.

Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

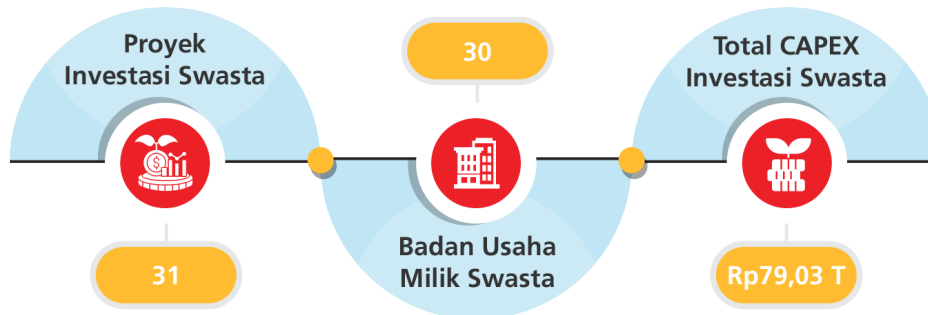
Investasi swasta memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Investasi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan infrastruktur dan inovasi untuk memajukan negara yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.

Seiring meningkatnya target pertumbuhan ekonomi serta terbatasnya pendanaan pembangunan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun investasi Badan Usaha Milik Negara, dukungan investasi swasta yang dapat mendorong pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional menjadi semakin penting. Sebagaimana tema RKP Tahun

2025, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, iklim berusaha dan investasi perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi berkualitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi dan teknologi, serta yang memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Kontribusi investasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan investasi swasta ditargetkan berkisar sebesar 86,67–87,44 persen dari total investasi atau senilai Rp6.668,78–Rp6.669,07 triliun pada tahun 2025.



Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, per 22 Juli 2024.

Catatan: Data bersifat sementara.

Terkait dengan kebutuhan investasi dari Badan Usaha Milik Swasta tersebut, terdapat upaya untuk memberikan gambaran contoh rencana investasi swasta yang dapat mendukung pembangunan nasional melalui rencana investasi swasta yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025, dengan kriteria-kriteria pengklasifikasian antara lain (1) memiliki keselarasan dengan prioritas nasional, dimana kriteria ini diharapkan dapat mempertajam peran investasi swasta dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) proyek memiliki nilai investasi yang signifikan; (3) sumber pendanaan proyek adalah investasi swasta murni atau disyaratkan modal investasi berasal dari ekuitas sendiri dan/atau investor, mitra, pinjaman bank, atau komponen pendanaan lainnya yang bukan dari Anggaran Pendapatan

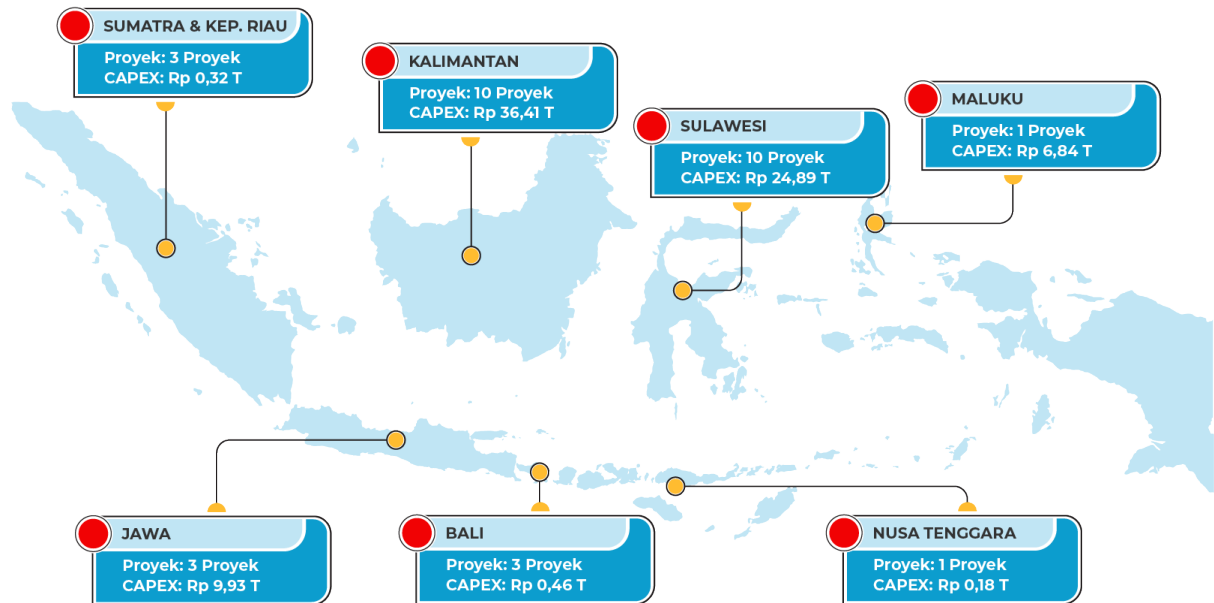
dan Belanja Negara; (4) proyek investasi swasta yang diusulkan untuk RKP Tahun 2025 adalah proyek yang pelaksanaan realisasinya (*capital expenditure*) dimulai di tahun 2025 ataupun proyek yang masih berjalan realisasinya di tahun 2025; (5) proyek investasi swasta prioritas tidak terlibat konflik hukum maupun sedang terlibat isu internal perusahaan; dan (6) proyek investasi swasta memiliki realisasi terbukti secara fisik atau telah memiliki nomor izin investasi berupa nomor proyeknya sehingga dapat diketahui pelaporan resmi nilai realisasi investasinya.

Rencana investasi swasta yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025 merupakan proyek rencana investasi swasta yang diusulkan dari kementerian/lembaga, instansi daerah, swasta yang telah dikurasi berdasarkan kriteria-kriteria pengklasifikasian.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Sebaran Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, per 22 Juli 2024.

Catatan: Data bersifat sementara.

Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Jumlah Investasi Swasta (Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Swasembada Energi	1
	Pemenuhan Akses Air Minum Aman	1
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	2
	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	5
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	15
	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	2
	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5
TOTAL		31

Catatan: Data bersifat sementara.



BAB

3

**Prioritas
Nasional**





3.1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia ^{a)}	79,51	81,69–85,23
2	Indeks Aktualisasi Pancasila ^{b)}	75,53 ¹⁾ (2022)	79,37 ¹⁾
3	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik ^{c)}	69,80	71–80 (kategori baik)
4	Indeks Hak Asasi Manusia ^{d)}	2,70 (2022)	2,75

Sumber: a) Badan Pusat Statistik, 2024; b) Badan Pembina Ideologi Pancasila, 2023; c) Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023; d) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023.

Keterangan: 1) *Baseline* dan target merujuk pada Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga/ Komunitas/Hubungan Antarwarga.

Arah Kebijakan

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan (1) memperkuat ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

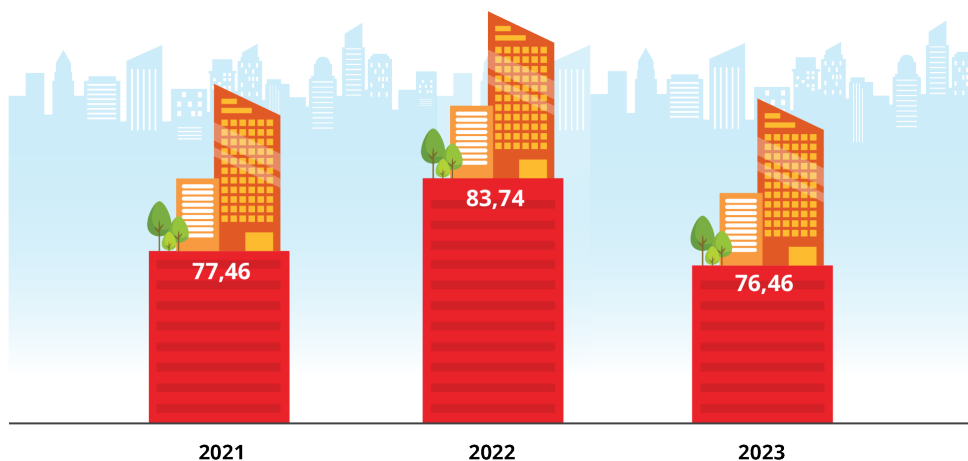
- (1) Memperkokoh ideologi Pancasila dilaksanakan melalui (a) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan; serta (b) aktualisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan pendekatan pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan berbasiskan ramah pengguna (*user friendly*).
- (2) Penguatan demokrasi dilaksanakan melalui (a) penguatan kebebasan dan kesetaraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil, serta penguatan kesetaraan masyarakat pada sektor politik; dan (b) penguatan lembaga demokrasi.

- (3) Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik dilaksanakan melalui (a) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; serta (b) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO'S), melalui penguatan kapasitas lembaga dan insan pers yang dibarengi mewujudkan iklim penyehatan media arus utama.
- (4) Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah; serta (b) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.
- (5) Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia; serta (b) transformasi layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Program yang menjadi penekanan untuk mencapai keseimbangan dan konsistensi pada ketiga aspek tersebut, yaitu penguatan lembaga demokrasi dan transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia.



Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Penguatan Lembaga Demokrasi

Kuatnya tatanan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari salah satu komponen yang mendasarinya, yaitu kapasitas lembaga demokrasi. Dalam konteks kapasitas, terdapat peran, kinerja, dan kualitas yang harus diperhatikan, yaitu menyangkut suprastruktur dan infrastruktur lembaga demokrasi di tingkat pusat dan daerah. Dalam merespons isu demokrasi ini, dirumuskan penguatan lembaga demokrasi dengan pokok pembahasan utama terkait penguatan lembaga legislatif dan demokrasi di tingkat pusat dan daerah.

Permasalahan dan tantangan. Hubungan formal kelembagaan menjadi salah satu permasalahan utama dari stagnasi demokrasi. Di tingkat pusat, fungsi legislasi berada dalam posisi rendah ditandai dengan minimnya pengesahan peraturan perundang-undangan dari yang telah ditargetkan menjadi prioritas. Di tingkat daerah, lembaga-lembaga demokrasi terutama partai politik yang merupakan tonggak pelaksanaan demokrasi serta perantara antara proses penyelenggaraan pemerintahan dengan warga negara belum maksimal melakukan mekanisme kontrol, kaderisasi, dan pendidikan politik. Tren capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi tahun 2021–2023 dapat dilihat pada gambar di atas.

Meskipun telah ada upaya signifikan untuk penguatan kapasitas lembaga demokrasi,

namun masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan di tingkat pusat dan daerah yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Selain permasalahan demokrasi prosedural yang menyangkut sistem pengisian jabatan, stagnasi demokrasi juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga legislatif, belum maksimalnya pemanfaatan saluran aspirasi dari konstituen kepada anggota lembaga perwakilan, serta belum maksimalnya fungsi kaderisasi dan pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik melalui dana bantuan politik.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam upaya penguatan lembaga demokrasi di tingkat pusat, diperlukan peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi anggota lembaga perwakilan dengan konstituen serta peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya. Selain di tingkat pusat, penguatan demokrasi perlu dilakukan pula di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi secara holistik. Dapat dilakukan penguatan demokrasi melalui pendidikan politik kepada partai politik dan masyarakat serta fasilitasi penguatan demokrasi di daerah. Kerja sama antarsektor dan optimalisasi peran masyarakat adalah kunci untuk menuju demokrasi substansial. Intervensi masing-masing upaya dapat dilihat pada gambar berikut.

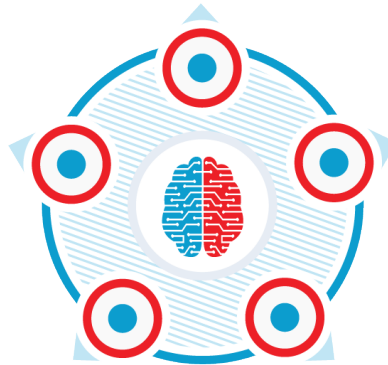
Kerangka Pikir Penguatan Lembaga Demokrasi

Identifikasi Permasalahan

1. Masih belum optimalnya keterlibatan konstituen/publik dalam proses pengambilan kebijakan di lembaga legislatif karena belum terbangunnya saluran partisipasi secara sistemik
2. Belum maksimalnya fungsi kaderisasi partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat di pusat dan daerah

Dukungan Intervensi

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sistem informasi bagi anggota legislatif dan anggota konstituen
2. Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
3. Pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Ahli Anggota Perwakilan
4. Penguatan demokrasi di daerah



Dukungan Lintas Sektor

1. Dewan Perwakilan Daerah
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Kementerian Dalam Negeri

Upaya Penguatan Lembaga Demokrasi

1. Pengembangan sistem informasi lembaga legislatif
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga legislatif
3. Pendidikan politik kepada partai politik dan masyarakat

Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah

1. Koordinasi penguatan demokrasi di tingkat pusat dan daerah
2. Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dengan pedoman teknis pelaksanaan

Tahapan intervensi penguatan lembaga demokrasi meliputi (a) manajemen data dan materi pengelolaan aspirasi masyarakat, (b) optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pengembangan sistem informasi, (c) peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga legislatif, (d) pendidikan politik dan penguatan ideologi bagi para pengurus partai politik dan

masyarakat, (e) peningkatan kapasitas Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah, serta (f) tindak lanjut rencana aksi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat pusat dan provinsi. Kegiatan penguatan lembaga demokrasi dilakukan secara nasional di seluruh provinsi. Selanjutnya, Provinsi akan menerima fasilitasi dan supervisi secara terukur serta berkelanjutan.

Penguatan Lembaga Demokrasi

Sasaran dan Indikator

Menguatnya lembaga demokrasi modern di pusat dan daerah untuk mendukung terwujudnya demokrasi substansial

1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Target 2025: 79,46–82,90
2. Kinerja Lembaga Legislatif. Target 2025: 55,00
3. Pendidikan Politik pada Kader Politik. Target 2025: 79,46

Instansi Pelaksana

1. Dewan Perwakilan Daerah
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Kementerian Dalam Negeri

1. Penguatan sistem informasi bagi anggota legislatif dan anggota konstituen
2. Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga ahli anggota dewan perwakilan
4. Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah
5. Fasilitasi penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi

Kegiatan penguatan lembaga demokrasi dilakukan secara nasional di seluruh provinsi

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

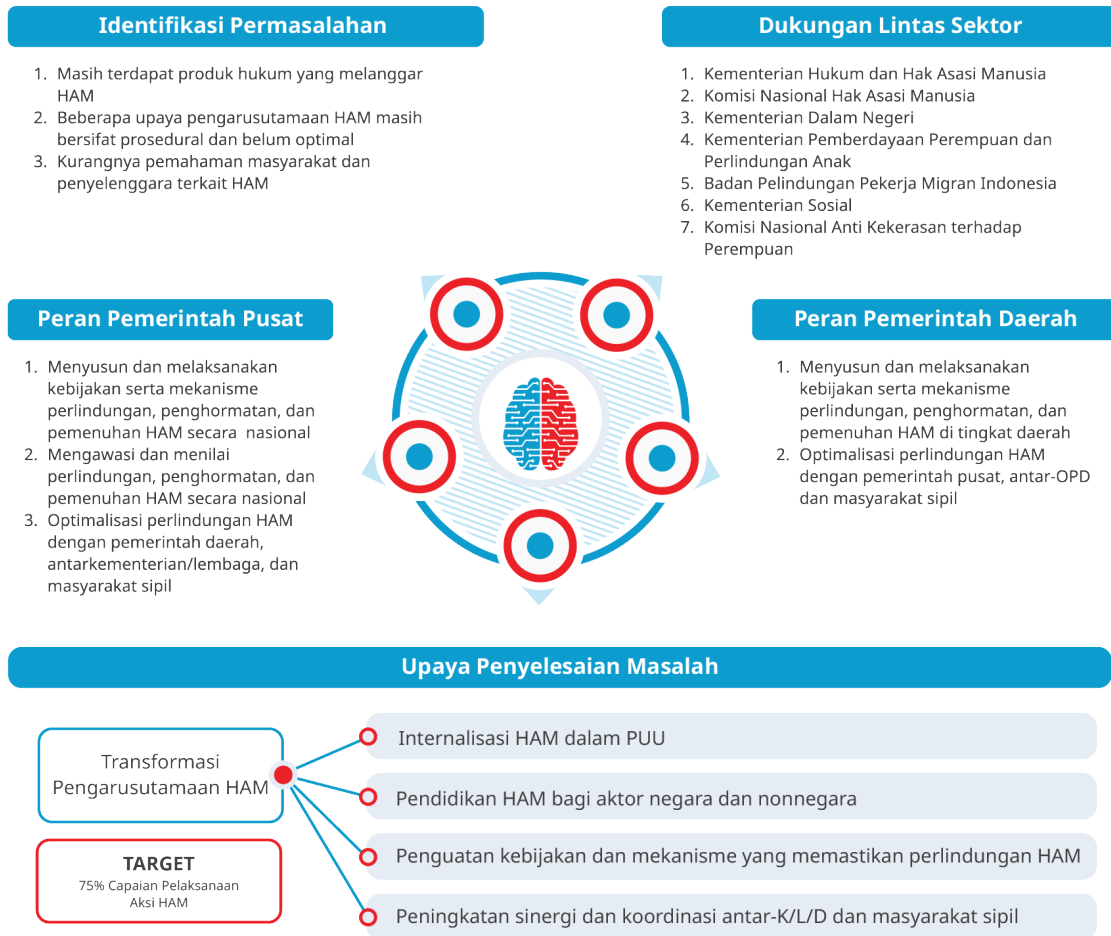


Transformasi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia

Kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia merupakan hal esensial untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan secara menyeluruh dalam kebijakan pemerintah. Meskipun telah ada beberapa instrumen untuk pengarusutamaan hak asasi manusia, implementasinya belum optimal akibat berbagai masalah dan tantangan yang ada. Untuk mengoptimalkan pengarusutamaan hak asasi manusia, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia nasional yang terdiri atas empat aspek (a) adanya standar normatif terhadap hak asasi manusia, (b) kebijakan dan mekanisme, (c) peran kementerian/ lembaga dan pemerintah; serta (d) partisipasi masyarakat sipil.

Permasalahan dan tantangan. Upaya pemerintah dalam pengarusutamaan hak asasi manusia, di antaranya melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan. Akan tetapi, pelaksanaan saat ini masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya dapat menilai pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara efektif. Masih rendahnya pemahaman pemerintah daerah terkait dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya di tingkat daerah secara optimal. Selain itu, pemerintah juga mempunyai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tahun 2023 sebagai upaya memperkuat regulasi perlindungan hak asasi manusia di sektor bisnis. Namun demikian, pemahaman dan kesadaran tentang

Kerangka Pikir Transformasi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia



pengarusutamaan hak asasi manusia dalam sektor bisnis masih rendah menyebabkan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia belum optimal.

Permasalahan lain yang mendasar terletak pada produk hukum dan kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Pembentukan hukum yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia menghadapi tantangan besar, termasuk adanya nilai-nilai masyarakat yang tidak selaras dengan standar dan

penafsiran norma hak asasi manusia internasional yang berbenturan dengan partikularitas lokal. Lebih lanjut, nilai-nilai hak asasi manusia yang belum sepenuhnya diterima dalam masyarakat menunjukkan terbatasnya pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia bagi aktor negara dan non-aktor negara. Hal tersebut merupakan isu krusial, terutama bagi aktor negara sebagai pemangku kewajiban utama dan juga korporasi yang belum memahami kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia, serta masih ada perlakuan yang membatasi hak kelompok rentan.



Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia, perlu dilaksanakan transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia. Fokus utama dari transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia adalah penguatan *National Human Rights Protection System* yang mencakup internalisasi prinsip dan kewajiban internasional negara terhadap hak asasi manusia dalam pengujian undang-undang, kebijakan, dan mekanisme yang memastikan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, penguatan lembaga-lembaga yang berkontribusi pada perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta lembaga-lembaga yang mengawasi pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Intervensi dapat dilihat pada gambar di atas.

Tindakan intervensi transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia mencakup (a) penyusunan instrumen dan mekanisme internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pengujian undang-undang; (b) pelaksanaan pendidikan terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada aktor negara (*state actors*) dan nonnegara (*non-state actors*) secara sistematis; (c) penyusunan aksi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang lebih memperhatikan kebutuhan aktual, penyesuaian *timeline* Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan perencanaan penganggaran, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia; dan (d) penggunaan instrumen penilaian dan evaluasi kebijakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan upaya pengarusutamaan hak asasi manusia.

Transformasi Pengarusutamaan HAM

Sasaran dan Indikator

Terwujudnya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan

Indikator: Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM. Target 2025: 75%

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Komisi Nasional HAM
3. Kementerian Sosial
4. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

1. Pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM
2. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM-Pusat
3. Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas (penyandang disabilitas)
4. Pelayanan perlindungan terhadap PMI
5. Daerah yang menerapkan layanan perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO
6. Permen tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual bagi Tenaga Layanan-Pusat
7. Rekomendasi penguatan arah kebijakan penyikapan kekerasan berbasis gender berperspektif kepulauan dan inklusif di era digital

Kegiatan transformasi pengarusutamaan HAM dilakukan secara nasional di seluruh provinsi

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” pada tahun 2025 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional, yaitu

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum. Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) dan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Penyusunan Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk mengatur berbagai aspek krusial, seperti penyesuaian mekanisme restitusi untuk memperkuat eksekusi dan sita aset, pengaturan konsep dana bantuan korban, serta perbaikan dalam layanan perlindungan dan pengawalan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi Undang-Undang ini juga mencakup pengaturan implementasi

kerahasiaan identitas, serta perbaikan proses administratif dan persyaratan perlindungan, termasuk memperluas penerima perlindungan, yaitu terhadap saksi pelaku.

- (3) Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan, seperti masih lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi di tengah masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, wajib diutamakan melalui pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan dengan pendekatan berbasiskan ramah pengguna. Selain itu, perlu memperkuat wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, anggota legislatif, dan masyarakat umum.

- (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional

Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional disusun untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidang komunikasi publik yang saat ini belum memiliki payung hukum nasional. Selain itu, Perpres ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan komunikasi publik digital secara lebih efektif dan mengedepankan kepentingan publik.



3.2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan			
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,6 (2022)	16
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	60,42	61,54
3	Asia Power Index (<i>Economic Relationship</i>)	12,6	12,6 ^{a)}
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	63,5
5	Global Cybersecurity Index	94,88	94,92
6	Indeks Keamanan Laut Nasional	56	60

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan			
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8,53	7,21
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2	20
10	Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional	3,48 (2022)	3,45–3,60
11	Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)	60,43	63,40
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12,5
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan			
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3	3
15	Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,8
16	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	76,49
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
	Kumulatif (%)	27,82	28,12
	Tahunan (%)	35,53 (2022)	36,65
20	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,92 (2022)	8,1
21	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	34,25	38,76
22	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45	45

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Sangat sementara

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif.
- (2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat;



- (3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.
- (2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui (a) percepatan peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; (b) peningkatan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri; (c) mendorong pembentukan ekosistem industri pertahanan; (d) percepatan transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*; dan (e) peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan pertahanan negara dilaksanakan melalui (a) peningkatan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia; (b) perkuatan komponen cadangan; (c) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara; (d) perkuatan kapabilitas Badan Pertahanan Siber; (e) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (f) peningkatan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar; (g) perkuatan instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (h) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (i) pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata strategis.
- (3) Penguatan sistem keamanan negara dilaksanakan melalui (a) sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (b) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara; (c) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (e) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; serta (f) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.
- (4) Profesionalisme pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui (a) peningkatan jumlah dan proporsi polwan; (b) peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (c) penguatan kapabilitas Polisi Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel Polisi Republik Indonesia; serta (e) perkuatan polisi dalam rangka sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

- (5) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dilaksanakan melalui (a) penguatan perkuatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; (c) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia, dan *choke point*; (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; serta (e) pemetaan batimetri dan alur laut.
- (6) Keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui (a) penguatan perkuatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (b) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (c) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (d) operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.
- (7) Penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy* dilaksanakan melalui (a) pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*; (b) pelibatan aktif dan perluasan akses fasilitas bagi diaspora Indonesia; serta (c) penguatan dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
- (8) Diplomasi ekonomi dilaksanakan melalui (a) penguatan kerja sama pembangunan internasional; (b) diplomasi ekonomi yang adaptif; (c) diplomasi ekonomi strategis dengan mitra utama; (d) diplomasi ekonomi dengan negara tetangga, perbatasan, regional, dan subregional; (e) kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil; serta (f) proses akses Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development.
- (9) Hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui (a) intensifikasi penyelesaian batas maritim dan batas darat serta penguatan diplomasi kedaulatan; (b) penguatan supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam fora dan organisasi internasional; (c) peningkatan peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia; serta (d) intensifikasi diplomasi publik dan budaya, serta memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.
- (10) Swasembada pangan dilaksanakan melalui (a) pengembangan kawasan sentra produksi pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan; (b) pengembangan lumbung pangan nasional; (c) penguatan cadangan pangan; (d) pengembangan pangan akuatik (*blue food*); (e) pengembangan pangan hewani; (f) pengembangan pangan nabati; (g) penganeekaragaman konsumsi pangan; (h) penjaminan mutu dan keamanan pangan; (i) biofortifikasi dan fortifikasi pangan; (j) penguatan pangan lokal; (k) penanganan kerawanan pangan dan gizi; (l) penguatan satu data pangan; (m) pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan (*food loss & waste*); (n) stabilisasi pasokan dan harga pangan; (o) pelaksanaan *one health*; (p) hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan; (q) pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam; (r) modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif; (s) penguatan regenerasi petani; serta (t) pendayagunaan pertanian berkelanjutan.
- (11) Swasembada energi dilaksanakan melalui (a) peningkatan penyediaan energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (c) penguatan implementasi transisi energi.
- (12) Swasembada air dilaksanakan melalui (a) pembangunan dan pengelolaan sumber air, (b) penyediaan pasokan air berkelanjutan, (c) pengelolaan risiko daya rusak air, dan (d) rehabilitasi hutan dan lahan.



- (13) Pemenuhan akses air minum dilaksanakan melalui (a) pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (b) pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, (c) penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan sistem penyediaan air minum, serta (d) peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum.
- (14) Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat dilaksanakan melalui (a) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim; (b) penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim; (c) penyusunan dan penerapan pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi aman dan berkelanjutan; (d) pengembangan ekosistem berbasis inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan sanitasi; serta (e) penguatan peran masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan sanitasi yang aman.
- (15) Ekonomi syariah dilakukan melalui (a) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri halal; (b) peningkatan ekspor produk halal berdaya saing global dan penguatan kerja sama ekonomi syariah internasional; (c) penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah halal; (d) penguatan peran keuangan syariah untuk pembiayaan pembangunan; serta (e) peningkatan peran dana sosial syariah.
- (16) Ekonomi digital dilakukan melalui (a) penguatan ekosistem infrastruktur ekonomi digital, dan (b) penguatan ekosistem industri digital lingkup ekonomi.
- (17) Ekonomi sirkular industri dilaksanakan melalui (a) penerapan efisiensi sumber daya dan perpanjangan daya guna, (b) pengembangan produk ramah lingkungan, serta (c) penguatan ekosistem daur ulang.
- (18) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik dilakukan melalui (a) penguatan pengelolaan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pemulihan ekosistem yang terdegradasi; (c) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (d) pengendalian spesies asing invasif; (e) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (f) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan; (g) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (h) pengembangan bioprospeksi serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; dan (i) pengelolaan bioteknologi serta keamanan hayati (*biosafety*).
- (19) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan air limbah; (c) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (d) peningkatan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (e) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (f) peningkatan kualitas lahan; (g) penurunan laju deforestasi; (h) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (i) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; (j) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (k) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (l) peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di pusat dan daerah serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; (m) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (n) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (20) Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara partisipatif (hulu) dilakukan melalui (a) pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta pengumpulan dan pengangkutan terpilah terjadwal; dan (b) penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah.
- (21) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir) dilakukan melalui (a) pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (b) peningkatan sampah terolah di tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pemrosesan akhir, dan *landfill mining*; serta (c) reformasi tata kelola persampahan.
- (22) Pembangunan rendah karbon dilakukan melalui (a) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (b) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (c) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (d) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (e) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (f) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (g) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (h) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
- (23) Tenaga kerja hijau dilakukan melalui (a) pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau, (b) pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau, serta (c) penguatan peran asosiasi serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau.
- (24) Pengelolaan hutan lestari dilaksanakan melalui (a) peningkatan produktivitas hutan, (b) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri, (c) penguatan pengelolaan hutan lestari, (d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, serta (e) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan.
- (25) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola ekonomi biru; (b) peningkatan pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan, dan pesisir; (c) pengembangan industrialisasi berbasis sumber daya alam perikanan dan kelautan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan; (d) penguatan industri manufaktur perkapalan dan bahan baku perkapalan; (e) penguatan sistem logistik, transportasi, dan perdagangan jalur perairan; (f) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan; serta (g) peningkatan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi biru serta peningkatan sumber daya manusia maritim.

Selain intervensi yang telah dijabarkan, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran prioritas nasional yaitu (1) mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; (2) memperluas akses energi bersih untuk masyarakat; serta (3) pembangunan dan pengelolaan sumber air.

Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional

Permasalahan dan tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap individu agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif. Pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat dan semakin beragam. Bahan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, yang permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, permintaan bahan



pangan untuk kebutuhan non-pangan juga semakin meningkat, termasuk untuk pakan, kesehatan, energi, dan lain-lain.

Di lain pihak, kapasitas produksi pangan dalam negeri menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

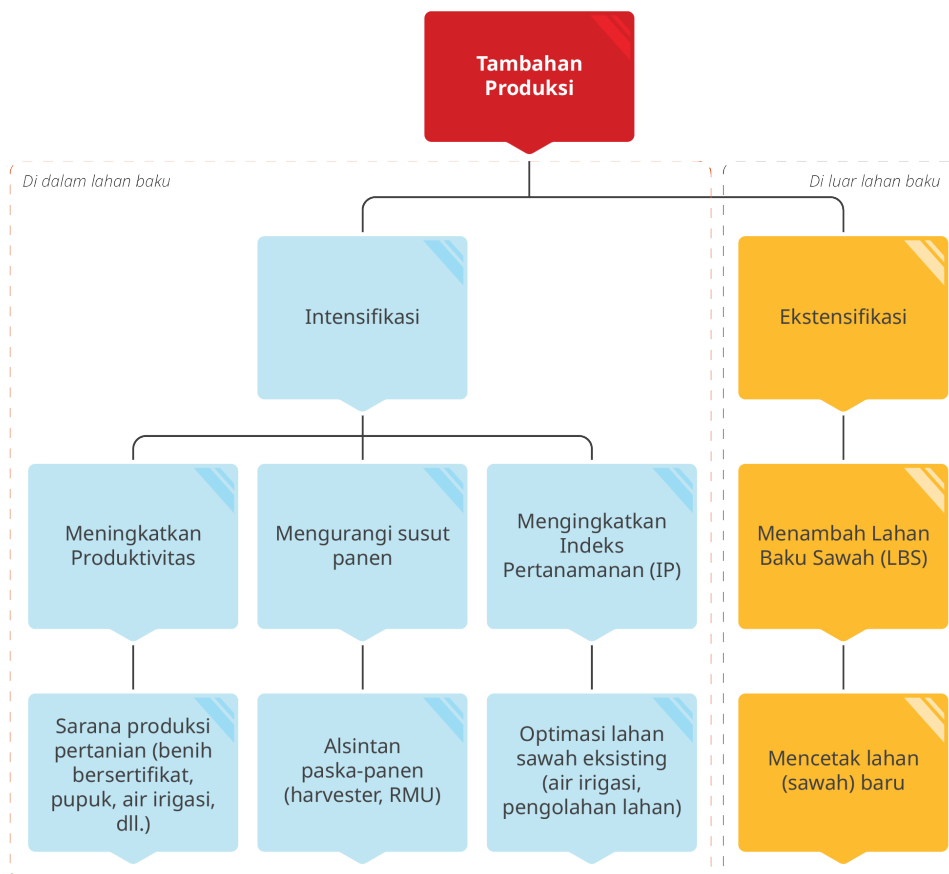
- (a) menurunnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, termasuk lahan dan air;
- (b) semakin tinggi dampak negatif dan tidak menentunya perubahan iklim;
- (c) rendahnya skala usaha tani;
- (d) masih relatif terbatasnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur wilayah di perdesaan dan pertanian; serta
- (e) semakin menurunnya minat menjadi petani dan semakin menuanya petani.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam merespons tantangan-tantangan di atas, program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri. Guna mencapai arah tersebut dilakukan melalui dua strategi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi lahan produksi pangan.

Strategi intensifikasi lahan dilaksanakan melalui (a) peningkatan produktivitas komoditas pangan; (b) peningkatan indeks pertanaman; serta (c) pengurangan susut atau kehilangan panen. Sedangkan, strategi ekstensifikasi dilaksanakan melalui penambahan lahan produksi pangan, dengan memperhatikan kesesuaian sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup setempat secara berkelanjutan. Secara umum, kerangka program tersebut disajikan pada gambar di bawah ini.

Rancangan Kerangka Kerja Program Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional



Peningkatan produktivitas komoditas pangan dilakukan melalui peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana produksi pertanian seperti penggunaan benih bersertifikat, penggunaan pupuk yang tepat dan efisien, serta optimalisasi penyediaan air irigasi. Beberapa daerah masih mempunyai produktivitas komoditas yang lebih rendah daripada rata-rata nasional. Daerah-daerah tersebut menjadi arahan lokasi untuk ditingkatkan produktivitas komoditas tersebut.

Pengurangan susut atau kehilangan panen melalui penyediaan alat dan mesin paska-panen, pengolahan hasil dan penyimpanan hasil panen. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan penyediaan infrastruktur wilayah juga merupakan upaya dalam mengurangi susut atau kehilangan hasil panen, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen.

Peningkatan Indeks Pertanaman utamanya melalui penyediaan air irigasi dan optimasi lahan pertanian eksisting. Beberapa upaya tersebut, antara lain pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, serta penuntasan pemanfaatan layanan irigasi dari bendungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa air irigasi tersambungkan dari sarana/prasarana ke area lahan pangan dan pertanian. Beberapa daerah masih mempunyai indeks Pertanaman yang lebih rendah daripada rata-rata nasional. Daerah-daerah tersebut berpotensi untuk menjadi arahan lokasi penyediaan air irigasi, dalam kerangka keterpaduan pengelolaan sumber daya air, baik dari sumber air permukaan maupun air tanah dangkal dan/atau air tanah dalam. Peningkatan Indeks Pertanaman akan meningkatkan luas tanam dan luas panen, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi pangan.

Strategi ekstensifikasi direncanakan dalam kerangka keterpaduan dan keberlanjutan. Pencetakan lahan pangan pertanian dipetakan sesuai kesesuaian lahan, kesiapan sumber daya manusia pertanian, serta kondisi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu,

ekstensifikasi lahan pangan pertanian diutamakan pada daerah-daerah yang telah mempunyai kesiapan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan air irigasi.

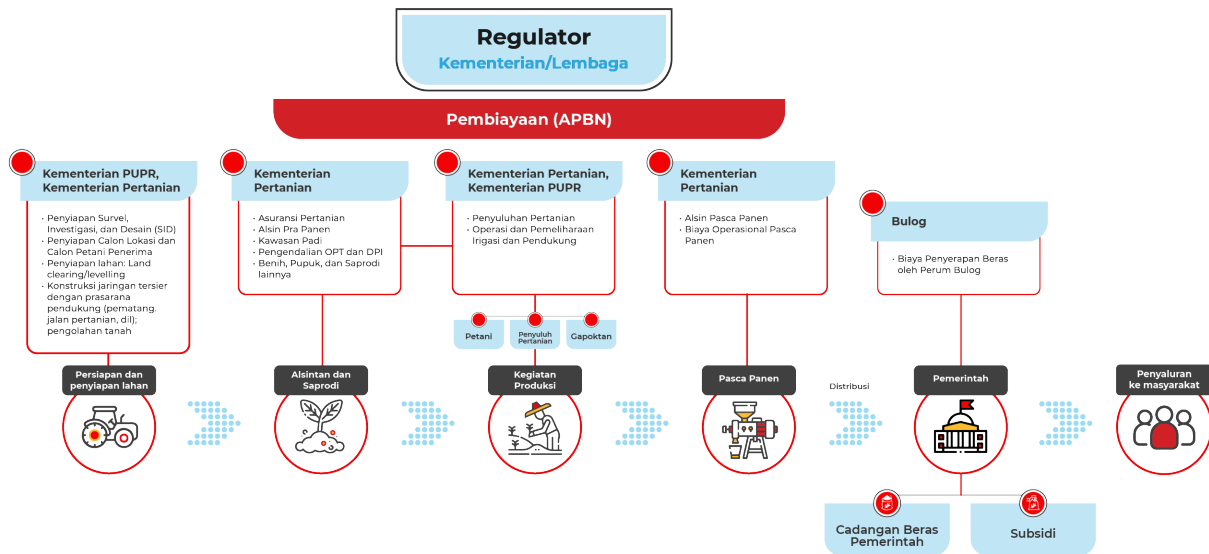
Strategi ekstensifikasi lahan pangan pertanian akan diikuti dengan proses pematangan lahan, yang selanjutnya, akan dilengkapi dengan penyediaan input produksi pertanian, termasuk benih bersertifikat, pupuk, pestisida, asuransi pertanian, serta alat dan mesin pertanian. Budidaya tanaman juga akan difasilitasi dengan pengembangan kelembagaan petani, dukungan akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas kepada tenaga kerja usaha tani/petani untuk meningkatkan produktivitas lahan. Lebih lanjut, strategi ekstensifikasi lahan direncanakan secara terpadu sampai dengan berkontribusi pada peningkatan produksi dan cadangan pangan dalam negeri.

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pangan merupakan upaya terpadu hulu-hilir, lintas bidang, lintas sektor, lintas pelaku dan lintas level pemerintahan. Penyiapan lahan diikuti dengan fasilitasi budidaya tanaman, sampai dengan menghasilkan produksi pangan. Selanjutnya, rangkaian strategi dan upaya tersebut akan berkontribusi pada peningkatan cadangan pangan dalam negeri.

Peningkatan Indeks Pertanaman melalui pemenuhan kebutuhan air yang diantaranya didukung dari pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi dan pompanisasi. Dari 58 bendungan yang selesai dibangun pada akhir tahun 2024, 49 unit di antaranya memiliki manfaat layanan irigasi dan hanya 29 unit yang telah ditindaklanjuti pemanfaatannya. Oleh karena itu, selain pembangunan bendungan, upaya pemenuhan kebutuhan sumber air untuk produksi padi nasional di lahan pertanian juga memerlukan sistem distribusi air yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan air dari bendungan dan sumber lain dapat mengalir dan dimanfaatkan secara optimal serta berkelanjutan ke area persawahan.



Model Pengelolaan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan Pangan Pertanian



Beberapa kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam strategi ini, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Badan Pangan Nasional; serta badan usaha milik negara. Strategi ekstensifikasi akan

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau institusi yang ditugaskan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai peran signifikan dalam ranah pelaksanaan di lapangan.

Pada tahun 2025, Program Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional ditargetkan untuk meningkatkan luasan dan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi seluas 250 ribu ha dan melalui intensifikasi seluas 50-80 ribu ha.

Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional



Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Memperluas Akses Energi Bersih Untuk Masyarakat

Permasalahan dan tantangan. Saat ini, Indonesia telah memulai proses transisi energi dari sumber energi fosil ke energi yang terbarukan. Hal ini selaras dengan target pembangunan berkelanjutan. Penyediaan energi yang terjangkau, andal, modern, dan berkelanjutan (*affordable and clean energy*) merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (tujuan ke-7). Energi berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan distribusi penduduk yang tidak merata dan terpisah relatif jauh menjadi tantangan dalam penyediaan akses energi. Untuk itu, diperlukan terobosan melalui pendekatan pembangunan infrastruktur energi yang tersebar (*distributed generation*) dan tidak sentralistik.

Pemanfaatan gas bumi merupakan salah satu strategi transisi yang menjembatani pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan energi terbarukan. Pemanfaatan gas bumi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui peningkatan akses energi dengan penggunaan gas bumi baik pipa maupun nonpipa. Pemanfaatan gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan pembangunan pipa transmisi gas bumi dan pembangunan jaringan pipa distribusi gas untuk rumah tangga (*jargas*). Selain itu, perluasan pemanfaatan *Liquefied Petroleum Gas* (elpiji) sebagai turunan dari minyak dan/atau gas bumi melalui Program Substitusi Elpiji 3 kilogram juga menjadi salah satu strategi untuk memberikan akses energi yang lebih andal dan modern. Di daerah yang telah mendapatkan Program Substitusi Elpiji 3 kilogram dilakukan kegiatan Pembagian Kit Konverter Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan dan petani sasaran dalam rangka membantu nelayan dan petani serta mendukung kebijakan diversifikasi penggunaan energi yang lebih bersih. Dari hasil pemantauan di lapangan, penggunaan kit konverter tersebut dapat meningkatkan ekonomi nelayan melalui

penghematan biaya operasional melaut antara 30.000 Rupiah sampai dengan 50.000 Rupiah per hari dengan penggunaan satu unit tabung gas untuk melaut antara 8 sampai 10 jam.

Persentase penggunaan energi dalam rumah tangga untuk kegiatan memasak didominasi oleh gas/elpiji dengan besaran 86,91 persen secara nasional. Meningkatnya penggunaan elpiji ini tentu akan meningkatkan impor elpiji sehingga perlu adanya pembangunan jaringan pipa distribusi gas untuk menggantikan elpiji dan menekan tingginya permintaan penggunaan elpiji di masyarakat. Di lain sisi, untuk mengukur kondisi dan capaian akses energi listrik di Indonesia digunakan rasio elektrifikasi yang merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah total rumah tangga. Sampai dengan tahun 2023, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,79 persen. Masih terdapat beberapa provinsi dengan rasio elektrifikasi di bawah rata-rata nasional seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, jumlah rumah tangga yang belum berlistrik sampai dengan 2023 mencapai 177.732 rumah tangga. Hingga saat ini, masih terdapat 339.256 rumah tangga dengan akses listrik sementara, melalui program Listrik Tenaga Surya (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi).

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam rangka meningkatkan interkoneksi penyaluran gas bumi sebagai upaya peningkatan gas bumi domestik, telah ditetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagai dasar acuan pembangunan infrastruktur gas bumi. Rencana induk ini menetapkan strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia yang terbagi menjadi Indonesia Barat dengan mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur dengan virtual pipeline menggunakan moda transportasi *Liquefied Natural Gas* berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan *demand* antara Barat dan Timur.



Selain itu, dalam mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk masyarakat, upaya yang dilakukan adalah pembangunan jaringan pipa distribusi gas yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang dekat dengan sumber gas bumi dan telah memiliki infrastruktur pipa distribusi gas (perluasan). Pembangunan jaringan pipa distribusi gas dilaksanakan melalui tiga skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Usaha Milik Negara, serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Selanjutnya, dalam rangka

pemerataan akses energi, masih terdapat wilayah-wilayah yang belum mendapatkan elpiji 3 kilogram yang merupakan substitusi dari minyak tanah di Kawasan Timur Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Substitusi Elpiji 3 kilogram harus semakin selektif dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan Pembagian Kit Konverter Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan dan petani sasaran juga dapat terus dilaksanakan secara tepat sasaran.

Indikasi Kegiatan Prioritas Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Pembangunan Jaringan Gas Kota untuk Rumah tangga (Jargas) (Sambungan Rumah)*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran (Paket)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran (Paket)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang (CISEM) (Ruas)	1	1	-	-	-
Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Sei – Mangkei – Dumai (DUSEM) (Ruas)	1	1	1	-	-

Keterangan: *) Skema Jargas APBN, BUMN, dan KPBU

Peran energi terbarukan menjadi krusial karena potensinya yang spesifik lokasi (*site specific*) dan tersebar merata di seluruh Indonesia (khususnya tenaga surya) memungkinkan wilayah yang sulit dijangkau jaringan Perusahaan Listrik Negara untuk dapat mengembangkan energi secara mandiri. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan beragam dan sangat besar dengan total potensi mencapai 3,6 ribu giga watt. Tenaga surya sendiri, meskipun intensitas radiasinya tidak terlalu tinggi, dengan posisi Indonesia di khatulistiwa menjadikan potensinya cukup besar mencapai 3,2 ribu giga watt. Lokasi program pembangunan energi terbarukan secara masif ini perlu disinkronisasi dengan program lainnya terkait perluasan akses energi seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik dan Program Listrik Pedesaan dari Perusahaan Listrik Negara.

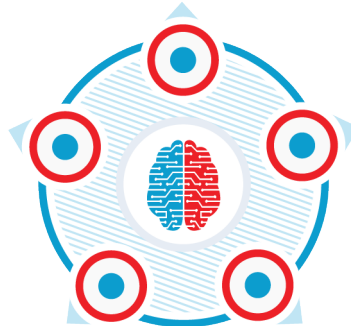
Upaya penuntasan akses listrik untuk pedesaan sampai 2029 dilakukan melalui pembangunan energi terbarukan skala kecil secara masif dari berbagai sumber pendanaan, seperti badan usaha Perusahaan Listrik Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dana transfer ke daerah, dana desa dan optimalisasi dana *corporate social responsibility*. Pengintegrasian sumber-sumber pembiayaan perlu dilakukan untuk memastikan penyediaan energi yang merata, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat. Di samping itu, perluasan akses energi listrik dilakukan melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan setempat. Hal ini didukung dengan potensi energi terbarukan surya dan hidro skala kecil yang cukup besar dan tersebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Kerangka Pikir Perluasan Akses Energi Bersih untuk Masyarakat

Memperluas akses energi bersih untuk masyarakat

Permasalahan dan Tantangan

1. Kurangnya pemanfaatan potensi EBT setempat
2. Kondisi geografis yang kurang mendukung, baik akses dan transportasi.
3. Tingginya biaya investasi, harga beli pasokan gas dan rendahnya volume pemakaian pelanggan menurunkan skala ekonomi proyek Jargas
4. Durasi waktu dan kompleksitas perizinan serta tingginya biaya retribusi atas infrastruktur berdampak pada keekonomian dan biaya investasi
5. Kurang nya sosialisasi manfaat proyek sehingga masyarakat kurang menerima



Dukungan Lintas Sektor

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Badan Pusat Statistik
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Perusahaan Listrik Negara;
10. PT Pertamina;
11. Perusahaan Gas Negara;
12. Swasta

Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

1. Penguatan kualitas data perencanaan melalui penguatan basis data rumah tangga belum berlistrik; penyusunan studi kelayakan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dan Penyiapan lahan dan perizinan
2. Penguatan SDM dan Kelembagaan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, pembentukan Lembaga pengelola, penyiapan SDM operator
3. Integrasi sumber pendanaan melalui Pemetaan sumber pendanaan eksisting dan potensial dan Penyusunan roadmap penuntasan akses energi listrik pedesaan
4. Sosialisasi proyek-proyek akses energi bersih untuk Masyarakat.

Penguatan Peran Pemerintah Daerah

1. Alokasi dukungan pendanaan APBD untuk pengelolaan dan pemeliharaan
2. Peningkatan kapasitas Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan
3. Penyiapan program untuk pendanaan CSR dan bimbingan teknis atau fasilitas pemanfaatan dana desa
4. Penyiapan lahan dan perijinan
5. Monitoring dan evaluasi aset

Memperluas akses energi bersih untuk masyarakat

Sasaran dan Indikator

1. Jumlah rumah tangga terlistrik energi bersih
2. Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan Sasaran
3. Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani Sasaran
4. Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi yang terbangun
5. Jumlah Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

1. Pemutakhiran data rumah tangga (BPS, Kemendes, KESDM)
2. Penguatan kelembagaan (Kemendes, Kemendagri)
3. Penyiapan SDM (KESDM, Kemnaker)
4. Dana transfer ke daerah (Kemenkeu, Bappenas)

Instansi Pelaksana

1. KESDM
2. PLN
3. PT Pertamina
4. PT PGN
5. Pemda

1. NTT
2. Kalimantan Tengah
3. Sulawesi Tenggara
4. Maluku
5. Papua Tengah
6. Papua Selatan
7. Papua Pegunungan

Catatan: Untuk lokasi Pembangunan Jargas dan Penerima Konverter kit masih dalam tahap identifikasi

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas



Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air

Permasalahan dan tantangan. Air merupakan fondasi kehidupan yang berkelanjutan sehingga mencapai swasembada air menjadi salah satu fokus dalam upaya menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, ketahanan air merupakan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Sebagai salah satu pilar swasembada/ketahanan air, penyediaan tampungan air sebagai bagian dari konservasi sumber daya air tak luput dari berbagai tantangan pengelolaan.

Kapasitas tampung air per kapita di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki variabilitas musim yang serupa, padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya air terbesar di dunia. Sebagai contoh, kapasitas tampung air per kapita Indonesia tahun 2023 baru mencapai 60,43 m³/kapita, jauh dibandingkan dengan Jepang (228 m³/kapita) dan Malaysia (710 m³/kapita). Keterbatasan tampungan air tersebut berimplikasi pada rendahnya layanan bendungan yang hanya mencakup 12 persen area irigasi permukaan dan 7 persen dari total kapasitas air baku. Sebagian besar layanan irigasi permukaan dan air baku menjadi sangat mengandalkan debit sungai atau mata air yang rentan terhadap perubahan curah hujan.

Penurunan kapasitas tampungan air akibat perubahan kondisi demografi dan aktivitas ekonomi juga menjadi ancaman serius terhadap bagi tampungan air. Pada periode 2012–2022, terjadi perubahan tutupan lahan yang mampu menahan air sebesar 21 persen terutama pada daerah tangkapan air di hulu tampungan air yang berdampak pada tingginya tingkat sedimentasi yang berpotensi mengancam keamanan struktur tampungan air eksisting. Selain itu, kapasitas operasi dan pemeliharaan

infrastruktur tampungan air belum memadai. Pada tahun 2024, kemampuan penganggaran operasi dan pemeliharaan tampungan air baru mampu memenuhi 19,95 persen dari Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP).

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan ketersediaan air dalam rangka mendukung berbagai pertumbuhan sektor produktif, antara lain:

- (a) Pembangunan tampungan air, melalui (i) pembangunan bendungan multiguna yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan; (ii) pembangunan tampungan air serbaguna skala kecil untuk daerah rawan kekeringan; serta (iii) pengembangan kajian potensi inovasi infrastruktur penyediaan air nonkonvensional seperti tampungan air bawah tanah, waduk muara, waduk lepas pantai, dan pemanenan air hujan.
- (b) Rehabilitasi dan revitalisasi tampungan air, melalui (i) inisiasi dam *upgrading* dan akselerasi *remedial works* bendungan; serta (ii) revitalisasi tampungan air eksisting.
- (c) Penyempurnaan tata kelola infrastruktur tampungan air, melalui (i) pengembangan modernisasi sistem manajemen tampungan air; (ii) optimalisasi aset Barang Milik Negara (BMN) tampungan air untuk pemantapan layanan dan kinerja operasi dan pemeliharaan seperti *floating solar panel*, dan pemanfaatan sempadan untuk kegiatan olahraga/pariwisata; serta (iii) pelibatan masyarakat dan teknologi untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan yang lebih efektif dan efisien, seperti *community participation* yang terintegrasi dengan operasi dan pemeliharaan waduk.

Pelaksanaan program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Instansi utama yang terlibat dalam program ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berperan dalam pembangunan infrastruktur tampungan air. Selain itu, terdapat

dukungan lintas sektor dari instansi lainnya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk konservasi daerah tangkapan air, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembinaan budidaya perikanan di tampungan air, dan Kementerian Dalam Negeri untuk pembinaan masyarakat. Program ini juga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah terkait pemberdayaan masyarakat di daerah tangkapan air hulu tampungan air dan pengendalian izin pemanfaatan lahan di hulu tampungan air. Kemudian, untuk mendorong pengembangan inovasi, dibutuhkan dukungan dari mitra pembangunan berupa inisiasi *pilot project community participation* di sempadan tampungan air, pengembangan modernisasi sistem tampungan air, dan *pilot project dam upgrading* untuk meningkatkan umur dan layanan tampungan air.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air memiliki sasaran berupa meningkat dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan. Keberhasilan program tersebut diukur melalui peningkatan kapasitas tampungan air menjadi 63,40 m³/kapita pada tahun 2025. Intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain pembangunan bendungan, revitalisasi danau, situ, dan tampungan air alami, serta pembangunan embung atau tampungan skala kecil lainnya. Indikasi lokasi prioritas untuk tahun 2025 adalah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Kerangka Pikir Program Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air

Identifikasi Permasalahan

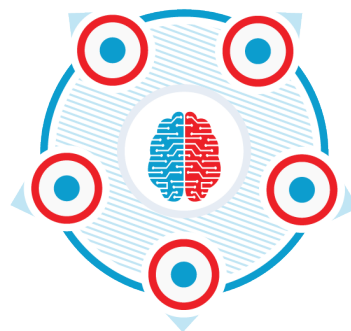
1. Kapasitas tampungan per kapita rendah
2. Perencanaan dan konstruksi bendungan butuh waktu belasan bahkan sampai puluhan tahun
3. Penuntasan manfaat bendungan juga membutuhkan waktu yang relatif panjang
4. Keberlanjutan pengelolaan bendungan tergantung keterlibatan dan peran banyak pihak

Dukungan Lintas Sektor

1. Konservasi daerah tangkapan air - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pembinaan budidaya perikanan di tampungan air - Kementerian Kelautan, dan Perikanan
3. Pembinaan masyarakat - Kementerian Dalam Negeri

Peran Pemerintah Daerah

1. Pemberdayaan masyarakat di daerah tangkapan air hulu tampungan air
2. Pengendalian izin pemanfaatan lahan di hulu tampungan air

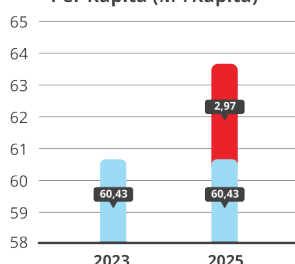


Peran Mitra Pembangunan

1. Inisiasi *pilot project community participation* di sempadan tampungan air
2. Pengembangan modernisasi sistem manajemen tampungan air
3. *Pilot Project dam upgrading* untuk meningkatkan umur dan layanan tampungan air

Upaya Penyelesaian Masalah

Kapasitas Tampungan Air Per Kapita (M³/Kapita)



Meningkatkan Kapasitas Tampungan Air

- Pembangunan tampungan air**
1. Pembangunan bendungan multiguna
 2. Pembangunan tampungan air serbaguna skala kecil
 3. Kajian potensi inovasi infrastruktur penyediaan air

Mempertahankan Kapasitas Tampungan Air

- Rehabilitasi dan revitalisasi tampungan air**
1. Inisiasi *dam upgrading* dan akselerasi *remedial works* bendungan
 2. Ravitalisasi tampungan air eksisting

Penyempurnaan tata kelola infrastruktur tampungan air

- Pengembangan modernisasi sistem manajemen tampungan air
- Optimalisasi aset BMN tampungan air untuk pemantapan layanan dan kinerja OP
- Pelibatan masyarakat dan teknologi untuk penyelenggaraan OP



Program Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air

Sasaran dan Indikator

Meningkat dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan

1. Peningkatan kapasitas tampungan air menjadi 63,40 m3/kapita

1. Pembangunan Bendungan
2. Revitalisasi danau, situ, dan tampungan air alami

Instansi Pelaksana

Instansi Utama: Kementerian PUPR

Instansi Pendukung:

1. Kementerian LHK
2. Kementerian KP
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Pemerintah Daerah

1. Sumatera (Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung)
2. Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten)
3. Bali Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur)
4. Kalimantan (Kalimantan Selatan)
5. Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat)
6. Maluku (Maluku)

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diperlukan untuk menjawab permasalahan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara instansi yang mengampu urusan persampahan dan belum dimuatnya amanat ekonomi sirkuler. Materi muatan perubahan meliputi optimalisasi

pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mempertegas kelembagaan pengelolaan sampah antara operator, regulator, dan pengawas, dan memuat amanat ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI diperlukan untuk meredefinisi cakupan veteran dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap perlindungan dan kesejahteraan veteran. Perubahan ini juga dilaksanakan untuk menyesuaikan pengaturan sanksi dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan dinamika ancaman keamanan nasional yaitu peningkatan jumlah serangan siber berbentuk malware ke Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di segala aktivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika disalahgunakan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab. Rancangan Undang-Undang Keamanan Ketahanan Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Persampahan Terpadu

Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Persampahan Terpadu diperlukan untuk mengisi celah atau ketidakjelasan pengaturan pengelolaan sampah yang ada di dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Materi muatan yang diperlukan dalam Rancangan Peraturan Presiden ini meliputi prinsip pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan, klasifikasi dan strategi peningkatan kinerja layanan pengelolaan sampah, pembagian peran antar-pihak, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan layanan pengelolaan sampah.

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

Rancangan Peraturan Presiden merupakan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Saat ini Rancangan Peraturan Presiden

sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017. Revisi Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional dilakukan sejalan dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang saat ini sudah dalam tahap harmonisasi. Revisi Peraturan Presiden Rencana Umum Energi Nasional dilakukan untuk mengakomodir arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Materi muatan Rancangan Peraturan Presiden ini meliputi pemutakhiran terhadap target-target, penjabaran arah kebijakan, sasaran, dan peran masing-masing pemangku kepentingan pemerintah dalam pembangunan ketahanan energi.

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan diperlukan untuk menerapkan pengelolaan susut dan sisa pangan yang berfokus pada penyelamatan pangan demi mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi. Materi muatan Rancangan Peraturan Presiden meliputi penerapan insentif-disinsentif, fasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pembentukan forum koordinasi penyelamatan susut dan sisa pangan, serta pengembangan standar penyelamatan pangan.

(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional merupakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penyusunan Rancangan Peraturan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Presiden ini diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pangan nasional ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

- (8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih

Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan, mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

- (9) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Utara Papua

Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata ruang darat

dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi laut yang berada di kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan, mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru", antara lain:

- (1) Penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan Platform Transformasi Sistem Pengelolaan Persampahan Nasional;
- (2) Penataan Kelembagaan dan Fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).



3.3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur			
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43 (2019)	51 ^{a)}
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	128,5	136,7
3	Aset Perbankan/PDB (%)	61,52	66,9
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,0 (2022)	8,0
5	Aset Asuransi/PDB (%)	8,82	9,1
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,84	57,8
7	Total Kredit/PDB (%)	33,94	37,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70	91



No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
9	Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang)	4,55	3,00–3,50
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,32 (2019)	1,44
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,60 (2022)	4,60
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,63	22,10
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Sangat sementara

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi, (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital, serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi.
- (2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan.
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.
- (4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- (5) Meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan konektivitas dan layanan transportasi dilaksanakan melalui (a) penguatan konektivitas jalan, (b) penguatan konektivitas kereta api, (c) penguatan konektivitas laut, (d) penguatan konektivitas udara, (e) penguatan konektivitas darat, (f) pengembangan transportasi perkotaan, serta (g) peningkatan sumber daya manusia transportasi.
- (2) Penguatan konektivitas dan transisi energi listrik dilaksanakan melalui (a) dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk terbarukan, (b) peningkatan konektivitas dan digitalisasi tenaga listrik, (c) peningkatan pemanfaatan tenaga listrik, serta (d) pengembangan ekosistem pendorong transisi energi listrik.
- (3) Penguatan konektivitas dan ekosistem digital dilaksanakan melalui (a) penguatan infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran; (b) pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta (c) peningkatan kondusivitas ruang digital.
- (4) Pengembangan pengairan dan irigasi dilaksanakan melalui (a) pengembangan irigasi, dan (b) pembangunan bendungan.
- (5) Pendalaman sektor keuangan dilaksanakan melalui (a) penguatan peran perbankan, (b) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (c) peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
- (6) Peningkatan produktivitas usaha mikro kecil menengah dan koperasi dilaksanakan melalui (a) pengembangan koperasi sektor produksi, (b) peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta (c) pengembangan kewirausahaan.
- (7) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan melalui (a) penguatan destinasi regeneratif Bali, (b) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau, (c) penguatan destinasi regeneratif *greater* Jakarta, (d) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramen, (e) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Manado-Likupang, (f) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung, (g) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, (h) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, (i) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat, (j) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo, (k) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi, (l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bromo-Tengger-Semeru, serta (m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai. Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi (i) menerapkan prinsip *blue-green-circular economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (ii) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan yang dipandu oleh Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*; (iii) reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi; (iv) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (v) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata; (vi) diversifikasi jenis pariwisata *geopark* (terutama UNESCO *Global Geopark*), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, olahraga, ramah muslim, dan desa wisata; serta (vii) pembangunan pariwisata melalui pengembangan dan implementasi *Indonesia Quality Tourism Fund*.



(8) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dilaksanakan melalui (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, dan video; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual akan dijalankan dengan strategi (i) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi; (ii) integrasi data ekonomi kreatif; (iii) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni; (iv) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (v) pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan hub/sentra kreatif yang didukung kelembagaan pengelola dan klaster kreatif sebagai ruang kreasi; (vi) penguatan struktur dan skema pendanaan, pembiayaan, dan insentif,

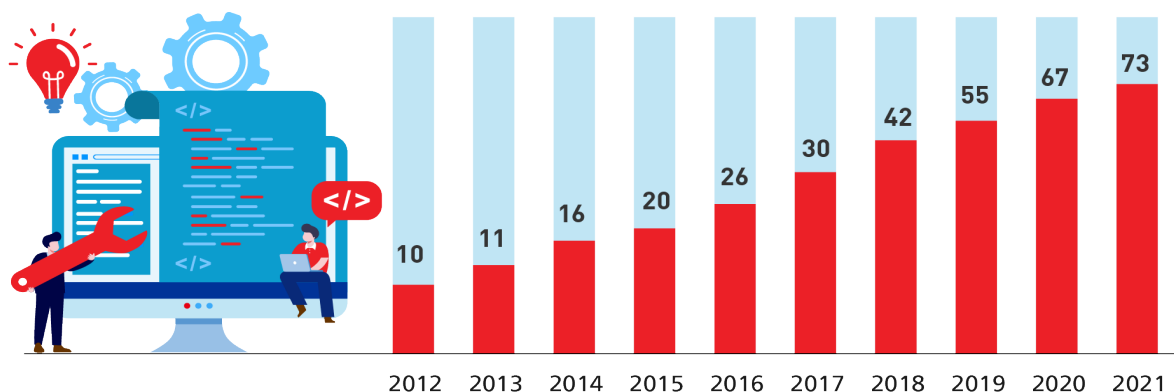
salah satunya melalui dana pengembangan konten kreatif/*Indonesia Creative Content Fund*; serta (vii) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah.

Kewirausahaan dan industri kreatif menjadi elemen penting yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia, sehingga perlu didorong dengan membangun ekosistem yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Program yang menjadi penekanan adalah pengembangan industri gim nasional dan pengembangan kewirausahaan.

Pengembangan Industri Gim Nasional

Permasalahan dan tantangan. Industri gim nasional menduduki peringkat 16 besar pasar gim dunia dan diperkirakan mencapai US\$2,5 miliar atau setara Rp36 triliun pada tahun 2025. Selain itu, jumlah pemain gim *mobile* di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan capaian 132,5 juta pemain pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan jumlah pendirian perusahaan gim lokal baru di Indonesia yang juga terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan 21,99 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Peningkatan Jumlah Perusahaan Gim di Indonesia 2012–2021



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022.

Namun demikian, dengan potensi ekonomi dan peluang pasar yang besar, industri gim nasional masih dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya (a) ketersediaan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan industri gim; (b) pengembang gim nasional yang masih belum punya pengalaman dalam manajemen produksi dan aspek pengembangan bisnis gim skala global; (c) kurikulum pendidikan vokasi yang dikembangkan tidak selaras dengan kebutuhan industri gim; (d) minimnya skema beasiswa untuk talenta-talenta berprestasi di sektor pengembangan gim; (e) belum adanya akses pendanaan dan pembiayaan, termasuk

matching fund; (f) belum adanya kebijakan yang dapat memberikan fasilitas pajak bagi pengembang gim dan penerbit gim; (g) belum optimalnya akses pasar bagi gim nasional di dalam dan luar negeri; (h) belum optimalnya promosi penyelenggaraan kegiatan gim nasional di dalam negeri; (i) belum optimalnya kebijakan terkait penambahan nilai tingkat komponen dalam negeri industri perangkat seluler yang melibatkan gim nasional; serta (j) belum optimalnya pemanfaatan gim nasional sebagai alat diplomasi budaya dalam mendukung aspek ketahanan negara.

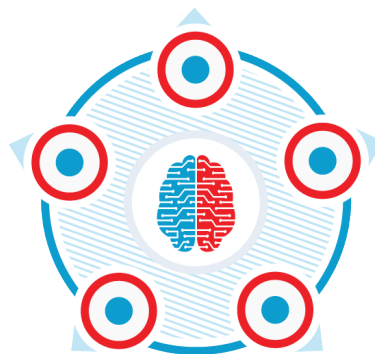
Kerangka Pikir Program Unggulan Pengembangan Industri Gim

Identifikasi Permasalahan

1. Ketersediaan SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan industri gim
2. Pengembang gim nasional yang masih belum memiliki pengalaman dalam manajemen produksi dan aspek pengembangan bisnis gim skala global
3. Kurikulum pendidikan vokasi yang dikembangkan tidak selaras dengan kebutuhan industri gim
4. Minimnya skema beasiswa untuk talenta-talenta berprestasi di sektor pengembangan gim
5. Belum adanya akses pendanaan dan pembiayaan, termasuk *matching fund*
6. Belum adanya kebijakan yang dapat memberikan fasilitas pajak bagi pengembang gim dan penerbit gim
7. Belum optimalnya akses pasar bagi gim nasional di dalam dan luar negeri
8. Belum optimalnya promosi penyelenggaraan kegiatan gim nasional di dalam negeri
9. Belum optimalnya kebijakan terkait penambahan nilai tingkat komponen dalam negeri industri perangkat seluler yang melibatkan gim nasional
10. Belum optimalnya pemanfaatan gim nasional sebagai alat diplomasi budaya dalam mendukung aspek ketahanan negara

Peran Mitra Pembangunan

1. Pendekatan berbasis komunitas
2. Keterlibatan dalam perumusan kebijakan
3. Kerja sama pembiayaan kebijakan



Peran Pemerintah Daerah

Daerah yang menjadi lokasi prioritas pengembangan berperan melakukan:

1. Mencantumkan indikator pengembangan ekonomi kreatif daerah terutama indikator gim dalam dokumen RPJMD
2. Menetapkan kebijakan yang mendukung industri gim
3. Mendukung kebijakan yang dilaksanakan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan industri gim di daerah

Peningkatan Upaya Pencegahan

1. Pengembangan SDM untuk industri gim nasional
2. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan industri gim nasional
3. Pembukaan akses pembiayaan dan permodalan bagi industri gim nasional
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan penguatan ekosistem industri gim nasional
5. Peningkatan promosi dan pembukaan akses pasar gim nasional
6. Pembangunan industri perangkat keras untuk gim nasional
7. Aktivasi gim nasional di kawasan regional dan global

Dukungan Lintas Sektor

1. Pendampingan dan inkubasi produk kreatif gim; Dukungan pembiayaan industri gim melalui *Indonesia Creative Content Fund (ICCF)* - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Fasilitas akselerasi *startup game* - Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Fasilitas Pameran dan Promosi Produk Gim - Kementerian Perdagangan
4. Pengembangan talenta industri gim - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Pengembangan pusat industri gim dan animasi nasional - Kementerian Perindustrian
6. Dukungan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian untuk industri gim - Badan Standardisasi Nasional



Pengembangan Industri Gim

Sasaran dan Indikator

Terwujudnya industri gim yang bedaya saing dan bernilai tambah tinggi

1. Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim mencapai 6,97% PDB
2. Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim mencapai 10,01%
3. Produktivitas tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim Rp 163,912 juta/ orang
4. Inkubasi produk Kreatif subsektor aplikasi, permainan, televisi dan radio sebanyak 130 industri

1. Produk kreatif subsektor aplikasi, permainan, televisi dan radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi
2. Startup digital yang dikembangkan
3. Talenta digital yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
4. Partisipasi pameran luar negeri jasa dan produk kreatif
5. Lembaga/komunitas/asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital

Indikasi Highlight Intervensi

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Kementerian Ketenagakerjaan
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga
12. Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dilakukan secara bertahap di 12 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif:

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Kepulauan Riau
4. Banten
5. Jakarta
6. Jawa Barat
7. Jawa Tengah
8. Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Jawa Timur
10. Bali
11. Kalimantan Timur
12. Sulawesi Selatan

Indikasi Lokasi Prioritas

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Untuk mendukung terwujudnya industri gim nasional yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, pengembangan industri gim nasional akan dilaksanakan melalui implementasi strategi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, meliputi (a) pengembangan riset, (b) pengembangan pendidikan, (c) fasilitas pendanaan dan pembiayaan, (d) penyediaan infrastruktur, (e) pengembangan sistem pemasaran, (f) pemberian insentif, (g) fasilitasi kekayaan intelektual, serta (h) perlindungan hasil kreativitas. Fokus penguatan ekosistem gim nasional dilaksanakan secara bertahap di dua belas provinsi prioritas ekonomi kreatif, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi

Selatan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, diperlukan kolaborasi seluruh pihak terkait, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.

Pengembangan Kewirausahaan

Permasalahan dan tantangan. Negara dengan tingkat kewirausahaan yang tinggi memiliki ekosistem kewirausahaan yang baik dengan didukung infrastruktur dan regulasi yang kuat. Hal ini belum tecermin dalam ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

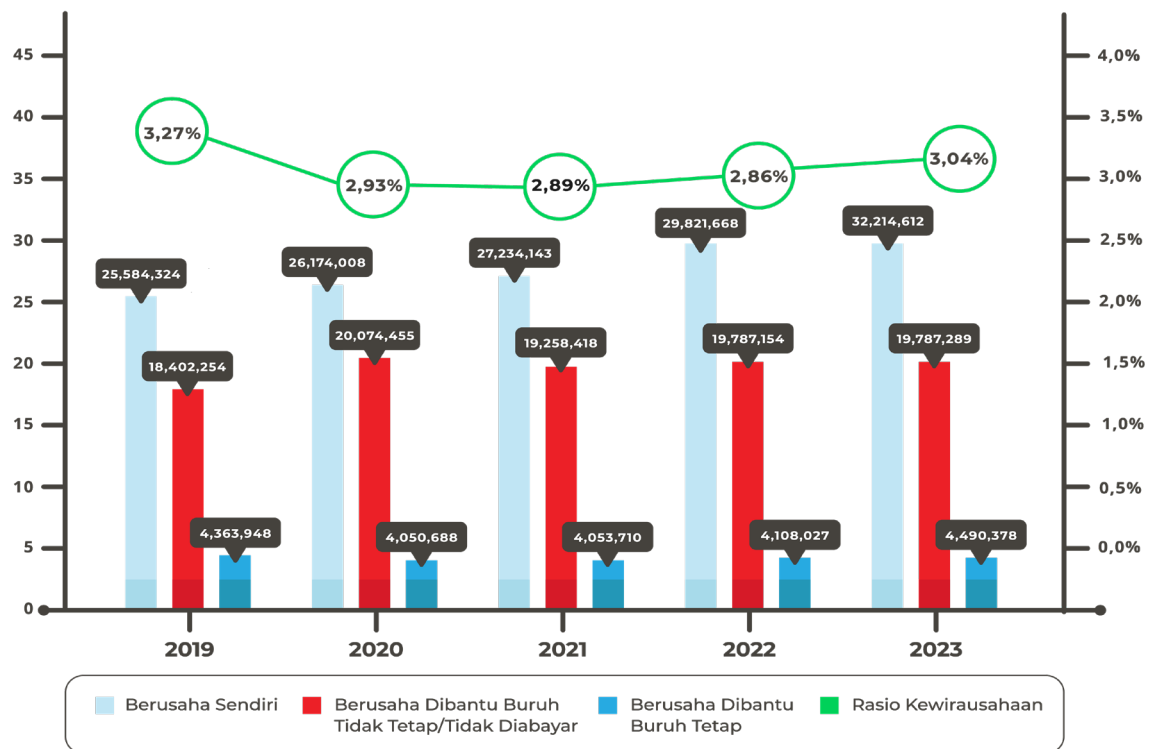
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia di antaranya (a) belum terintegrasinya data, program dan regulasi pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah antar kementerian/lembaga; (b) belum terintegrasinya layanan usaha yang mendukung peningkatan peran wirausaha

dalam rantai nilai global; (c) kapasitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah; (d) ekosistem kewirausahaan yang belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan tecermin pada perbedaan angka rasio kewirausahaan di Indonesia dengan beberapa negara maju. Angka rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 3,04 persen. Angka tersebut masih cukup kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat (16,5 persen), Korea Selatan (13,4 persen), dan Singapura (8,76 persen)². Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, ditetapkan rasio kewirausahaan sebagai salah satu target dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Peningkatan rasio kewirausahaan diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kemampuan penciptaan lapangan kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta

menjawab permasalahan sosial dan lingkungan. Adapun tren capaian rasio kewirausahaan tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan rasio kewirausahaan menurun cukup besar pada tahun 2020 hingga 2023 dan rasio ini belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi. Wirausaha yang banyak tumbuh pada periode 2020–2023 tersebut adalah mereka yang berusaha sendiri (rata-rata tumbuh 7,17 persen per tahun menjadi 32,21 juta pada tahun 2023), berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (tumbuh 3,49 persen per tahun menjadi 4,49 juta), sedangkan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar tumbuh negatif (-0,43 persen menjadi 19,79 juta). Data ini menunjukkan bahwa usaha yang banyak tumbuh adalah usaha mikro yang didirikan hanya untuk bertahan hidup (*necessity-driven*) dan belum banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Rasio Kewirausahaan 2019–2023



Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS (2019–2023)

² Global Entrepreneurship Monitor, 2022



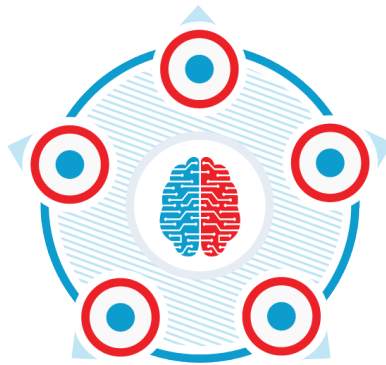
Kerangka Pikir Pengembangan Kewirausahaan

Identifikasi Permasalahan Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan

1. Belum terintegrasinya data, program dan regulasi pengembangan kewirausahaan dan UMKM antar Kementerian/Lembaga
2. Belum terintegrasinya layanan usaha yang mendukung peningkatan peran wirausaha dalam rantai nilai global
3. Kapasitas tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan UMKM
4. Ekosistem kewirausahaan belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan.

Peran Mitra Pembangunan

1. Penyusunan standar pendampingan bagi wirausaha
2. Penyusunan kurikulum wirausaha untuk diterapkan dalam dunia Pendidikan
3. Bermitra dengan pelaku UMKM.



Peran Pemerintah Daerah

1. Koordinasi kegiatan pengembangan kewirausahaan tingkat daerah
2. Peningkatan jumlah SDM pendamping kewirausahaan
3. Pemutakhiran data pelaku usaha
4. Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan Berbasis Data

Peningkatan Upaya Pencegahan

1. Pendampingan, inkubasi, business matching, dan akselerator usaha
2. Perluasan akses pasar, distribusi, serta kemitraan
3. Penyederhanaan birokrasi, regulasi, sinkronisasi program dan ekosistem kewirausahaan
4. Pengoptimalan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dan pemetaan data UMKM
5. Peningkatan peran UMKM dalam rantai nilai global dengan integrasi layanan usaha, business matching, dan akselerator usaha
6. Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan UMKM
7. Meningkatkan ekosistem wirausaha inklusif dan berkelanjutan melalui Inkubasi dan pendampingan.

Dukungan Lintas Sektor (15 K/L)

1. Inkubasi, Ekosistem dan Data usaha - Kementerian Koperasi dan UKM
2. Formalisasi Usaha - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Standardisasi Sertifikasi - Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian
4. Pelatihan dan Pemberdayaan wirausaha - Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Pertanian; dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Regulasi dan Sinkronisasi Program - Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kewirausahaan, perlu membentuk wirausaha yang inovatif, tangguh, mampu menciptakan lapangan kerja, serta diharapkan dapat berdampak menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia, diperlukan (a) penyederhanaan birokrasi, regulasi, serta pengintegrasian data dan program

pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah antar kementerian/ lembaga; (b) peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai nilai global dengan integrasi layanan usaha, *business matching*, dan akselerator usaha; (c) peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta (d) meningkatkan ekosistem wirausaha inklusif dan berkelanjutan melalui inkubasi dan pendampingan.

Pengembangan Kewirausahaan

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap

1. Rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,14%
2. Tercapainya Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh pada angka 19,39%

1. Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM
2. Layanan Terpadu Global *Startup Hub*
3. Wirausaha yang dikuatkan melalui Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan
4. Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis
5. Pengembangan Wirausaha Sosial
6. Startup yang dikembangkan melalui inkubasi
7. Penyusunan regulasi kewirausahaan
8. Tenaga Kerja Mandiri Pemula Reguler
9. Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha
10. SDM yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan

Indikasi *Highlight* Intervensi

Instansi Pelaksana

Utama

1. Kementerian Koperasi dan UKM

Pendukung

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kementerian Sosial

1. Pusat
2. Aceh
3. Sumatera Utara
4. Banten
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Jawa Timur
9. Kalimantan Timur
10. Nusa Tenggara Timur
11. Sulawesi Selatan

Indikasi Lokasi Prioritas

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 3 “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi” sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional, yaitu:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian

Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang tidak lagi dapat mengatasi permasalahan terkait koperasi yang terjadi saat ini. Materi ketentuan di dalamnya akan mengatur pembentukan koperasi yang lebih sederhana, pengawasan koperasi, penjaminan simpanan bagi

anggota koperasi, serta penguatan peraturan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan koperasi di Indonesia.

Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”, antara lain:

- (1) Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas;
- (2) Penguatan tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/ Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).



3.4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Pendidikan Berkualitas yang Merata			
1	Rata-rata nilai PISA		
	Membaca	359 (2022)	396
	Matematika	366 (2022)	404
	Sains	383 (2022)	416
2	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional		
	Literasi Membaca	60,89	62,89
	Numerasi	51,36	54,36
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13	9,33
4	Harapan lama sekolah (tahun)	13,15	13,32
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33,94
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,12	11,12
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Kesehatan untuk Semua			
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13	74,43
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023)	2,12
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50	18,8
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95 (2023)	98
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
14	Indeks Ketimpangan Gender	0,447	0,424
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 (2022)	70,29
16	Indeks Perlindungan Anak	63,83 ^{a)}	65,20
17	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59	64,56
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85	92,15
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94	94
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42	69
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50–5,00
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	54,52	56,3
25	Peringkat pada SEA Games	3 (2022)	3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Sangat sementara, data belum dirilis

Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematic*; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi;



- (2) Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif;
- (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- (4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (c) pengembangan manajemen talenta nasional, serta (d) peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui (a) penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual; (b) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*pedagogical technology content knowledge*); (c) pemantapan sistem asesmen komprehensif; (d) penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik; (e) peningkatan kualitas pendidikan agama; serta (f) pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (3) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dilakukan melalui (a) reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Penguatan Pendidikan Profesi Guru, (b) restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru, (c) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta (d) peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- (4) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dilakukan melalui (a) penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan, (b) peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta (c) penguatan sistem penjaminan mutu.
- (5) Penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematics* dilakukan melalui (a) peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas, (b) penguatan kelembagaan pendidikan tinggi berkualitas dan merata, (c) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen serta tenaga kependidikan, serta (d) peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dilaksanakan melalui (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini, (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, (c) penyaluran bantuan pendidikan, (d) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, (e) revitalisasi pendidikan nonformal, (f) pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya, (g) pembangunan sekolah unggul, serta (h) makan bergizi di sekolah dan pesantren.

- (6) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui (a) penguatan pendidikan menengah vokasi, (b) penguatan pendidikan tinggi vokasi, (c) penguatan pelatihan vokasi, serta (d) penguatan ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.
- (7) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional dilakukan melalui (a) penguatan kapasitas iptek dan inovasi, (b) peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, (c) optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang, serta (d) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.
- (8) Pengembangan manajemen talenta nasional dilakukan melalui (a) pengembangan manajemen talenta nasional seni budaya, (b) pengembangan manajemen talenta nasional riset dan inovasi, (c) pengembangan manajemen talenta nasional olahraga, dan (d) penguatan tata kelola manajemen talenta nasional.
- (9) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan, dan (b) peningkatan budaya kegemaran membaca.
- (10) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dilakukan melalui (a) penurunan kematian ibu dan anak; (b) pencegahan dan penurunan *stunting* serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; serta (c) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (11) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat dilakukan melalui (a) penuntasan tuberkulosis; (b) pengendalian penyakit menular lainnya; (c) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta dan *schistosomiasis*); (d) eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya; (e) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; serta (f) pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga.
- (12) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dilakukan melalui (a) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, (b) pemenuhan dan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta (c) penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.
- (13) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif dilakukan melalui (a) investasi pelayanan kesehatan primer; (b) pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses; (c) produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan; (d) penguatan jaminan kesehatan nasional dan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis; serta (e) penguatan tata kelola, pembiayaan, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.
- (14) Peningkatan ketangguhan keluarga dilaksanakan melalui (a) penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga; serta (c) pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan.
- (15) Peningkatan kualitas perlindungan anak dilaksanakan melalui (a) pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; serta (b) perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.



- (16) Peningkatan kualitas pemuda dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; serta (c) peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.
- (17) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan dilakukan melalui (a) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan; (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (c) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (d) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; serta (e) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan.
- (18) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia dilakukan melalui (a) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta (b) penguatan prinsip dan pendekatan kesetaraan, partisipasi, dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.
- (19) Peningkatan prestasi olahraga dilakukan melalui (a) pengembangan budaya olahraga, (b) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (c) pengembangan tenaga dan organisasi

olahraga berstandar internasional, (d) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas, serta (e) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan *event*/festival/kompetisi olahraga.

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu kesehatan dan pendidikan pada Prioritas Nasional 4, dirumuskan program-program yang menjadi penekanan yaitu (1) memberikan makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita; (2) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus tuberkulosis, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota; serta (3) membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah. Program-program tersebut memiliki daya ungkit tinggi terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4.

Memberikan Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita

Asupan gizi yang cukup merupakan aspek fundamental bagi pembentukan sumber daya manusia. Namun demikian, keterbatasan akses kepada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta pemahaman masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan gizi. Program hasil terbaik cepat memberikan makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia.



Lebih dari 139 negara di dunia telah menyelenggarakan program pemberian makan kepada anak sekolah dengan sasaran dan frekuensi pemberian yang beragam. Di Brazil, pemberian makanan gratis diberikan untuk peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah selama lima kali seminggu. Di Finlandia, program dilakukan untuk seluruh peserta didik dari jenjang pra sekolah sampai pendidikan tinggi. Sementara di Skotlandia, pemberian makanan gratis diberikan kepada peserta didik miskin yang berlokasi di wilayah rawan pangan. Di Indonesia, program serupa pernah dilaksanakan seperti Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, Program Gizi Anak Sekolah (Progas), serta Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (Genius) yang diselenggarakan di 50 kabupaten/kota rawan pangan.

Selain itu, Indonesia juga telah menyelenggarakan program pemberian makanan tambahan untuk ibu dan balita sesuai rekomendasi dari World Health Organization dan United Nations International Children's Emergency Fund. Fokus sasaran intervensi ini adalah ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, ibu hamil risiko kekurangan energi kronis, balita berat badan tidak naik, balita berat badan kurang, dan balita gizi kurang. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal diberikan di posyandu, puskesmas, atau pada saat kunjungan rumah.

Pengalaman dari berbagai negara dan juga praktik yang sudah berjalan di Indonesia mendorong pemerintah untuk memperkuat program dukungan gizi ini menjadi Program Makan Bergizi Gratis yang fokus pada masa pertumbuhan anak sejak ibu hamil hingga usia remaja.

Permasalahan dan tantangan. Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah gizi pada anak seperti *underweight*, *wasting*, *stunting*, dan anemia. Data hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa sebesar 21,5 persen balita di Indonesia mengalami *stunting*, menurun tidak signifikan dari tahun 2022 (21,6 persen)³. Prevalensi *underweight* juga sedikit menurun dari 17,7 persen (2022) menjadi 15,9 persen (2023) sedangkan *wasting* justru mengalami peningkatan dari 7,7 persen (2022) menjadi 8,5 persen (2023). Selain itu, anak usia sekolah juga masih mengalami masalah gizi kurus dan sangat kurus dengan prevalensi yang cenderung meningkat dari tahun 2018⁴ ke tahun 2023⁵, yaitu usia 5-12 tahun sebesar 11 persen, usia 13-15 tahun sebesar 7,6 persen, dan usia 16-18 tahun sebesar 8,3 persen pada tahun 2023.

Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan bahwa sebesar 16,9 persen ibu hamil dengan kurang energi kronis, meningkat dibandingkan tahun 2022 maupun Riskesdas 2018 (10,6 persen). Selain kurang energi kronis, ibu hamil di Indonesia juga mengalami masalah

anemia. Satu dari 3–4 ibu hamil menderita anemia pada tahun 2023. Meski mengalami penurunan dari tahun 2018, angka ini masih tinggi dan menyebabkan risiko perdarahan pada saat proses bersalin.

Kualitas asupan gizi menjadi faktor utama masalah gizi pada ibu hamil, balita, maupun anak sekolah. Pemenuhan gizi sesuai dengan kebutuhan harian masih menjadi masalah pada anak Indonesia. Konsumsi buah dan sayur penduduk masih rendah⁶. Sebesar 52,5 persen baduta mengalami tingkat cakupan energi kurang dari Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan. Selain itu, hanya 55,7 persen balita mengonsumsi makanan yang beragam, meningkat sebesar 5,2 persen pada tahun 2023^{7,8}. Selain itu, angka kecukupan protein pada ibu hamil dan balita juga masih rendah. Sekitar separuh ibu hamil mengalami kekurangan asupan protein (mencapai <80 persen dari angka kecukupan protein) sedangkan 23,6 persen balita mengalami kekurangan angka kecukupan protein (<80 persen dari angka kecukupan protein) yang dianjurkan. Oleh karena itu,

³ Kementerian Kesehatan RI. 2023. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

⁴ Kementerian Kesehatan RI. 2019. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018

⁵ Kementerian Kesehatan RI. 2024. Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

⁶ Kementerian Kesehatan RI. 2014. Laporan Hasil Survei Diet Total 2014

⁷ Kementerian Kesehatan RI. 2021. Laporan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021

⁸ Kementerian Kesehatan RI. 2024. Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023



pemenuhan makanan kaya protein sangat dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal.

Tujuan program makan bergizi gratis. Program Makan Bergizi Gratis ditujukan sebagai investasi untuk 1) menanamkan kebiasaan pola makan sehat dan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; 2) meningkatkan prestasi, partisipasi dan kehadiran anak sekolah, serta menurunkan angka putus sekolah; 3) meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dan mikro; serta 4) menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin. Makan Bergizi Gratis akan diberikan kepada anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal/ sederajat) sampai dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program ini diselenggarakan dengan menerapkan enam prinsip utama yaitu 1) tepat sasaran; 2) memberdayakan masyarakat, usaha mikro dan kecil, dan badan usaha milik

desa dalam penyediaan bahan pangan; 3) mengutamakan pemanfaatan bahan pangan lokal; 4) menyesuaikan menu dengan preferensi lokal; 5) meningkatkan keragaman pangan; dan 6) mengutamakan keamanan pangan.

Standar gizi, komposisi makanan, dan pedoman menu. Makan bergizi gratis mengandung 20-25 persen (dalam bentuk sarapan) dan 30-35 persen (dalam bentuk makan siang) dari angka kecukupan gizi harian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut, angka kecukupan gizi ditetapkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Waktu pemberian makan bergizi menyesuaikan jadwal kegiatan belajar mengajar, terutama untuk anak pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/ bustanul athfal/sederajat) dan sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/sederajat. Sementara khusus untuk anak sekolah, santri, dan balita dengan status gizi normal belum terdapat penetapan angka kecukupan gizi spesifik. Oleh karena itu, penyesuaian perhitungan angka kecukupan gizi pada usia anak sekolah dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan.

Kebutuhan Kalori Makanan Lengkap dan Makanan Tambahan

Kategori Penerima Manfaat	Kebutuhan Kalori 1x Makanan Lengkap
Balita (1–4 tahun)	275-344
Anak Sekolah PAUD (TK/RA/BA/sederajat)	
Usia 4–6 tahun	280-350
Anak Sekolah SD/MI/Sederajat	
Usia 7–9 tahun	330-412
Usia 10–12 tahun	585±22
Anak Sekolah SMP/MTS/Sederajat	
Usia 13–15 tahun	668±74
Anak Sekolah SMA/SMK/MA/sederajat	
Usia 16–18 tahun	713±116
Ibu hamil gizi normal	728-850
Ibu menyusui gizi normal	760-887

Catatan: Kebutuhan kalori berdasarkan hasil perhitungan dari Tim Pakar/Pokja Perbaikan Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan

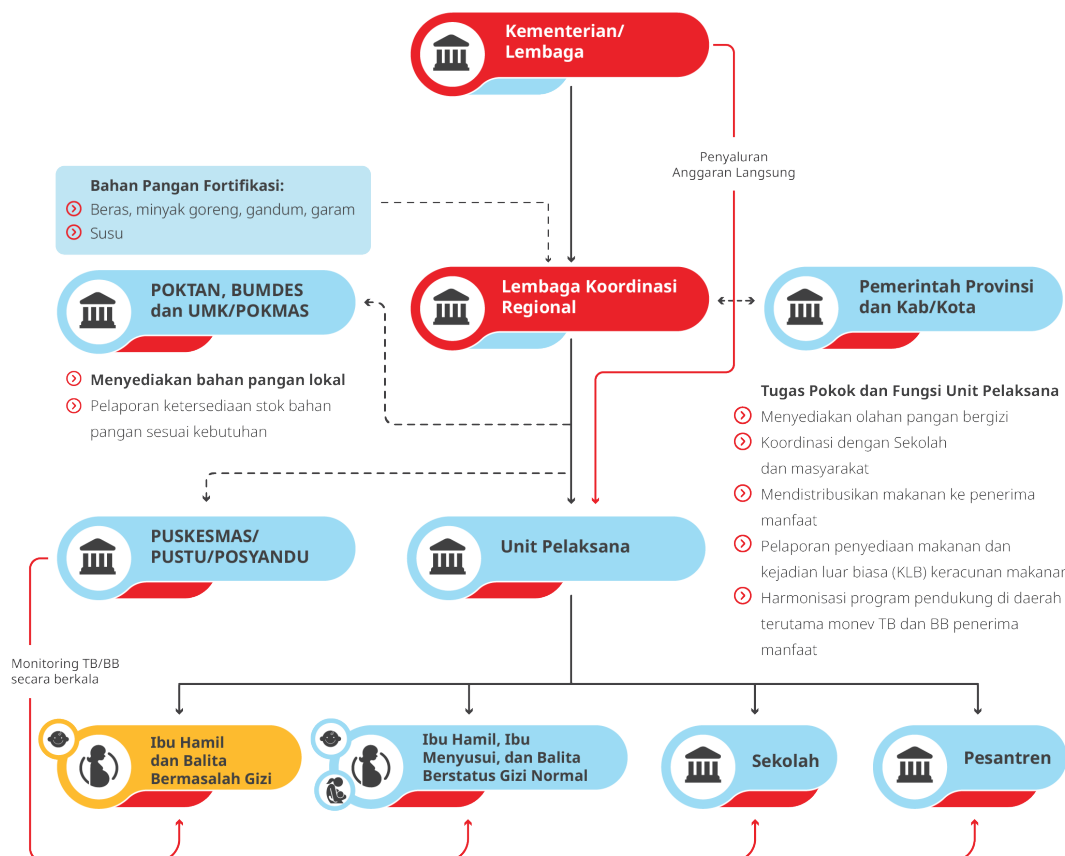
Komposisi makanan yang disajikan merujuk pada edukasi pola makan Isi Piringku yang juga telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 serta Pedoman Gizi Seimbang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui tahun 2021. Isi piringku mengatur pola makan dengan pemenuhan gizi seimbang yang terdiri dari setengah bagian berisi karbohidrat dan lauk serta setengah bagian lainnya berisi sayur dan buah. Pemberian makanan kaya protein hewani dan nabati sangat dibutuhkan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Air minum juga harus dikonsumsi selama makan dan susu menjadi pelengkap. Jika susu sapi terbatas, kebutuhan protein dapat ditukar dengan bahan pangan kaya protein hewani.

Pengembangan menu lokal didorong dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan makanan. Penggunaan sumber pangan lokal diutamakan dengan memperhatikan alternatif bahan peneruk

dan preferensi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembang pedoman bahan peneruk makanan dan variasi menu tidak boleh luput dalam persiapan implementasi program.

Mekanisme pelaksanaan. Program makan bergizi gratis akan diselenggarakan oleh institusi yang ditugaskan di tingkat pusat dan daerah. Institusi yang ditugaskan juga mengkoordinasikan unit-unit pelaksana dan organisasi perangkat daerah untuk memastikan penyediaan makanan sesuai dengan standar/kecukupan gizi dan tepat sasaran. Mekanisme pelaksanaan program tercermin pada gambar di bawah ini. Penyaluran anggaran disalurkan langsung ke satuan unit pelaksana. Bahan pangan disediakan oleh petani lokal, Usaha Mikro dan Kecil, atau Badan Usaha Milik Desa dan didistribusikan kepada unit pelaksana yang memiliki kapasitas mengolah makanan. Jika kapasitas masyarakat memadai, penyelenggaraan/pengadaan makan bergizi gratis juga dapat diselenggarakan oleh Usaha Mikro dan Kecil.

Modalitas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis





Sasaran 2025. Program akan diimplementasikan di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran diperkirakan sekitar 15,42 juta target penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Makan bergizi gratis akan diberikan dalam bentuk 1) makanan lengkap siap saji untuk anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dan santri; 2) makanan lengkap siap saji untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan status gizi normal; serta 3) makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, balita gizi kurang, balita dengan berat badan kurang, dan balita tidak mengalami peningkatan berat badan.

Program Pendukung. Implementasi program makan siang gratis dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan program pendukung yaitu terselenggaranya edukasi gizi dan pola makan sehat yang terstruktur, pemberian suplemen seperti tablet tambah darah, fortifikasi, terselenggaranya usaha kesehatan sekolah termasuk skrining anak sekolah, pengukuran antropometri secara rutin, penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih, dan tempat pengolahan makanan yang layak di lingkungan sekolah dan pesantren, serta penjaminan kebersihan dan keamanan pangan dari kontaminasi zat kimia dan mikroorganisme. Program manajemen limbah juga perlu dikembangkan agar limbah sisa makanan dan non makanan yang muncul tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan baru di masyarakat.

Memberi Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya status gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

- **Sasaran:**
15,42 juta jiwa yang terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten/kota
- **Indikator:**
Penurunan prevalensi stunting (TB/U) pada balita menjadi 18,80%

1. Pemberian makan bergizi sehat menu lengkap untuk anak sekolah dan santri
2. Pemberian makan bergizi sehat menu lengkap untuk santri
3. Pemberian bantuan pangan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan status gizi normal
4. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita bermasalah gizi
5. Kegiatan pendukung seperti edukasi gizi dan pengukuran antropometri, suplementasi mikronutrien dan fortifikasi, UKS, air bersih dan sanitasi, keamanan pangan, manajemen limbah, pemanfaatan komoditas lokal, serta pemberdayaan masyarakat, UMK lokal, dan BUMDes

Indikasi Highlight Intervensi

Instansi Pelaksana

Institusi yang ditunjuk oleh Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengatur koordinasi lintas K/L sampai di tingkat unit pelaksana bersama Pemerintah Daerah.

Tugas pokok dan fungsi institusi tersebut adalah:

1. Koordinasi pelaksanaan program makan siang secara nasional;
2. Penetapan target sasaran dan penetapan satuan biaya;
3. Perencanaan, anggaran, pelaksanaan, serta move;
4. Pembinaan dan pengawasan di daerah;
5. Koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah;
6. Penggalan sumber pendanaan inovatif;
7. Pemenuhan SDM pelaksana program.

Kementerian Kesehatan, untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi

Program dilaksanakan di 514 kabupaten/kota.

Pemilihan sekolah, pesantren, dan kecamatan akan mempertimbangkan akses untuk distribusi

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

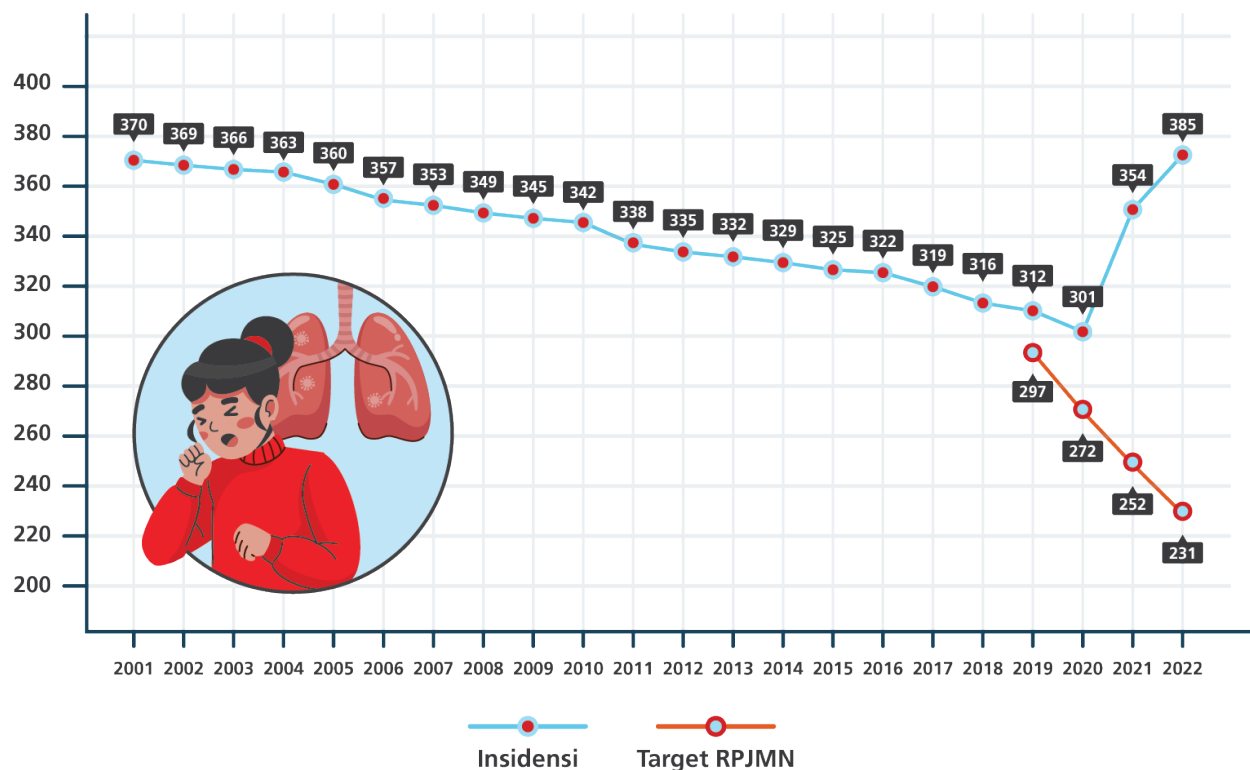
(a) Menuntaskan Kasus TBC

Permasalahan dan tantangan. Tuberkulosis menjadi salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit, termasuk lemahnya dukungan sistem kesehatan yang memadai. Jumlah kasus baru atau insidensi tuberkulosis masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-2 terbesar di dunia, setelah India. Insidensi tuberkulosis meningkat dari 370 kasus

per 100.000 penduduk di tahun 2000 menjadi 385 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2022. Tren capaian kinerja insidensi tuberkulosis tahun 2005–2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Meskipun telah ada upaya signifikan untuk mengatasi penyakit tuberkulosis, namun masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai eliminasi tuberkulosis. Selain dampak pandemi, tingginya kasus tuberkulosis juga disebabkan oleh rendahnya cakupan penemuan kasus dan pelaporan kasus, rendahnya cakupan pemberian terapi pencegahan, lamanya jangka waktu pengobatan, meningkatnya angka kasus tuberkulosis resisten obat, dan kurangnya pengetahuan penularan dan pengobatan tuberkulosis.

Beban Kasus Tuberkulosis 2000–2023



Sumber: WHO Global TB Report 2023



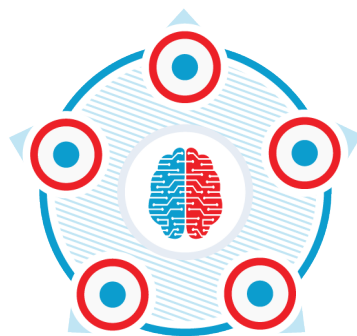
Kerangka Pikir Penuntasan Kasus Tuberkulosis

Intensifikasi Penemuan Kasus dan Pengobatan TBC Secara Tuntas

1. Deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular
2. Skrining dan Deteksi Dini Pada Kelompok Berisiko untuk Pengendalian TBC dalam Pelaksanaan SPM TBC
3. Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB
4. Pelatihan nakes dalam testing (*e-learning & e-coaching*) (New)
5. Layanan survei faktor risiko penyakit TB
6. SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penemuan kasus TB
7. Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan Pengendalian TBC
8. Percepatan uji coba *short regimen* TB (New)

Peran Mitra Pembangunan

1. Pendekatan berbasis komunitas
2. Penemuan kasus dan investigasi kontak
3. Pendampingan pengobatan
4. Pengawasan penganggaran di daerah (GF)



Peran Pemerintah Daerah

1. Membentuk tim percepatan penuntasan TBC di daerah
2. Edukasi dan partisipasi masyarakat
3. Mencantumkan indikator TBC dalam RPJMD dan Renstra Daerah
4. Menyediakan pendanaan dan SDM
5. Melakukan penemuan kasus, pengobatan, dan pelaporan kasus TBC
6. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi pasien TBC
7. Menetapkan kebijakan yang mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai tuntas

Peningkatan Upaya Pencegahan TBC

1. Peningkatan Kapasitas SDM TB
2. Imunisasi TB
3. Penambahan *content tracing* dalam sistem informasi kasus TB (New)
4. Perluasan pendataan kasus TB di faskes swasta (Revisi Permenkes No.67/2016 tentang Penanggulangan TB: menambahkan insentif untuk swasta dalam melaporkan kasus TB yang ditemukan dan dirawat) (New)
5. Perluasan cakupan TPT (New)

Dukungan Lintas Sektor (17 KL)

1. Pembangunan dan perbaikan rumah sehat (Bantuan stimulan perumahan swadaya) - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
2. Skrining TBC pada pokorja - Kementerian Ketenagakerjaan
3. Pengembangan vaksin TB - Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Dana desa untuk eliminasi TB - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Pembinaan kader - Kementerian Dalam Negeri
6. Pelayanan TB di lapas - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Skrining TB pada siswa/i di sekolah/madrasah - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Skrining TB pada siswa/i di sekolah/madrasah - Kementerian Agama
9. Kampanye pencegahan dan pengobatan TBC Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Bantuan sosial pasien TBC - Kementerian Sosial

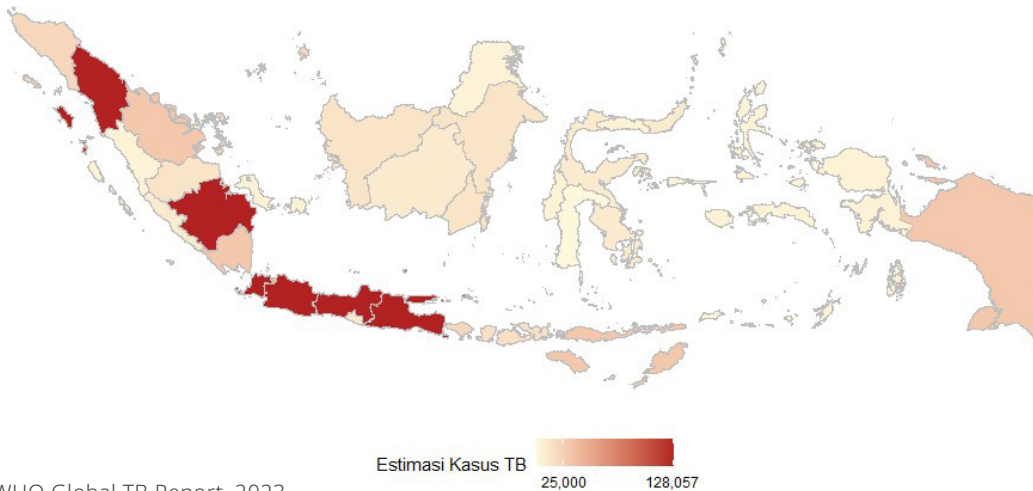
Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan insidensi tuberkulosis di Indonesia, diperlukan (i) peningkatan penemuan kasus tuberkulosis melalui perluasan skrining aktif di komunitas berisiko tinggi, peningkatan kapasitas deteksi dini, investigasi kontak dan integrasi layanan kesehatan tuberkulosis dengan penyakit lain; (ii) penguatan pengobatan tuberkulosis melalui pendampingan kepatuhan pengobatan, penggunaan regimen pengobatan yang efektif, pengembangan obat baru, dan pengembangan manajemen program, salah satunya *Directly Observed Treatment, Short Course*; serta (iii) peningkatan upaya pencegahan dan edukasi melalui perluasan vaksinasi, peningkatan cakupan terapi pencegahan tuberkulosis,

optimalisasi peta jalan riset tuberkulosis, dan upaya lintas sektor, seperti pemberian nutrisi tambahan bagi anak dan pemukiman sehat.

Intervensi masing-masing upaya dapat dilihat pada gambar di atas. Kerja sama antarsektor dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk memutus mata rantai penularan dan menuju eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis mengatur tentang tugas dan tanggung jawab kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan tuberkulosis, dimana salah satunya mengamanatkan pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat pusat dan daerah.

Peta Estimasi Kasus Tuberkulosis Nasional Tahun 2022



Sumber: WHO Global TB Report, 2023

Program penuntasan tuberkulosis dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi. Namun, terdapat 359 kabupaten/kota prioritas (70 persen dari total 514 kabupaten/kota) yang akan menerima intervensi komprehensif, sedangkan 155 kabupaten/kota lainnya akan menerima intervensi esensial. Kabupaten/kota yang menerima intervensi komprehensif termasuk 193 kabupaten/kota di 8 provinsi

prioritas, yaitu daerah dengan beban kasus tuberkulosis, *human immunodeficiency virus*, dan diabetes melitus tinggi, serta merupakan daerah prioritas program tuberkulosis resisten obat dan *district-based public-private mix*. Sedangkan kabupaten/kota yang menerima intervensi esensial merupakan kabupaten/kota dengan estimasi beban kasus tuberkulosis <1.000 dan prevalensi diabetes melitus rendah.

Menuntaskan Kasus TBC

Sasaran dan Indikator

Menurunnya kasus tuberkulosis di Indonesia

1. Insidensi Tuberkulosis sebanyak 272 orang per 100.000 Penduduk
2. Cakupan penemuan kasus TBC mencapai 80 persen
3. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (*TB Success Rate*) mencapai 90,31 persen
4. Cakupan penemuan kasus TBC secara aktif (*active case findings/ACF*)

1. Layanan Penemuan Aktif TBC;
2. Kasus TBC yang mendapatkan pengobatan;
3. Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC;
4. Bahan Pencegahan dan Pengendalian;
5. Desain Genome Terkait Penyakit TBC;
6. Penyusunan Purwarupa Vaksin untuk Pencegahan dan Terapi Penyakit TBC;
7. Koordinasi program pencegahan dan pengendalian TBC;
8. Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB;
9. Layanan survei faktor risiko penyakit TB;
10. Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Layanan Pengendalian TBC.

Indikasi *Highlight* Intervensi

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Sekretariat Kabinet
4. Kemenko PMK
5. Kementerian Agama
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Kementerian Ketenagakerjaan
8. Kementerian Hukum dan HAM
9. Kementerian BUMN
10. Kementerian Sosial
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika
12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
14. Kementerian PPN/Bappenas
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
16. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

1. Program penuntasan Tuberkulosis dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di 38 Provinsi
2. Namun terdapat 359 Kabupaten/Kota prioritas (70% dari 514 Kabupaten) yang akan menerima intervensi komprehensif
3. Sedangkan 155 Kabupaten/Kota lainnya akan menerima intervensi esensial

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

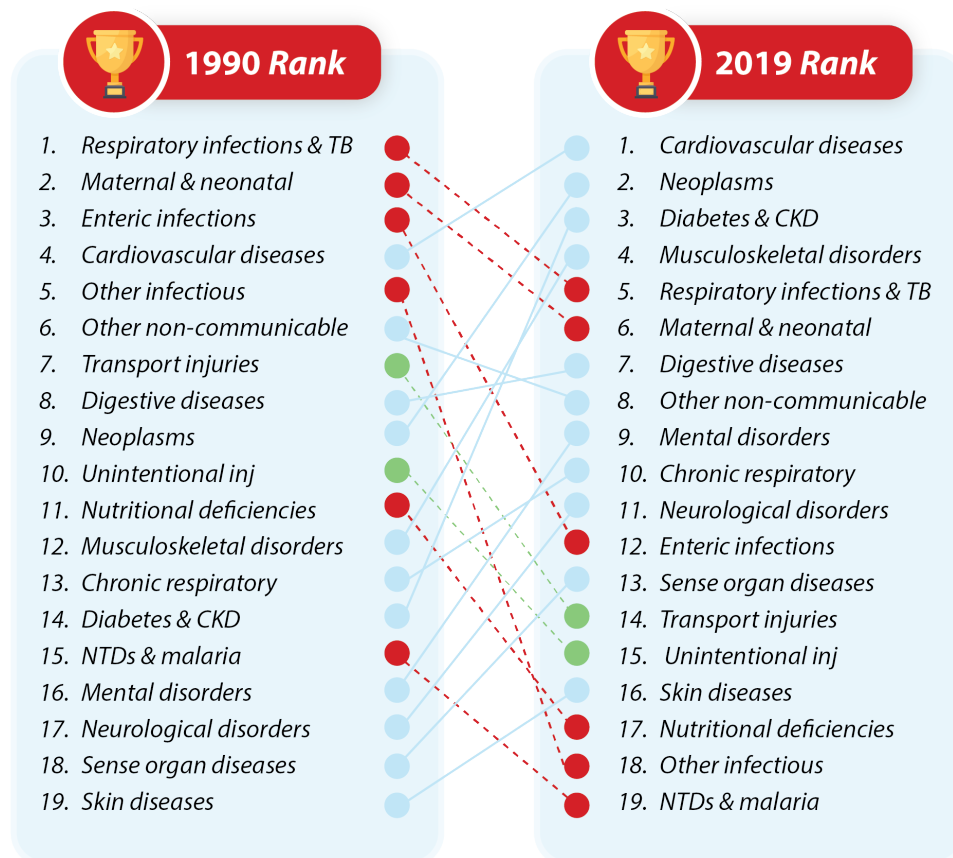


(b) Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Permasalahan dan tantangan. Secara global telah terjadi transisi epidemiologi, yaitu perubahan kelompok penyakit penyebab mortalitas dan morbiditas yang mendominasi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Transisi tersebut didorong peningkatan kondisi sosial ekonomi, pengetahuan, dan teknologi baru kesehatan. Perkembangan ini disertai peningkatan populasi penduduk lanjut usia dan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan beban penyakit, baik menular maupun tidak menular menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan juga meningkat.

Penyakit seperti *stroke*, jantung, diabetes, dan kanker memerlukan biaya perawatan yang mahal. Tingkat pertumbuhan total pengeluaran kesehatan atau *total health expenditure* dalam 20 tahun terakhir sudah melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto. Selain itu, *total health expenditure* Indonesia meningkat 16 kali lipat dari Rp. 28 Triliun (2000) menjadi Rp. 459 Triliun (2019). Jika pola tersebut tidak dikendalikan, maka diperkirakan proporsi pembiayaan kesehatan oleh pemerintah pada tahun 2045 akan mencapai 19 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tanpa modifikasi pada postur pembiayaan atau intervensi dalam upaya kesehatan, maka pembiayaan kesehatan ke depan akan tidak berkelanjutan.

Pergeseran Beban Penyakit di Indonesia 1990–2019



Sumber: IHME Global Burden of Disease Compare

Tingginya beban penyakit dan pembiayaan kesehatan dapat dicegah melalui upaya promotif dan preventif kesehatan. Salah satu bagian dari upaya preventif adalah dengan deteksi dini penyakit. Semakin awal suatu kondisi penyakit diketahui, maka semakin minimal biaya yang diperlukan, serta semakin baik prognosis untuk sembuh total. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua golongan masyarakat, khususnya masyarakat rentan perlu dijamin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Penduduk yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Diperlukan strategi tepat untuk mengurangi risiko beban penyakit dan mortalitas. Pemeriksaan kesehatan termasuk deteksi dini menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan morbiditas yang dapat menyebabkan peningkatan beban penyakit dan mortalitas. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses bagi semua golongan masyarakat, khususnya masyarakat rentan perlu dijamin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang tentang sistem jaminan sosial nasional telah menjamin hak sosial masyarakat, salah satunya melalui jaminan kesehatan nasional. Dalam Undang-Undang tersebut yang dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah seluruh peserta jaminan kesehatan nasional termasuk penerima bantuan iuran. Kriteria penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional pada tahun 2020–2024 adalah penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah atau sekitar 96,8 juta jiwa. Pada periode 2025–2029 kriteria penerima bantuan iuran perlu dilakukan pemutakhiran dengan berbasis kerentanan untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Pemeriksaan kesehatan gratis dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan finansial bagi penduduk rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan melalui skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional serta mendorong pemanfaatannya untuk deteksi dini risiko penyakit katastropik seperti diabetes mellitus, jantung koroner, dan stroke. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis selain memerlukan dukungan pembiayaan, juga memerlukan sumber daya manusia, serta sarana, prasarana, dan alat.

Saat ini, kondisi pemenuhan, baik pada aspek kebutuhan sumber daya manusia maupun sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama masih belum mencukupi. Dari sejumlah 10.508 puskesmas, terdapat 43,8 persen belum memenuhi standar ketenagaan kesehatan dan 50 persen belum dapat memenuhi 70 persen kelengkapan sarana, prasarana, dan alat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan dan strategi untuk memenuhi standar.

Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dapat dipenuhi melalui skema penugasan khusus dengan lokasi prioritas pada puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta pada daerah tidak diminati. Penugasan khusus bersifat temporer (dua tahun) dan peran pemerintah daerah untuk memenuhi sumber daya manusia Kesehatan di puskesmas tetap menjadi intervensi utama. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat puskesmas dapat dipenuhi melalui skema dana alokasi khusus dan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Pinjaman Luar Negeri Kementerian Kesehatan.



Dukungan program, tata kelola, serta kerja sama yang kuat antar kementerian/lembaga diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Instansi yang menjadi pengampu kepentingan (*stakeholder*) pada pemeriksaan kesehatan gratis adalah Kementerian Sosial sebagai pengampu data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selaku pelaksana program, menjamin pengawalan mutu pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, dan upaya peningkatan peserta jaminan kesehatan nasional aktif; Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berperan dalam koordinasi terkait anggaran, perencanaan program, dan pengawasan kinerja program jaminan kesehatan nasional; Kementerian Kesehatan menetapkan regulasi terkait standar pelayanan, pembayaran iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta evaluasi capaian indikator dalam pelayanan kesehatan; serta pemerintah daerah berperan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan puskesmas dan upaya peningkatan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional.

Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sasaran dan Indikator

Menyediakan proteksi finansial bagi penduduk miskin dan tidak mampu dalam mengakses pelayanan Kesehatan termasuk pemeriksaan Kesehatan

1. Jumlah kepesertaan segmen PBI mencapai 96,8 juta jiwa
2. Jumlah penduduk yang melakukan skrining kesehatan 52,2 juta jiwa

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Sosial
3. BPJS Kesehatan

1. Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN sebanyak 96,8 juta orang
2. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan memenuhi standar di puskesmas dan RS
3. Pemenuhan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas

38 Provinsi

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Kelengkapan Alat Kesehatan yang Belum Memenuhi Standar

Aspek Standar	Jumlah RS Kab/Kota	Persentase (%)
Belum memenuhi standar sarana (gedung dan bangunan) minimal 70%	163	18
Belum memenuhi standar prasarana (air bersih, limbah, listrik, ambulans, dll) minimal 70%	378	42
Belum memenuhi standar alat kesehatan minimal 70%	791	88

Sumber: ASPAK (Kementerian Kesehatan, Maret 2024)

(c) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Permasalahan dan tantangan. Ketersediaan layanan kesehatan di rumah sakit digambarkan melalui rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit Indonesia saat ini sudah mencapai 1,4 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk sehingga sudah melebihi rasio minimal rekomendasi *World Health Organization* yaitu satu tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk. Meskipun begitu, rasio tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio tempat tidur rumah sakit di negara lain di Asia. Berdasarkan data Bank Dunia, Jepang mencapai rasio hingga 12,98 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk (2018), Singapura mencapai 2,49 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk (2017), dan Malaysia mencapai 1,88 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk (2017).

Kondisi rasio ini juga masih menunjukkan adanya kesenjangan apabila ditelaah hingga ke tingkat daerah. Di tingkat provinsi, hanya Provinsi Papua Pegunungan yang belum memenuhi rasio minimal yaitu sebesar 0,47/1000 penduduk. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, masih terdapat 237 kabupaten/kota yang memiliki rasio tempat tidur rumah sakit kurang dari 1 per 1000 penduduk seperti Kabupaten Bireuen, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nduga, dan lainnya.

Selain aspek ketersediaan, tantangan pengembangan rumah sakit di Indonesia juga perlu ditinjau dari kualitas dan kapasitas rumah sakit yang dapat dilihat dari kelengkapan ketersediaan

sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta tenaga kesehatan yang ditunjang dengan tata kelola pelayanan yang diukur melalui skema akreditasi pelayanan kesehatan. Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit disebut memenuhi standar minimal apabila terpenuhi data minimal 70 persen kondisi baik yang diukur dalam laporan Kementerian Kesehatan. Hingga saat ini, masih 13 persen rumah sakit yang baru memenuhi kelengkapan sarana, prasarana, alat kesehatan dengan standar minimal tersebut terutama pada kelengkapan alat kesehatan yang belum memenuhi standar sejumlah 791 rumah sakit (detail pada tabel di atas).

Dari aspek tenaga kesehatan, ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis masih menjadi tantangan. Terdapat 244 rumah sakit umum daerah yang belum memiliki 4 jenis dokter spesialis dasar (*obgyn*, anak, penyakit dalam, dan bedah) dan 3 jenis spesialis lainnya (anestesi, patologi klinik, dan radiologi) sebagai kondisi minimal. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat kekurangan 826 dokter spesialis pada 10 jenis spesialis di seluruh rumah sakit umum daerah di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya waktu produksi dokter spesialis yang tergolong lama dengan *range* estimasi pemenuhan hingga mencapai 13 dan 27 tahun.

Kualitas tata kelola rumah sakit dapat dilihat dari capaian akreditasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas rumah sakit, dengan kriteria yang dinilai yaitu manajemen rumah sakit, pelayanan berfokus pasien, sasaran keselamatan pasien, dan pelayanan program



prioritas nasional. Secara nasional, 78 persen rumah sakit sudah mencapai status akreditasi tertinggi yaitu paripurna. Mayoritas rumah sakit yang belum memiliki capaian akreditasi paripurna merupakan rumah sakit yang berada di wilayah perifer. Selain akreditasi, tipe rumah sakit juga dapat menggambarkan kapasitas dan kemampuan layanan rumah sakit dengan tipe terendah rumah sakit yaitu tipe D. Saat ini, masih terdapat 67 kabupaten/kota yang sudah

memiliki rumah sakit umum daerah yaitu tipe D atau D Pratama.

Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan sistem layanan unggulan rumah sakit untuk isu kanker, jantung, *stroke*, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak dengan sasaran 514 kabupaten/kota. Rencana tersebut didasarkan pada fakta adanya ketimpangan layanan yang dijelaskan dalam Tabel berikut.

Kapasitas Sistem Kesehatan berdasarkan Layanan

Layanan	Kapasitas Sistem Kesehatan
Jantung	- Baru 153 RS (134 kab/kota) yang mampu melayani kateterisasi jantung (mampu <i>cathlab</i>) - Baru 21 Provinsi yang mampu layanan bedah pintas arteri - Rata-rata waktu tunggu layanan bedah jantung anak > 6 bulan di setiap RS
Kanker	- Baru 196 RS (169 kab/kota) yang mampu layani Mammografi (<i>Rontgen Payudara</i>) 18 provinsi yang mampu layanan radioterapi (<i>Linac</i>) - Baru 2 provinsi yang mampu layanan PEC CT
Ginjal	- Terdapat 93 RS (29 provinsi) yang mampu layanan nefropati obstruksi (batu) - Baru 7 RS di 7 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali yang mampu transplantasi ginjal - Baru 229 RS (201 kab/kota) dengan RS mampu pelayanan hemodialisis

Sumber: Kementerian Kesehatan, Maret 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Berdasarkan kondisi di atas, rencana program pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di kabupaten/kota agar dapat memberikan layanan yang berkualitas yang digambarkan berdasarkan kriteria berikut:

- Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 70 persen;
- Mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, *stroke*, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak;
- Tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan;
- Telah mencapai standar akreditasi paripurna.

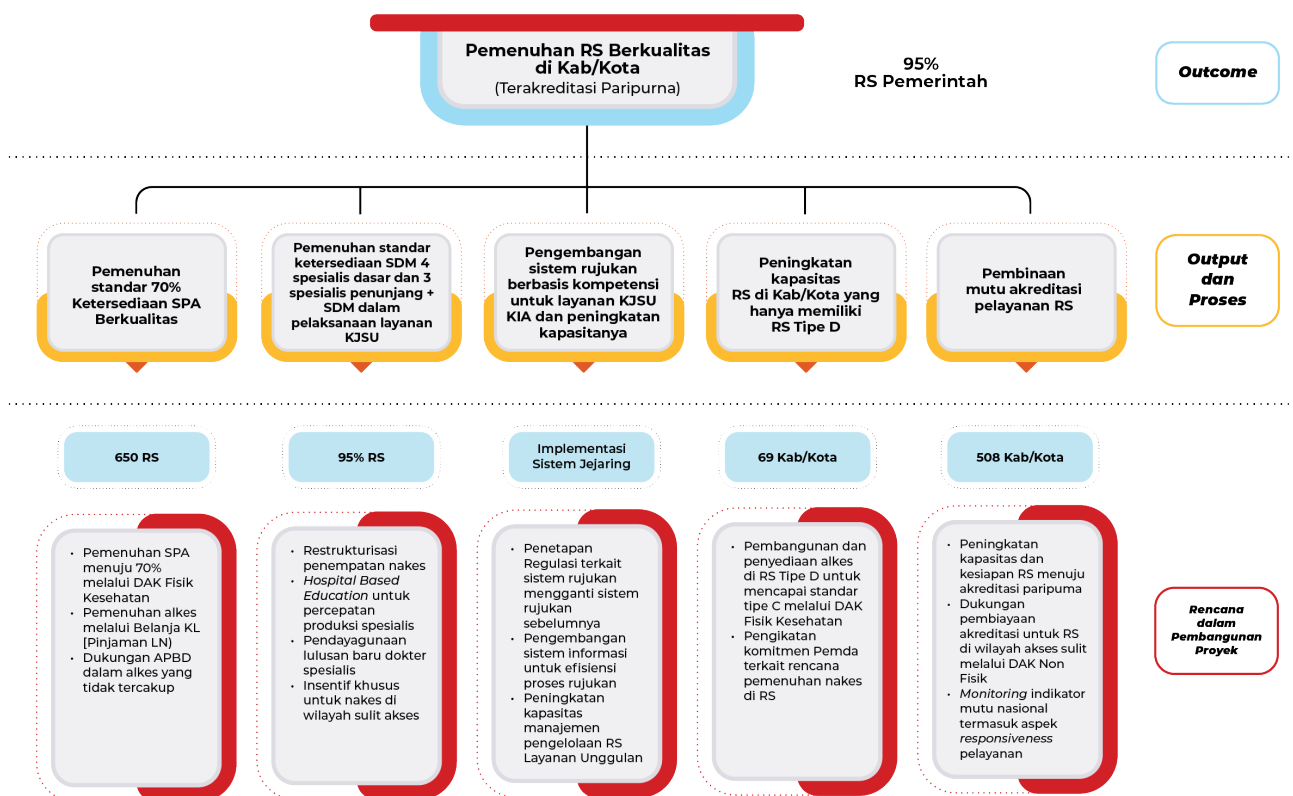
Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diturunkan ke dalam kerangka pikir dengan hasil akhir yang akan dituju (*outcome*) yaitu pemenuhan rumah

sakit berkualitas di kabupaten/kota dengan capaian yang diharapkan sebanyak 90 persen rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna dalam periode lima tahun ke depan seperti pada bagan kerangka pikir berikut.

Bagan di bawah menunjukkan bahwa langkah penyelesaian masalah terbagi menjadi lima aktivitas keluaran, yaitu:

- Pemenuhan standar 70 persen sarana, prasarana, dan alat kesehatan
- Pemenuhan ketersediaan tenaga spesialis
- Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, *stroke*, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak minimal satu rumah sakit umum daerah di tiap kabupaten/kota
- Peningkatan tipe rumah sakit di kabupaten/kota yang hanya memiliki rumah sakit umum daerah tipe D
- Pembinaan mutu rumah sakit untuk mencapai akreditasi paripurna

Kerangka Pikir Pemenuhan Rumah Sakit Berkualitas di Kabupaten/Kota





Pentahapan pelaksanaan langkah-langkah di atas dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan daerah terutama dari sisi sumber daya manusia serta kondisi epidemiologi yang dapat mencerminkan *demand* pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, dengan gambaran pentahapan sebagai berikut:

- (i) Pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan 70 persen di rumah sakit
- (ii) Saat ini, terdapat 650 rumah sakit belum memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan, sehingga diperlukan intervensi melalui dukungan dana alokasi khusus fisik. Intervensi awal diprioritaskan untuk daerah dengan kriteria sulit akses dan rasio tempat tidur kurang dari 1 per 1000 penduduk.
- (iii) Pemerataan layanan rujukan (optimalisasi kapasitas) rumah sakit kanker, jantung, *stroke*, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak
- (iv) Selain berdasarkan kesiapan rumah sakit, pentahapan pada intervensi awal didasarkan dari jumlah populasi penduduk dan kondisi epidemiologis. Pentahapan direncanakan menjadi dua tahap yaitu tahap satu pada tahun 2024–2025 dan tahap dua pada tahun 2026–2029
- (v) Pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit

(vi) Peningkatan Kelas rumah sakit umum daerah kabupaten/kota

(vii) Terdapat 67 rumah sakit belum mencapai tipe C, sehingga untuk memastikan kapasitas layanan unggulan perlu ditingkatkan tipenya.

Stakeholders utama dalam program ini adalah Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang didukung kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Dukungan peran kementerian/lembaga dibutuhkan juga dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peran pemerintah daerah juga butuh dilibatkan terutama dalam menyiapkan ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Selain pelibatan *stakeholders* lintas sektor, program ini juga membutuhkan pemutakhiran regulasi teknis tentang rumah sakit yang akan mengatur terkait standar tipe rumah sakit berbasis kompetensi layanan (termasuk standar sumber daya manusia yang perlu tersedia), sistem rujukan yang saat ini sedang dikembangkan (layanan kanker, jantung, *stroke*, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak), dan pola hubungan serta pembagian peran antar rumah sakit.



Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya kapasitas RS Daerah di Kab/Kota

1. 75% RS Pemerintah terakreditasi paripurna
2. 30% RS Kab/Kota yang memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar
3. 20% RS Kab/Kota dengan kapasitas pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Stroke, Ginjal sesuai standar
4. 42% RS Pemerintah dengan tenaga medis sesuai standar
5. 30 Kab/Kota yang hanya memiliki 1 RS dan ber-tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C

1. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan memenuhi standar di 322 RS
2. Pemenuhan ketersediaan tenaga spesialis sebanyak 690 tenaga
3. Pemenuhan sarana layanan unggulan KJSU-KIA di 275 RS
4. Peningkatan tipe RS di Kab/Kota yang hanya memiliki RSUD tipe D di 30 RS
5. Pemenuhan gedung pelayanan kanker terpadu dan KIA di 12 RS
6. Pengadaan alat kesehatan pelayanan kanker terpadu dan KIA di 12 RS

7. Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit di 282 RS
8. Fasilitas Peningkatan Mutu Rumah sakit di 3.080 RS
9. NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit sebanyak 2 NSPK
10. Penyelenggara akreditasi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di 19 Lembaga
11. Laporan Koordinasi, Supervisi, dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan RS Bergerak/ Kapal di 8 Provinsi

Instansi Pelaksana

Pelaksana Utama:

1. Kementerian Kesehatan
2. Pemerintah Daerah (Kab/Kota & Provinsi)

Pendukung:

1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Perindustrian
5. Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

37 Provinsi

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Membangun Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sekolah

(a) Membangun Sekolah Unggul

Permasalahan dan tantangan. Penyiapan sumberdaya manusia unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas masih menghadapi tantangan kurangnya wadah bagi siswa berprestasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing pada level lanjut, masih sedikitnya siswa yang berpartisipasi pada ajang prestasi di tingkat global, belum tersedianya sistem yang memadai

untuk mempersiapkan siswa bersaing di tingkat global, serta masih terbatasnya implementasi pendidikan menengah berbasis *science, technology, engineering, and mathematics*.

Pada tahun 2023, hanya 0,004 persen atau 2.122 siswa Indonesia dari seluruh jenjang yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat internasional, 82 persen di antaranya menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Selain pada regional Jawa, jumlah siswa yang berprestasi di tingkat internasional di provinsi lainnya berada pada rentang 0–50 orang per provinsi.

Peta Persebaran Siswa Bernprestasi Indonesia di tingkat Internasional





Berdasarkan data penyaluran beasiswa Indonesia maju tahun 2021–2024, Sekolah Menengah Atas yang mengirimkan peserta didiknya ke perguruan tinggi luar negeri melalui program Beasiswa Indonesia Maju masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, yaitu sebesar 65 persen siswa berasal dari pulau Jawa. Sementara itu, siswa penerima beasiswa Indonesia maju yang berasal dari pulau Sulawesi, Maluku dan Papua hanya sebanyak 3 persen dari total penerima.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan keunggulan siswa, serta meningkatkan peluang penerimaan peserta didik asal wilayah afirmasi di perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri melalui jalur non-afirmasi, maka perlu dikembangkan katalisator untuk mendorong peningkatan prestasi siswa melalui penyediaan sekolah unggul yang difokuskan pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Pembangunan sekolah unggul berbasis *higher order thinking skills*, yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti asrama, bus sekolah, dan tenaga pendidikan profesional dengan memberikan kualitas unggulan diharapkan mampu memberikan keberpihakan pada siswa unggul untuk terus berkembang dengan

mengurangi batasan untuk berprestasi, dan pada akhirnya mampu menjawab tantangan untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing pada tingkat global, serta meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat internasional dan meningkatkan kedudukan Indonesia di kancah global.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Pembangunan sekolah unggul ditujukan untuk memperbaiki transisi pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran serta karakter, kreativitas, kemandirian, dan kepemimpinan siswa. Sekolah unggul dikembangkan pada jenjang pendidikan menengah untuk membentuk pembelajar yang independen, kreatif, dan percaya diri, dengan memastikan keberlanjutan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi (*customized learning*) berbasis minat dan bakat siswa; meningkatkan efisiensi sumber daya dan kolaborasi antarguru dan antardisiplin ilmu; memperkuat kecerdasan sosial dan emosional, membangun komunitas yang inklusif, serta mengembangkan keterampilan berbasis kebutuhan global dengan tetap mengedepankan penguatan karakter bangsa berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai keagamaan.

Logical Framework Pembangunan Sekolah Unggul

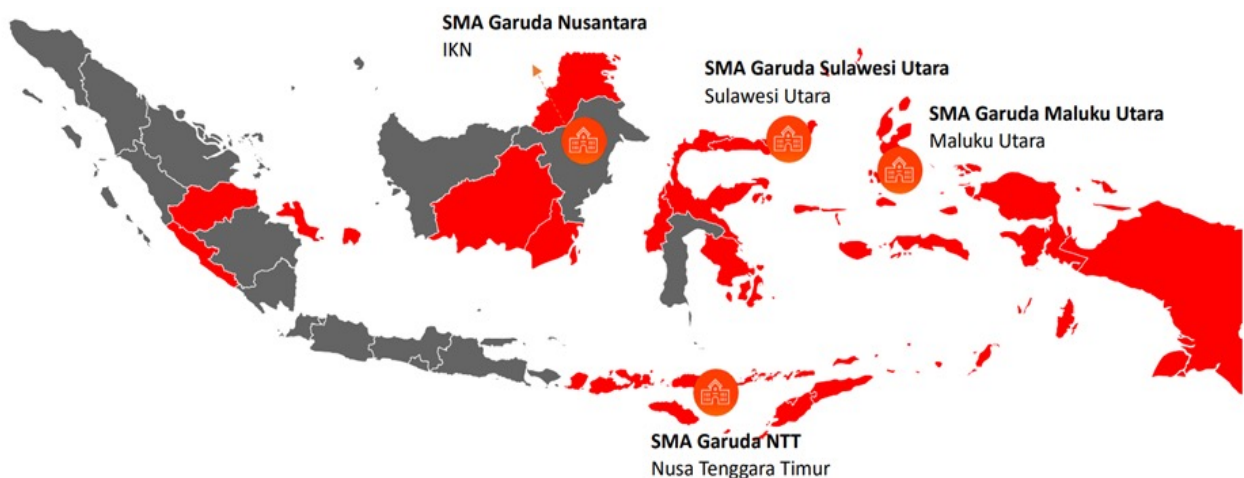


Penentuan lokasi pembangunan. Dalam rangka meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, seluruh anak usia sekolah harus dipastikan mendapatkan akses layanan pendidikan berkualitas. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan sekolah unggul. Identifikasi lokasi potensial mempertimbangkan kesiapan daerah dan lahan berdasarkan asesmen *readiness criteria*, *feasibility study*, *detail engineering design*, dan *environmental impact*. Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara, pembangunan sekolah unggul tahun 2025 diprioritaskan pada daerah dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat yang dibiayai beasiswa Indonesia maju di 100 *World Top University* rendah.

Pembangunan Sekolah Unggul. Sekolah unggulan dibangun pada jenjang pendidikan menengah yang akan menampung ± 5 rombongan belajar sekolah menengah atas. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun beserta dengan penyediaan sarana penunjang, sehingga dapat segera beroperasi pada tahun berikutnya.

Pembangunan tersebut mencakup asrama siswa untuk menjaga kemudahan akses siswa ke sekolah serta menjaga ciri unggul siswa melalui desain boarding school. Untuk menunjang pembelajaran yang optimal, satuan pendidikan dilengkapi dengan ruang kelas, laboratorium IPA dan multimedia terpadu, perpustakaan terpadu dengan koleksi buku lengkap, lapangan olahraga, ruang penunjang lain (unit kesehatan sekolah, perkantoran, dan lainnya) serta bus transportasi untuk operasional siswa di lingkungan sekolah.

Lokasi Prioritas Pembangunan Sekolah Unggul tahun 2025



Keterangan: Lokasi prioritas merupakan daerah dengan jumlah lulusan SMA yang dibiayai Beasiswa Indonesia Maju di 100 *World Top University* rendah.



Komponen Pembangunan Sekolah Unggul



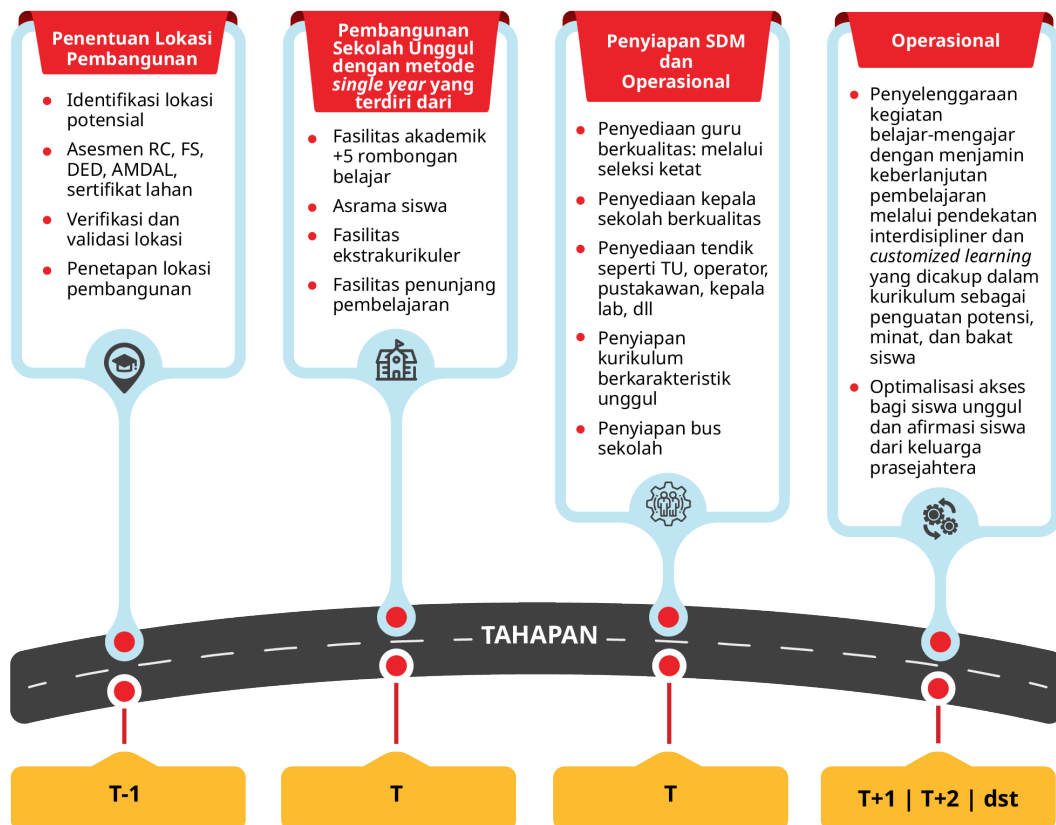
Penyiapan sumber daya manusia dan operasional.

Di samping aspek fisik, penyelenggaraan sekolah unggul juga mempertimbangkan aspek non fisik salah satunya adalah penyediaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Kepala sekolah sebagai penggerak utama penyelenggaraan sekolah unggul diseleksi dan dipilih dari kepala sekolah berprestasi atau dari guru dalam jabatan yang memiliki kompetensi kepemimpinan pendidikan yang tinggi. Penyediaan guru berkualitas dilakukan melalui seleksi ketat yang menjamin kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme, baik dari guru dalam jabatan maupun pengadaan guru baru. Untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran dan tata laksana satuan pendidikan yang efektif, sekolah unggul akan dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang berkompeten, seperti tata usaha, operator, pustakawan, kepala laboratorium, guru pembina asrama, pembina ekstrakurikuler, petugas keamanan, dan lain sebagainya.

Hanya dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sekolah unggul akan mampu menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran berkualitas dan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesentosaan (*wellbeing*) sivitas sekolah. Insentif perlu diberikan sebagai apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang bertugas.

Operasional. Pembangunan prasarana dan penyediaan sarana sekolah unggul diharapkan dapat selesai dalam waktu satu tahun anggaran, sehingga proses pembelajaran dapat langsung dilaksanakan secara optimal pada tahun berikutnya. Komitmen pengelola satuan pendidikan dan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan menjadi sekolah yang unggul. Sekolah unggul tidak dimaksudkan untuk menciptakan favoritisme dan eksklusivisme dalam pendidikan. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik di sekolah unggul harus memberikan pemihakan pada siswa berprestasi serta afirmasi pada siswa yang berasal dari keluarga dari kelompok ekonomi lemah.

Roadmap Pembangunan Sekolah Unggul



Enabler. Selain pembangunan fisik juga perlu dilakukan penguatan regulasi untuk penataan kewenangan urusan pendidikan. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan sekolah unggul oleh pemerintah pusat.

(i) **Enabler Satu** - Penyusunan NSPK Sekolah Unggul

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria diperlukan sebagai penjabaran perencanaan dan eksekusi yang lebih matang. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria meliputi tahapan perencanaan, pembangunan, hingga prosedur penyelenggaraan sekolah unggul, baik fisik maupun kualitas mutu pendidikan yang diselenggarakan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sedikitnya memuat aspek sarana dan prasarana, kurikulum *customized learning*, penyediaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan, proses penerimaan peserta didik, biaya operasional penyelenggaraan

pendidikan, serta pembinaan siswa di lingkungan sekolah, termasuk fasilitasi dan pendampingan lulusan agar dapat mengakses perguruan tinggi internasional ternama.

(ii) **Enabler Dua** - Penguatan Regulasi Pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Unggul sangat besar dan harus diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Pengaturan pendanaan dan penugasan pelaksana penyediaan sarana prasarana tersebut perlu dilandasi dengan regulasi khusus untuk memastikan ketuntasan pekerjaan dengan kualitas yang baik sehingga dapat segera dimanfaatkan pada tahun berikutnya. Selain itu, lini masa penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Unggul perlu diselaraskan dengan kegiatan penyediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan,

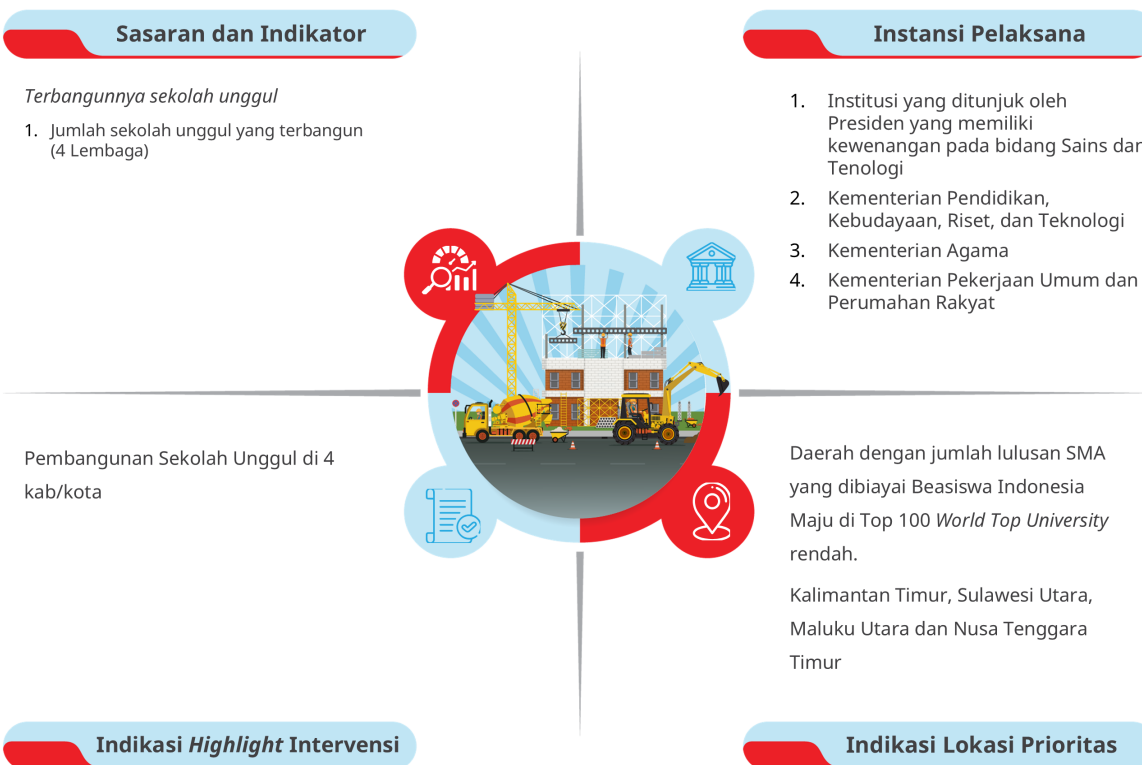


serta pemenuhan biaya operasional setelah sekolah beroperasi penuh. Karena standar kualitas layanan yang akan diberikan lebih dari kualitas sekolah pada umumnya, biaya operasional Sekolah Unggul lebih tinggi daripada biaya operasional yang disediakan melalui BOSP. Untuk itu, perlu disusun standar biaya khusus yang akan digunakan di Sekolah Unggul dan skema pendanaan kolaboratif untuk pemenuhannya.

- (iii) *Enabler* Tiga - Penataan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Bidang Pendidikan

Sekolah Unggul yang akan diselenggarakan merupakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Sesuai pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengaturan khusus diperlukan agar pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh mengelola Sekolah Unggul untuk menjamin kualitas unggul yang diharapkan.

Membangun Sekolah Unggul



Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

(b) Revitalisasi Sekolah

Permasalahan dan tantangan. Aspek geografis Indonesia menjadi salah satu tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, di antaranya penyediaan satuan pendidikan, akses jalan, jembatan, ketersediaan listrik, dan internet. Masih terdapat 29.830 desa/kelurahan yang tidak memiliki taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal, 302 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan 727 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah (Potensi Desa, 2021). Dari 415.189 sekolah, sebanyak 3.153 sekolah tidak memiliki listrik, 22.373 sekolah tidak memiliki internet, dan 2.458 tidak memiliki listrik dan internet (Data Pokok Pendidikan, 2023).

Di samping itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan terpasang perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan dapat dimanfaatkan dengan aman dan nyaman. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan tahun 2023, 25,67 persen dari total 1.831.172 ruang kelas berada pada kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi prasarana pendidikan yang tidak

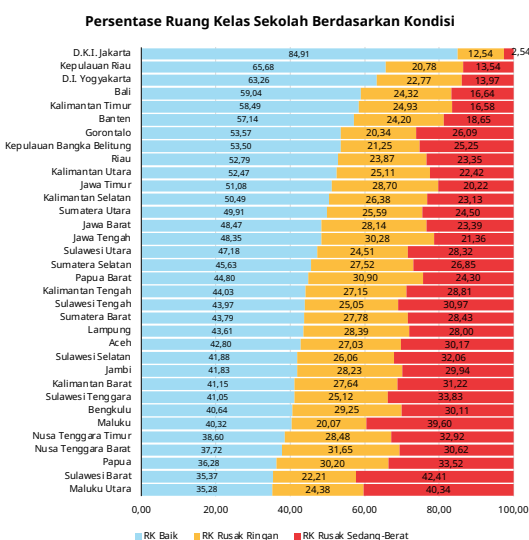
memadai berpengaruh pada penurunan kualitas pembelajaran, peningkatan potensi bahaya bagi peserta didik dan pendidik, hingga penyebab hilangnya akses terhadap pendidikan, terlebih pada wilayah dengan keterbatasan akses akibat kondisi geografis.

Hal tersebut menjadi tantangan pemerataan akses layanan pendidikan yang berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah, menurunnya angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya meningkatkan kasus anak tidak sekolah. Sejalan dengan itu, intervensi terhadap sekolah/madrasah yang sudah beroperasi akan terus dijaga kualitasnya dengan melakukan rehabilitasi pada ruang-ruang kelas sekolah/madrasah yang rusak.

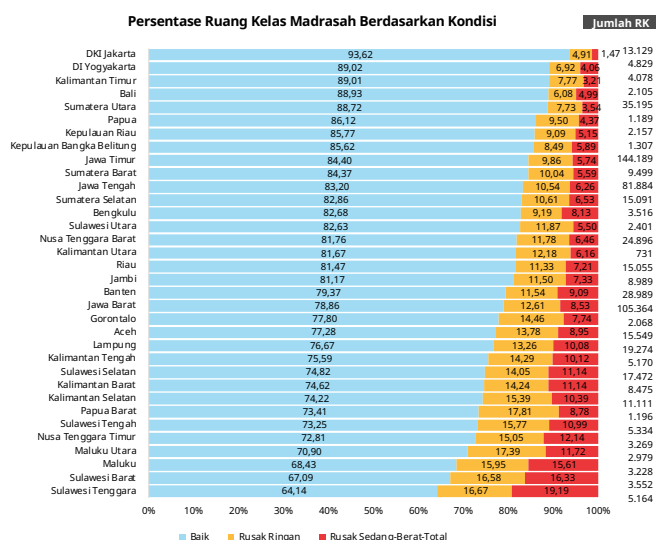
Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Revitalisasi sekolah ditujukan untuk menciptakan ekosistem lingkungan belajar yang kondusif serta menjamin keamanan dan kenyamanan siswa selama belajar di sekolah. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, diharapkan proses belajar-mengajar menjadi lebih fokus dan optimal.

Persentase Kondisi Ruang Kelas



(a) Sekolah



(b) Madrasah



Logical Framework Revitalisasi Sekolah



Penentuan lokasi revitalisasi sekolah.

Identifikasi lokasi potensial mempertimbangkan lokasi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sekolah yang berada di daerah dengan kinerja pendidikan rendah serta kemampuan fiskal yang rendah, atau memiliki jumlah siswa yang melebihi daya tampung. Penetapan lokasi mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan sekolah yang meliputi *readiness criteria*, *feasibility study*, dan *detail engineering design*.

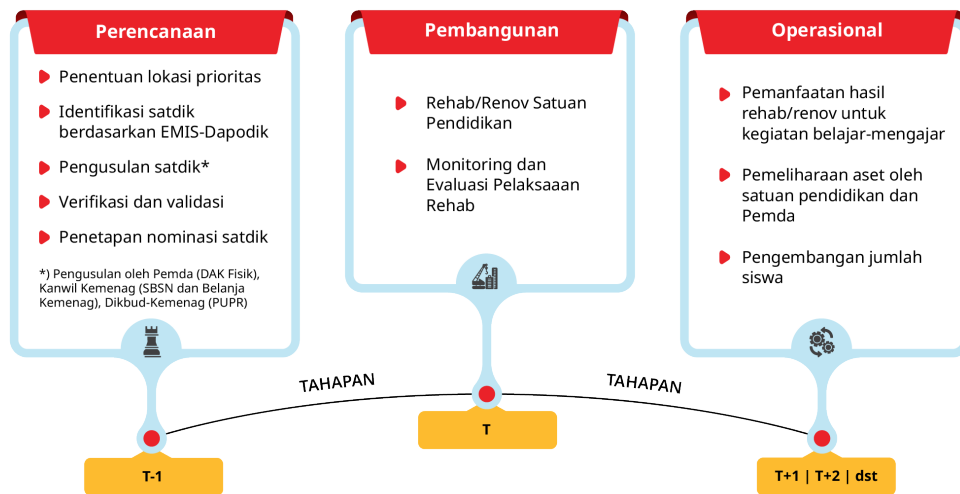
Penentuan lokasi prioritas dimaksud berdasarkan asesmen kondisi ruang kelas rusak sedang dan berat yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan dan *Education Management Information System*. Pada tahun 2023, terdapat 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah yang rusak sedang atau berat.

Revitalisasi sekolah. Revitalisasi sekolah dilakukan di tingkat satuan pendidikan yang meliputi ruang kelas utama, serta penyediaan sarana pendidikan. Revitalisasi sekolah diharapkan dapat selesai dalam waktu satu tahun.

Komponen Revitalisasi Sekolah



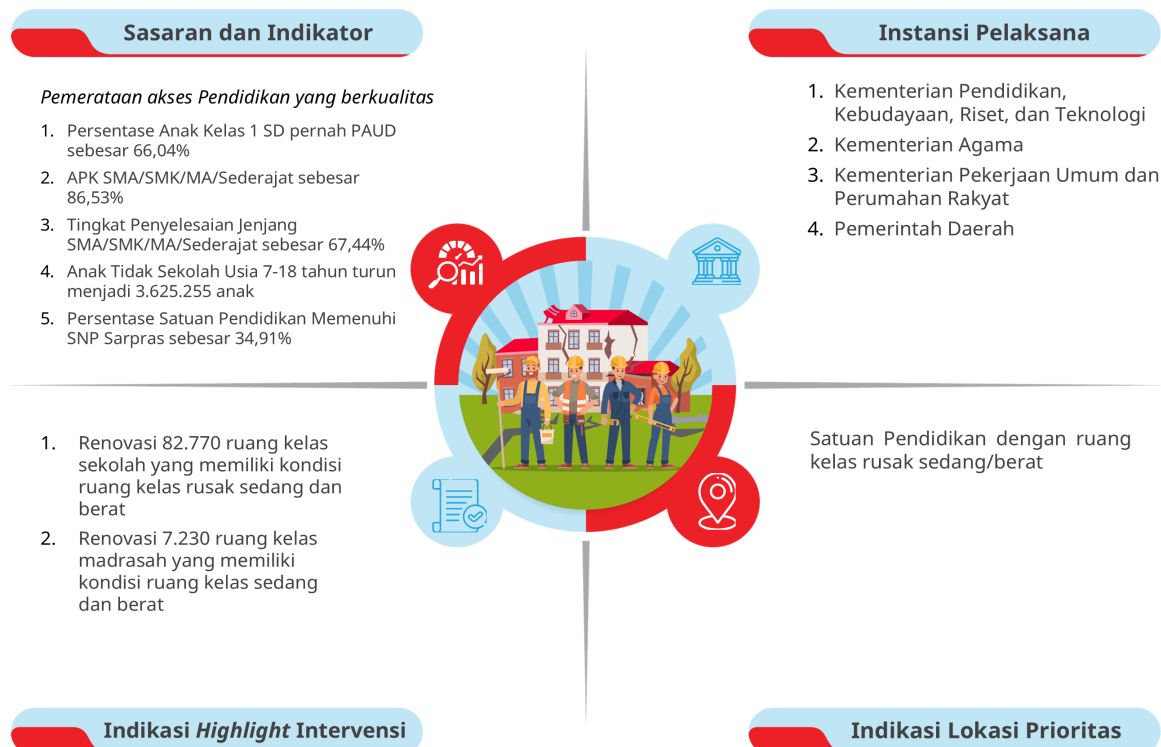
Roadmap Revitalisasi Sekolah



Operasional. Pascarenovasi, diharapkan ruang kelas, ruang pembelajaran, dan ruang penunjang lainnya yang direnovasi dapat langsung dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya, diperlukan komitmen sekolah dan pemerintah daerah mengenai penyediaan

biaya operasional dan pemeliharaan sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan selama jangka waktu yang lebih panjang untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang berkelanjutan.

Revitalisasi Sekolah



Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.



Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja akan direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan dinamika ketenagakerjaan terkini. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga bisa mendorong pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Beberapa perubahan yang diperlukan antara lain memperluas cakupan dari keselamatan kerja menjadi keselamatan dan kesehatan kerja, memperkuat kerangka kelembagaan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja;

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan pembaruan di antaranya terkait dengan persyaratan dalam penerapan *diversi* dan *restorative justice*, optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, upaya pemenuhan hak anak yang menjadi korban, upaya pencegahan anak agar tidak berhadapan dengan hukum, dan beberapa ketentuan yang tidak diatur secara jelas

seperti perbedaan antara kejahatan dan kenakalan biasa yang dilakukan oleh anak.

- (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang rencana aksinya berakhir pada tahun 2024. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu diatur kembali dalam Rancangan Peraturan Presiden ini sesuai dengan rencana aksi periode berikutnya.

- (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Masih tingginya perkawinan anak mendorong perlu ditetapkannya Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Beberapa ketentuan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah perkawinan anak, memlimitasi persyaratan untuk memperoleh dispensasi kawin, serta peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya perlindungan anak.

- (5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan

Rancangan Peraturan Presiden ini dibentuk sebagai wujud komitmen terhadap ratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Selama ini upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan belum memiliki payung hukum yang jelas. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Presiden ini perlu dibentuk untuk mengatur terkait upaya komprehensif dalam melakukan pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, serta mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dapat berjalan baik di tingkat nasional maupun daerah.



Sumber: Kementerian Sekretariat Negara



3.5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan	18,67	20,8
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,5
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1–30,2
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0–21,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dilaksanakan melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.
- (2) Integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar dilakukan melalui (a) hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, bauksit); (b)

hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati (sawit, kelapa, rumput laut); (c) penguatan produktivitas industri padat karya terampil (makanan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki); (d) pengembangan industri *medium-high technology* (alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi); serta (e) penguatan industri dasar (kimia dasar dan logam dasar). Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pada setiap industri prioritas tersebut, serangkaian strategi penguatan ekosistem industrialisasi akan dilakukan melalui (i) pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (ii) peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja industri yang terampil dan profesional sesuai *skill-set* kebutuhan industri; (iii) jaminan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi yang di antaranya mencakup energi dan bahan baku/bahan penolong, dengan diiringi peningkatan produktivitas sektor hulu; (iv) peningkatan penerapan standarisasi; (v) peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi dan diversifikasi produk industri; serta (vi) perluasan pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (2) Pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus yang meliputi (a) perencanaan, perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; (b) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; (c) penyiapan sumber daya manusia untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; serta (d) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus



prioritas. Fasilitas kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas.

- (3) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional dilakukan melalui (a) penguatan layanan konektivitas *backbone* integrasi ekonomi, (b) penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik, (c) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta (d) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.
- (4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global dapat dilakukan dengan (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.
- (5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah serta integrasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; (h) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta (i) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

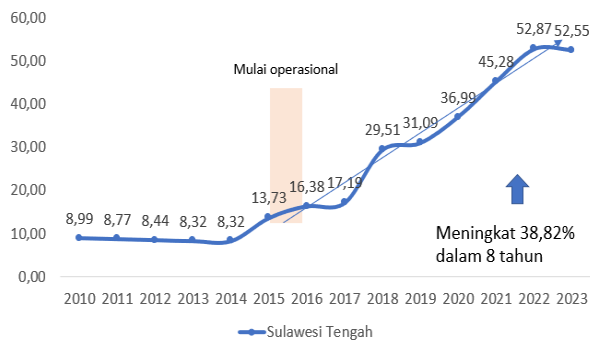
Selain intervensi yang telah dijabarkan, pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global juga akan didukung oleh tiga program yang menjadi penekanan, yaitu (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam dan Luar KI/KEK Prioritas; (2) Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut); serta (3) Pengembangan Industri *Medium-High Technology* (Industri Alat Angkut, Industri Elektronika dan Digital, Industri Kimia dan Farmasi).

Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam dan Luar Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Prioritas

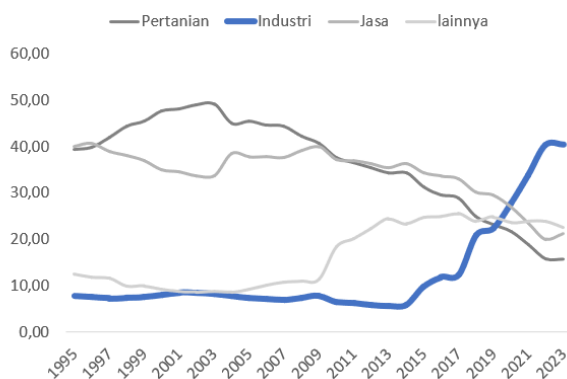
Permasalahan dan tantangan. Dalam upaya mendorong pencapaian target rasio produk domestik bruto industri pengolahan terhadap produk domestik bruto sebesar 20,8 persen di tahun 2025, salah satu arah kebijakan yang akan dilakukan adalah mengembangkan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Hal ini sejalan dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri yang mewajibkan pelaku industri menjalankan kegiatan industrinya berlokasi di kawasan industri.

Salah satu contoh sukses bagaimana aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus dapat menjadi pusat pertumbuhan baru dan mendorong transformasi ekonomi di tingkat regional adalah Sulawesi Tengah. Produk domestik regional bruto Sulawesi Tengah terbukti mampu naik tiga kali lipat hanya dalam waktu delapan tahun pasca operasionalisasi Kawasan Industri Morowali di tahun 2015. Keberadaan Kawasan Industri Morowali mampu mengubah struktur ekonomi provinsi tersebut dari sektor primer ke sektor sekunder, dimana kontribusi produk domestik regional bruto industri pengolahan terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Tengah mencapai 52,55 persen di tahun 2023.

Kontribusi PDRB Industri Sulawesi Tengah terhadap PDRB Industri Pulau Sulawesi



Perkembangan Transformasi Ekonomi Sulawesi Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Hanya saja, hasil evaluasi terhadap 42 kawasan industri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Proyek Strategis Nasional sampai dengan pertengahan tahun 2024 tercatat hanya 28,5 persen kawasan industri yang sudah beroperasi dan ada kegiatan industri. Bahkan, masih terdapat 13 kawasan industri yang berstatus persiapan pengurusan Izin Usaha Kawasan Industri. Hal ini dipicu oleh beberapa persoalan,

di antaranya: (a) isu pertanahan, tata ruang, dan lingkungan, seperti perbedaan peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota dan provinsi, proses pelepasan kawasan hutan, kesulitan dalam pengadaan lahan dan status pengelolaan, serta izin lingkungan; (b) isu sarana dan prasarana konektivitas, seperti akses jalan, jembatan, dan jalan tol menuju dan dari kawasan industri/kawasan ekonomi khusus yang dapat menghubungkan dengan bahan baku serta simpul transportasi; (c) isu sarana dan prasarana penunjang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, seperti energi, air baku dan/atau air bersih, permukiman dan perumahan/mes pekerja, fasilitas pendidikan dan pelatihan pekerja, dan fasilitas kesehatan; serta (d) isu tata kelola dan penarikan investor sebagai *anchor tenant* dan *tenant*.

Pengembangan kawasan industri/kawasan ekonomi khusus sering kali menghadapi berbagai masalah ketimpangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan kawasan sekitarnya, seperti timbulnya permukiman kumuh, permasalahan tata ruang, serta permasalahan lingkungan (risiko banjir, air bersih, dan sampah). Upaya mengatasi permasalahan yang terjadi antara kawasan industri/kawasan ekonomi khusus dengan kawasan sekitarnya memerlukan kebijakan yang inklusif, dimana program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan harus menjadi bagian integral dari rencana pengembangan kawasan industri/kawasan ekonomi khusus serta memastikan bahwa pengembangan sarana dan prasarana pendukung di luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus perlu dilakukan secara paralel oleh pemerintah pusat dan daerah.



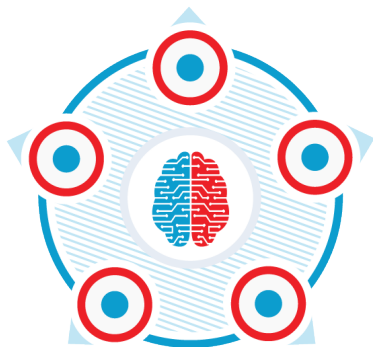
Kerangka Pikir Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam dan Luar KI/KEK Prioritas

Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk Pendukung Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas

1. Sarana dan prasarana konektivitas, seperti akses jalan, jembatan, dan jalan tol menuju dan dari KI/KEK untuk menghubungkan industri dalam kawasan dengan bahan baku dan/ atau simpul transportasi;
2. Fasilitasi perizinan untuk pembangunan dan operasionalisasi Terminal Khusus dan/atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
3. Sarana dan prasarana penunjang KI/KEK, seperti energi, air baku dan/atau air bersih, permukiman dan perumahan/mes pekerja, fasilitas pendidikan dan pelatihan pekerja, serta fasilitas kesehatan.

Peningkatan Upaya Pencegahan

1. Pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan/jembatan;
2. Pengembangan konektivitas simpul transportasi;
3. Pembangunan sarana prasarana air bersih;
4. Pembangunan sarana prasarana limbah;
5. Pengembangan sarana prasarana perdagangan dan penjaminan mutu.



Peran Pemerintah Daerah

1. Dukungan penyediaan dan pembebasan lahan;
2. Fasilitasi tata ruang dan perizinan;
3. Secara aktif ikut melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung KI/KEK prioritas (seperti jaringan transportasi, infrastruktur energi, penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur telekomunikasi, dan pengelolaan lingkungan) sesuai kewenangan daerah;
4. Keberlanjutan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung KI/KEK Prioritas sesuai kewenangan daerah;
5. Pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan daerah.

Dukungan Lintas Sektor

1. Pembangunan jalan kawasan prioritas - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pembangunan jalan strategis - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembangunan jalan bebas hambatan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Pembangunan jembatan strategis - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan - Kementerian Perhubungan
6. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang jalan - Kementerian Dalam Negeri.

Peran Mitra Pembangunan

1. Pengelola Kawasan: Melaksanakan perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan sarana dan prasarana di dalam kawasan KI/KEK prioritas, termasuk menjalin kerja sama dengan mitra investor;
2. Pelaku Industri: Kerja sama perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung KI/KEK prioritas bersama pengelola kawasan dan pemerintah daerah;
3. Lembaga Keuangan/Lembaga Pembiayaan : Dukungan finansial melalui pemberian pinjaman, kredit, atau skema investasi lainnya;
4. Perguruan Tinggi: Membantu perencanaan serta desain sarana dan prasarana pendukung KI/KEK Prioritas;
5. Masyarakat Lokal: Keterlibatan dalam perencanaan partisipatif, pengawasan selama konstruksi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di luar kawasan KI/KEK Prioritas.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyediakan infrastruktur kawasan industri, yang mencakup infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang. Untuk itu, pemerintah berencana untuk menyiapkan sarana dan prasarana di dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas, yang mencakup (a) pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan/jembatan, (b) pengembangan konektivitas simpul transportasi, (c) pembangunan sarana

prasarana air bersih, (d) pembangunan sarana prasarana limbah, serta (e) pengembangan sarana prasarana perdagangan dan penjaminan mutu.

Sebagai indikasi awal, pada tahun 2025 fokus intervensi aglomerasi kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas akan dilakukan di tujuh provinsi sesuai dengan tingkat kesiapan kawasan industri/kawasan ekonomi khusus pada provinsi dimaksud. Sementara, untuk penyiapan sarana dan prasarana kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas. Upaya intervensi

sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas tersebut diharapkan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (termasuk Dana Alokasi Khusus), melainkan dapat juga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi Badan Usaha Milik Negara/Swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut)

Permasalahan dan tantangan. Dalam pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya hayati (sawit, kelapa, dan rumput laut) berbagai permasalahan dan tantangan masih dihadapi, baik dari aspek hulu maupun hilir. Rata-rata produktivitas komoditas tersebut masih belum mencapai titik optimal akibat terbatasnya ketersediaan bibit unggul dan

berkualitas. Konflik pemanfaatan ruang antara sektor hulu dengan aktivitas perekonomian lainnya pun menjadi tantangan tersendiri dalam budidaya komoditas tersebut. Adanya perubahan iklim juga meningkatkan risiko tanaman rusak atau tidak menghasilkan yang berdampak negatif pada efisiensi dan produksi di hulu. Rendahnya penerapan *Good Agricultural Practices* dan *Good Handling Practices* di kalangan petani dan pembudidaya juga menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Selanjutnya, regenerasi petani dan pembudidaya yang lambat menyebabkan kurangnya tenaga kerja terampil dan berpengalaman. Selain itu, tuntutan pasar terhadap penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ketelusuran menjadi tantangan baru yang perlu dihadapi dalam pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya hayati. Berbagai hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan industri.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam dan Luar KI/KEK Prioritas

Sasaran dan Indikator

Terciptanya aglomerasi industri di KI/KEK

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan mencapai 48,06%
2. Tingkat Aksesibilitas kawasan mendukung KI/KEK Prioritas sebesar 55,5%
3. Panjang jalan nasional yang dibangun/dipreservasi mendukung KI/KEK Prioritas sepanjang 39,32 Km

1. Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) – NANGATAYAP SUNGAI KELIK
2. Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) – SUNGAI KELIK SIDUK
3. Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) Provinsi Jawa Timur
4. Jalan Strategis (ProPN) – LOHGUNG (KM. 93.175) SADANG (BTS. KAB. LAMONGAN)

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kementerian Perhubungan
5. Kementerian Dalam Negeri

1. Banten
2. Bangka Belitung
3. Jawa Timur
4. Kalimantan Barat
5. Maluku Utara
6. Papua Barat Daya
7. Sulawesi Tenggara

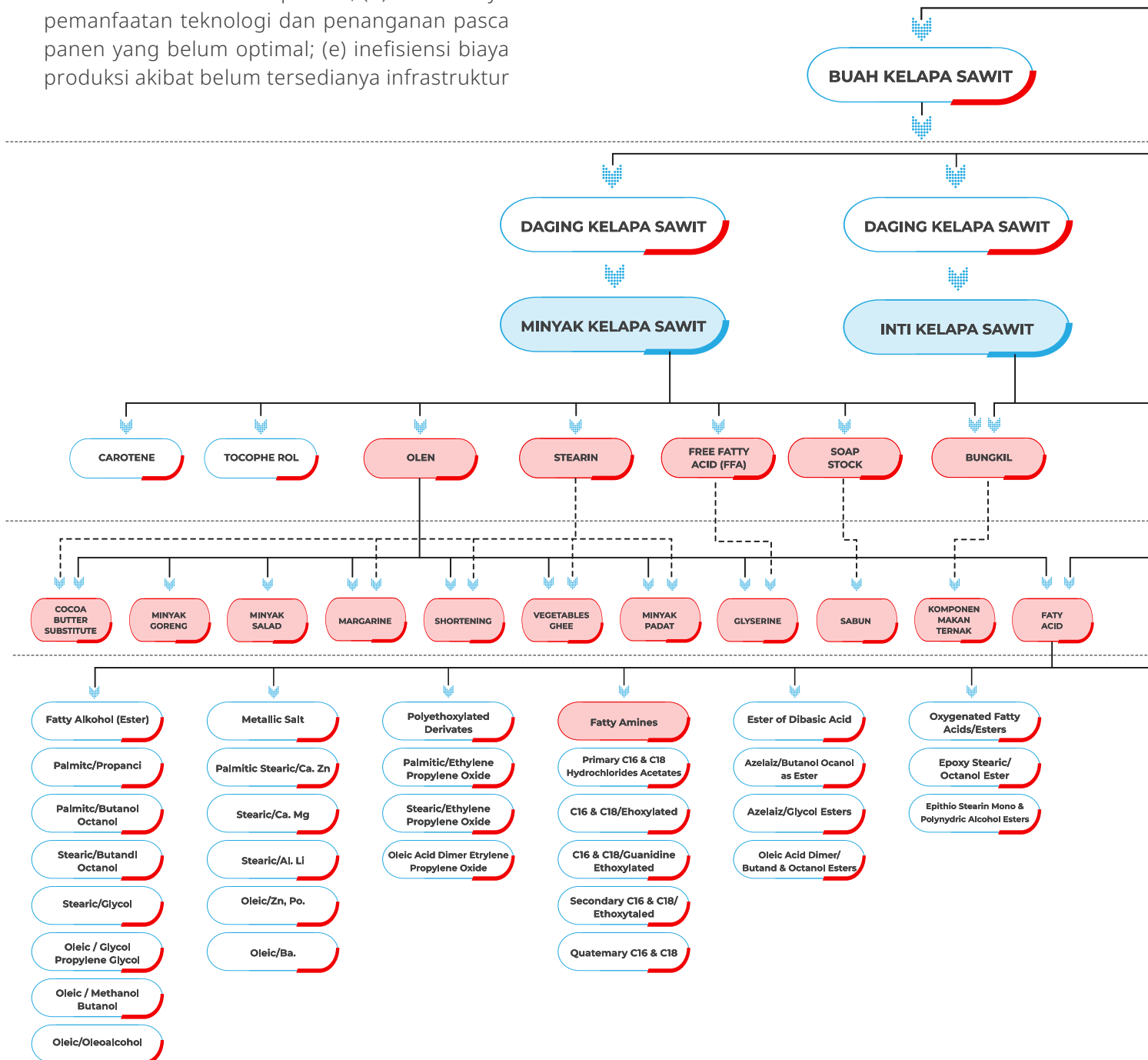
Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas



Selain aspek hulu, hilirisasi berbasis sumber daya hayati juga dihadapkan pada berbagai tantangan lain, seperti (a) masih terbatasnya jumlah industri di dalam negeri yang memproduksi produk hilir dengan nilai tambah tinggi; (b) kemampuan tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterampilan dan produktivitas; (c) terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk; (d) terbatasnya pemanfaatan teknologi dan penanganan pasca panen yang belum optimal; (e) inefisiensi biaya produksi akibat belum tersedianya infrastruktur

penghubung yang andal antara daerah sentra produsen bahan baku dengan industri; (f) konsistensi mutu produk yang sesuai dengan standar internasional dan mitra dagang, termasuk dalam hal pemenuhan sertifikasi berkelanjutan; serta (g) iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif akibat inkonsistensi kebijakan.



TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Turunan
Ke 1

TANDAN KOSONG

SLUDGE

TEMPURUNG

SERAT

Turunan
Ke 2

MINYAK INTI SAWIT
(Palm Kernel Oil)

TEPUNG
TEMPURUNG

ARANG

BAHAN BAKAR

BAHAN
SELULOSA

Turunan
Ke 3

LAURIC
ACID

MYRISTIC
ACID

BRIKET
ARANG

KARBON
AKTIF

ASAM
ORGANIK

KERTAS

Turunan
Ke 4

Fatty Alcohol, dll

C 16 & C 18 Alcohols/
Sulphated

C16 & C 18 Alcohols/
Esterified With Higher
Saturated Fatty Acids

C16 & C 19 and
C 19 Alcohol

C16 & C 19 Alcohol/
Ethoxylation

Monoglycerides

Monoglycerides
Ethoxylation

C16 Aldehyde

Fatty Acids
Amides

Stearamide

Oleamide

Sulphated Alcanolamide
of Palmic, Stearic and Oleic
Acids

Alkanolamides

Industri eksisting

Industri eksisting namun masih defisit

Sumber: Prospera dan Kementerian Perindustrian, Keterangan: *Angka sementara, tidak untuk dikutip



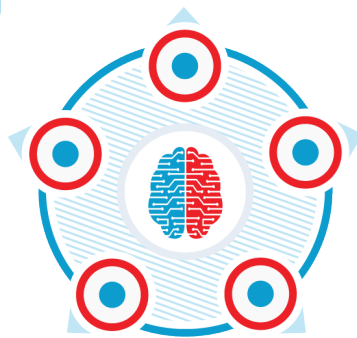
Kerangka Pikir Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut)

Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut)

1. Produktivitas komoditas belum mencapai titik optimal akibat ketersediaan bibit unggul/berkualitas yang terbatas, perubahan iklim, serta rendahnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP)
2. Konflik pemanfaatan ruang antara sektor hulu dengan aktivitas perekonomian lainnya;
3. Kurangnya tenaga kerja terampil dan berpengalaman;
4. Tuntutan pasar terhadap penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan;
5. Terbatasnya jumlah industri di dalam negeri yang memproduksi produk hilir dengan nilai tambah tinggi;
6. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk;
7. Terbatasnya pemanfaatan teknologi;
8. Inefisiensi biaya produksi akibat belum tersedianya infrastruktur penghubung yang andal antara daerah sentra produsen bahan baku dengan industri;
9. Mutu produk belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional dan mitra dagang.

Peran Mitra Pembangunan

1. Pelaku Industri: Investasi dalam bentuk penanaman modal dan/atau teknologi untuk pengembangan industri hilir;
2. Lembaga Keuangan/Lembaga Pembiayaan: Dukungan finansial melalui pemberian pinjaman, kredit, atau investasi modal ventura;
3. NGO: Promosi dan pendampingan praktik GPA dan GHP;
4. Perguruan Tinggi dan Peneliti: Riset dan pengembangan teknologi untuk diversifikasi produk, perbaikan teknik budidaya dan produksi, dan lainnya;
5. Masyarakat Lokal, termasuk Petani dan Pembudidaya: penerapan GAP dan GHP.



Peran Pemerintah Daerah

1. Perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten /Kota, termasuk perairan pesisir, yang mempertimbangkan kepentingan antarpihak;
2. Fasilitasi izin usaha (izin perkebunan, izin lingkungan, dan izin lain sesuai kewenangan daerah) dan investasi industri;
3. Pembangunan infrastruktur penghubung antara daerah sentra produsen bahan baku dengan industri sesuai kewenangan daerah;
4. Pengembangan program pelatihan dan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan *skill-set* industri;
5. Pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan daerah.

Peningkatan Upaya Pencegahan

1. Penerapan GAP dan GHP di sepanjang rantai pasok komoditas;
2. Penyediaan input produksi yang berkualitas (termasuk bibit unggul) serta sarana dan prasarana budidaya serta pascapanen;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja terampil, termasuk melakukan regenerasi petani;
4. Pembangunan industri hilir yang bernilai tambah tinggi;
5. Pemanfaatan teknologi serta hasil riset dan inovasi untuk diversifikasi produk dan penerapan prinsip berkelanjutan;
6. Penguatan standarisasi produk dan sistem mutu yang diakui pasar global;
7. Membangun infrastruktur logistik dan konektivitas.

Dukungan Lintas Sektor

1. Pengembangan Industri Hilir Sawit (*Industri Carotene dan Tocopherol*), *Industri Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel*; - Kementerian Perindustrian
2. Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Atsiri - Kementerian Perindustrian
3. Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan; - Kementerian Kelautan, dan Perikanan
4. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut. - Kementerian Kelautan, dan Perikanan
5. Pengembangan Kawasan Kelapa; - Kementerian Pertanian
6. Penyediaan Benih Unggul Komoditas Perkebunan (Kelapa) - Kementerian Pertanian
7. Penelitian dan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman; - Badan Riset dan Inovasi Nasional
8. Purwarupa Produk Baru (Pangan dan Energi); - Badan Riset dan Inovasi Nasional
9. Purwarupa Teknologi Produksi dan Pasca Panen. - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada beberapa langkah perlu dilakukan, di antaranya mendorong peningkatan produktivitas komoditas perkebunan melalui penerapan *Good Agricultural Practices* dan *Good Handling Practices* di sepanjang rantai pasok komoditas perkebunan, mulai dari penyediaan input produksi hingga pascapanen, modernisasi pertanian, pertanian berkelanjutan dan terintegrasi, penguatan konsolidasi usaha untuk mendorong produktivitas usaha dan pelaku usaha tani dan penguatan akses permodalan, serta regenerasi petani dan

pembudidaya. Selain itu, penguatan sistem informasi perkebunan juga perlu dilakukan untuk mendukung upaya legalitas dan ketertelusuran produk, standarisasi sistem sertifikasi yang dapat diakui oleh pasar global, serta penguatan inovasi untuk menghasilkan ragam produk turunan yang bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi khususnya untuk komoditas rumput laut, upaya yang dapat dilakukan mencakup (a) pengembangan klaster budidaya rumput laut; (b) penyediaan sarana dan prasarana budidaya

serta bibit rumput laut unggul yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tahan terhadap penyakit dan cuaca; (c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung, seperti gudang penyimpanan dan sistem logistik yang memadai; (d) peningkatan pemanfaatan teknologi dalam diversifikasi produk rumput laut, seperti agar-agar, karagenan, dan produk pangan/nonpangan lainnya; serta (e) peningkatan akses pasar produk olahan rumput laut, terutama pasar ekspor.

Selain itu, beberapa industri hilir yang bernilai tambah tinggi akan terus dikembangkan, seperti industri *carotene* dan *tocopherol* yang merupakan produk oleokimia turunan sawit. Hal ini tentunya perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil, adopsi teknologi, penerapan standarisasi produk sesuai pasar internasional, riset dan inovasi untuk diversifikasi produk, serta penyiapan infrastruktur pendukung guna menjaga kualitas bahan baku, termasuk infrastruktur konektivitas sebagai penghubung daerah produsen hulu dengan industri.

Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut)

Sasaran dan Indikator

Meningkatkan Hilirisasi Industri berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput laut)

1. Nilai Tambah (Harga Pasar) Industri Besar Sedang di Subsektor Makanan Rp. 766.675,69 M
2. Volume Produksi Rumput Laut 11,64 juta ton
3. Nilai Ekspor Rumput Laut 589,77 juta USD
4. Produksi Kelapa Sawit 47.929.374 ton
5. Produksi Kelapa 2.880.690 ton

1. Fasilitas Investasi Industri Hilir Kelapa Sawit (*Carotene* dan *Tocopherol*)
2. Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa
3. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - *'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas*
4. Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang Disalurkan ke Masyarakat
5. Purwarupa Senyawa Turunan Sawit untuk *Clean Energy*

Indikasi Highlight Intervensi

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Banten | 13. Papua Barat Daya |
| 2. DKI Jakarta | 14. Riau |
| 3. Jambi | 15. Sulawesi Selatan |
| 4. Jawa Barat | 16. Sulawesi Tengah |
| 5. Jawa Tengah | 17. Sulawesi Tenggara |
| 6. Jawa Timur | 18. Sulawesi Utara |
| 7. Kalimantan Barat | 19. Sumatera Utara |
| 8. Kalimantan Tengah | 20. Kalimantan Selatan |
| 9. Kalimantan Timur | 21. Bali |
| 10. Kalimantan Utara | 22. Aceh |
| 11. Kepulauan Riau | 23. Di Yogyakarta |
| 12. Lampung | 24. Gorontalo |
| 13. Maluku | 25. Sulawesi Barat |
| 14. Maluku Utara | 26. Bengkulu |
| 15. Nusa Tenggara Barat | 27. Bangka Belitung |
| 16. Nusa Tenggara Timur | 28. Sumatera Barat |

Indikasi Lokasi Prioritas



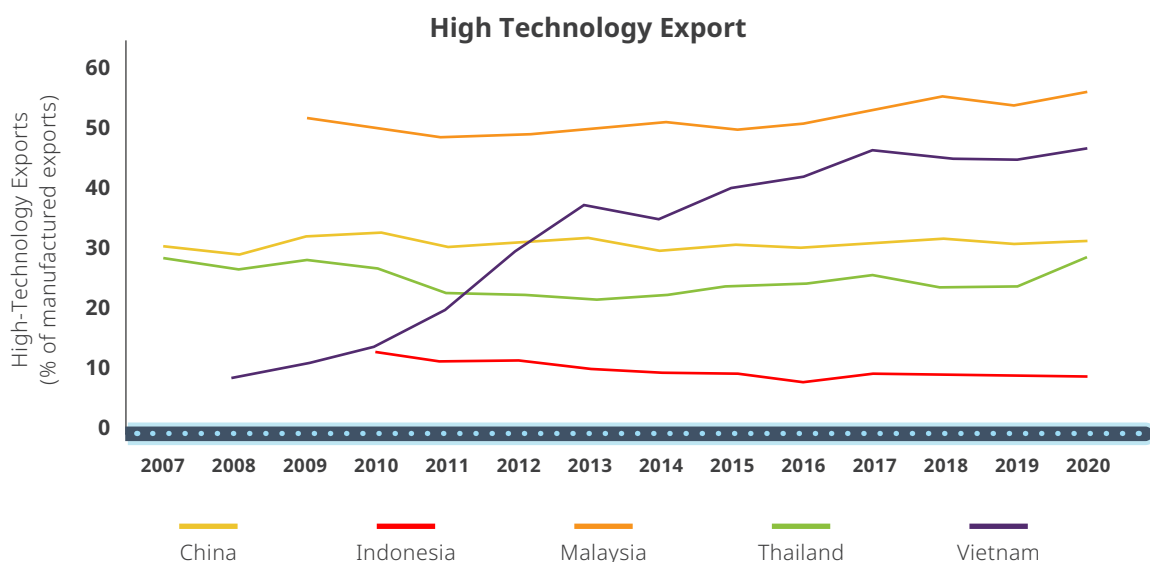
Pengembangan Industri *Medium-High Technology* (Industri Alat Angkut, Industri Elektronik dan Digital, Industri Kimia dan Farmasi)

Permasalahan dan tantangan. Indonesia memiliki modalitas besar untuk mendorong sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan membawa Indonesia keluar dari *middle income trap*. Indonesia memiliki angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang (Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2024) yang potensial menjadi tenaga kerja industri. Selain itu, sumber daya alam yang selama ini menjadi keunggulan Indonesia pun berpotensi untuk ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri, sehingga menjadi produk yang lebih kompleks serta padat inovasi dan teknologi.

Namun, saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas bernilai tambah rendah (*Harmonized System 27*, *Harmonized System 26*, dan *Harmonized System 15*), jauh tertinggal dari Vietnam yang sudah didominasi oleh produk yang lebih berteknologi tinggi seperti elektronik (*Harmonized System 85*) dan permesinan (*Harmonized System 84*). Proporsi

ekspor produk *high technology* Indonesia merupakan yang terendah dibanding negara *peers* dengan tingkat daya saing yang relatif rendah.

Permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam perkembangan industri *medium high technology* di antaranya adalah (a) ketergantungan tinggi terhadap bahan baku/penolong asal impor akibat belum tersedianya industri komponen dan permesinan yang cukup berdaya saing di dalam negeri dan penguasaan teknologi oleh industri global; (b) struktur tingkat pendidikan tenaga kerja industri yang masih didominasi tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama); (c) industri *medium-high technology* saat ini masih terbatas pada perakitan; (d) adopsi teknologi yang masih dapat ditingkatkan dan diperluas, terutama adanya *gap* teknologi yang signifikan antara industri besar dengan industri kecil dan menengah; (e) partisipasi dalam *global value chain* masih terbatas; serta (f) *overlapping* Standar Nasional Indonesia, International Organization for Standardization, dan standar mitra dagang lainnya menyebabkan proses dan administrasi standar menjadi tidak efisien bagi pelaku industri.



Sumber: World Development Indicators (diolah)

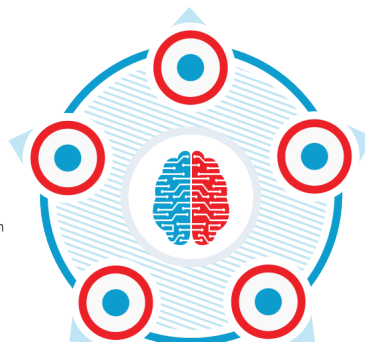
Kerangka Pikir Pengembangan Industri *Medium-High Technology* (Industri Alat Angkut, Industri Elektronik dan Digital, Industri Kimia dan Farmasi)

Identifikasi Permasalahan Pengembangan Industri *Medium High Technology*

1. Daya saing produk berteknologi tinggi Indonesia di pasar global relatif rendah dibandingkan negara *peers*;
2. Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku/penolong asal impor akibat belum tersedianya industri komponen dan permesinan yang cukup berdaya saing di dalam negeri;
3. Tenaga kerja di industri pengolahan masih didominasi *unskilled labor*;
4. Industri *medium-high technology* masih terbatas pada perakitan;
5. Adopsi teknologi perlu ditingkatkan dan diperluas;
6. Partisipasi dalam *global value chain* masih terbatas;
7. *Overlapping* SNI, ISO dan standar mitra dagang lainnya menyebabkan proses dan administrasi standar menjadi tidak efisien bagi pelaku industri.

Peran Mitra Pembangunan

1. Pelaku Industri: Investasi dalam bentuk penanaman modal dan /atau teknologi untuk pengembangan industri;
2. Lembaga Keuangan/Lembaga Pembiayaan: Dukungan finansial melalui pemberian pinjaman, kredit, atau investasi modal ventura;
3. Perguruan Tinggi: Penyiapan SDM sebagai calon tenaga kerja *high-skilled* dan profesional;
4. Lembaga Riset: Penelitian dan pengembangan teknologi inovatif untuk diversifikasi dan inovasi produk, pengembangan prototipe, inovasi proses, pengembangan mesin/teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dan lainnya;
5. Organisasi Internasional: Bantuan teknis dan konsultasi untuk pengembangan kebijakan industri, fasilitasi kolaborasi perusahaan internasional untuk transfer teknologi dan inovasi, advokasi standar internasional.



Peran Pemerintah Daerah

1. Fasilitasi izin usaha (izin lingkungan, izin bangunan, dan izin lain sesuai kewenangan daerah);
2. Menjaga iklim investasi yang kondusif;
3. Pembangunan infrastruktur dasar pendukung industri (seperti jaringan transportasi, jalan, infrastruktur logistik, dan lainnya) sesuai kewenangan daerah;
4. Pengembangan program pelatihan dan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan *skill-set* industri;
5. Pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan daerah.

Peningkatan Upaya Pencegahan

1. Penguatan rantai pasok dan pendalaman struktur industri guna menjamin ketersediaan bahan baku/penolong yang berkualitas dan kompetitif;
2. Fasilitasi akses bahan baku industri teknologi menengah tinggi;
3. Peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja industri yang terampil dan profesional sesuai *skill-set* kebutuhan industri;
4. Peningkatan adopsi teknologi dan *smart manufacturing*;
5. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
6. Optimalisasi dan harmonisasi penerapan standar industri.

Dukungan Lintas Sektor

1. Pengembangan Ekosistem Industri KBLBB - Kementerian Perindustrian
2. Pembangunan Infrastruktur IMEI Control - Kementerian Perindustrian
3. Pembangunan *Indonesia Manufacturing Center* (IMC) - Kementerian Perindustrian
4. Hilirisasi Silika menjadi Wafer Silikon - Kementerian Perindustrian
5. Fasilitasi Industri Semikonduktor - Kementerian Perindustrian
6. Penumbuhan Industri Bahan Baku Obat - Kementerian Perindustrian
7. Penyempurnaan Kebijakan Impor dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Bahan Baku - Kementerian Perdagangan
8. Penyusunan dan Pelaksanaan Penyerahan Perizinan Berusaha di Bidang Impor - Kementerian Perdagangan
9. Purwarupa Vaksin Untuk Pencegahan dan Terapi Penyakit - Badan Riset dan Inovasi Nasional
10. Purwarupa Produk Biofarmaseutikal dan Biosimilar - Badan Riset dan Inovasi Nasional
11. Purwarupa Bahan Baku Obat Terapi Terarah - Badan Riset dan Inovasi Nasional
12. Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Untuk mendukung percepatan industrialisasi dalam industri *medium-high technology* akan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu (a) penguatan rantai pasok dan pendalaman struktur industri guna menjamin ketersediaan bahan baku/penolong yang berkualitas dan kompetitif; (b) fasilitasi akses bahan baku industri teknologi menengah tinggi; (c) peningkatan adopsi teknologi, *smart manufacturing*, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi; (d) optimalisasi dan harmonisasi

penerapan standar industri; serta (e) peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja industri yang terampil dan profesional sesuai *skill-set* kebutuhan industri. Pada tahun 2025, pengembangan industri *medium-high technology* akan difokuskan pada industri alat angkut termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri elektronika dan digital (industri semikonduktor dan industri baterai kendaraan listrik), serta industri kimia dan farmasi termasuk industri kosmetika, minyak atsiri, farmasi, dan obat tradisional.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Pengembangan Industri *Medium-High Technology* (Industri Alat Angkut, Industri Elektronik dan Digital, Industri Kimia dan Farmasi)

Sasaran dan Indikator

Meningkatkan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Alat Angkut, Elektronik & Digital, Kimia & Farmasi

1. Pertumbuhan Industri Alat Angkut 5,20-5,40%
2. Pertumbuhan Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 5,60-6,30%
3. Pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 7,10-7,50%

1. Industri Komponen yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur
2. Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem
3. Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika
4. Hilirisasi Silika Menjadi *Wafer Silikon* Dalam Rangka Kemandirian *Industri Photovoltaic (PV) Module* dan Semikonduktor Dalam Negeri
5. Purwarupa Produk Biofarmaseutikal dan Biosimilar
6. Penyempurnaan Kebijakan Bidang Impor Dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Bahan Baku

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Perdagangan
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



1. Banten
2. Jawa Barat
3. DKI Jakarta
4. Maluku
5. Sumatera Barat

Indikasi *Highlight* Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan Regulasi pada Prioritas Nasional 5 “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Perubahan Rancangan Undang-undang sejalan dengan upaya menyinergikan tata kelola investasi nasional dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Rancangan Undang-undang ini memuat perubahan ketentuan penanaman modal asing, standardisasi produk perizinan, sinkronisasi investasi pusat dan daerah serta dukungan terhadap paradigma baru dalam perekonomian global yang dapat mempengaruhi investasi seperti adanya kebijakan *Green Investment* (termasuk *Environmental Social Governance* dan *Net Zero Emission*), *Global Minimum Tax*, dan lainnya.

- (2) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Perubahan Undang-undang Perindustrian menjadi penting dalam menjamin keberlanjutan arah perindustrian nasional. Rancangan Undang-undang ini memuat perubahan ketentuan transformasi digital, keamanan data dan siber industri, pabrik dan industri cerdas, serta pengadaan teknologi industri. Pembaruan ketentuan yang ada diharapkan dapat meningkatkan kerja sama internasional serta menciptakan iklim investasi bidang perindustrian yang berkelanjutan.

- (3) Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Rancangan Peraturan Presiden ini merupakan upaya perbaikan iklim investasi di Indonesia agar semakin kondusif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi makro yang berkelanjutan sekaligus Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di dalam menarik investasi asing. Perubahan kedua mengakomodir daftar bidang usaha prioritas, penerapan dalam kesesuaian ketentuan bidang usaha, penanaman modal, bidang usaha khusus (*single purpose*) serta pembaruan standardisasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



3.6

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Perlindungan sosial yang adaptif			
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03 (2024)	7,0 – 8,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	0,83 (2024)	0
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan			
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
7	Persentase desa mandiri (%)	3,9 (2021)	4,00
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
8	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,13 (2022)	44,35

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan.
- (2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

- (4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Satu sistem registrasi sosial ekonomi dilaksanakan melalui (a) pengembangan tata kelola registrasi sosial ekonomi, (b) penguatan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, serta (c) sinkronisasi administrasi kependudukan dan statistik hayati dengan sistem registrasi sosial ekonomi.
- (2) Reformasi sistem jaminan sosial nasional dilakukan melalui (a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional secara inklusif dengan peningkatan literasi jaminan sosial secara masif dan penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas; serta (b) penguatan program



dan kelembagaan jaminan sosial nasional dengan reformasi perlindungan hari tua, penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, peningkatan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program jaminan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan kanal resmi penyelenggara jaminan sosial.

- (3) Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dilakukan melalui (a) pengembangan dan sinkronisasi pendanaan yang berbasis risiko, (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat melalui kartu usaha, (c) penyaluran bantuan sosial yang adaptif melalui kartu kesejahteraan, (d) percepatan pelaksanaan reforma agraria, serta (e) penguatan pendamping pembangunan.
- (4) Pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan dilakukan melalui (a) penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lain; (b) pengembangan pendanaan perawatan/pengasuhan; serta (c) penguatan kapasitas perawatan masyarakat.
- (5) Inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan dilakukan melalui (a) penjangkauan pendataan kelompok rentan, serta (b) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan.
- (6) Pembangunan wilayah metropolitan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Medan, (b) pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, (c) pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta, (d) pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung, (e) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Semarang, (f) peningkatan kualitas Wilayah

Metropolitan Surabaya, (g) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar, (h) pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, (i) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar, dan (j) pengembangan Wilayah Metropolitan Manado.

- (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui (a) perencanaan dan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara, (b) pembangunan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara, (c) pembangunan sosial dan sumber daya manusia Ibu Kota Nusantara, (d) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Ibu Kota Nusantara, (e) pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, (f) pemindahan dan penyelenggaraan pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, serta (g) pembangunan pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara
- (8) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui (a) fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas, (b) pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu, (c) pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan, (d) penguatan ekosistem perumahan, serta (e) peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu.
- (9) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilakukan melalui (a) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, (b) transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan, (c) peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan, (d) penguatan tata kelola dan pendampingan desa adaptif, (e) transformasi pengembangan kawasan transmigrasi, (f) transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal, serta (g) transformasi pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan, dirumuskan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6.

Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut

Permasalahan dan tantangan. Program-program kesejahteraan yang sudah berjalan masih memiliki tantangan yaitu masih diperlukan (a) peningkatan akurasi basis data penyasaran kelompok miskin dan rentan dengan interoperabilitas dan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala dan memiliki tingkat kesejahteraan; (b) pengembangan mekanisme integrasi dan graduasi untuk program-program bantuan sosial; (c) peningkatan jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; (d) peningkatan sinergi serta mekanisme konvergensi dan komplementaritas antar program di berbagai kementerian/lembaga; serta (e) mendorong inklusivitas bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia di semua sektor.

Sementara itu, terkait program pemberdayaan dan wirausaha juga masih memerlukan (a) sinkronisasi dan standardisasi antar program pemberdayaan di berbagai kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah; (b) perluasan pendampingan dan kolaborasi multisektor dengan mitra inkubasi bisnis untuk menjangkau keseluruhan kelompok miskin dan rentan; (c) perluasan akses masyarakat

miskin dan rentan terhadap program-program redistribusi aset produktif dan akses pembiayaan usaha mikro serta ultra mikro; (d) peningkatan kemampuan dan kapasitas penerima manfaat melalui pelatihan terintegrasi; serta (e) peningkatan kapasitas layanan sentra/panti/balai, ketersediaan kesempatan kerja dan/atau usaha produktif.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Program ini memainkan peran penting dalam mendukung Prioritas Nasional 6 yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0–8,0 persen dan meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 sekaligus mengatasi tantangan penyelenggaraan kesejahteraan. Program ini mengintensifkan upaya melalui pengembangan kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha yang bertujuan menghapuskan kemiskinan absolut.

Kerangka pikir program mengadopsi pendekatan terintegrasi yang meliputi (a) akses terintegrasi ke layanan dasar, memastikan setiap warga negara memiliki akses ke layanan penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar; (b) pengurangan beban pengeluaran dan pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif melalui penyasaran berdasarkan kerentanan penduduk, diwujudkan melalui kartu kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan berbagai program bantuan dalam satu sistem target yang komprehensif; (c) peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha, dan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif dan setara melalui kartu usaha yang mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan; serta (d) penggunaan basis data terpadu yang mutakhir, konsisten, dan terinteroperabilitas antarprogram dan lembaga pemerintah melalui satu sistem registrasi sosial ekonomi.



Kerangka Pikir Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut

QW5: Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.



TARGET 2029:

Tingkat Kemiskinan 4,5 - 5,0%
Indeks Modal Manusia 0,61

Faktor Pendorong

- Satu Basis Data Regsosek sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan sinkronisasi target, Pendamping Pembangunan Terintegrasi
- Inklusivitas disabilitas, lansia, dan kelompok rentan

Pengarusutamaan Pembangunan Inklusif

3

Kartu Usaha: Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi & Layanan Pencari Kerja Inklusif

Akses Pasar & Sertifikasi Produk

Pendampingan Usaha & Penguatan Kapasitas usaha

Kartu Prakerja

Perizinan usaha

Kredit Mikro **

2

Kartu Kesejahteraan: Integrasi dan Peningkatan Kualitas Program Perlindungan Sosial

KIS

PKH

KIP

Kartu Sembako

KIS Lansia

Kartu Anak Sehat

Layanan Disabilitas & Kelompok Rentan lain

PBI Ketenagakerjaan

3

Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

Subsidi Energi, Listrik, & Pupuk

Fasilitas Pendidikan Kesehatan, dan Rehab Sosial

Transportasi Murah

Pangan & Perumahan Layak

4

** Meliputi akses kredit mikro seperti Kredit Ultra Mikro, PNM Mekaar, dan KUR super mikro. Kredit telah mencakup sektor perternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan pangan.

Kartu yang sudah ada saat ini

Manfaat baru dalam menu Kartu Sejahtera

- Menjangkau seluruh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan.
- Kolaborasi dan sinergi antar-program dan pemangku kepentingan.
- Pro poor planning budgeting.
- Pelaksanaan Kartu Sejahtera dan Kartu Usaha yang terintegrasi berdasarkan kerentanan membangun kemandirian.
- Terintegrasi membangun kemandirian.

Pendekatan terintegrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana kepada individu dan keluarga agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka panjang serta mempermudah akses ke penghidupan yang lebih baik. Selain itu, program ini juga menekankan inklusivitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak agar mereka juga dapat menikmati manfaat dari inisiatif ini secara adil dan merata.

Program ini dilaksanakan dengan melanjutkan dan memperluas manfaat program serta menambahkan program baru, yang meliputi (a) peningkatan akses layanan dasar yang mencakup

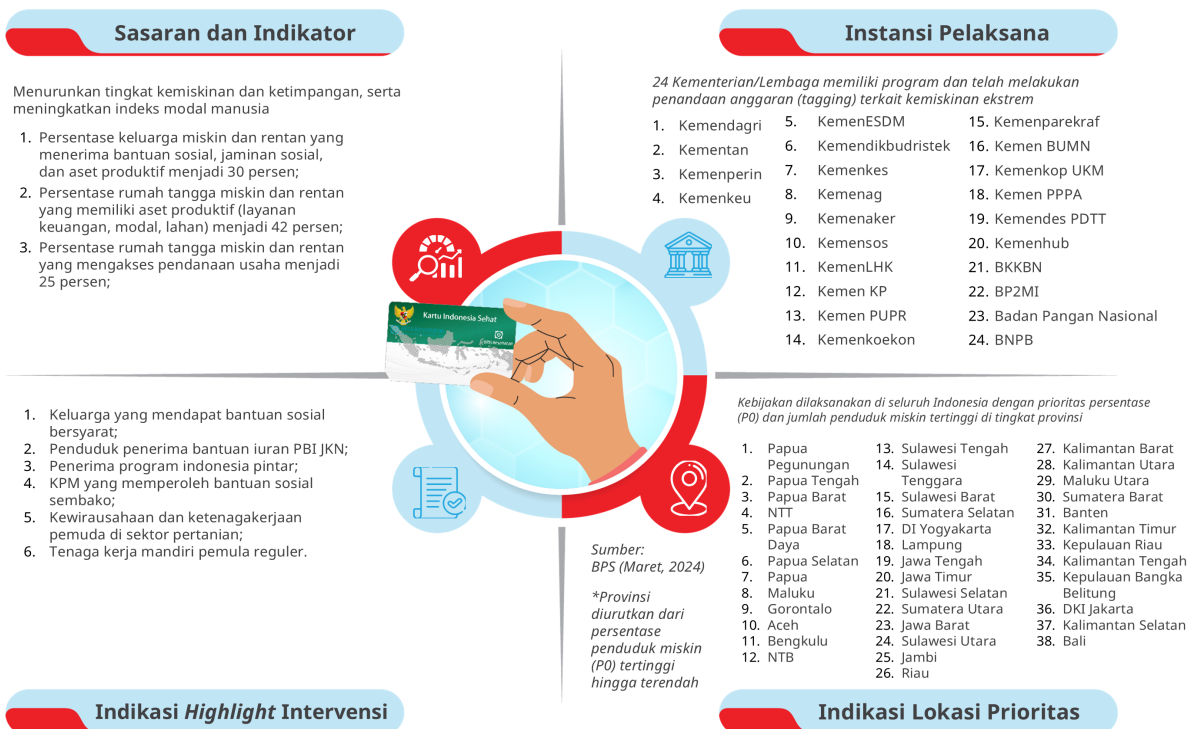
penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi sosial, transportasi murah, pangan, perumahan layak, serta subsidi energi yang tepat sasaran; (b) kartu kesejahteraan yang dipergunakan untuk mengintegrasikan berbagai bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih mudah diakses oleh penerima manfaat. Program ini mendukung penyaluran bantuan sosial secara non tunai, yang lebih transparan dan akuntabel, meliputi Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat Lanjut Usia, Kartu Anak Sehat, layanan untuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya, penerima bantuan iuran ketenagakerjaan, serta Bantuan Langsung Tunai; dan (c) kartu usaha yang mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan

vokasi, layanan pencari kerja inklusif, akses pasar dan sertifikasi produk, serta pendampingan dan penguatan kapasitas usaha. Program ini juga mencakup Kartu Prakerja untuk peningkatan keterampilan, penyederhanaan perizinan usaha, dan penyediaan kredit mikro bagi usaha kecil dan mikro, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Langkah-langkah pelaksanaan program diimplementasikan melalui tahapan berikut (a) penilaian kebutuhan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik berbagai kelompok sasaran berdasarkan kondisi kerentanan mereka, menggunakan data Registrasi Sosial dan Ekonomi untuk memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh; (b) memetakan program yang telah ada sesuai dengan kriteria dan tujuan dari program-program bantuan sosial dan pemberdayaan; (c) mengembangkan inisiatif dan inovasi program baru untuk memastikan

tercapainya tujuan dan visi misi pembangunan, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan, termasuk program-program pendukung seperti Kartu Anak Sehat, program kelanjutusiaan dan penyandang disabilitas, serta beberapa program adaptif lain sesuai dengan kebutuhan penduduk saat terjadi bencana; (d) memastikan bahwa semua program memiliki proses dan kriteria kelayakan yang jelas, konsisten, dan terstandar dengan satu data terpadu dari Registrasi Sosial dan Ekonomi yang terinteroperabilitas lintas program dan lembaga sehingga mampu menjangkau kelompok yang paling rentan dengan intervensi yang komprehensif; (e) memastikan keterkaitan dan ketersambungan antara program kartu kesejahteraan, kartu usaha, dan layanan dasar yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk intervensi yang lebih holistik dan berdaya guna optimal; serta (f) memantau peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat tergradasi dari kemiskinan.

Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut



Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.



Pembangunan Infrastruktur Desa dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

(a) Pembangunan infrastruktur desa

Permasalahan dan tantangan. Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait penyediaan infrastruktur hingga skala desa dibandingkan dengan negara lainnya yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development. Tantangan penyediaan infrastruktur di desa yaitu masih rendahnya capaian pada berbagai aspek, antara lain akses air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah, rasio elektrifikasi, dan hunian layak. Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi, terdapat desa yang layanan dasar sudah mantap namun juga terdapat desa yang layanan dasarnya memprihatinkan. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan dengan layanan dasar perkotaan, antara lain (i) akses air minum layak perdesaan 83,91 persen; (ii) akses ke sanitasi layak perdesaan 75,95 persen; (iii) rasio elektrifikasi di desa 99,85 persen namun belum mempertimbangkan kualitas infrastruktur kelistrikannya; (iv) penanganan jalan desa strategis melalui sumber pendanaan dana alokasi khusus transportasi perdesaan (2022–2024) baru sekitar 29 persen dari total kebutuhan penanganan jalan desa strategis sebesar 4.042,11 kilometer. Maka itu, pembangunan infrastruktur desa perlu dilaksanakan di seluruh desa, termasuk desa di kawasan transmigrasi, sesuai kebutuhan, prioritas dan status masing-masing desa (pengukuran berdasarkan Indeks Desa).

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pada pembangunan infrastruktur di desa, disusun skema penyelesaian permasalahan sebagai berikut (i) pembinaan pemerintah desa tentang prioritas pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk pemenuhan infrastruktur perdesaan, dan pendampingan dari pendamping desa; (ii) memfasilitasi peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis spasial dan peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; (iii) penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra desa dengan tujuan untuk menciptakan rantai suplai produk ekonomi yang selaras, termasuk pembangunan infrastruktur perumahan (khususnya hunian tapak) dan lingkungan permukiman serta mencakup desa-desa di kawasan transmigrasi dan perbatasan prioritas; serta (iv) peningkatan komitmen supra desa (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) serta pemangku kepentingan terkait lainnya mengenai urgensi pembangunan/pengelolaan infrastruktur desa secara terintegrasi dan komprehensif.

Program pembangunan infrastruktur desa akan dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dengan infrastruktur supra desa sehingga tercapai rantai suplai produk ekonomi yang selaras, yang mencakup pembangunan infrastruktur perumahan (khususnya hunian tapak) dan lingkungan permukiman serta infrastruktur konektivitas. Infrastruktur perumahan perlu dilakukan dan terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya sehingga pemanfaatan perumahan yang dibangun akan lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran khususnya di perdesaan. Pembangunan infrastruktur desa ini dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hulu ke hilir aktivitas masyarakat di perdesaan terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, produksi, pengolahan, distribusi, hingga jasa.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Sasaran dan Indikator

Terciptanya pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur perdesaan

1. Persentase desa dengan air minum layak mencapai 35 %;
2. Persentase desa dengan sanitasi layak mencapai 98 %.

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Otorita Ibu Kota Nusantara;
5. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Pemerintah Desa.

1. Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan;
2. Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan;
3. Sistem drainase yang dikembangkan di kawasan transmigrasi;
4. Sarana permukiman yang dikembangkan di kawasan transmigrasi;
5. Jalan non-status yang dibangun di kawasan transmigrasi;
6. Jalan strategis yang dibangun di kawasan perbatasan;
7. OM akses internet.

Lokasi prioritas infrastruktur desa terdiri dari:

1. 37 kabupaten (terdapat di 11 provinsi), yang terdiri dari 6.330 desa, dimana sebanyak 1.849 desa tertinggal dan 4.481 desa sangat tertinggal;
2. kawasan transmigrasi (terdapat di 14 provinsi), yang terdiri dari 140 desa, dimana sebanyak 133 desa tertinggal dan 7 desa sangat tertinggal;
3. kawasan perbatasan (terdapat di 15 provinsi), yang terdiri dari 877 desa, dimana sebanyak 648 desa tertinggal dan 229 desa sangat tertinggal;
4. Kawasan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra IKN (2 kabupaten), yang terdiri dari 18 desa;
5. 42 kabupaten/kota prioritas penyusunan masterplan (23 kota dan 19 kab);
6. Kawasan perdesaan tematik berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata dalam kabupaten/kota terkait (7 kabupaten) yang terdiri dari 70 desa.

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Permasalahan dan tantangan.

Pemenuhan 100 persen akses rumah tangga terhadap rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum, air limbah, dan persampahan) pada tahun 2045 masih menjadi permasalahan dan tantangan ke depan. Saat ini, akses rumah layak huni secara nasional hanya sebanyak 63,15 persen, dimana 59,91 persen berada di perdesaan dan 65,47 persen berada di perkotaan. Selain itu, masih terdapat 36,85 persen (26,33 juta) rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak. Adapun sebanyak 82,47 persen rumah tangga membangun rumahnya secara mandiri yang mana 37,10 persen di antaranya tidak

layak huni. Lebih lanjut, kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor utama penyebab ketidaklayakan hunian tersebut. Sementara itu, masih terdapat *backlog* kepemilikan hunian sebesar 9,68 juta rumah tangga (70 persen diantaranya adalah masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah). Kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial masyarakat juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses rumah layak huni.

Tantangan ke depan dalam penyediaan rumah adalah memastikan ketercapaian target pemenuhan akses rumah layak huni, baik di perdesaan maupun di perkotaan dengan intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada tahun 2029, gap penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mencapai 74 persen adalah sebanyak 10,84 juta rumah tangga. Target 362 ribu rumah pada

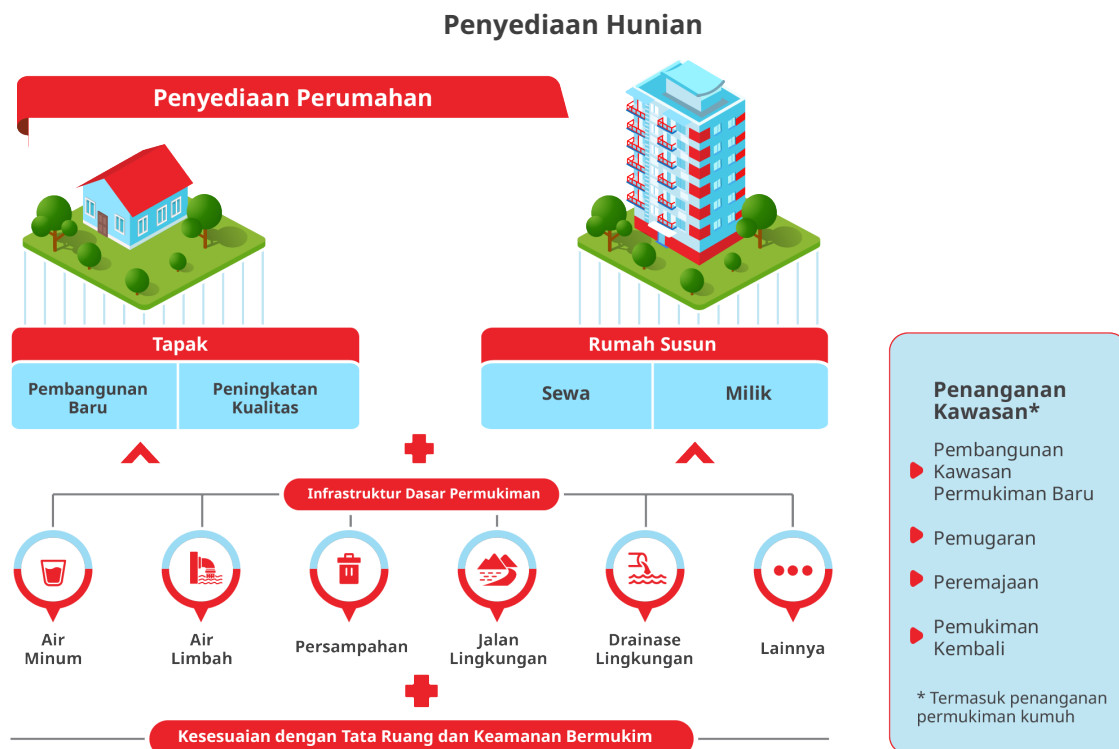


tahun 2025 akan menjadi upaya pemerintah dalam kerangka pemenuhan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaan program perumahan terdapat tantangan diantaranya (i) masih rendahnya penyediaan akses rumah layak huni yang terjangkau dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman dan konektivitas sehingga berpotensi menimbulkan kawasan permukiman kumuh; (ii) terbatasnya kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; dan (iii) terbatasnya fasilitas pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara mandiri.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan, jalan, dan drainase). Skenario pelaksanaan penyediaan rumah akan dipenuhi dengan skema sebagai berikut:

- (i) Perkotaan, meliputi (1) penyediaan hunian tapak dan vertikal yang terhubung dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum, air limbah, persampahan, jalan, drainase dan transportasi publik); dan (2) penanganan permukiman kumuh, diutamakan peremajaan permukiman kumuh;
- (ii) Perdesaan, meliputi (1) fasilitasi pembangunan hunian baru secara swadaya yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman, termasuk perumahan berkelompok; (2) peningkatan kualitas hunian secara swadaya yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman; dan (3) penanganan permukiman kumuh mencakup pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali;
- (iii) *Enabling environment*, meliputi penegakan tata ruang, kepastian bermukim, dan keandalan bangunan.



Penyediaan rumah murah bersanitasi baik terutama bagi generasi milenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah akan dilakukan melalui dua skema yaitu pertama penyediaan perumahan tapak baik dalam bentuk pembangunan baru atau peningkatan kualitas (revitalisasi/perbaikan). Kedua, pembangunan rumah susun sewa dan rumah susun milik. Penyediaan perumahan perlu dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air

minum, air limbah, persampahan, jalan, drainase lingkungan, dan lainnya) serta kesesuaian dengan tata ruang dan keamanan bermukim. Penyediaan perumahan dan permukiman ini secara spasial atau penanganan kawasan akan dilakukan melalui pembangunan kawasan permukiman baru, pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali, termasuk untuk penanganan permukiman kumuh.

Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik

Sasaran dan Indikator

Tersedianya hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan dan perkotaan

1. Jumlah pembangunan dan peningkatan kualitas hunian di desa/kelurahan (20 ribu unit);
2. Jumlah penyediaan hunian tapak dan vertikal (342 ribu unit).

Hunian tapak di perdesaan

1. Bantuan pembangunan rumah swadaya;
2. Penyediaan rumah khusus regular;
3. Penanganan permukiman kumuh terpadu melalui DAK PPKT yang terdiri dari (i) air minum; (ii) air limbah; (iii) rekonstruksi rumah swadaya; serta (iv) jalan dan drainase lingkungan

Hunian tapak dan vertikal di perkotaan

1. Bantuan PSU bidang perumahan;
2. Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh;
3. Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/Pekerja;
4. Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI;
5. Fasilitas Pembiayaan Perumahan;
6. Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka.

Indikasi Highlight Intervensi

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Sosial;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. BP Tapera;
6. BUMN;
7. Pemerintah daerah yang menjadi lokasi prioritas.

Lokasi prioritas hunian terdiri dari kabupaten/kota yang berada dibawah capaian rata-rata untuk akses rumah layak huni nasional pada tahun 2023:

1. 250 kabupaten/kota (ada di 31 provinsi);
2. 10 Wilayah Metropolitan (33 kabupaten dan 26 kota);
3. Kawasan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra (2 kabupaten), yang terdiri dari 18 desa.

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.



Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkotaan bertujuan untuk mentransformasi tata kelola perkotaan, khususnya kawasan perkotaan secara terpadu dan inovatif. Upaya ini penting untuk didorong karena pengelolaan perkotaan masih terhambat oleh kebijakan yang terpisah dan kurangnya peraturan khusus tentang perkotaan. Rancangan Undang-undang ini akan mendefinisikan perkotaan, ketentuan prinsip dan standar pelayanan perkotaan yang kontekstual, pengelolaan perkotaan untuk lintas wilayah, memberi peran warga perkotaan dalam pengelolaan perkotaan, memperkuat penggunaan data dan teknologi informasi dalam pengelolaan perkotaan serta upaya pengendalian perkotaan.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Kelanjutusiaan

Kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia membutuhkan pengaturan yang komprehensif di level Undang-Undang. Secara umum, Rancangan Undang-Undang tentang Kelanjutusiaan ini akan memberikan panduan mengenai kebijakan kelanjutusiaan untuk mempersiapkan kehidupan lanjut usia yang sehat, produktif dan berdaya dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan tempat tinggal, pemberdayaan, perlindungan sosial, pemenuhan hak, dan aspek lainnya, bukan hanya untuk lanjut usia tetapi juga untuk pemangku kepentingan lainnya.

(3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Aglomerasi

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, diamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan aglomerasi. Pembentukan kawasan aglomerasi bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitarnya (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024). Peraturan pemerintah tersebut akan memuat ketentuan dan pertimbangan bagi daerah-daerah sekitar Jakarta yang dapat dimasukkan dalam kesatuan entitas kawasan aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsional dan berdampak bagi pengembangan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi

Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan lintas wilayah dan sektoral yang termasuk dalam cakupan kawasan aglomerasi (Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024). Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi akan memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi (Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024).



3.7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi			
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani			
5	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68 ^{a)}
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94



No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba			
8	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan			
9	<i>Clearance rate</i> tindak pidana judi	33,28	35,00
10	<i>Clearance rate</i> tindak pidana penyelundupan	5,88	7,00
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan			
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi			
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30–12,36
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1–10,3
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Instrumen evaluasi pada tahun 2025 akan mengalami perubahan, Unit Lokus Evaluasi juga akan mengalami perubahan sehingga nilai nasional ataupun per kategori instansi pemerintah tersebut diproyeksikan akan turun.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik, (b) reformasi hukum, (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi, (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*.
- (2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan, (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik, dan (c) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani.
- (3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- (4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan.
- (5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara.
- (6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk

mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

- (7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Reformasi politik dilaksanakan melalui (a) penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik; (b) penguatan kualitas tata kelola pemilu dan partai politik; serta (c) penyusunan pedoman/kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Reformasi hukum dilakukan melalui (a) transformasi tata kelola regulasi, (b) penerapan dan penegakan hukum, serta (c) penguatan budaya hukum.
- (3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui (a) budaya antikorupsi, (b) pencegahan tindak pidana korupsi, dan (c) pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Penguatan kelembagaan hukum dilakukan melalui (a) penguatan lembaga kekuasaan kehakiman serta (b) penguatan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.
- (5) Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.
- (6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) optimalisasi layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba; serta (f) meningkatkan kemampuan *surveillance* dan intelijen Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (7) Penanggulangan judi dan penyelundupan dilakukan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian *online*, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.
- (8) Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan melalui (a) manajemen penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja sumber daya manusia aparatur; (b) penguatan manajemen talenta dan karier aparatur sipil negara; (c) penguatan kepemimpinan, budaya kerja, dan citra institusi; (d) perluasan akses belajar bagi aparatur sipil negara; (e) perbaikan sistem pelayanan kepegawaian melalui platform tunggal manajemen aparatur sipil negara; (f) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (g) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (h) penataan desentralisasi dan otonomi daerah; serta (i) penguatan manajemen kinerja pembangunan.



- (9) Inklusivitas dan transformasi digital layanan publik dilakukan melalui (a) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (b) digitalisasi pelayanan publik; (c) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (d) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (e) perluasan akses pelayanan publik

- (10) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui (a) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dan (b) efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah.

- (11) Optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui (a) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, (b) optimalisasi *local taxing power*, serta (c) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dilakukan melalui (i) pembenahan kelembagaan penerimaan negara, (ii) percepatan implementasi *core tax system* dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data, (iii) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian, (iv) optimalisasi pengumpulan pajak atas wajib pajak berpendapatan tinggi, (v) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi, serta (vi) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi.

Pada tingkat daerah, optimalisasi *local taxing power* dilakukan melalui serangkaian upaya untuk implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dilakukan melalui reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset barang milik negara, serta inovasi layanan.

- (12) Sementara itu, optimalisasi belanja negara dilakukan melalui (a) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat; (b) optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah; serta (c) peningkatan kualitas belanja daerah.

Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dilakukan melalui (i) pengalokasian belanja negara yang diutamakan pada implementasi prioritas nasional dan penguatan *well-being*, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial), percepatan dan pemerataan konektivitas, serta pelaksanaan transformasi ekonomi; (ii) penajaman program subsidi untuk mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan menjaga daya beli; (iii) penataan kelembagaan dan regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dilakukan melalui (i) penguatan kualitas belanja transfer ke daerah untuk mendorong produktivitas dan berorientasi pada *outcome*, (ii) penguatan skema *earmarking* transfer ke daerah terutama dana alokasi khusus fisik, serta (iii) penguatan sinergi dan harmonisasi transfer ke daerah dengan belanja pemerintah pusat.

Peningkatan kualitas belanja daerah dilakukan melalui (a) pemetaan dan evaluasi alokasi belanja pegawai di daerah dan (b) pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik di daerah.

- (13) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilakukan melalui (a) optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang secara selektif dan prudent dalam

rangka menjaga kesinambungan fiskal dan (b) ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non utang yang inovatif. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui optimalisasi instrumen surat berharga negara dan pinjaman secara selektif dan berfokus pada sektor produktif. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non utang yang inovatif dilakukan melalui (i) optimalisasi pembiayaan yang berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan *blended finance*; (ii) optimalisasi pembiayaan investasi pemerintah pada sektor yang memberikan imbal hasil serta memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian; serta (iii) penguatan peran *Sovereign Wealth fund* dan *Special Mission Vehicle* untuk mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan inovasi pembiayaan di tingkat daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan pinjaman daerah, *blended finance*, serta pengembangan lembaga pengelola pembiayaan pembangunan daerah.

- (14) Pengendalian komponen inflasi harga bergejolak dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi pangan bergejolak di bawah lima persen melalui penyelesaian permasalahan struktural di antaranya (a) optimalisasi belanja negara dan daerah untuk penguatan infrastruktur, konektivitas, dan ketersediaan pasokan melalui subsidi ongkos angkut, bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah; (b) percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan; (c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi pascapanen); (d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi pangan; (e) penguatan logistik melalui pemenuhan sarana prasarana konektivitas, penyediaan

kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* dan layanan angkutan perintis pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan serta koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f) pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan nasional; serta (g) penguatan sinergi antar kementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

- (15) Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia dan keamanan insani dilakukan melalui (a) peningkatan pelindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk tenaga kerja Indonesia serta (b) penanganan konflik sosial.

Selain intervensi-intervensi yang telah dijabarkan, terdapat juga program yang menjadi penekanan serta memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran prioritas nasional, yaitu (1) menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) serta Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; dan (2) optimalisasi penerimaan negara.

Menaikkan Gaji Aparatur Sipil Negara (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh) serta Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia

Permasalahan dan tantangan. Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa merupakan pilar penting untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Namun demikian kesejahteraan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia saat ini masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak.



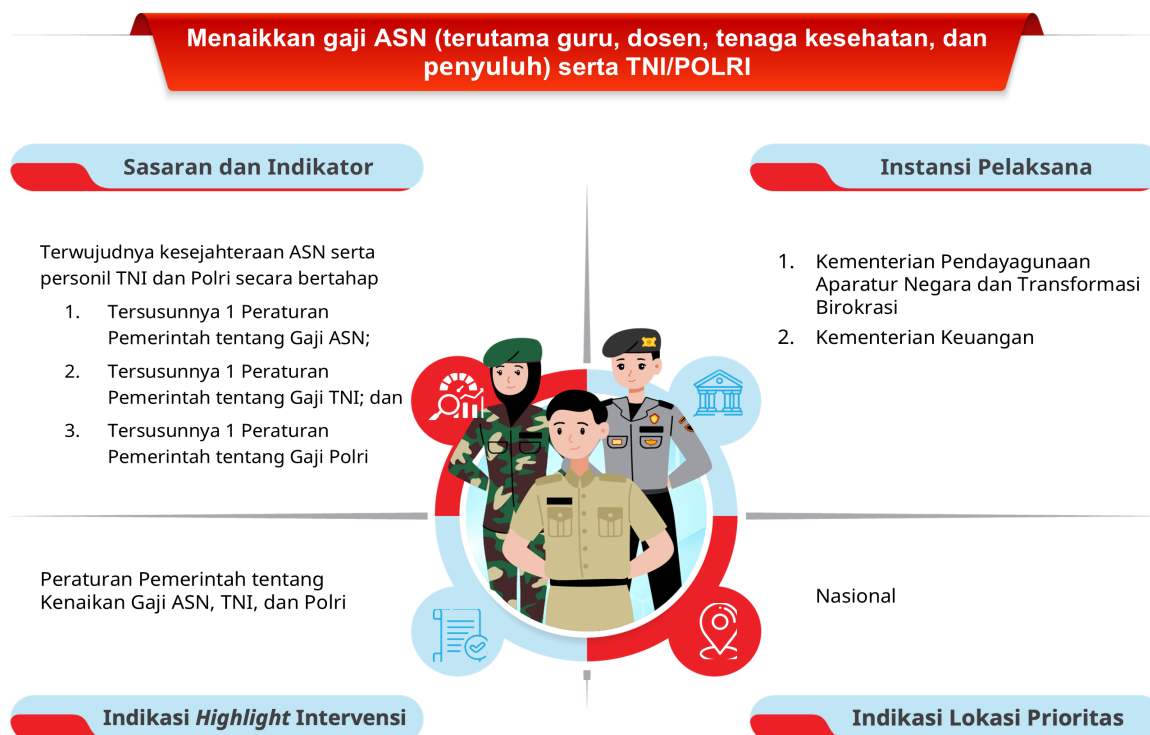
Permasalahan terkait kesejahteraan aparatur sipil negara, antara lain (a) disparitas penghasilan terjadi pada instansi pusat dan instansi daerah, hal ini disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan; (b) *dual system* penggajian yang terdiri dari gaji pokok berbasis golongan dan pangkat, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai yang didasarkan pada kelas jabatan; (c) manfaat pensiun yang diterima pegawai masih rendah; dan (d) sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip *competitiveness* dengan sektor swasta.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia diperlukan upaya peningkatan pendapatan pegawai secara layak. Dalam jangka pendek, upaya meningkatkan gaji pegawai dapat dilakukan melalui menaikkan besaran gaji pokok sebagai penghasilan yang secara tetap diperoleh pegawai setiap bulan. Kenaikan gaji pokok ini dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta meningkatkan manfaat pensiun yang akan diperoleh saat pensiun ke depan dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal dan fokus pembangunan.

Kenaikan gaji pokok bagi aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dapat dicapai dengan perubahan peraturan gaji saat ini, yaitu (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; (b) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam jangka menengah perlu dilakukan transformasi sistem penggajian untuk mengurangi disparitas penghasilan. Arah transformasi sistem penggajian diarahkan pada upaya perbaikan yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja dan kesempatan untuk berkembang bagi aparatur sipil negara.



Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Optimalisasi Penerimaan Negara

Permasalahan dan tantangan. Ruang fiskal di Indonesia saat ini belum memadai untuk dapat memberikan stimulus yang efektif bagi pembangunan, salah satunya disebabkan oleh rendahnya penerimaan negara. Rendahnya penerimaan negara di Indonesia menjadi tantangan besar dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia ditargetkan keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju.

Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan. Sebagai contoh, Korea Selatan pada tahun 1995 berhasil lepas dari *middle income trap*, dengan rasio penerimaan negara pada saat itu mencapai 17,6 persen produk domestik bruto. Chile pada tahun 2013 juga berhasil lepas dari *middle income trap*, dengan rasio penerimaan negara sebesar 20,6 persen produk domestik bruto.

Rendahnya penerimaan negara di Indonesia, utamanya disebabkan masih rendahnya penerimaan perpajakan. Rasio penerimaan perpajakan di Indonesia sebesar 10,4 persen produk domestik bruto (2022) merupakan yang paling rendah dibandingkan negara-negara ASEAN antara lain Filipina (14,6 persen produk domestik bruto), Thailand (14,1 persen produk domestik bruto), Singapura (12,9 persen produk domestik bruto), Malaysia (11,2 persen produk domestik bruto), dan Timor Leste (11,2 persen produk domestik bruto).

Capaian penerimaan perpajakan yang belum optimal tersebut disebabkan beberapa permasalahan utama, meliputi (a) terbatasnya tata kelola kelembagaan eksisting, seperti: keterbatasan organisasi dan pengelolaan SDM dari sisi kewenangan dan fleksibilitas, keterbatasan pengelolaan anggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana; (b) tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) yang masih rendah; serta (c) penyalahgunaan kewenangan pada unit pengelola penerimaan negara yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara. Di samping itu, adanya perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya sektor jasa dan menguatnya aktivitas ekonomi digital, serta volatilitas harga komoditas membawa pengaruh terhadap belum optimalnya capaian penerimaan perpajakan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan di atas, pemerintah merencanakan optimalisasi penerimaan negara melalui transformasi kelembagaan penerimaan negara yang dapat mengimplementasikan *core tax* secara terintegrasi, peningkatan pelayanan dan kepatuhan perpajakan serta mewujudkan inisiatif berbagai kebijakan penerimaan negara yang adil, berdaya saing, efisien, dan optimal.

Studi literatur menunjukkan bahwa kelompok negara berpendapatan tinggi yang mengadopsi kelembagaan perpajakan semi otonom, mampu mengumpulkan penerimaan perpajakan pada kisaran 20 persen produk domestik bruto, lebih tinggi dibandingkan negara dengan bentuk kelembagaan perpajakan bagian dari otoritas fiskal (*non-independent*). Dengan langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal dalam jangka menengah-panjang.



OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Sasaran dan Indikator

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi

- Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB sebesar 12,30-12,36
- Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB sebesar 10,1-10,3

Transformasi Kelembagaan Penerimaan Negara

- Penyusunan desain kelembagaan penerimaan negara sesuai dengan "best practice"
- Pemisahan fungsi kebijakan dan implementasi/administrasi perpajakan
- Optimalisasi implementasi *core tax* yang terintegrasi
- Integrasi kebijakan dan perbaikan administrasi perpajakan yang adil, berdaya saing, efisien dan optimal

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Koordinator Perekonomian
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Hukum dan HAM

Nasional

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025.

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan nasional. Pengaturan yang dibutuhkan dalam perubahan undang-undang ini yaitu: (a) meningkatkan konsistensi antara prioritas nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah; (b) meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; serta (c) koordinasi pengendalian, pemantauan,

dan evaluasi pembangunan nasional melalui pelembagaan manajemen risiko pembangunan nasional.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengatur terkait pembaharuan substansi terhadap proses bisnis pailit khususnya penataan terhadap aspek-aspek hubungan perikatan dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang ini mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan kepercayaan investor.

- (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Revisi Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sangat penting karena ada

kesalahpahaman yang meluas tentang siapa yang berhak menerima bantuan hukum, mengakibatkan pengaturan yang tidak memadai untuk kelompok rentan. Syarat-syarat yang saat ini ada tidak memadai untuk mendorong keberadaan pemberi bantuan hukum yang efektif, serta tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum

- (4) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan United Nation Convention Against Corruption yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

- (5) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membutuhkan pembaruan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tekanan disruptif teknologi informasi. Perubahan undang-undang ini dilaksanakan pada beberapa ketentuan yang meliputi kerangka catatan pinggir, penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan stelsel aktif pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, pemanfaatan dan perlindungan data kependudukan, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, *contrarius actus*, pendanaan dan sanksi, serta pengaturan terkait identitas kependudukan digital, Kartu Identitas Anak, dan pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

- (6) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha bertujuan untuk menyatukan pengaturan pembentukan badan usaha yang saat ini tersebar di beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan lainnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memodernisasi pembentukan badan usaha guna mengakomodasi perkembangan bisnis digital dan aktivitas ekonomi lintas batas.

- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sangat penting mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan jaminan atas benda bergerak yang efisien, serta belum adanya produk hukum terintegrasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait penjaminan benda bergerak. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak bertujuan mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kebendaan yang saat ini tersebar pengaturannya seperti jaminan fidusia, gadai, dan resi gudang.

- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan regulasi ini diperlukan untuk mendukung upaya transformasi tata kelola regulasi. beberapa hal yang perlu diatur yaitu: (a) penguatan sinergitas tata kelola regulasi di tingkat pusat dan daerah; (b) penguatan pemantauan dan evaluasi regulasi melalui *self assessment* oleh kementerian/lembaga; (c) penguatan tata kelola peraturan menteri, peraturan lembaga, dan sejenisnya; serta (d) pengaturan komprehensif mengenai metode omnibus.

- (9) Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional sangat diperlukan untuk menetapkan arah pembinaan hukum nasional yang mampu mengantisipasi



tantangan global di masyarakat secara efektif. Rancangan Undang-Undang ini akan mencakup program pembinaan hukum nasional yang komprehensif, baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan hukum, serta bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan setiap individu, badan hukum, atau badan publik yang melakukan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

- (10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh

Rancangan peraturan presiden ini disusun untuk menyediakan payung hukum untuk pengaturan pemanfaatan ruang kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh sebagai kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dengan adanya pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan ini diharapkan tindakan-tindakan ilegal seperti perkebunan sawit ilegal, perambahan hutan ilegal dan perburuan satwa ilegal dapat dicegah. Rancangan peraturan presiden ini mendukung sasaran pembangunan dengan mengatur penguatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang wilayah dengan pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik *Online Single Submission*.

- (11) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda

Dalam rangka menyediakan payung hukum untuk pengaturan pemanfaatan ruang Kawasan Selat Sunda sebagai pendukung pengembangan ekonomi di Kawasan Selat Sunda yang merupakan hub konektivitas Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda juga mengakomodir strategi-strategi pengurangan risiko bencana tinggi seperti gempa bumi dan tsunami. Rancangan peraturan presiden ini mendukung sasaran pembangunan

dengan mengatur penguatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang wilayah dengan pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik *Online Single Submission*.

- (12) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Berbak - Bukit Tigapuluh

Rancangan peraturan presiden ini disusun untuk menyediakan payung hukum untuk pengaturan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Berbak - Bukit Tigapuluh untuk memastikan fungsi taman nasional yang meliputi pusat penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, penunjang kebudayaan, pariwisata dan rekreasi dapat berjalan. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Berbak - Bukit Tigapuluh diharapkan dapat memberikan arahan pemanfaatan ruang yang mengedepankan prinsip konservasi dan kelestarian lingkungan di dalamnya. Rancangan peraturan presiden ini mendukung sasaran pembangunan dengan mengatur penguatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang wilayah dengan pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik *Online Single Submission*.

- (13) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Nasional Jagoi Babang

Rancangan peraturan presiden ini disusun untuk menyediakan payung hukum untuk pengaturan pemanfaatan ruang kawasan Jagoi Babang yang berpotensi sebagai pintu gerbang ekonomi perbatasan Indonesia dan Malaysia dan dengan tetap mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan. Rancangan peraturan presiden ini mendukung sasaran pembangunan dengan mengatur penguatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang wilayah dengan pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik *Online Single Submission*.



3.8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	71,07
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58,39
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76,77
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).



Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
- (2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui (a) pembangunan berketahanan iklim, dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat dilaksanakan melalui (a) penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (b) jaminan hak beragama dan kehidupan beragama yang harmonis; (c) peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; (e) transformasi layanan kantor urusan agama yang berkualitas, merata, dan inklusif; (f) transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman; (g) transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal; serta (h) pengembangan dana sosial keagamaan produktif.

- (2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa dilaksanakan melalui (a) penguatan karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (b) perlindungan dan pelestarian warisan budaya; (c) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (d) penjaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (e) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (f) pengembangan budaya bahari dan revitalisasi jalur rempah; serta (g) transformasi layanan kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa.

- (3) Pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui (a) ketahanan pesisir dan laut, (b) pembangunan dan konservasi sumber daya air, (c) pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim.

- (4) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna melalui (a) peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi; (b) peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana; serta (e) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

Keseimbangan antara nilai-nilai agama, kebudayaan, dan lingkungan alam menjadi aspek fundamental dalam proses pembangunan. Untuk mendukung keseimbangan antara ketiga aspek tersebut dirumuskan program yang menjadi penekanan, yaitu (1) penguatan zakat-wakaf produktif dalam pembangunan; (2) revitalisasi cagar budaya sebagai pusat pengembangan karakter, jati diri, dan kesejahteraan rakyat; serta (3) peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Penguatan Zakat-Wakaf Produktif dalam Pembangunan

Program Penguatan Zakat-Wakaf Produktif dalam pembangunan merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi zakat-wakaf.

Kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, khususnya lembaga zakat dan wakaf, akan meningkatkan kualitas pengembangan zakat-wakaf produktif. Lebih lanjut, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat relasi antarumat beragama yang berbasis nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Permasalahan dan tantangan. Potensi zakat-wakaf produktif di Indonesia cukup besar, pada tahun 2023 potensi zakat sebesar Rp327,6 Triliun dan wakaf uang sebesar Rp180 Triliun. Meskipun demikian, pengembangan zakat-wakaf produktif belum berjalan secara optimal dan menghadapi beberapa kendala, antara lain (a) transparansi dan akuntabilitas publik yang minim sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana zakat-wakaf, (b) pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberdayaan dana zakat-wakaf masih rendah, (c) sistem validasi data penerima manfaat zakat-wakaf masih lemah dan belum terintegrasi, (d) kemampuan kewirausahaan dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif dan pemanfaatan dana zakat-wakaf masih lemah, (e) kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola zakat-wakaf masih terbatas, serta (f) sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan masih kurang optimal.



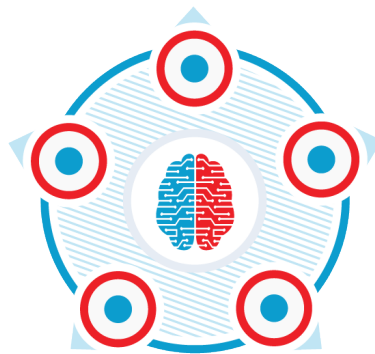
Kerangka Pikir Penguatan Zakat-Wakaf Produktif dalam Pembangunan

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pengembangan Zakat-Wakaf Produktif

1. Penguatan peran lembaga pengelola zakat-wakaf produktif melalui perluasan akreditasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perluasan jangkauan wilayah kerja
2. Penyusunan regulasi pengelolaan zakat-wakaf produktif di tingkat nasional dan daerah
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Amil dan Nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat-wakaf produktif

Peran Mitra Pembangunan

1. Mendorong pengembangan zakat-wakaf menggunakan pendekatan berbasis komunitas
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola zakat-wakaf
3. Advokasi Kebijakan Publik yang mendukung pengelolaan zakat-wakaf produktif



Peran Pemerintah Daerah

1. Menyusun dan menerapkan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif
2. Memprioritaskan integrasi zakat-wakaf produktif dalam rencana pembangunan daerah
3. Menjembatani koordinasi antara lembaga zakat-wakaf, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan di daerah dengan pemerintah pusat
4. Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat-wakaf dalam pengentasan kemiskinan

Penguatan Mekanisme Koordinasi dalam Pengembangan Zakat-Wakaf Produktif

1. Sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat-wakaf produktif
2. Integrasi basis data penerima manfaat zakat-wakaf produktif dengan basis data lintas-sektor
3. Pembentukan kelompok kerja bersama untuk memastikan adanya sinergi pengelolaan zakat-wakaf produktif
4. Pengembangan mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara terpadu antar pemangku kepentingan dalam pengembangan zakat-wakaf produktif

Dukungan Lintas Sektor

1. Kemenag: Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan zakat-wakaf produktif
2. Kemensos: Integrasi basis data, program, dan kegiatan pengentasan kemiskinan dengan zakat-wakaf produktif
3. Kemendagri: Penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
4. Baznas: Mengkoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat secara nasional
5. BWI: Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam upaya mengatasi persoalan pengembangan zakat-wakaf produktif, perlu dilakukan penguatan tata kelola dan mekanisme koordinasi untuk mengoptimalkan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat-wakaf produktif. Penguatan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

pengelolaan zakat-wakaf produktif. Sedangkan penguatan mekanisme koordinasi dilakukan untuk memastikan sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan zakat-wakaf produktif. Adapun kerangka berpikir program unggulan penguatan zakat-wakaf produktif dalam pembangunan ditunjukkan pada Gambar di atas.

Penguatan Peran Zakat-Wakaf Produktif dalam Pembangunan

Sasaran dan Indikator

Terwujudnya program unggulan penguatan zakat-wakaf produktif untuk memperluas layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta pengentasan kemiskinan

1. Realisasi penyaluran zakat sebesar 36,8 Triliun
2. Realisasi penyaluran wakaf uang sebesar 0,1 Triliun

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia

1. Penyelarasan data mustahiq dengan data kemiskinan regsosek
2. Pemberdayaan rumah tangga miskin melalui zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya
3. Penguatan literasi program pengentasan Kemiskinan kepada lembaga amil zakat & nazhir
4. Pembinaan kepada lembaga pengumpul dan pengelola zakat
5. Pembinaan kepada lembaga pengelola wakaf

Seluruh Provinsi

Indikasi *Highlight* Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas

Revitalisasi Cagar Budaya sebagai Pusat Pengembangan Karakter, Jati Diri, dan Kesejahteraan Rakyat

Pengelolaan cagar budaya menjadi bagian penting dalam proses memperkuat karakter, jati diri, dan kesejahteraan. Program ini merupakan ikhtiar menyelaraskan antara pelestarian budaya dan aktivitas ekonomi (*cultural preservation and economic activity*) untuk pertumbuhan inklusif (*cultural heritage for inclusive growth*) yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8.

Permasalahan dan tantangan. Indonesia tercatat memiliki potensi cagar budaya mencapai 4.760, dan 220 di antaranya merupakan Cagar Budaya Nasional. Walaupun memiliki potensi yang sangat besar, pengelolaan cagar budaya masih menghadapi beragam persoalan. Pelindungan terhadap cagar budaya masih kurang optimal yang tecermin dari maraknya aksi vandalisme dengan melakukan kerusakan, penghancuran, pencurian, dan pencemaran lingkungan di sekitar cagar budaya. Selain itu, cagar budaya belum dikelola secara terpadu dan terintegrasi dengan bidang pembangunan lainnya. Padahal cagar budaya dapat dikembangkan menjadi pusat pengembangan karakter dan jati diri bangsa serta pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan.



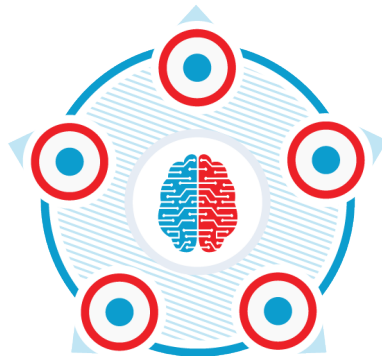
Kerangka Pikir Revitalisasi Cagar Budaya sebagai Pusat Pengembangan Karakter, Jati Diri, dan Kesejahteraan Rakyat

Penguatan Karakter dan Pemanfaatan Potensi Sosial-Ekonomi Cagar Budaya

1. Identifikasi nilai budaya lokal
2. Pemberdayaan komunitas dan masyarakat lokal
3. Penanaman nilai-nilai budaya berbasis cagar budaya pada satuan pendidikan
4. Penetapan kawasan prioritas pemajuan kebudayaan
5. Pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peran Mitra Pembangunan

1. Pendanaan dan *Sponsorship*
2. *Expertise* dan Pengetahuan
3. Pendekatan berbasis komunitas
4. Pendampingan pengelolaan cagar budaya



Peran Pemerintah Daerah

1. Melakukan pencatatan dan penyebarluasan informasi tentang cagar budaya
2. Memastikan peran aktif Tim Ahli Cagar Budaya
3. Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat terkait pemanfaatan cagar budaya
4. Fasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya
5. Memberikan upaya mitigasi untuk mencegah kerusakan cagar budaya yang ada di daerah
6. Melakukan pengawasan

Revitalisasi Cagar Budaya

1. Pemeliharaan cagar budaya
2. Konservasi dan restorasi
3. Peningkatan kualitas SDM pengelola
4. Penguatan regulasi dan perlindungan hukum
5. Revitalisasi fisik
6. Pengembangan kawasan penyangga cagar budaya

Dukungan Lintas Sektor

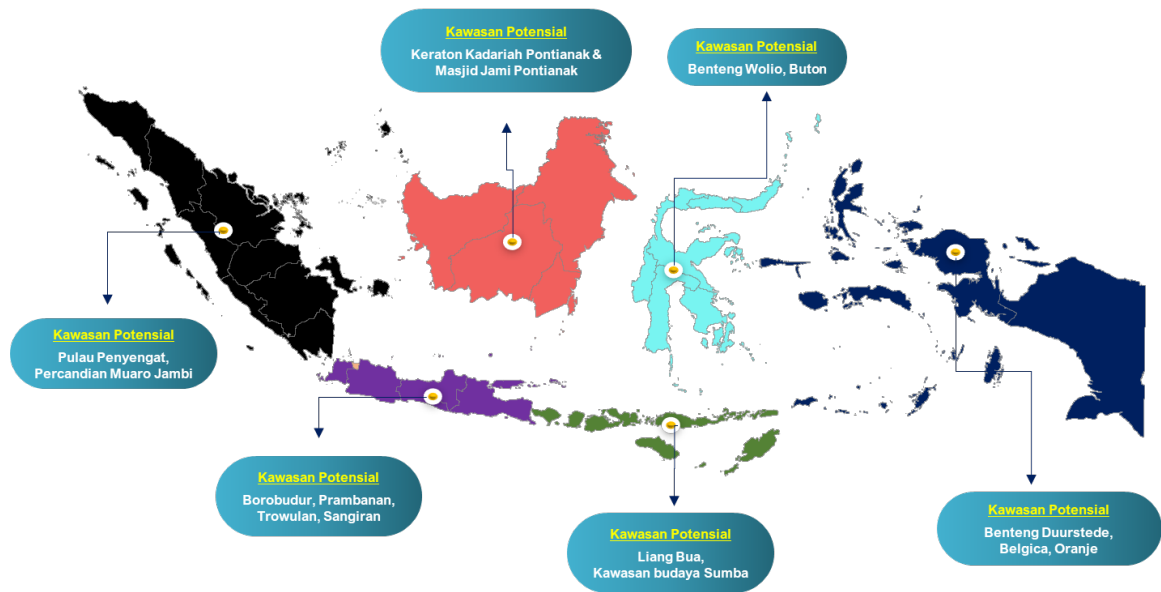
1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: Pendataan ODCB dan CB
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: Penanaman nilai-nilai budaya berbasis cagar budaya pada satuan Pendidikan
3. Kementerian Desa PDTT: Dana desa untuk fasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya
4. Kementerian Dalam Negeri: Penyelarasan kebijakan pusat-daerah
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Pemanfaatan cagar budaya sebagai destinasi pariwisata
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional: Penelitian dan kajian pengembangan cagar budaya

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Revitalisasi cagar budaya diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan lokal, memperkuat karakter dan jati diri bangsa,

serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun kerangka pikir revitalisasi cagar budaya sebagai pusat penguatan karakter, jati diri, dan kesejahteraan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas.

Peta Potensi Pengembangan Cagar Budaya Nasional



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Program unggulan pengembangan cagar budaya sebagai pusat penguatan karakter, jati diri, dan kesejahteraan menetapkan tiga cagar budaya sebagai prioritas dalam RKP Tahun 2025,

yaitu Situs Trowulan di Jawa Timur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi di Jambi, dan Keraton Kadariah di Kalimantan Barat.

Revitalisasi Cagar Budaya sebagai Pusat Pengembangan Karakter, Jati Diri, dan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran dan Indikator

Terlaksananya pengembangan cagar budaya secara terpadu sebagai pusat pengembangan karakter dan jati diri bangsa serta kesejahteraan rakyat

1. Jumlah cagar budaya nasional yang direvitalisasi sebanyak 3 CBN

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kementerian Desa PDTT
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional

1. Pelestarian OPK di kawasan CBN
2. Peningkatan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan CBN
3. Pembelajaran berbasis nilai budaya dan OPK di kawasan CBN

1. Situs Trowulan di Jawa Timur
2. KCBN Muaro Jambi di Jambi
3. Keraton Kadariah di Kalimantan Barat

Indikasi Highlight Intervensi

Indikasi Lokasi Prioritas



Peningkatan Ketahanan Iklim Wilayah Pesisir

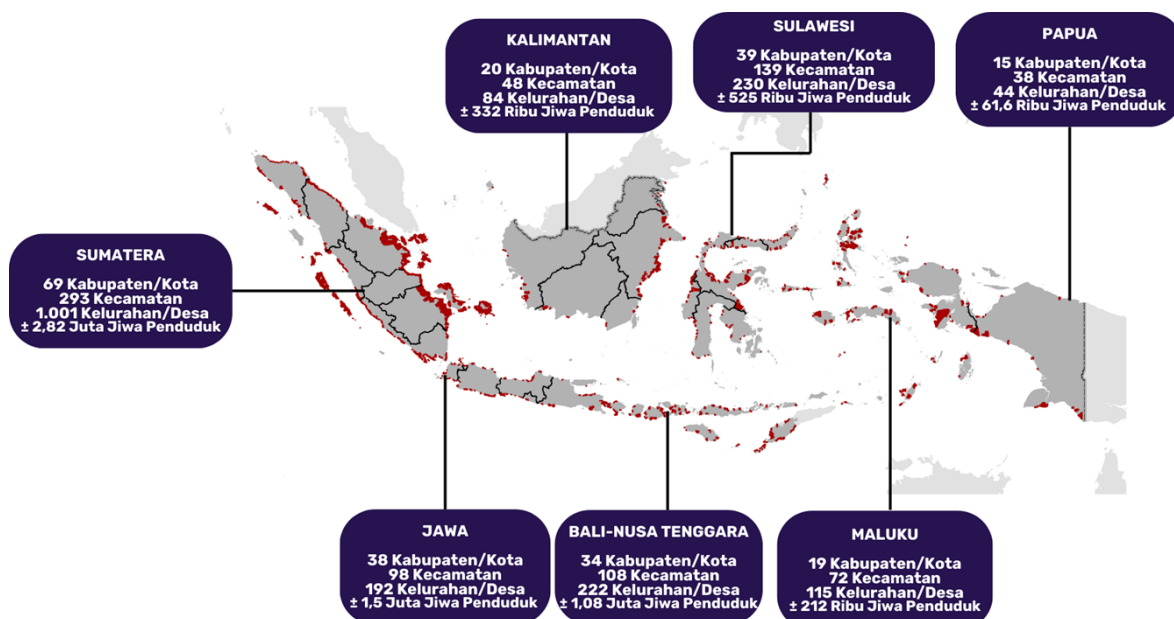
Permasalahan dan tantangan. Perubahan iklim mengacu pada fenomena global yang ditandai oleh perubahan suhu, pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan peristiwa lainnya yang memengaruhi kehidupan manusia. Tren terbaru menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem, seperti curah hujan deras selama musim hujan atau kemarau, serta kekeringan yang berkepanjangan. Sebagian besar populasi dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah pesisir, termasuk kota besar dan kecil di Indonesia. Di sisi lain, wilayah pesisir sangat rentan terhadap perubahan iklim dengan ancaman seperti erosi, banjir rob, dan gelombang tinggi yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, pantai Indonesia sepanjang 102.000 kilometer memiliki tingkat kerentanan bervariasi berdasarkan Indeks Kerentanan Pesisir (*Coastal Vulnerability Index/CVI*). *Coastal Vulnerability Index* menilai aspek lingkungan fisik seperti kemiringan, kisaran pasang surut,

tinggi gelombang, kenaikan permukaan air laut, geomorfologi, dan erosi pantai. Sekitar 1.800 kilometer garis pantai dikategorikan sangat rentan (CVI 5), terutama di pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, dan pantai timur Sumatera. Pulau Sumatera memiliki garis pantai terpanjang dengan indeks kerentanan sangat tinggi (CVI 5) yaitu sebesar 487,49 kilometer.

Dampak perubahan iklim di sektor pesisir berpotensi menyebabkan hilangnya pulau-pulau kecil di Indonesia dan dapat meningkatkan potensi perpindahan penduduk antar pulau hingga lintas negara di masa mendatang. Sekitar enam juta jiwa pada 1.888 kelurahan/desa rentan terhadap perpindahan penduduk akibat krisis iklim. Distribusi potensi perpindahan penduduk pada masing-masing wilayah ditunjukkan pada gambar di bawah. Tantangan ini mempengaruhi kelestarian lingkungan dan budaya lokal dalam menghadapi migrasi dan perubahan demografis. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim khususnya di sektor pesisir menjadi kunci untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Wilayah Rentan Perpindahan Penduduk di Desa Pesisir Indonesia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

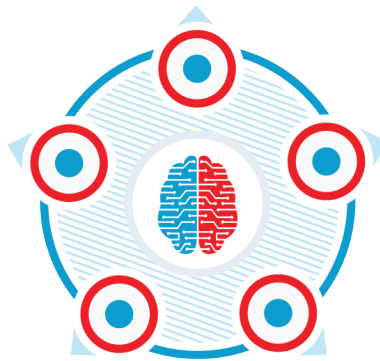
Kerangka Pikir Peningkatan Ketahanan Iklim Wilayah Pesisir

Identifikasi Masalah

1. Peningkatan kenaikan muka air yang mengancam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir
2. Dampak banjir rob dan penggenangan wilayah pesisir mempengaruhi kehidupan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat
3. Masih kurangnya infrastruktur adaptif perubahan iklim dan penerapan alam pada pengurangan dampak perubahan iklim di pesisir
4. Tata kelola dan pelibatan aktif multistakeholder belum maksimal

Peran Mitra Pembangunan

1. Pendanaan dan *sponsorship* peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat pesisir
2. Peningkatan kemitraan (CSR) pada wilayah pesisir



Peran Pemerintah Daerah

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan pengelolaan pesisir tangguh iklim kepada aparaturnya dan masyarakat pesisir
2. Penyusunan dokumen dan regulasi daerah penanganan banjir rob
3. Mendorong peran aktif multi stakeholder pada peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir

Aksi Peningkatan Ketahanan Iklim Wilayah Pesisir

1. Pembangunan prasarana pengaman pantai, seperti tanggul
2. Pengembangan kawasan pesisir tangguh
3. Penanaman mangrove dan vegetasi pesisir lainnya untuk menahan abrasi
4. Pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah kawasan pesisir

Dukungan Lintas Sektor

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
6. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam upaya peningkatan ketahanan perubahan iklim di pesisir, perlu dilakukan intervensi aksi ketahanan iklim pada lokasi prioritas. Aksi yang dapat dilakukan meliputi pembangunan *grey* infrastruktur dan penerapan *nature based solution*, seperti pembangunan *green belt* untuk wilayah pesisir rentan kenaikan muka air laut. Adapun kerangka pikir aksi peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir tersebut ditunjukkan pada gambar di atas.

Pembangunan Infrastruktur Adaptif sangat penting untuk menahan dampak perubahan iklim di pesisir. Kegiatan yang dapat dilakukan

seperti (a) pembangunan prasarana pengaman pantai seperti tanggul, (b) pengembangan kawasan pesisir tangguh, dan (c) penataan kawasan dan bangunan rumah, serta relokasi pemukiman di kawasan pesisir. Penerapan *nature based solution* dapat dilakukan dengan melakukan penanaman vegetasi pantai seperti penanaman mangrove, terumbu karang, lamun dan vegetasi pesisir lainnya yang dapat berfungsi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut. Peningkatan tata kelola meliputi (a) pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah, (b) penyediaan sistem informasi peringatan dini, dan (c) penguatan regulasi kawasan pesisir.

Peningkatan Ketahanan Iklim di Wilayah Pesisir

Sasaran dan Indikator

Menurunnya kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di sektor kelautan dan pesisir.

1. Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim terhadap PDB (%) pada Sektor Pesisir sebesar 0,211 persen
2. Panjang prasarana pengaman pantai yang dibangun sepanjang 8 km
3. Luas kawasan ekosistem Mangrove yang direhabilitasi seluas 1000 Ha

1. Pembangunan prasarana pengaman pantai
2. Penanaman vegetasi pantai (mangrove)
3. Penyediaan sistem informasi peringatan dini
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah di kawasan pesisir

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
5. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1. Jawa Tengah
2. Sulawesi Selatan
3. Nusa Tenggara Barat
4. Riau
5. Yogyakarta
6. Maluku

Indikasi Highlight Intervensi

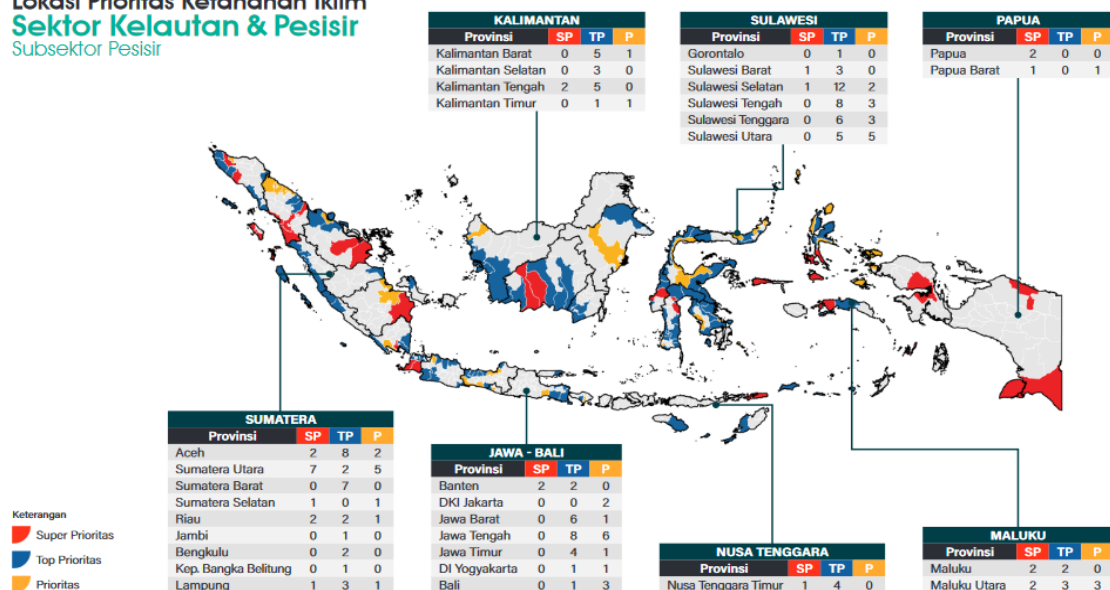
Indikasi Lokasi Prioritas

Dengan mengintegrasikan pendekatan infrastruktur adaptif, solusi berbasis alam, dan peningkatan tata kelola, wilayah pesisir dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus

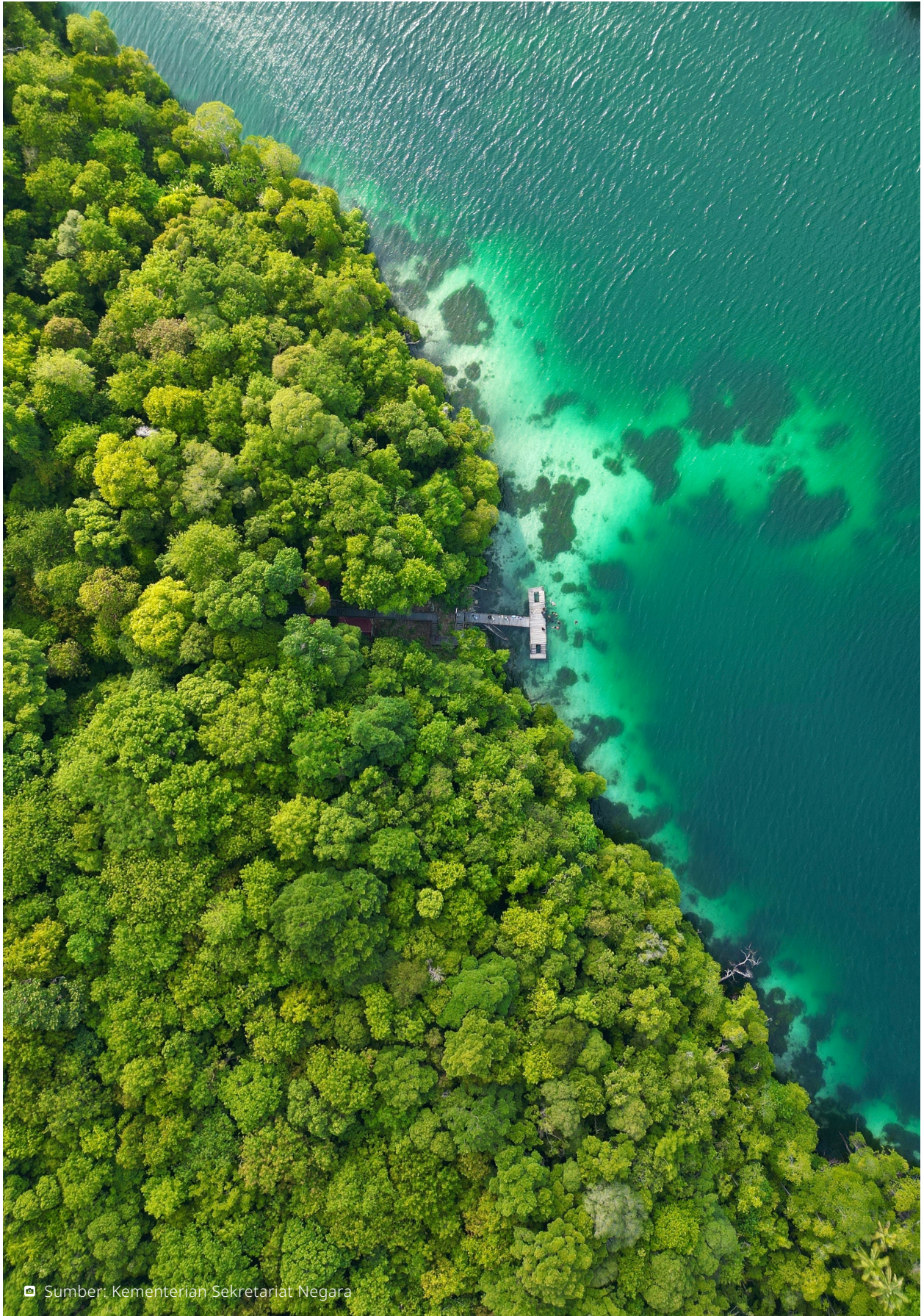
melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lokasi prioritas pesisir. Adapun lokasi prioritas untuk sektor pesisir tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim Sektor Pesisir

Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim Sektor Kelautan & Pesisir Subsektor Pesisir



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.



☐ Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

BAB

4

Intervensi Pembangunan Wilayah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

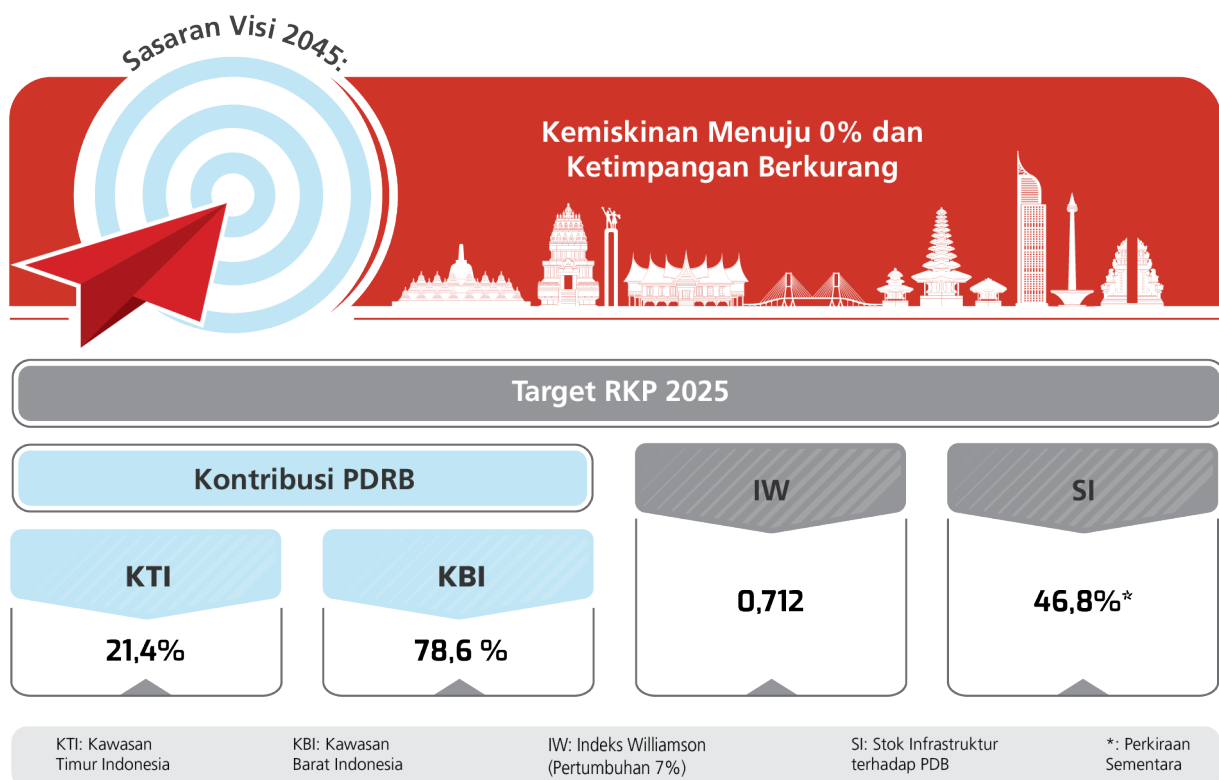
4.1

Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah

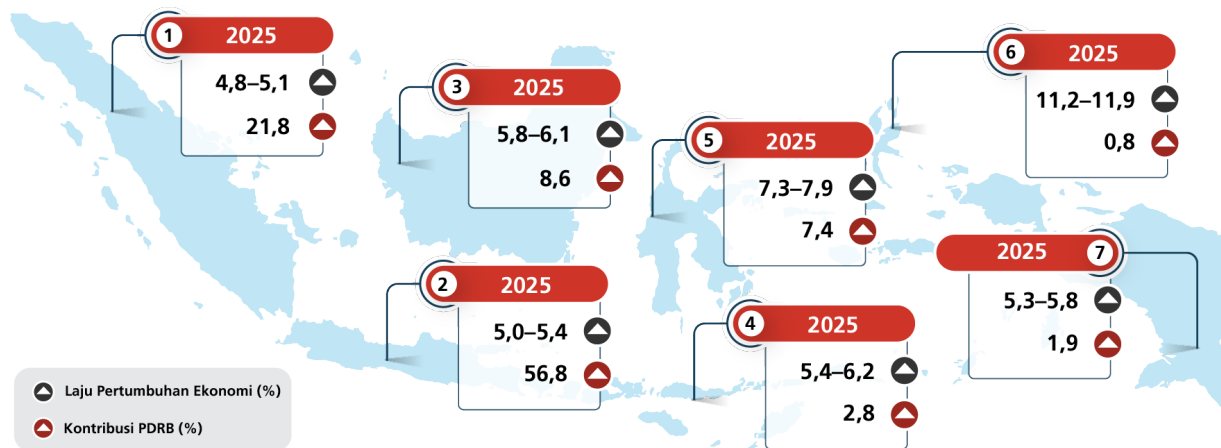
Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan,

serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045.



Target Pertumbuhan, Kontribusi dan Tema Pembangunan Per Wilayah Pulau Tahun 2025



1 Tema Sumatera

Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan

2 Tema Jawa

Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan

3 Tema Kalimantan

Superhub Ekonomi Nusantara

4 Tema Bali-Nusra

Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional

5 Tema Sulawesi

Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

6 Tema Maluku

Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia

7 Tema Papua

Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional yaitu (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi; (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,

Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; serta (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.



Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

- Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission*
- Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
- Penataan otonomi daerah menasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
- Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya
- Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
- Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital



Infrastruktur dan Layanan Dasar

- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun pra-sekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah
- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
- Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan rendah karbon termasuk melalui pengembangan infrastruktur, penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
- Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi
- Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air
- Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
- Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan, prioritas intervensi diarahkan berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat regional hingga nasional, peningkatan pengelolaan urbanisasi dalam rangka mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan juga menjadi prioritas intervensi.

Selain kebijakan umum yang telah disampaikan sebelumnya, juga terdapat intervensi spesifik yang akan diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional yang termuat dalam subbab 4.2 hingga 4.8. Dalam Perpres RKP Tahun 2025 ini, intervensi yang termuat masih bersifat indikatif dan akan dimutakhirkan dalam Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.



Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi



Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan



Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan



Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan



Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan



Pengelolaan Pusat Pertumbuhan



Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif



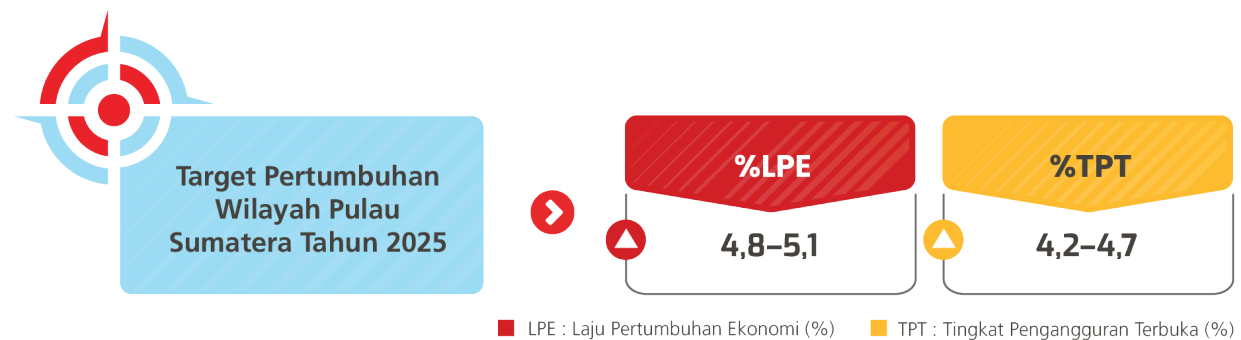
Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan sumber daya alam, agropolitan, wisata alam, dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting



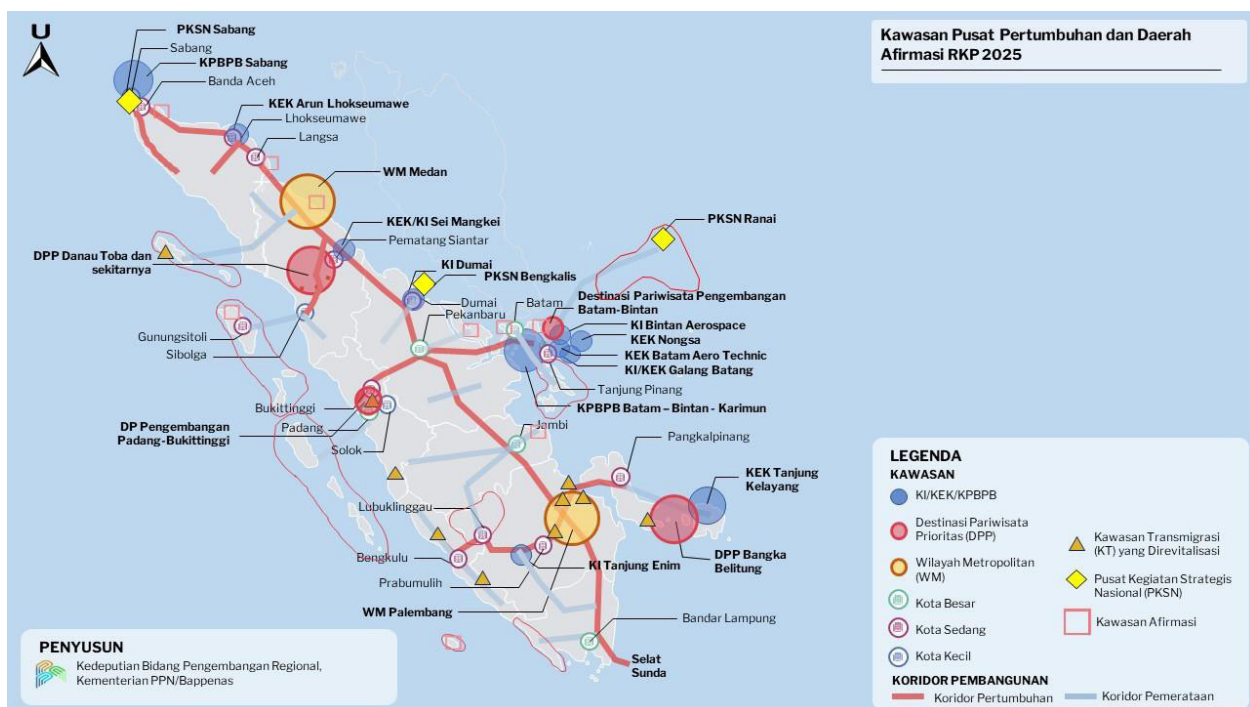
Penuntasan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan carry over proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional

4.2 Wilayah Sumatera

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2025



Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afiriasi*



Keterangan: *) Daerah Afiriasi (Kawasan Perbatasan) masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029

➤ Provinsi Aceh

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Peningkatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pengembangan kawasan tanaman perkebunan - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Revitalisasi tambak udang di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen - Pembangunan SPAM Pulau Rondo Kota Sabang - Pembangunan bangunan pengarah Bendungan Rukoh - Rehabilitasi Daerah Irigasi Baro Raya
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan; Pembangunan Jalan Lintas Tengah Provinsi Aceh ruas Jantho – Keumala; serta Preservasi Jalan ruas Genting Gerbang – Sp. Uning dan ruas Bts. Nagang Raya/ Abdya - Blang Pide - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Lanjutan Pembangunan PLTA Peusangan - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Sumber Daya Manusia yang diberikan Bimtek tentang kewirausahaan
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/ RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Malikussaleh - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, HIV/AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi yang didukung oleh penyediaan infrastruktur serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeulue • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Aceh • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria di Provinsi Aceh • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset daerah • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik dan partai politik lokal
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana • Penyelidikan geologi tata lingkungan untuk mitigasi bencana likuefaksi • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Peningkatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan - Pengembangan kawasan tanaman pangan - Pengembangan kawasan tanaman perkebunan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala Kota Parapat di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di KSN Mebidangro
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A di Kota Sibolga - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 4 : Serbelawan-Pematang Siantar; Preservasi Jalan Kota Rantau Parapat – Aek Nabara; Sp Natal – Gambir, serta Pelebaran Batang Toru - Rianite – Sp. Aek Nabara - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, kuliner, fesyen, kriya, aplikasi, dan gim - Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Lanjutan Pembangunan PLTA Asahan III - Sumber Daya Manusia yang diberikan Bimtek tentang kewirausahaan - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Perkuatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak • Pengendalian penyakit rabies dan kusta • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan TPPO • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Bandara Kualanamu • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Penyediaan infrastruktur dan layanan angkutan umum massal • Pembangunan kawasan perbatasan di kecamatan prioritas perbatasan di Provinsi Sumatera Utara • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan • Penyediaan/revitalisasi rumah (hunian tapak) dan infrastruktur desa di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan • Penyediaan rumah murah terintegrasi dengan infrastruktur dasar di Wilayah Metropolitan Medan • Penataan tahap II Kawasan Kota Lama Kesawan di Kota Medan • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh WM Medan
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset daerah • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perpres RTR Kawasan Strategis Negara (KSN) Kawasan Danau Toba • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penyediaan <i>Early Warning System</i> pada sungai kewenangan pusat di Kota Medan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Kabupaten Solok Selatan - Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan pembangunan terintegrasi rancang bangun TPST Kota Padang - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengendalian banjir Batang Lembang, Batang Suliti, Batang Agam, Kab. Dharmasraya - Pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala kota di Kota Pariaman - Digitalisasi sektor strategis - Pengawasan kinerja kawasan di kawasan pendidikan tinggi - Pengembangan kawasan tanaman perkebunan dan hortikultura - Peningkatan kualitas input komoditas tanaman pangan melalui sertifikasi benih
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan jalan ruas Sigapokna – Labuan Bajau - Pengembangan fasilitas pelabuhan Laut Carocok Painan - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, dan HIV/AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Pengembangan Bandara Minangkabau • Pembangunan SMTI Padang



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru di Kabupaten Sijunjung • Penyediaan/revitalisasi rumah (hunian tapak) dan infrastruktur desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset daerah • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Harmonisasi Rancangan Perpres RTR Nasional Taman Nasional Kawasan Berbak - Bukit Tiga Puluh • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan bidang sosial di daerah pascabencana Kabupaten Tanah Datar • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Riau

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan kawasan tanaman perkebunan dan pangan lokal
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Jalan Tol Trans Sumatera ruas Rengat - Pekanbaru (Seksi <i>Junction</i> Pekanbaru - <i>Bypass</i> Pekanbaru) dan Bts. Prov Riau – Payakumbuh - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Riau - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang ekonomi yang didukung oleh penciptaan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri kelapa dan rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Bantuan PSU bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Harmonisasi RPerpres RTR Nasional Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Jambi

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Optimalisasi perhutanan sosial di Jambi - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan Daerah Irigasi Batang Asai - Pengembangan kawasan tanaman perkebunan - Peningkatan kualitas input subsektor tanaman pangan melalui sertifikasi benih
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tempino – Sp. Ness; Penggantian Jembatan Pemusiran; Preservasi Jalan Sei Manu – Bts. Kerinci; ruas Lubuk Kambing – Merlung; serta ruas Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Jambi - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata Kelola Pengelolaan Aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Peningkatan kapasitas kelembagaan <i>multistakeholder</i> dalam pengelolaan DAS • Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Kawasan sentra produksi pangan Sumatera Selatan yang didukung Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin - Pengembangan kawasan tanaman pangan - Pengembangan produktivitas tanaman hortikultura - Sarana pascapanen tanaman pangan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Gerakan penanganan banjir/kekeringan - Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji - Modernisasi DI Komering - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Tol Palembang – Betung; Pembangunan <i>Fly Over</i> Jalan Sudirman (Muara Enim); dan Preservasi Jalan Mangunjaya – Bts Kab Muba - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Lanjutan Pembangunan PLTP Lumut Balai - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Sriwijaya • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kesetaraan gender, terutama melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, dan HIV AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Fasilitasi investor dalam rangka pembangunan industri petrokimia berbasis gasifikasi batubara di Tanjung Enim

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Bantuan pembangunan rumah swadaya di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Palembang • Pembangunan Baru Rumah Susun (pembangunan infrastruktur desa dan revitalisasi/penyediaan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), gen Z dan milenial) • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, dan Kawasan Transmigrasi Petata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir • Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan Sosial • Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa • Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, produk unggulan, serta kegiatan ekonomi desa dan perdesaan • Fasilitasi pengembangan desa ekspor • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/ Pekerja • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Fasilitasi pembiayaan perumahan • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria di Provinsi Sumatera Selatan
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang Lebih Efektif • Penguatan Basis Data Potensi Objek PDRD • Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi • Tata kelola pengelolaan aset daerah • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Optimalisasi peralatan sistem mitigasi bencana geologi • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Bengkulu

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Sarana budidaya air tawar yang disalurkan ke masyarakat (pembudidaya ikan-bioflok) - Pembangunan pengendalian banjir air Bengkulu dan pengaman pantai di Kabupaten Kaur - Jalan non-status yang dikembangkan di kawasan transmigrasi - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian - Sarana pascapanen untuk mendukung pengembangan kawasan perkebunan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	<i>Rounding up</i> (Rehabilitasi) Jaringan Tersier Kanan Daerah Irigasi Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko - Penataan kawasan destinasi wisata Danau Dendam Tak Sudah - Rehabilitasi DI Air Nipis Seginim di Kab. Bengkulu Selatan dan DI Air Seluma di Kab. Seluma - Perencanaan pembangunan embung <i>Integrated Nursery Farming System</i> Kab. Bengkulu Utara - Prasarana air baku yang dibangun (Air Baku Kedurang Kab. Bengkulu Selatan) - Penggantian Jembatan Pulau Baai; Preservasi Jalan Antar Provinsi ruas Lais – Kerkap; Nakau – Air Sebakul; dan Bintunan – Lais - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis panas bumi, terutama pada PLTP Hululais - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan IAIN Curup • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria di Provinsi Bengkulu • Bantuan PSU bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kaur (tahap II) • Pembangunan pengendalian banjir air Bengkulu • Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Lampung

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Sarana pascapanen untuk mendukung pengembangan kawasan tanaman pangan - Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan - Peningkatan produktivitas sektor perkebunan - Penguatan kesehatan layanan hewan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Sekampung
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi Jalan dan Jembatan ruas Bts. Prov. Sumsel – Sp. Empat; ruas Sp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh) – Terbanggi Besar dan ruas Sp. Empat – Bukit Kemuning - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan - Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Backbone Interkoneksi Ketenagalistrikan Pulau Sumatera
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya

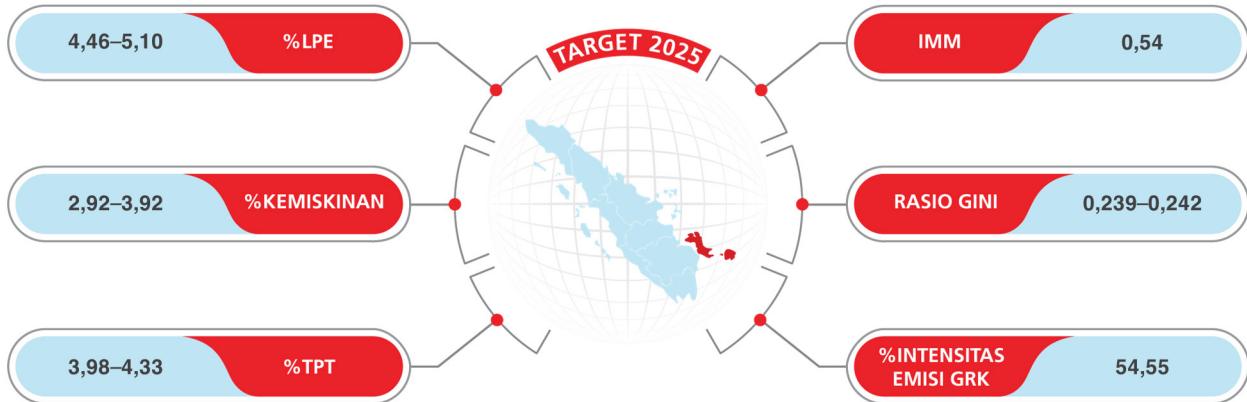
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat • Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Metro Lampung • Pembangunan RS PTN di Universitas Lampung • Peningkatan kesetaraan gender, terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Tanggamus; perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, dan HIV/AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pemberdayaan masyarakat miskin untuk pengurangan beban terkait kebutuhan dasar di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara • Pemberdayaan masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dengan program pendampingan usaha di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Peningkatan sumber daya manusia berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan - perkapalan dan garam - Pengembangan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau, serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan - Rehabilitasi ekosistem karbon biru - mangrove dan lamun - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Peningkatan situ konservasi di Bayangkara Park Polda Bangka Belitung - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung - Penataan Kawasan Destinasi Wisata Kota Tua Muntok Kluster Eropa di Kabupaten Bangka Barat dan Kawasan Bukit Peramun di Kabupaten Belitung - Penggantian Jembatan Aek Batu Rusa; Preservasi Jalan Petikan - Pilang - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakit dan Belinyu - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi

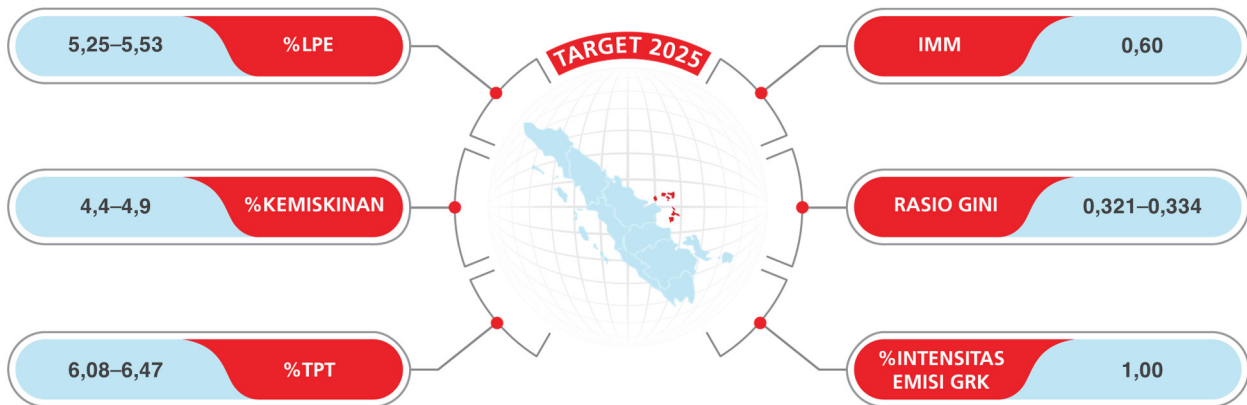
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga - Peningkatan kesetaraan gender, khususnya terkait peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan partisipasi perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak - Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) - Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas - Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja - Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN - Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria - Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS - Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS - Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - Koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal - Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - Pencegahan perilaku berisiko pemuda - Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda - Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia - Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	- Pembangunan fasilitas sisi darat Pelabuhan Tanjung Batu - Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) - Pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar KEK/KI prioritas
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat - KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako - Bantuan PSU bidang perumahan - Bantuan pembangunan rumah swadaya - Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	- Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD - Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda - Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif - Penguatan basis data potensi objek PDRD - Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi - Tata kelola pengelolaan aset - Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan - Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Penataan bangunan kawasan rawan bencana - Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan pengaman pantai pulau terluar - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Karimun - Peningkatan fasilitas Pelabuhan Midai - Penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen dan kriya, aplikasi, gim, serta kuliner - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Backbone Interkoneksi Ketenagalistrikan Pulau Sumatera

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Asistensi rehabilitasi sosial kelompok masyarakat lanjut usia di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang • Pengembangan program <i>link and match</i> tenaga kerja melalui kerja sama antara pendidikan vokasi dan perguruan tinggi dengan industri strategis • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Maritim Raja Ali Haji • Revitalisasi sarana dan prasarana STAIN Kepulauan Riau • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan TPPO • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi Remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Bandara Hang Nadim • Hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, dan bauksit) dan sumber daya hayati (sawit, kelapa, dan rumput laut) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, bauksit dan industri sawit, kelapa, rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Serasan, Kabupaten Natuna • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh • Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang Tahap III
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, Non-SDA, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan Kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Peningkatan pemanfaatan khazanah bahasa dan sastra melayu di Kawasan Cagar Budaya Nasional Pulau Penyengat dan kawasan Istana Damnah Lingga • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

4.3 Wilayah Jawa

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2025



Target Pertumbuhan
Wilayah Pulau Jawa
Tahun 2025



%LPE

5,0–5,4

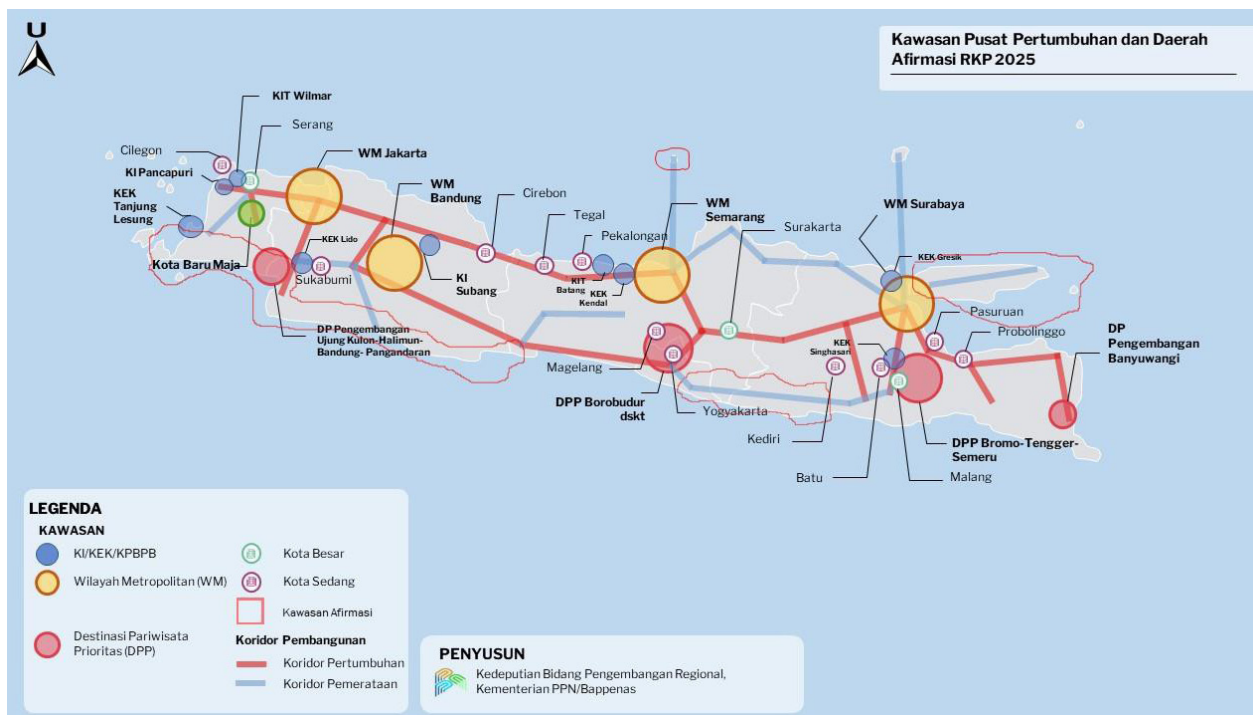
%TPT

5,1–5,6

■ LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

■ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

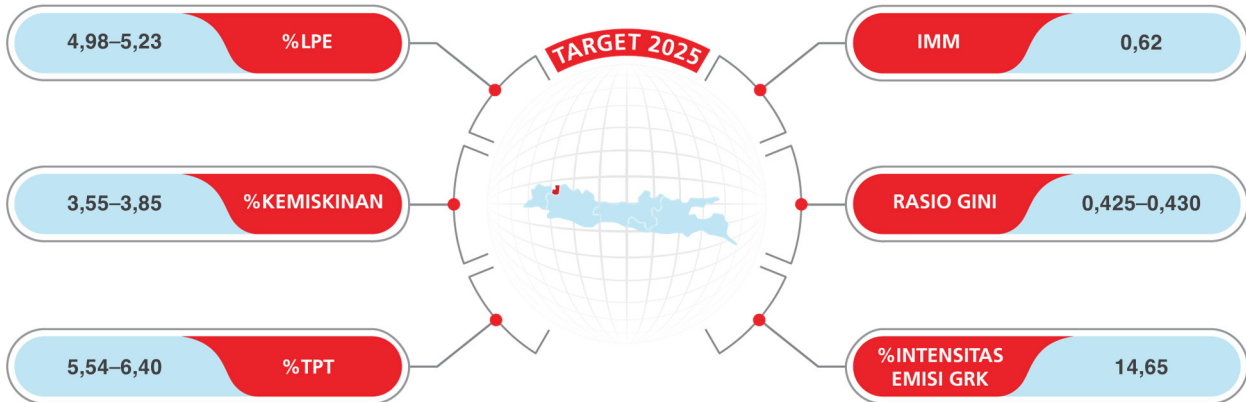
Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afiriasi





➤ Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pembangunan SPAM kabupaten/kota mendukung Kawasan Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) - Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Regional Karian-Serpong Wilayah Jakarta - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di DKI Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 dan Zona 6 (Fase 1)) - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan diversifikasi pangan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/<i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA) (BUMN); Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Semanan – Grogol dan Grogol – Kelapa Gading (BUMN) - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner - Penguatan destinasi regeneratif Greater Jakarta - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Memperluas kumpulan bakat (<i>talent pool</i>) dan memperbaiki mekanisme akuisisi talenta riset dan inovasi • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Pengembangan tata kelola manajemen talenta nasional (MTN) olahraga • Penguatan basis data terpadu MTN dan sinergi pelaksanaan MTN • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan TPPO • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB • Pengendalian penyakit kusta • Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RS • Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RS • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pembangunan sarana dan prasarana Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) • Penataan sarana dan prasarana olahraga • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

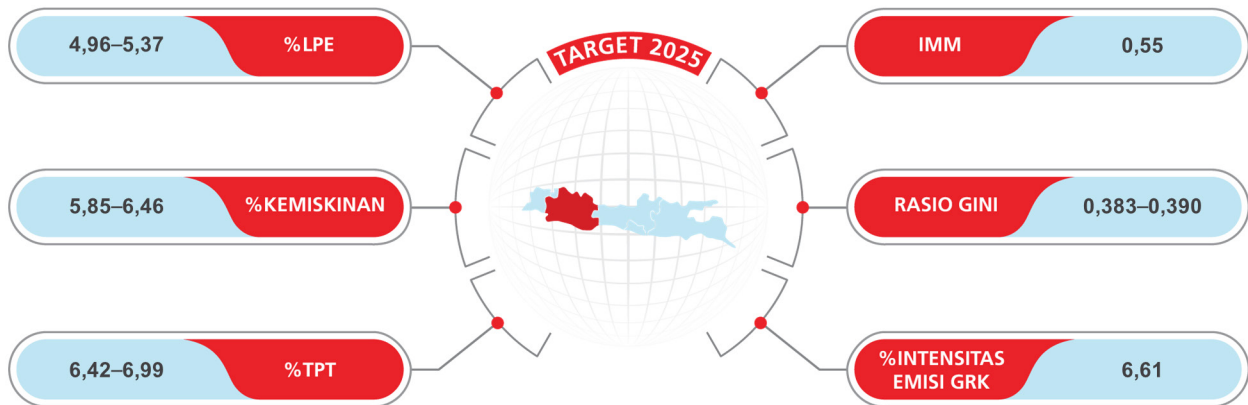


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan transportasi publik perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan <i>Transit Oriented Development</i>, antara lain melalui perluasan jaringan BRT terintegrasi, peningkatan layanan KA komuter, pengembangan LRT Jakarta, serta pengembangan MRT Jakarta Utara-Selatan dan MRT Timur-Barat • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi pada Kali Ciliwung • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Penyediaan infrastruktur dan layanan angkutan umum massal • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh di WM Jakarta
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Jawa Barat

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan pembangunan TPST terintegrasi rancang bangun Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, dan Kota Depok - Pengembangan kawasan hortikultura - Penguatan pangan lokal melalui sertifikasi benih dan pengembangan kawasan - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan kawasan perkebunan - Peningkatan produksi melalui distribusi benih - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan PPN Kejawanan - Pembangunan SPAM Mendukung KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung - Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey - Pembangunan <i>ground sill</i> Sungai Cipamingkis, pengaman Pantai Bojongslawe, pengendalian banjir Kali Bekasi - Modernisasi DI Rentang - Pembangunan sarana air baku Lobener - Citarum Harum - Digitalisasi sektor strategis



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Pembangunan Jalan Tol Japek II Selatan, Preservasi Jalan antarprovinsi Lohbener – Indramayu – Cirebon – Losari/Bts. Jateng dan Jalan Cipatujah – Kalapagenep • Pengembangan angkutan umum massal perkotaan (BRT) • Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Lanjutan Pembangunan PLTA PS <i>Upper</i> Cisokan • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Pengembangan <i>Science Techno Park</i> di Institut Teknologi Bandung • Pengembangan <i>Science Techno Park</i> di Institut Pertanian Bogor • Pengembangan <i>Science Techno Park</i> di Universitas Indonesia • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Pendidikan Indonesia • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Singaperbangsa Karawang • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Fasilitasi penyelenggaraan Pelatnas Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade khususnya di Pengalengan • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

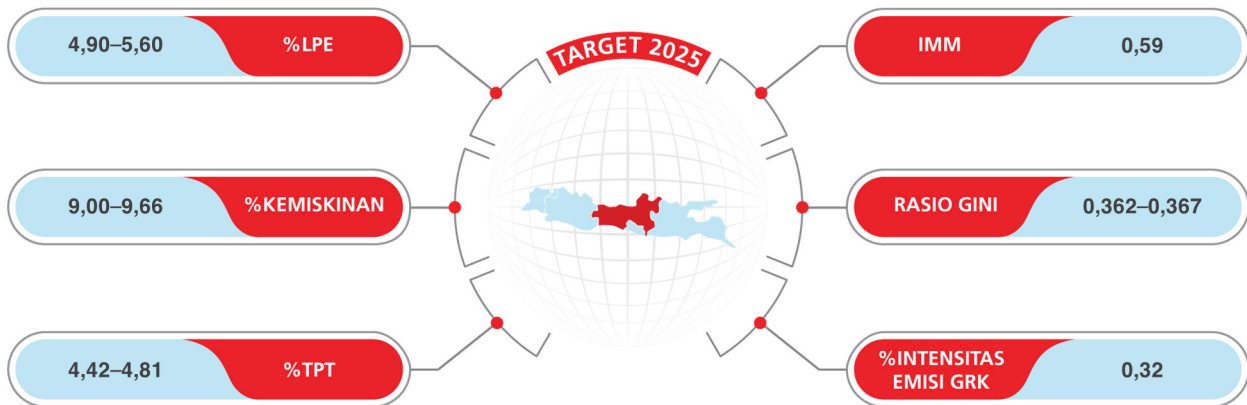
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban • Pembangunan Jalan Ciawi – Sukabumi
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan rumah susun sederhana sewa masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung • Program penyediaan rumah murah terintegrasi dengan infrastruktur dasar • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja dan ASN/TNI/Polri • Fasilitasi pembiayaan perumahan • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan • Pemugaran permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan Non-Migas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • penyusunan materi teknis dan Rancangan Perpres RTR KSN Cekungan Bandung • Harmonisasi Rancangan Perpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penyusunan rekomendasi ketahanan bangunan terhadap bencana • Pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Pembangunan Bendungan Jragung, Bener, Ceban • Rehabilitasi DI Jragung, DI Glapan • Pengendalian banjir di Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Kudus, dan Kab. Pati • Penguatan Pangan Lokal melalui sertifikasi benih dan pengembangan kawasan • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional • Penguatan sarana dan prasarana pertanian • Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan • Pengembangan pertanian organik, perkebunan, dan hortikultura • Peningkatan produksi melalui distribusi benih • Pembangunan SPAM Angkatan Darat Komando Pasukan Khusus Kab. Sukoharjo • Pembangunan SPAM Regional Wosusokas Kap. 750 L/detik, JDU SPAM, dan reservoir distribusi Provinsi Jawa Tengah • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Pengembangan PPS Cilacap • Pengawasan kinerja kawasan • Pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di KSN Gunung Merapi

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA seksi Kartasura – Klaten; Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak; Preservasi jalan ruas Lingkar Selatan Purworejo – Karangnongko (Bts. Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Losari (Bts. Tegal) – Pemalang • Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Jenderal Soedirman • Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Walisongo Semarang • Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Salatiga • Revitalisasi sarana dan prasarana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan • Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Kudus • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Cilacap • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, peningkatan ketahanan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak dan pencegahan TPPO pada wilayah kantong pekerja migran • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pembangunan sarana dan prasarana Karanganyar <i>Paralympic Training Center</i>

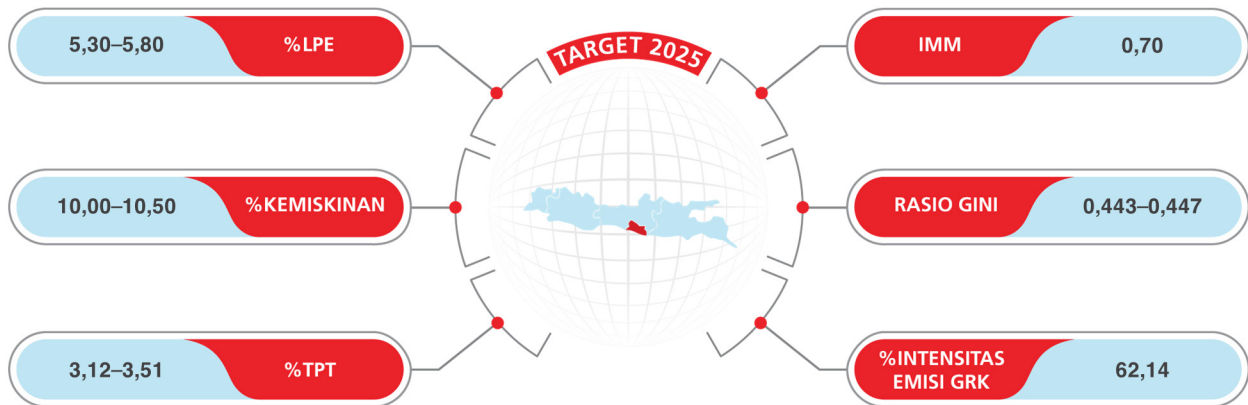


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenakarya Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, dan bauksit) • Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati (sawit, kelapa, dan rumput laut) • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Program penyediaan rumah murah terintegrasi dengan infrastruktur dasar di WM Semarang (Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Grobogan, dan Kab. Demak) • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Pelaksanaan reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh • Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Losari-Demangan Semanggi, Kota Surakarta
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan NonMigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• <i>Flood Management in North Java Project</i> • Optimalisasi peralatan sistem mitigasi bencana geologi • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SPAM Kamijoro Kab. Kulon Progo - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan <i>Groundsill</i> Sungai Srandakan - Pembangunan pengaman Pantai Congot Kab. Kulonprogo - Pengawasan kinerja kawasan di kawasan pendidikan tinggi - Pengembangan komoditas hortikultura dan kawasan tanaman pangan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (Seksi JC Sleman–SS Banyurejo) (BUMN) - Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya

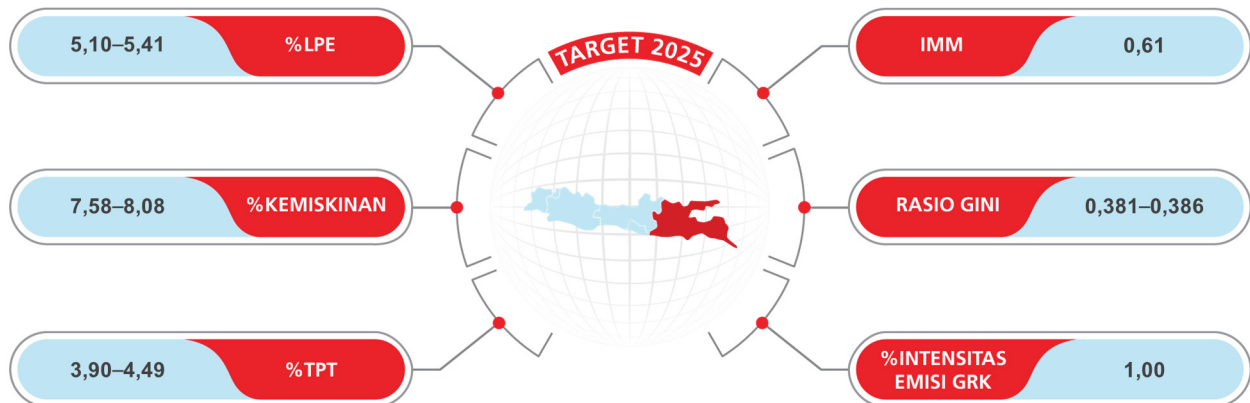


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, nefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan <i>Science Techno Park</i> di Universitas Gadjah Mada • Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Penguatan inklusi sosial, khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Pelaksanaan reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pendampingan percepatan integrasi rencana detail tata ruang dengan sistem <i>online single submission</i> untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman • Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Bantuan peralatan/sarana kebencanaan • Peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Jawa Timur

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan pembangunan terintegrasi rancang bangun TPST Kabupaten Tuban - Pembangunan jaringan perpipaan (mendukung Sebaif Grati) Kab. Pasuruan - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Penguatan pangan lokal melalui sertifikasi benih dan pengembangan kawasan - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, serta implementasi teknologi peternakan modern - Pengembangan pertanian organik, perkebunan, dan kawasan hortikultura - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan Bendungan Bagong, Karangnongko - Rehabilitasi Daerah Irigasi Pacal - Pembangun/peningkatan infrastruktur pengendalian lumpur Sidoarjo - Digitalisasi sektor strategis - Pengawasan kinerja kawasan di kawasan pendidikan tinggi



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ruas Probolinggo – Banyuwangi Seksi Banyuglugur – Besuki; Pembangunan Jalan Pansela; Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional ruas Bulu (Bts. Kab. Jateng) – Bts. Kota Tuban; Preservasi Jalan Bts. Kota Bangil – Pasuruan • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Panarukan • <i>Replacement</i> fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian • Surabaya <i>Regional Railway Line (Phase 1)</i> • Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner • Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Madura dan daerah 3T • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan TPPO pada wilayah kantong pekerja migran serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Kediri • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madura dan Politeknik Negeri Madiun • Pengembangan <i>Science Techno Park</i> di Institut Teknologi Surabaya • Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Brawijaya • Pengembangan kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dan penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria dan penyakit kusta • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan penyakit HIV/AIDS • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD

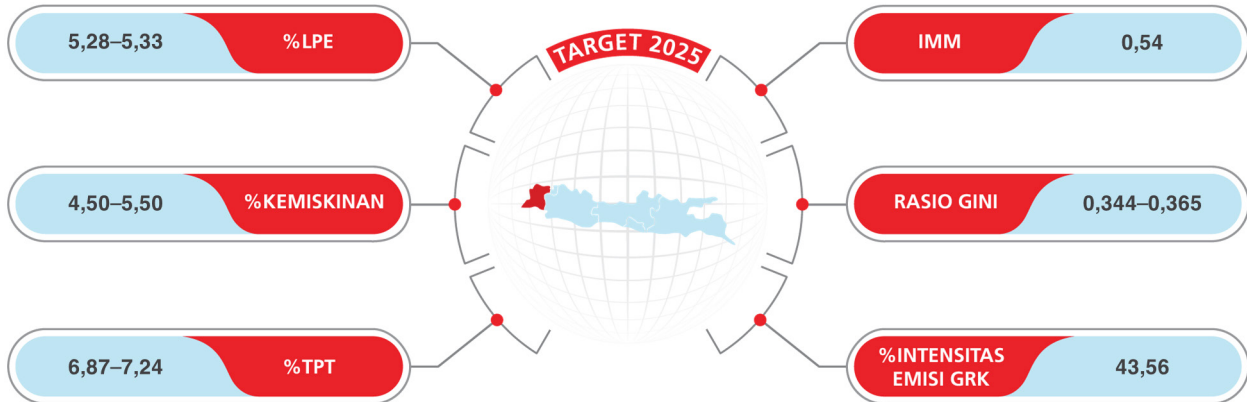
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Preservasi Jalan Bts. Kabupaten Lamongan – Bts. Kota Gresik; Preservasi Jalan ruas Lohgung (Km 93.175) - Sadang (Bts. Kota Lamongan) • Pengembangan Bandara Juanda • Hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, dan bauksit) • Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati (sawit, kelapa, dan rumput laut) • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, dan rumput laut • Pembangunan Gedung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia • Pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar KEK/KI prioritas
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Simulasi penanggulangan bencana • Revitalisasi Cagar Budaya Situs Trowulan • Layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan bidang ekonomi di daerah pascabencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Banten

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan pembangunan terintegrasi rancang bangun TPST Kota Cilegon - Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Regional Karian-Serpong - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan Bendungan Karian - Rehabilitasi Daerah Irigasi Cisdane - Pembangunan sarana dan prasarana air baku Bendungan Karian - Penguatan pangan lokal melalui sertifikasi benih - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan pertanian organik - Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan <i>Underpass</i> Bitung - Koordinasi pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Pengembangan Agrowisata Cikapek - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, dan video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis tenaga panas bumi, terutama untuk eksplorasi WKP Rawadano - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, nefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan kesetaraan gender terutama di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB, HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta • Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar KEK/KI prioritas
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan kawasan permukiman di Kawasan Kumuh Cigondang • Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Surya Bahari, Kabupaten Tangerang • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Bantuan PSU bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/Polri • Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/Pekerja • Fasilitasi pembiayaan perumahan • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan • Pemugaran permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pendampingan pemulihan bidang fisik di wilayah terdampak bencana masif • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

4.4 Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Bali – Nusa Tenggara Tahun 2025



Target Pertumbuhan
Wilayah Pulau
Bali-Nusa Tenggara
Tahun 2025



%LPE

5,4–6,2

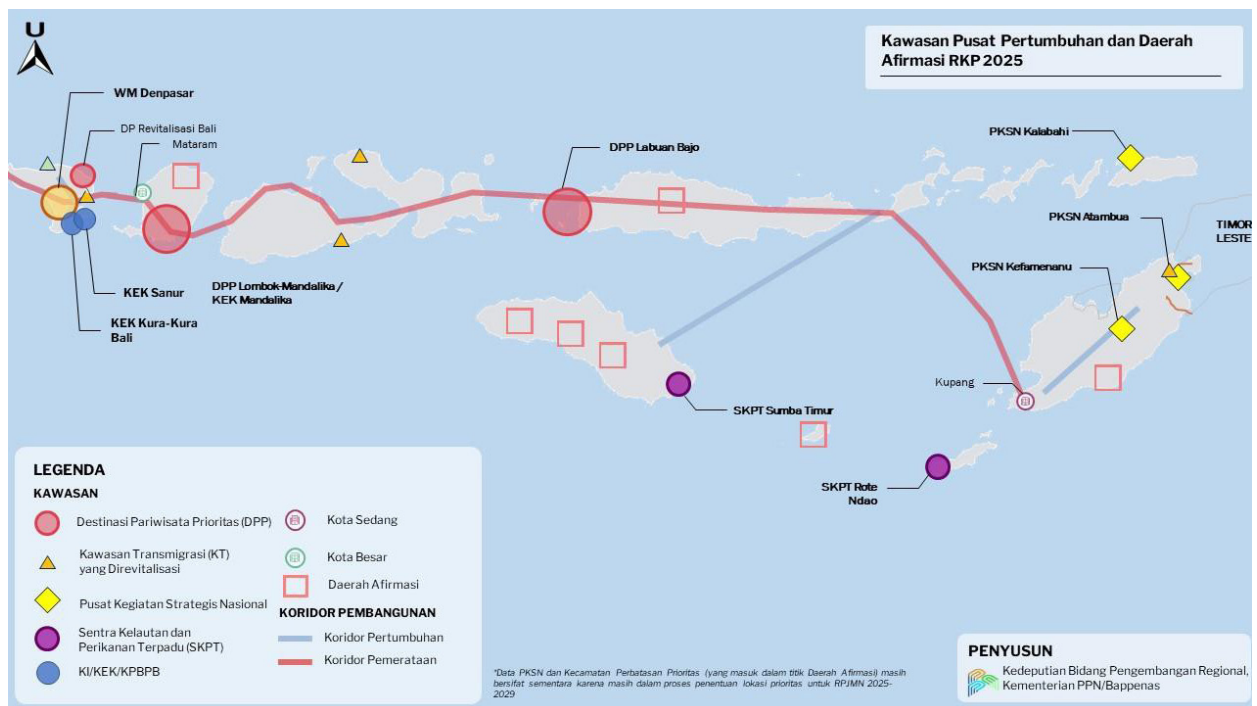
%TPT

2,2–2,7

■ LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

■ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi*

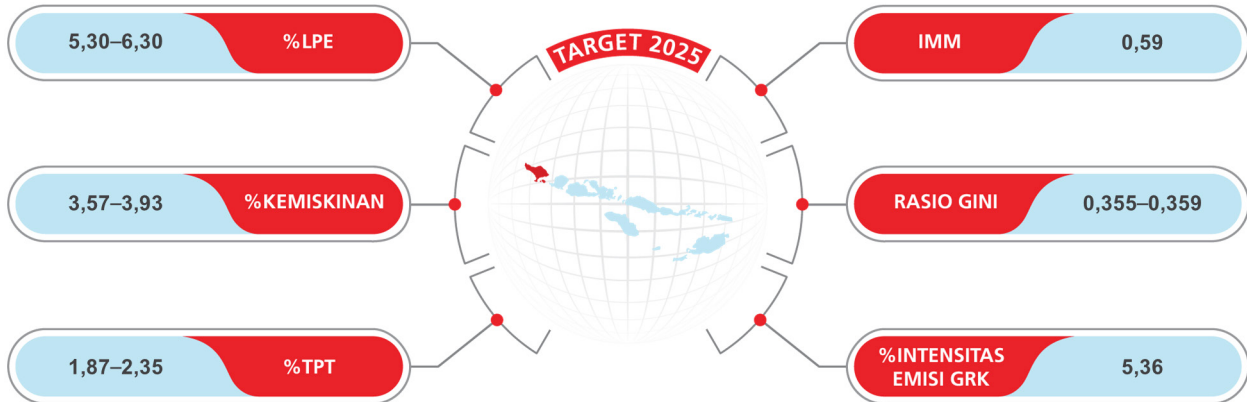


Keterangan: *) Daerah Afirmasi (Kawasan Perbatasan) masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029



➤ Provinsi Bali

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan pembangunan terintegrasi rancang bangun TPST Kabupaten Gianyar - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan PPN Pengambengan - Penyediaan sarana penangkapan ikan - Pengembangan pusat produksi induk udang - Peningkatan indeks pertanian (intensifikasi) - Cetak sawah (ekstensifikasi) - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan pertanian organik - Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan - Digitalisasi sektor strategis
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Bts Kota Singaraja – Mengwitani Seksi 9 – 10 - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, <i>visual arts</i> dan video, fesyen, kriya, kuliner, serta pengembangan aplikasi dan gim - Penguatan destinasi regeneratif - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, nefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi unggulan di tingkat regional pada Universitas Pendidikan Ganesha melalui revitalisasi sarana dan prasarana • Peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk TPPO • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Pengendalian penyakit rabies dan kusta • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Pembangunan Gedung Bali <i>Creative Industrial Center</i>

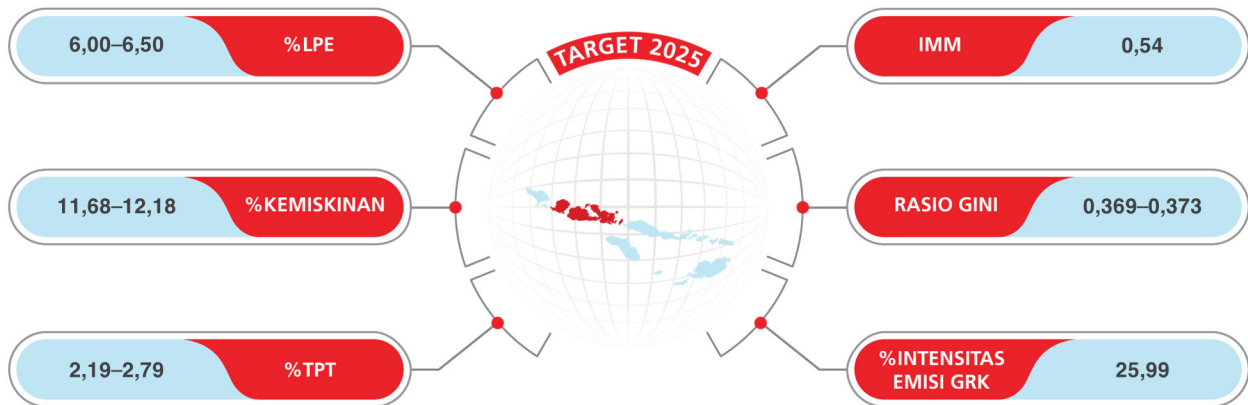


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Penataan kawasan kumuh di Suwung dan Pantai Kusamba • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/Pekerja dan ASN/TNI/Polri • Fasilitasi pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, dan fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pengembangan pusat kebudayaan di Klungkung • Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan pertanian organik - Pengembangan kawasan perkebunan - Pengembangan kawasan hortikultura - Penguatan pengolahan dan pemasaran produk ternak - Pengendalian banjir di Kota Bima - Pengaman Pantai di 3 Gili Kabupaten Lombok Utara
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi Jalan Lintas Kabupaten di Pulau Sumbawa Pal IV (Km 4.00) - Km 70.00 - Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kilo - Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lomboka – Gili Tramena - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Backbone interkoneksi ketenagalistrikan Pulau Nusa Tenggara
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi

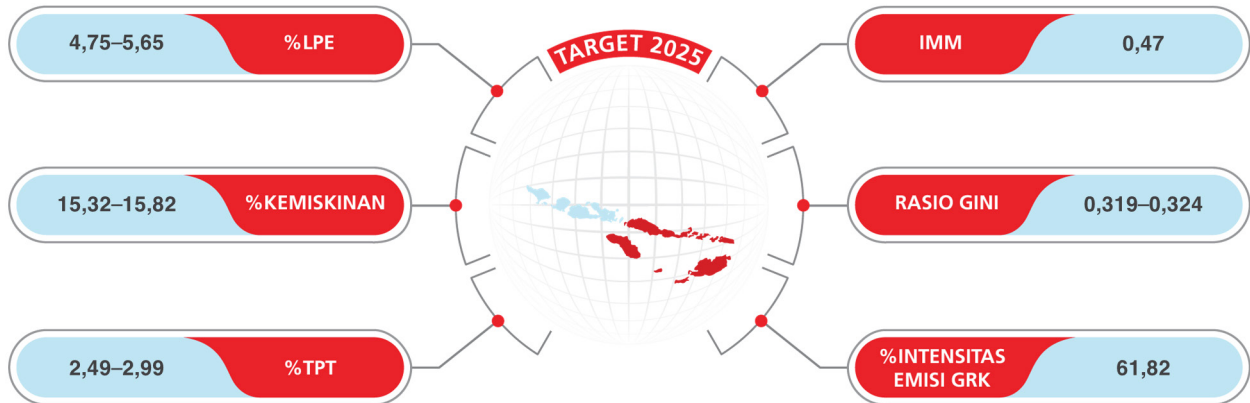


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Mataram • Peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak; serta pencegahan TPPO utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Fasilitas Penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mataram • Penataan permukiman kumuh perkotaan kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten Bima • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana • Peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan - Operasi Kapal Pengawas untuk pemberantasan <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> di wilayah Pengelolaan Perikanan 573 dan negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (<i>transboundary management</i>) - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah yang didukung Kawasan Transmigrasi Tasifeto – Mandeu di Kabupaten Belu - Penguatan ketahanan pangan di antaranya melalui: - peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - pengembangan kawasan perkebunan - pengembangan kawasan hortikultura - pengembangan <i>database</i> komoditas ternak - pengembangan pembibitan peternakan - peningkatan hasil uji mutu dan keamanan pakan - peningkatan kapasitas penyuluh peternakan - Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif salah satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja - Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan Bendungan Mbay dan Bendungan Manikin - Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam dan di luar kawasan konservasi



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo • Peningkatan infrastruktur konektivitas jalan trans Flores melalui peningkatan ruas Maumere – Wairunu dan jalan trans Timor mendukung perbatasan melalui penanganan longsor di ruas Motaain – Henes – Motamasin • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pengembangan dan penanganan infrastruktur transportasi untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerataan pembangunan wilayah berupa: - pembangunan jembatan akses perbatasan Oesapa Besar - <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Marapokot - peningkatan fasilitas Pelabuhan Ndao - preservasi Jalan KM 35 – Kota Waingapu, Walilebe – Kp Sagu • Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemberian bimtek tentang kewirausahaan • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - rehabilitasi ruang kelas rusak dan rusak berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - melanjutkan penyediaan bantuan Pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di antaranya melalui: - pengembangan sistem rujukan kepulauan (termasuk RS perairan), <i>telemedicine</i>, serta sistem <i>sister hospital</i> dengan RS di wilayah lain - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal - penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan serta penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak • Pengendalian penyakit (tuberkulosis, malaria, kusta, dan HIV/AIDS, dan rabies) dengan indikasi lokasi prioritas, di antaranya melalui: - layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria - layanan survei faktor risiko penyakit TB - pengendalian penyakit kusta - layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS • Percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Penguatan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas melalui: - fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) - pemberdayaan kampung keluarga berkualitas - keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja - Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pengecahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik - Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia - Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN - Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	- Penguatan produktivitas industri padat karya terampil (makanan dan minuman) - Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri rumput laut - Pengelolaan kawasan kampung/sentra nelayan - Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati (rumpun laut)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- Pembangunan perkotaan melalui peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh - Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas - Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan - Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu Raijua - Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan - Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan sosial bersyarat dan bantuan sosial sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	- Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah - Harmonisasi RPerpres RDTR KPN - Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/ agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan - Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor <i>pentahelix</i> dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi - Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan - Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Intervensi masih bersifat indikatif



4.5 Wilayah Kalimantan

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Kalimantan Tahun 2025



**Target Pertumbuhan
Wilayah Pulau
Kalimantan Tahun 2025**



%LPE

5,8-6,1

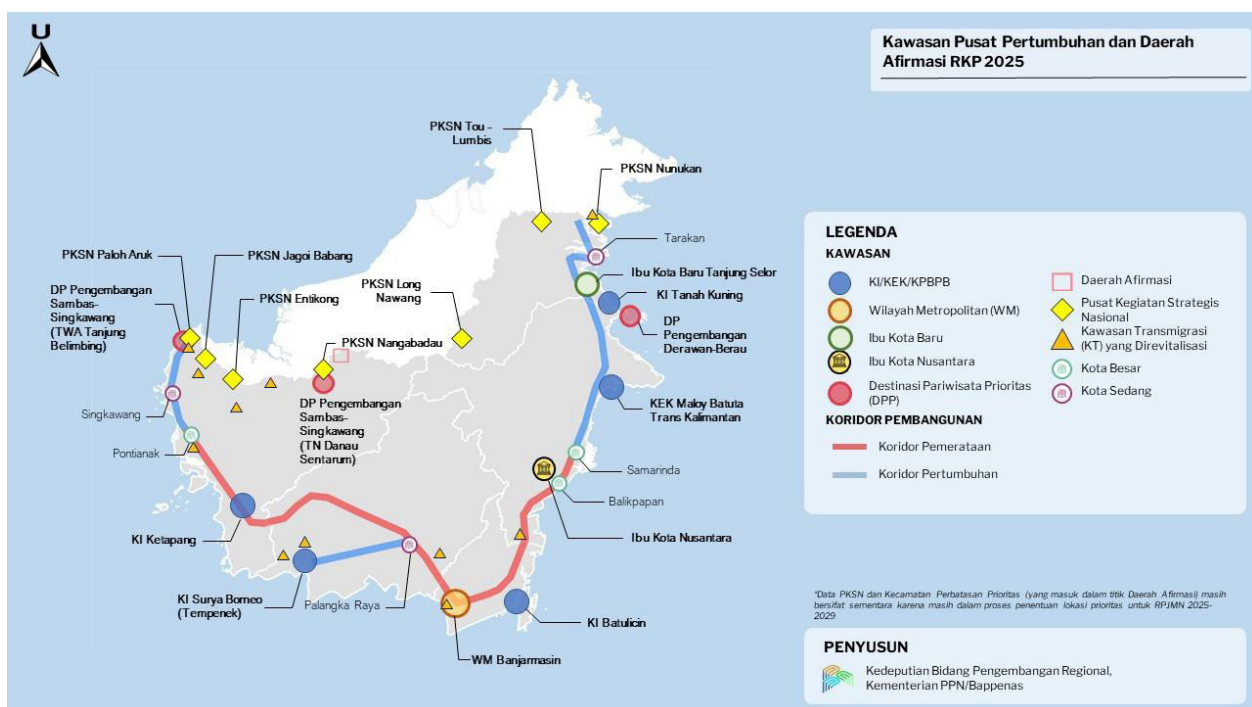
%TPT

4,0-4,5

■ LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

■ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi*



Keterangan: *) Daerah Afirmasi (Kawasan Perbatasan) masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029

➤ Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan kawasan tanaman pangan - Pengembangan <i>database</i> komoditas ternak - Pengembangan peningkatan produksi peternakan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi Jalan ruas Tanjung–Bts. Kota Sanggau, Dermaga Feri–Teraju, dan Sebadu–Sidas - Pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan dan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga - Pengendalian penyakit rabies dan kusta - Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak dan TPPO



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) - Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas - Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja - Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN - Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, dan HIV/AIDS - Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - Pencegahan perilaku berisiko pemuda - Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda - Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia - Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	- Preservasi jalan ruas Nanga Tayap – Sungai Kelik dan Sungai Kelik-Siduk - Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) - Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit - Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut - Pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar KEK/KI prioritas
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- Pembangunan Jalan Perbatasan Nanga Era-Bts Kalimantan Timur - Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria - Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat - KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako - Bantuan PSU bidang perumahan - Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	- Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD - Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pmda - Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif - Penguatan basis data potensi objek PDRD - Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, Non-SDA - Tata kelola pengelolaan aset - Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan - Harmonisasi RPerpres RDTR KPN - Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Perapatan stasiun pasang surut permanen - Penataan kawasan bangunan rawan bencana - Revitalisasi Keraton Kadariah - Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas - Pengembangan kawasan tanaman pangan dan penguatan kualitas input melalui sertifikasi benih - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan prasarana air baku Kotawaringin Barat - Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Penggantian Jembatan Sei Sebahang; Preservasi jalan ruas Pilang – Pulang Pisau dan Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) • Penyediaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Palangka Raya dan IAIN Palangka Raya • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, dan HIV/AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Percepatan peningkatan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Peningkatan kualitas perumahan swadaya di 14 kabupaten/kota • Pengembangan kawasan transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Sukamara • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya

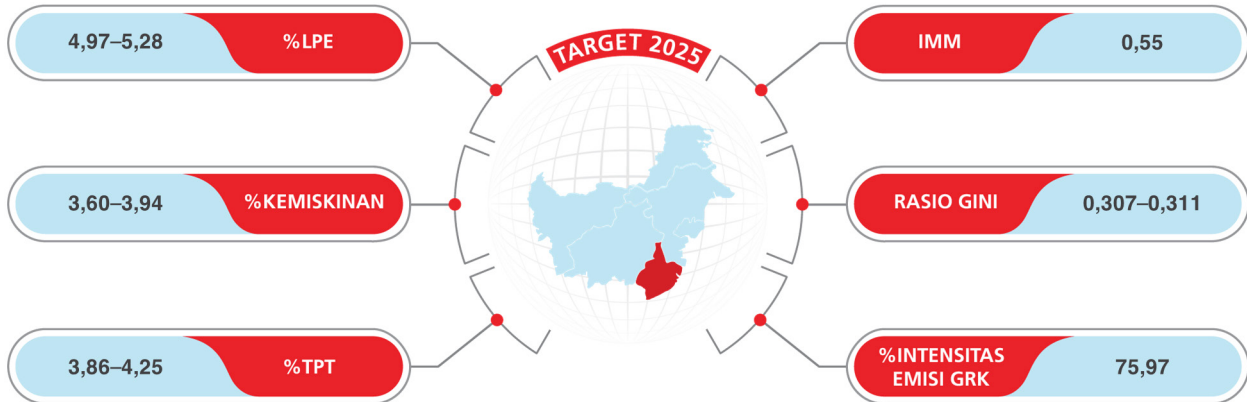
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Areal pengendalian OPT tanaman pangan • Asuransi pertanian • Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim • Jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi • Pemeliharaan prasarana SAR • Pemeliharaan sarana SAR • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Perapatan stasiun pasang surut permanen • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu - Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan - Penguatan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan - Penguatan input peternakan melalui bibit unggul - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Penguatan Bendungan Riam Kiwa
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan jalan ruas Anjir Pasar (Bts Prov Kalteng) – Serapat – Bts. Kota Banjarmasin; - Preservasi jalan ruas Walangsi – Kaparkias dan Pagatan –Batulicin - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) di fasyankes • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian Aparatur Sipil Negara dan mahasiswa di Kota Banjarbaru • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Bantuan PSU Bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pendanaan perumahan • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana produk unggulan dan kegiatan ekonomi desa dan perdesaan • Pendampingan desa • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten dan penyediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya <i>off grid</i> di Kabupaten Mahakam Ulu - Pengembangan sumber energi biogas di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan pertanian organik - Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura - Penguatan layanan kesehatan hewan - Pembangunan pengaman pantai AURI
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi jalan ruas Sp. Blusuh–Bts. Kalteng; Sp. 3 Muara Wahau–Kelay; Sp. 3 Damai–Barong Tongkok; Sp. Perdau–Batu Ampar dan Kuaro Kademan - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, gim, dan ekosistem kuliner - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Samarinda • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penempatan Mesin <i>Test Cepat Bakteri TBC</i> (TCM Truenat dan TCM Genexpert) • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik & digital, kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas <i>coal to ammonia</i> di Kutai Timur
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Tering–Long Bangun 5 • Pembangunan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas • Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas, antara lain ekowisata dan <i>Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions tourism</i> (MICE tourism) • Bantuan PSU bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/Polri, MBR/pekerja dan swadaya • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pendanaan perumahan • Pemugaran permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, dan produk unggulan dan kegiatan ekonomi desa dan perdesaan • Fasilitasi pengembangan desa ekspor • Pendampingan desa • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata Kelola Penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyediaan peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5.000 dan skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi • Perapatan stasiun pasang surut permanen • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Penyediaan sarana penangkapan ikan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Penyiapan bantuan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan - Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Nunukan - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi jalan ruas Sekatak Buji-Malinau; Preservasi Jalan Lingkar Pulau Sebatik - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga - Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Nunukan

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan TPPO dan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB, penyakit HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Malinau-Long Semamu • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan • Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Kalimantan Utara • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Harmonisasi RPerpres RDTR KPN • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan • Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara



Catatan:

Sasaran Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara masih menjadi bagian dari perhitungan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Penguatan tata kelola sistem pangan melalui integrasi Satu Data Pangan - Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Sepaku - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota berupa jaringan perpipaan air limbah 1, 2, dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN) - Rehabilitasi hutan dan lahan dan DAS sekitarnya
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Tol Mendukung Akses IKN Segmen Karangjoang–KKT Kariangau dan KKT Kariangau–Sp Tempadung - Pembangunan jembatan mendukung IKN duplikasi Jembatan Pulau Balang - Desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga - Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon)

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas - Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja - Pengembangan IKN yang inklusif - Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN - Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - Layanan survei faktor risiko penyakit TB - Pengendalian penyakit kusta - Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - Pencegahan perilaku berisiko pemuda - Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda - Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia - Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- Pengembangan pelayanan kesehatan unggulan berstandar internasional di wilayah Ibu Kota Nusantara - Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan eksisting dan pembangunan sarana pendidikan baru, termasuk pembentukan <i>center of excellence</i> - Pemindahan aparatur sipil negara, pegawai lembaga negara/badan publik, serta personel pertahanan dan keamanan - Pembangunan gedung perkantoran dan penataan kawasan - Pembangunan hunian ASN dan personel HANKAM - Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas, antara lain ekowisata dan <i>Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions tourism (MICE tourism)</i> di Ibu Kota Nusantara termasuk pengembangan <i>economic and financial centre</i> - Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan - Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan - Sarana dan prasarana produk unggulan dan kegiatan ekonomi desa dan perdesaan - Fasilitasi pengembangan desa ekspor - Pendampingan desa - Pengembangan klaster pariwisata dan ekonomi kreatif - Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang ketahanan pangan - Bantuan PSU bidang perumahan
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	- Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD - Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda - Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif - Penguatan basis data potensi objek PDRD - Tata kelola penerimaan SDA Nonmigas dan Non-SDA yang bernilai tambah tinggi - Tata kelola pengelolaan aset - Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan - Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Mitigasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara - Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang ketahanan pangan - Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



4.6 Wilayah Sulawesi

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sulawesi Tahun 2025



Target Pertumbuhan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2025



%LPE

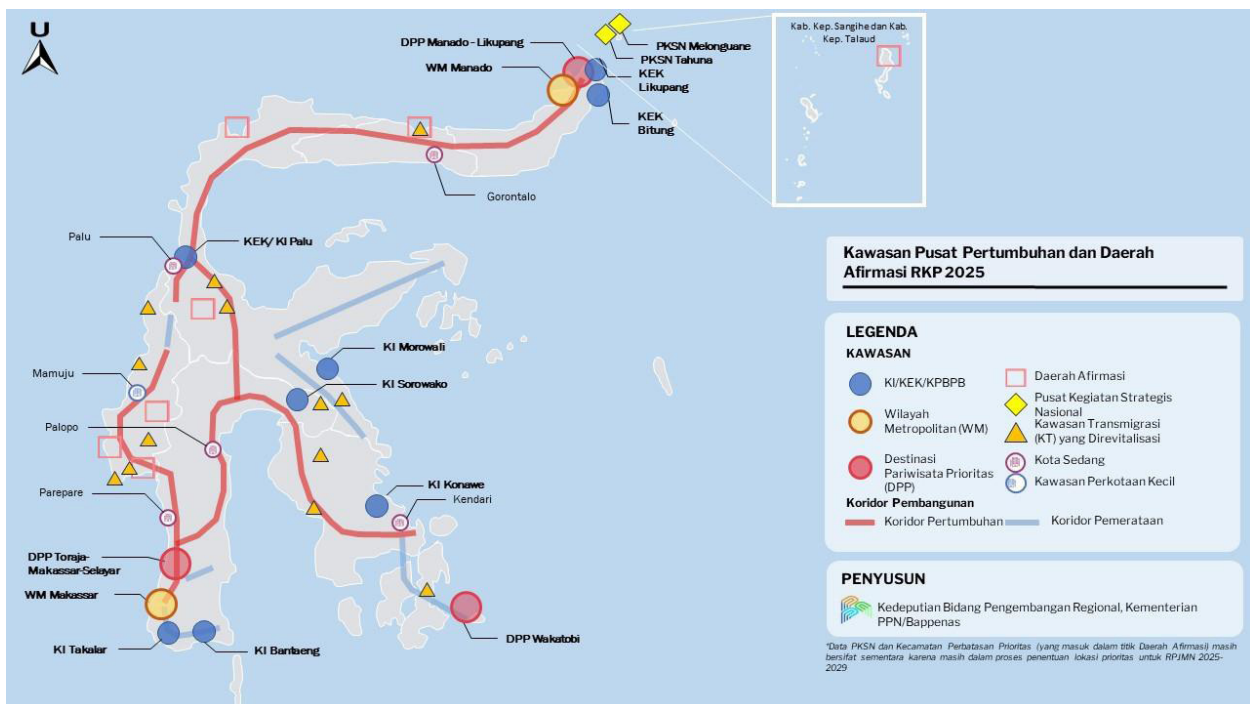
7,3–7,9

%TPT

3,2–3,7

■ LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ■ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

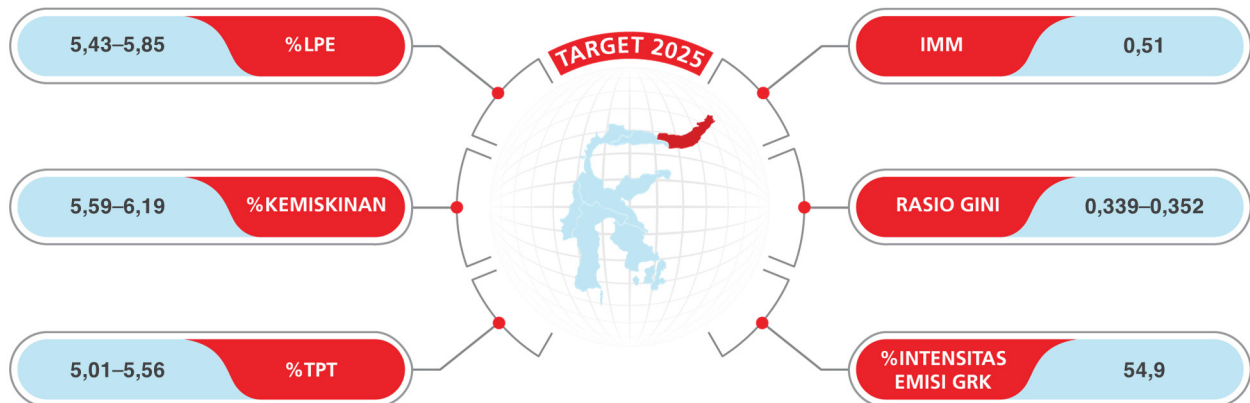
Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi*



Keterangan: *) Daerah Afirmasi (Kawasan Perbatasan) masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029

➤ Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Peningkatan efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan PPS Bitung - Penguatan pangan lokal melalui sertifikasi benih - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan pertanian organik - Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura - Pengembangan komoditas tanaman pangan - Pengaman Pantai Amurang, Kab. Bolaang Mongondow
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Manado <i>Outer Ring Road</i> III Tahap 4; Preservasi jalan ruas Airmadidi–Bts. Kota Tondano; dan Worotican–Poigar <i>Replacement</i> Fasilitas Pelabuhan Matutuung dan Laut Pelabuhan Kotabunan - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado–Likupang - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pengendalian Banjir di Kota Manado - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Pemenuhan alat kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak • Pengendalian penyakit rabies • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Manado • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Nusa Utara • Peningkatan kualitas keluarga • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui peningkatan kesehatan reproduksi dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi Remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, dan rumput laut

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 250 kabupaten/kota • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan kecamatan perbatasan prioritas • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Pemugaran permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh • Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana produk unggulan dan kegiatan ekonomi desa dan perdesaan • Fasilitasi pengembangan desa ekspor • Pendampingan desa • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan instrumen peringatan dini bencana melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Penguatan sarana pertanian subsektor tanaman pangan - Pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman pangan - Optimalisasi SPAM IKK Kota Donggala, Kab. Donggala - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan - Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Rekonstruksi dan rehabilitasi ruas jalan dalam Kota Palu - Peningkatan fasilitas Pelabuhan Bungin - Pengembangan fasilitas pokok Pelabuhan Salakan - Penanganan jalan mendukung <i>Infrastructure Reconstruction Sector Loan</i> (IRSL) - Preservasi jalan lintas provinsi ruas Tagolu–Tentena dan Tolai–Sausu - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya

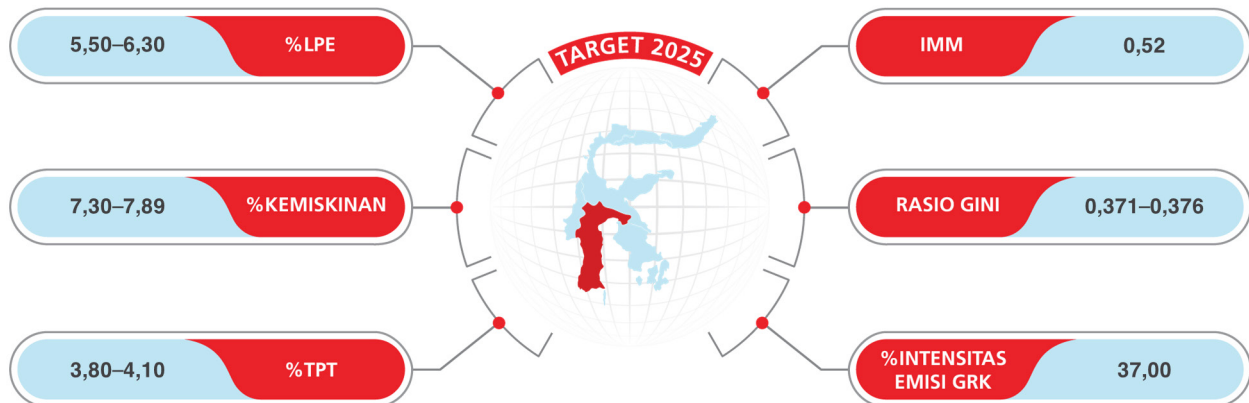
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Tadulako • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi Kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, TB, dan HIV/AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Pengembangan industri <i>medium-high technology</i> (industri alat angkut, industri elektronika dan digital, industri kimia dan farmasi)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, dan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kabupaten Poso • Penyediaan/revitalisasi rumah (hunian tapak) dan infrastruktur desa • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Simulasi penanggulangan bencana • Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) In Central Sulawesi • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat - Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik - Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Rehabilitasi sarana dan prasarana balai perikanan di UPT Takalar - Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan - Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk meningkatkan ketahanan bencana - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial - Optimalisasi SPAM Curio Kabupaten Enrekang - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala kota Kabupaten Maros - Stabilisasi pasokan dan harga pangan - Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan Bendungan Jenelata - Pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di KSN Maminasata - Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura - Penguatan sarana dan prasarana pertanian

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Penyelenggaraan KA Makassar–Pare Pare • Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata • Pelaksanaan kegiatan (<i>events</i>) nasional dan internasional: Festival <i>Geopark</i> Maros Pangkep • Preservasi jalan lintas provinsi ruas Koppe–Taccipi–Bts. Kota Watampone dan Ujung Lamuru–Koppe; dan ruas Bts. Kota Janeponto–Bts. Kota Bantaeng • <i>Replacement</i> fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Kalatua dan Jinato • Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Mandai • Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Pengendalian penyakit rabies • Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Alauddin Makassar • Pembangunan Stadion Sudiang • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Hasanuddin • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Pencegahan dan Penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Layanan survei faktor risiko penyakit TB, HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin (BUMN) dan kawasan cabai • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Pembangunan SMAK Makassar • Pengembangan industri <i>medium-high technology</i> (industri alat angkut, industri elektronika dan digital, industri kimia dan farmasi)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar • Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Wajo • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Pemugaran permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh

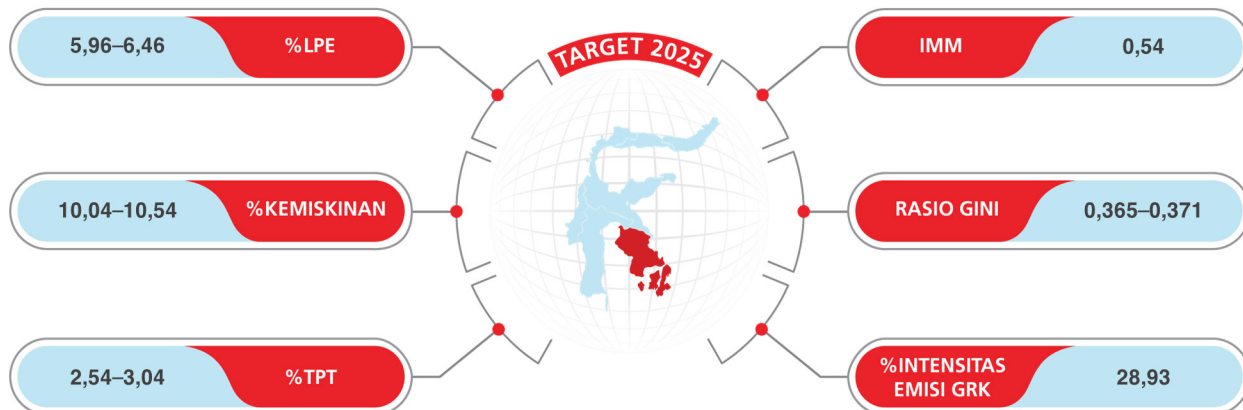
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (<i>events</i>) nasional dan internasional di <i>Geopark</i> Maros Pangkep • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat - Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik - Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi - Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi - Pengembangan lahan pertanian pangan produktif - Pengembangan kawasan perkebunan - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan PPS Kendari
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Duplikasi jembatan mendukung lintas Kabupaten Kolaka dengan Kab. Kolaka Utara ruas S. Balandete, CS - Peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Raha dan Lampia - Pengembangan fasilitas Pelabuhan Lapuko dan Pelabuhan Laut Sikeli - Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Penyediaan tenaga medis pada rumah sakit jantung pembuluh darah dan otak di Kota Kendari • Pendayagunaan dokter spesialis dan dokter sub spesialis di Kota Kendari • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB • Pengendalian penyakit kusta • Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Preservasi jalan mendukung KI Pomalaa ruas Kolaka–Dawi Dawi tahap 2 • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, dan rumput laut • Pengembangan industri <i>medium-high technology</i> (industri alat angkut, industri elektronika dan digital, industri kimia dan farmasi)

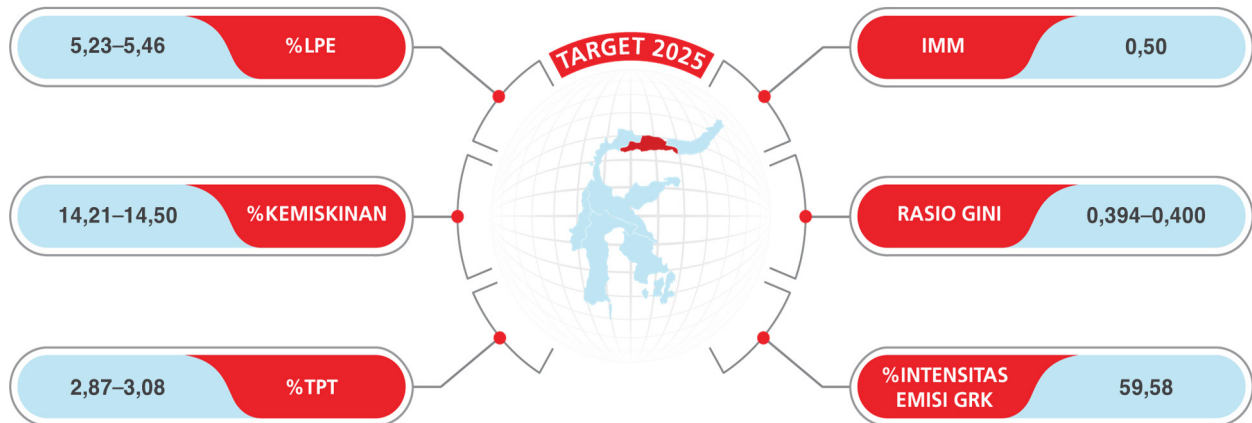


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Penanganan kawasan kumuh Kota Kendari, Kabupaten Konawe (Kawasan Mopu), dan Kabupaten Kolaka • Peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Mopu, Kabupaten Konawe • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi Objek PDRD • Tata Kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Gorontalo

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pengembangan kawasan tanaman pangan - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan kawasan perkebunan - Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan - Pengendalian banjir Sungai Bolango
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi Jalan Lintas Tengah Sulawesi ruas Paguyaman–Tabulo, Taludaa–Pel Gorontalo dan Isimu–Paguyaman - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga

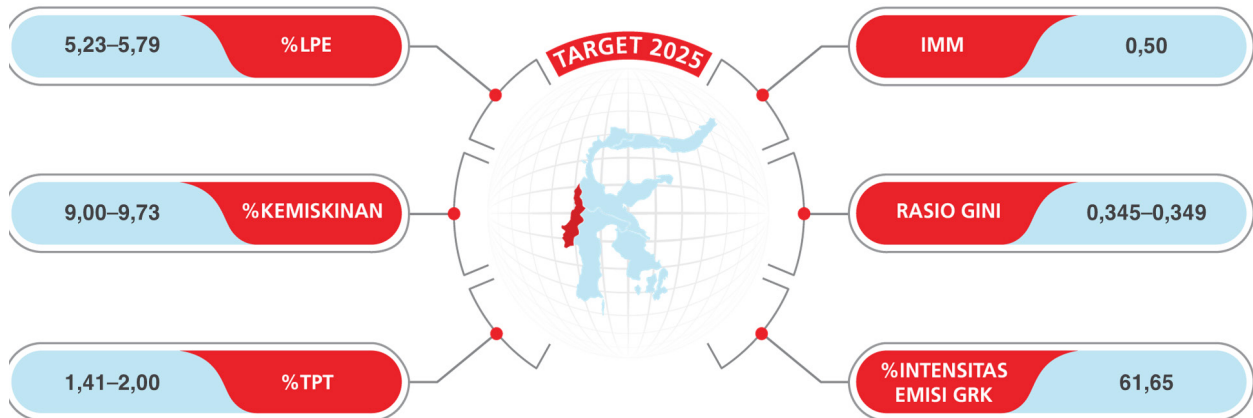


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Penguatan pelayanan promotif serta preventif ibu dan anak • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pemugaran permukiman kumuh di kawasan Lekobalo • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN di Kabupaten Bone Bolango • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-migas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan • Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim • Irigasi perpipaan • Jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Pengembangan kawasan tanaman pangan dan perkebunan - Penyaluran dan penguatan sarana dan prasarana pertanian - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan - Pengendali banjir Sungai Kalukku
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Preservasi jalan di Kabupaten Mamuju (Jalan Ahmad Yani); Kabupaten Mamasa (ruas Mamasa–Prov. Sulsel); Karossa–Topoyo, dan Pasangkayu–Baras - Peningkatan fasilitas Pelabuhan Mamuju - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga - Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) - Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas - Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja - Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak - Penguatan pelayanan promotif serta preventif ibu dan anak - Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN - Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - Layanan survei faktor risiko penyakit TB - Pengendalian penyakit kusta - Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - Peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - Pencegahan perilaku berisiko pemuda - Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda - Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia - Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasangkayu - Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria di Provinsi Sulawesi Barat - Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat - KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako - Bantuan PSU bidang perumahan - Bantuan pembangunan rumah swadaya
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	- Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD - Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda - Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif - Penguatan basis data potensi objek PDRD - Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan Non-SDA - Tata kelola pengelolaan aset - Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan - Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Simulasi penanggulangan bencana - Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

4.7 Wilayah Maluku

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Maluku tahun 2025



Target Pertumbuhan
Wilayah Pulau Maluku
Tahun 2025



%LPE

11,2–11,9

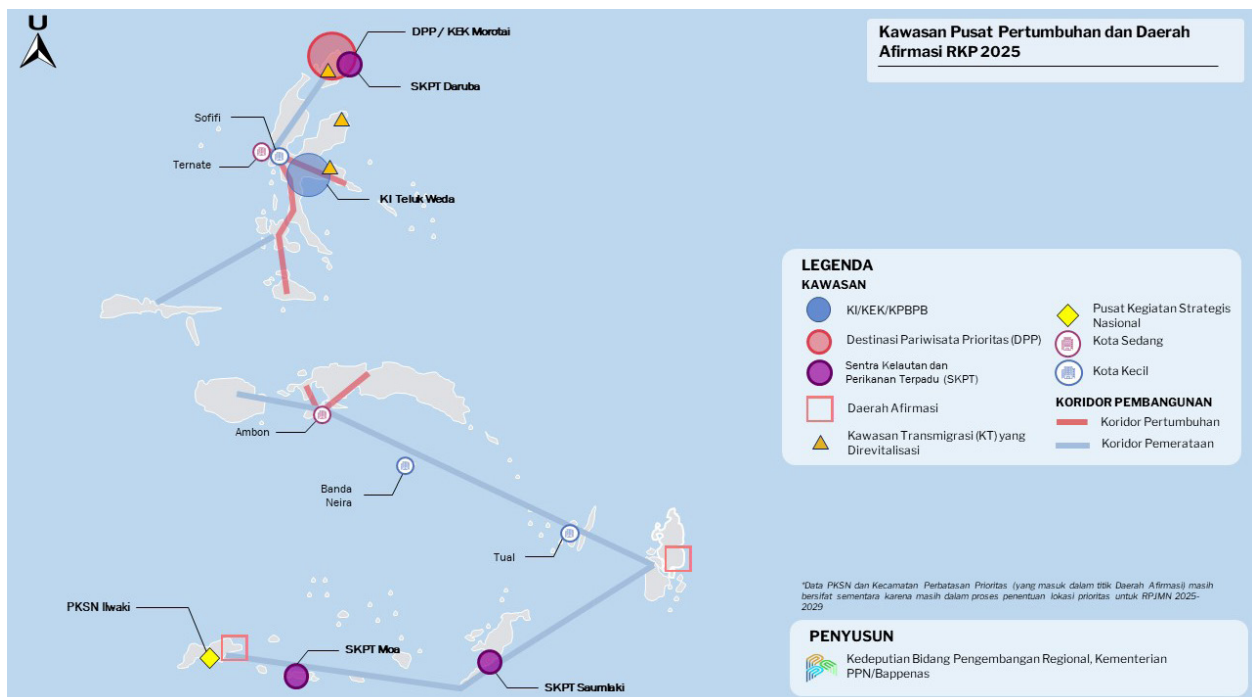
%TPT

4,6–5,1

■ LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

■ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi*

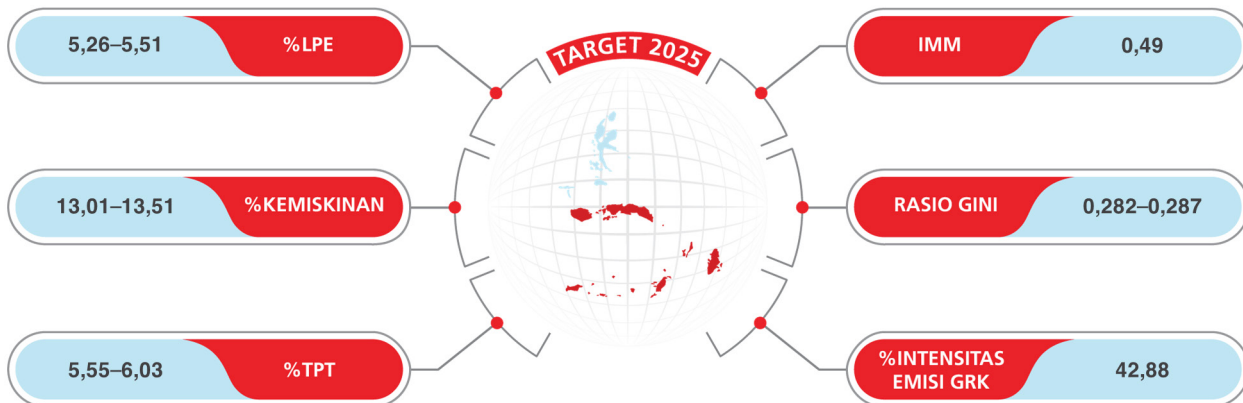


Keterangan: *) Daerah Afirmasi (Kawasan Perbatasan) masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029



➤ Provinsi Maluku

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Operasi kapal pengawas untuk pemberantasan praktik ilegal, <i>Unreported, and Unregulated Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan 714 dan 718 - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Perluasan SPAM jaringan perpipaan Kota Larat - Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi perairan - Penguatan ketahanan pangan di antaranya berbasis pangan akuatik/ <i>bluefood</i> melalui penyaluran benih ikan kerapu, serta berbasis pertanian melalui penguatan sarana dan prasarana pertanian - Pengembangan kawasan perkebunan - Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pengembangan dan penanganan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah berupa: - penanganan infrastruktur konektivitas Trans Seram melalui pembangunan jalan ruas Kota Baru – Air Nanang dan ruas Werinama – Kota Baru di Kabupaten Seram Bagian Timur - pembangunan Jalan Popjetur – Batu Goyang di Kabupaten Kepulauan Aru - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T - Penataan dan pengembangan kawasan pariwisata rintisan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, melalui: - Giat warisan budaya (aktivitas yang dikerjakan Festival Banda Neira) - Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan (aktivitas yang dikerjakan Pemugaran Bastion Benten Nassau)

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - rehabilitasi ruang kelas rusak dan rusak berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Penguatan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi, serta meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan serta penguatan pelayanan promotif serta preventif ibu dan anak • Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna dan peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - koordinasi dan supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal • Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta dan rabies, serta layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh penyediaan infrastruktur, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan yang berkualitas melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - fasilitasi PIK remaja dan BKR dan pembiayaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi unggulan di tingkat regional pada Universitas Pattimura melalui revitalisasi sarana dan prasarana • Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga melalui: - peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

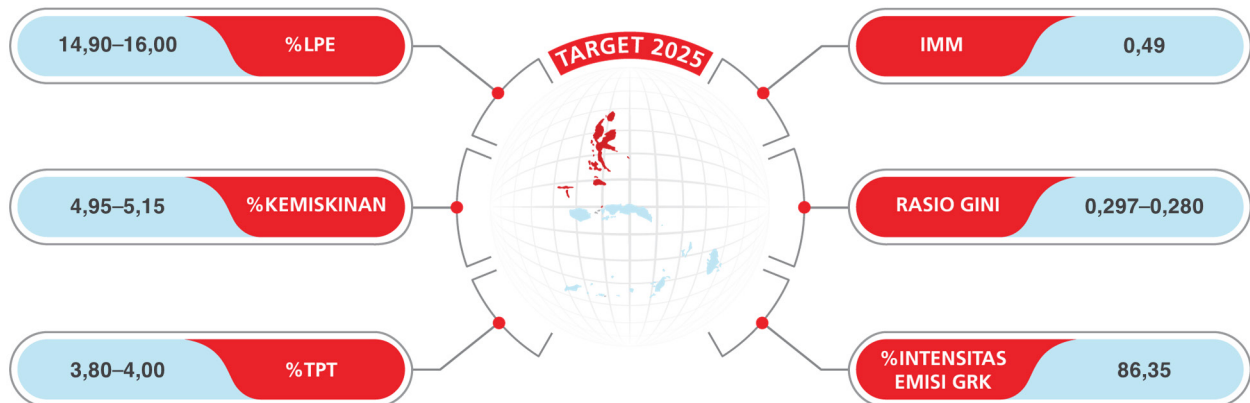


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri tembaga • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri kelapa dan rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya, di antaranya melalui: - peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo di Kab. Kep. Aru - peningkatan fasilitas Pelabuhan Mahaleta dan Eray di Kab. Maluku Barat Daya • Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui Bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian Bantuan Sosial Bersyarat dan Bantuan Sosial Sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah • Adaptasi perubahan iklim (di antaranya <i>sea level rise</i> di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (<i>green infrastructure</i> dan <i>nature-based solutions</i>) serta tata kelola risiko • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi melalui: - Penguatan sistem peringatan dini kebencanaan - Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana - Simulasi penanggulangan bencana - Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Maluku Utara

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Operasi kapal pengawas untuk pemberantasan praktik ilegal, <i>Unreported, and Unregulated Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan 716 dan 717 - Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, di antaranya melalui pengadaan sarana berkelanjutan dengan indikasi lokasi di Kota Tidore Kepulauan, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi - Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan - Pengembangan kawasan tanaman pangan dan penguatan sarana dan prasarana pertanian - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - rehabilitasi ruang kelas rusak dan rusak berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Penguatan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga melalui: - memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi, serta meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna dan peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - koordinasi serta supervisi pelayanan kesehatan RS bergerak/kapal. • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan, serta penguatan pelayanan promotif serta preventif ibu dan anak • Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta, serta layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS termasuk juga dengan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan yang berkualitas melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi keluarga baduta dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK - fasilitas PIK remaja dan BKR dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Hilirisasi industri berbasis mineral penting komoditas nikel di KI Teluk Weda dan KI Obi • Penguatan aksesibilitas Kawasan Industri Teluk Weda melalui preservasi jalan ruas Weda – Mafa – Matuting – Saketa mendukung Kawasan Industri Weda • Preservasi jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Sidangoli ruas Boso – Sidangoli (dermaga feri) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri kelapa

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Kawasan Transmigrasi Patlean di Kabupaten Halmahera Timur, Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh di Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Transmigrasi Pulau Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan • Penanggulangan dampak dari pengembangan Kawasan Industri di Kab. Halmahera Tengah (KI Teluk Weda) dan ketuntasan pembangunan Kota Sofifi, melalui: - bantuan pembangunan rumah susun - bantuan PSU bidang perumahan - bantuan pembangunan rumah swadaya - fasilitasi pembiayaan perumahan - peningkatan kualitas permukiman kumuh • Pelaksanaan reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria di Provinsi Maluku Utara • Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian Bantuan Sosial Bersyarat dan Bantuan Sosial Sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah • Adaptasi perubahan iklim (di antaranya <i>sea level rise</i> di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (<i>green infrastructure</i> dan <i>nature-based solutions</i>), serta tata kelola risiko • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi melalui: - penguatan sistem peringatan dini kebencanaan - pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana - simulasi penanggulangan bencana - penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



4.8 Wilayah Papua

Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Papua Tahun 2025



Target Pertumbuhan
Wilayah Pulau Papua
Tahun 2025



%LPE

5,3–5,8

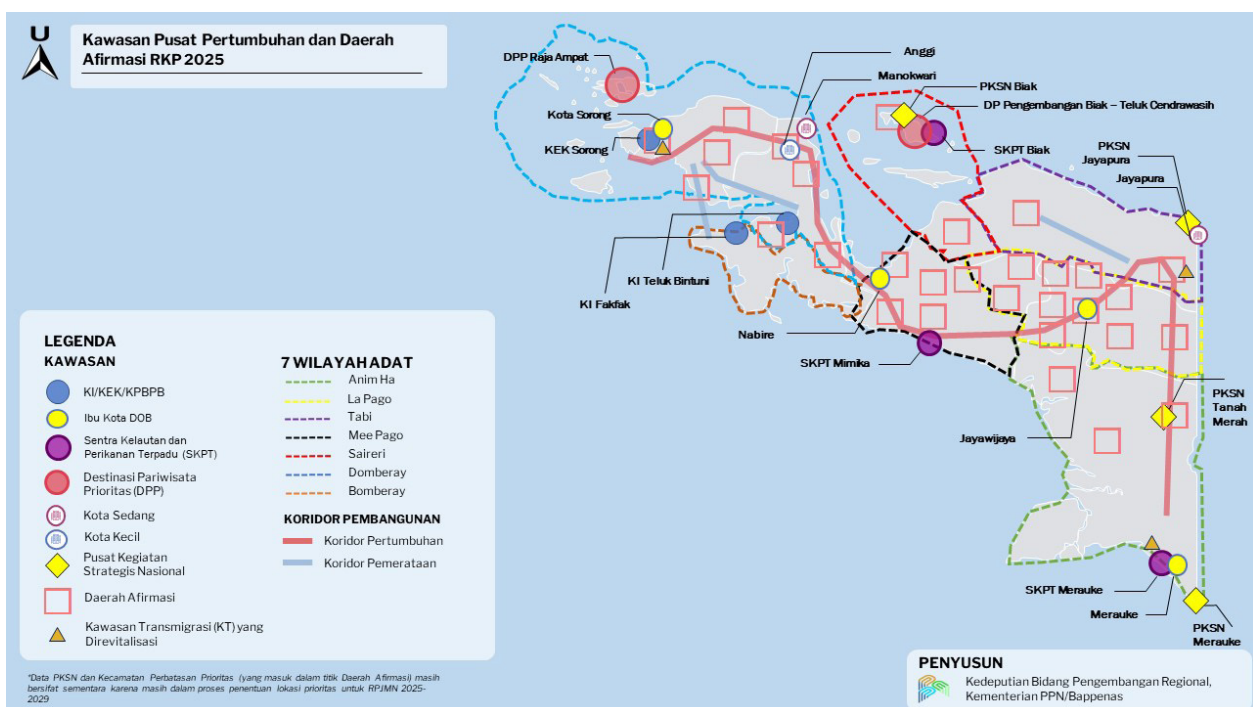
%TPT

2,5–3,0

■ LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

■ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi*



Keterangan: *) Daerah Afirmasi (Kawasan Perbatasan) masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029

➤ Provinsi Papua

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Forum kerukunan umat beragama di level provinsi dan kabupaten/kota • Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Operasi kapal pengawas untuk pemberantasan praktik <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan 717 • Pengembangan sektor pertanian, melalui: - pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Kabupaten Keerom - pengembangan kawasan perkebunan tanaman pangan lokal - peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian - pengembangan perlindungan hortikultura - fasilitasi dan bantuan peternakan • Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Dukungan pelaksanaan kegiatan (<i>events</i>) Sail Teluk Cendrawasih • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi - pembangunan Jalan Trans Papua Towe Hitam – Oksibil II - pembangunan Jembatan Trans Papua Elelim – Mamberamo III - preservasi Jalan Sarmi–Arbais • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua - perluasan akses perguruan tinggi keagamaan di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua melalui revitalisasi sarana dan prasarana • Penguatan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan akses dan layanan kesehatan, melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), melalui: - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan - penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer di Wilayah Papua • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK pada keluarga dengan baduta - fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja pada PIK remaja dan BKR • Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga, melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

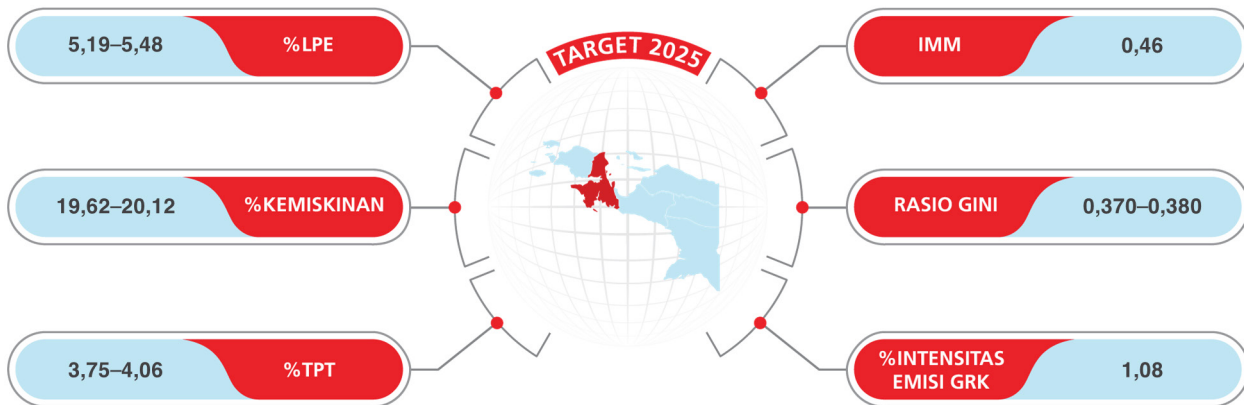
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Bandara Sentani Jayapura (BUMN) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Keerom • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Keerom • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Papua • Peningkatan jalan mendukung daerah tertinggal dan sangat tertinggal melalui peningkatan jalan pada ruas Yeti – Senggi – Mamberamo • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan sosial bersyarat dan bantuan sosial sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana • Dukungan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana peralatan pencarian dan pertolongan • Inventarisasi tanah ulayat • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Papua Barat

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Forum kerukunan umat beragama di level provinsi dan kabupaten/kota • Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala Kota Sowi di Kabupaten Manokwari • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan • Pengembangan sektor pertanian, melalui: - pengembangan sarana dan prasarana pertanian - percontohan penerapan teknologi pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan - pengembangan kawasan perkebunan tanaman pangan lokal - peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian - peningkatan pelayanan peternakan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Fasilitasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - pembangunan jalan ruas Windesi – Ambuni dan Prafi – Warmare – Maruni, Preservasi Jalan Warmenu – Furwata dan Ambuni – Tandia - pengembangan Bandar Udara Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat • Penguatan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan akses dan layanan kesehatan, melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak - penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak - pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit TB - pengendalian penyakit kusta - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), melalui: - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - peningkatan program <i>fellowship</i> serta bantuan program pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan - pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK pada keluarga dengan baduta - fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja pada PIK remaja dan BKR

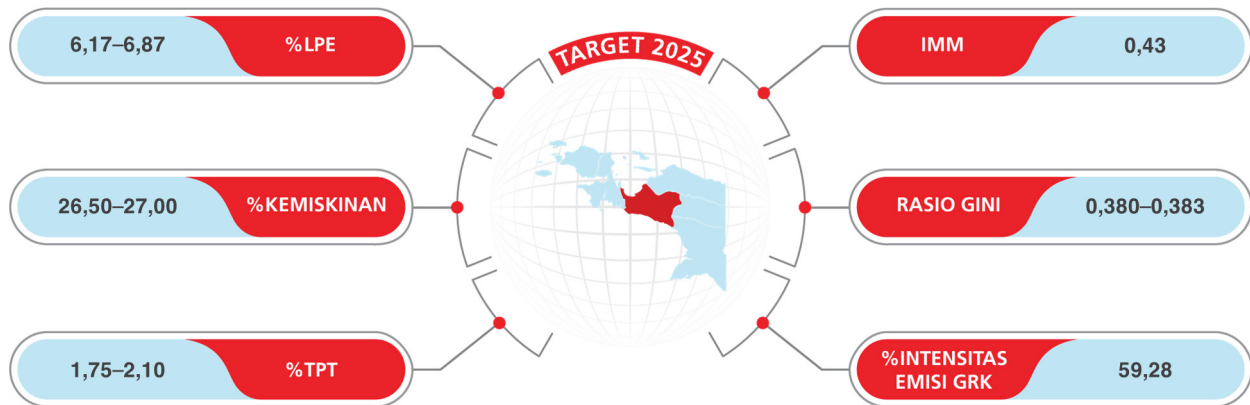


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Pelatihan berbasis kompetensi PBK • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Penguatan industri dasar • Peningkatan konektivitas mendukung akses simpul transportasi di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi, melalui: - pembangunan alih trase akses Bandara Rendani - pengembangan Bandara Rendani • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak • Pembangunan kawasan perbatasan kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Papua Barat • Penanganan infrastruktur jalan mendukung daerah tertinggal melalui pembangunan jalan pada ruas Windesi – Ambuni; Ambuni – Karuan dan preservasi jalan pada ruas Makbon – Mega • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan sosial bersyarat dan bantuan sosial sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana • Dukungan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana peralatan pencarian dan pertolongan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Papua Tengah

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Forum kerukunan umat beragama di level provinsi dan kabupaten/kota - Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Operasi kapal pengawas untuk pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>, terutama pada perbatasan perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pengembangan sektor pertanian, melalui: - penguatan sumber daya manusia pertanian - penyiapan kawasan perkebunan pangan lokal - Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	- Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Tengah



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pengembangan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan akses dan layanan kesehatan, melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak - penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak - pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit TB - pengendalian penyakit kusta • Pemenuhan tenaga kesehatan dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), melalui: - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK pada keluarga dengan baduta - fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja pada PIK Remaja dan BKR • Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga, melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

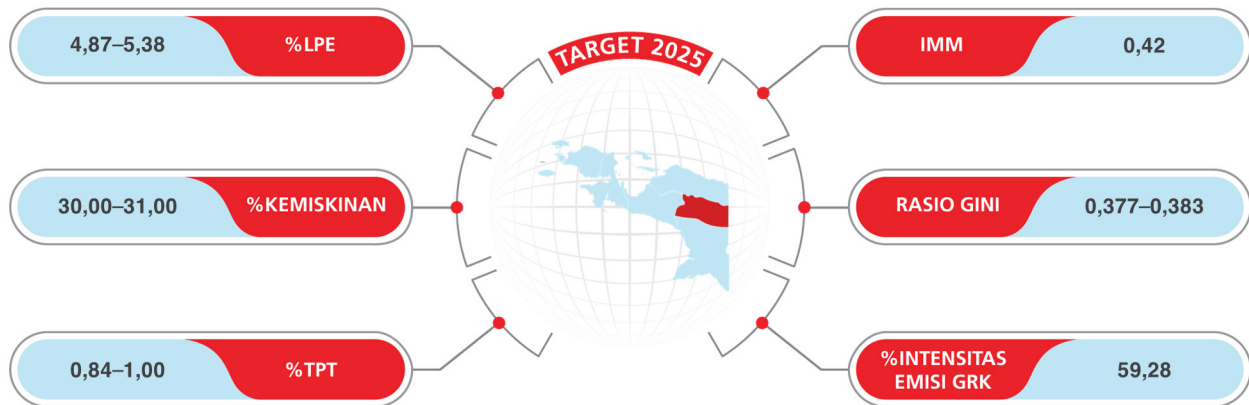
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru, melalui pembangunan gedung kantor gubernur, MRP, dan DPRD • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiyai • Dukungan infrastruktur pada daerah tertinggal dan sangat tertinggal melalui pembangunan Jalan Trans Papua ruas Wagate – Timika • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Pembangunan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Papua Tengah • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria di Provinsi Papua Tengah • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan sosial bersyarat dan bantuan sosial sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Penyusunan materi teknis dan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Kawasan Timika • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Papua Pegunungan

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Forum kerukunan umat beragama di level provinsi dan kabupaten/kota • Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Pengembangan sektor pertanian melalui penguatan sumber daya manusia pertanian • Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - pengembangan Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan - pembangunan Jalan Trans Papua Usulimo – Karubaga, Oksibil – Iwur I dan Oksibil – Iwur II - penggantian Jembatan Gurage
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Pegunungan. - pengembangan kurikulum kontekstual Papua

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pengembangan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga, melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan akses dan layanan kesehatan, melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit TB - pengendalian penyakit kusta - penguatan pelayanan promotif serta preventif ibu dan anak - pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), melalui: - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK pada keluarga dengan baduta - fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja pada PIK remaja dan BKR • Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga, melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

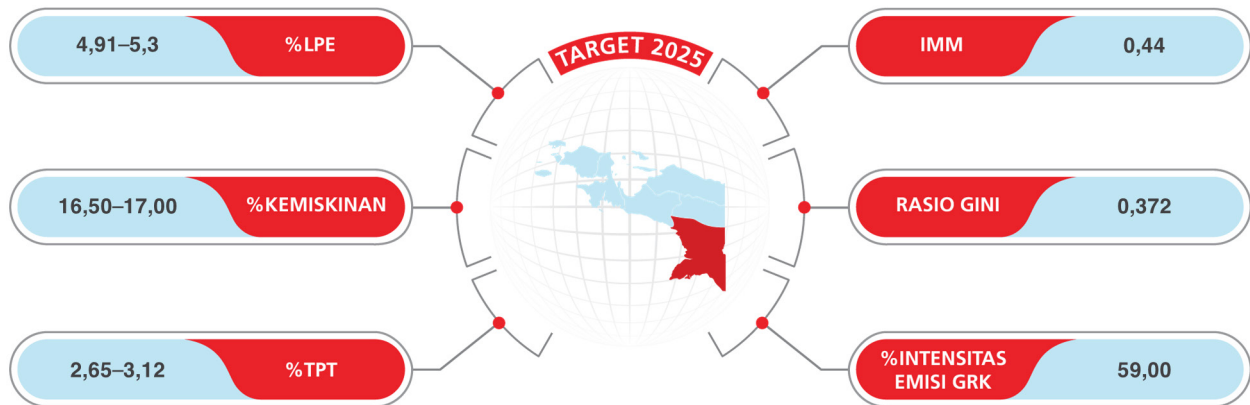


Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah • Pengembangan Kabupaten Jayawijaya sebagai ibukota provinsi daerah otonom baru melalui pembangunan gedung kantor gubernur, MRP, dan DPRP • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Peningkatan konektivitas mendukung daerah sangat tertinggal preservasi Jalan Karubaga - Ilu - Mulia • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan sosial bersyarat dan bantuan sosial sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif

➤ Provinsi Papua Selatan

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Forum kerukunan umat beragama di level provinsi dan kabupaten/kota • Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Operasi kapal pengawas untuk pemberantasan praktik <i>Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing</i> di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Pengembangan sektor pertanian, melalui: - penguatan sumber daya manusia pertanian - penguatan sarana prapangan sub sektor pertanian pangan • Pengembangan kawasan perkebunan pangan lokal • Pengembangan kawasan sentra produksi pangan Papua Selatan • Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Peningkatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, melalui: - pengembangan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat - preservasi Jalan Trans Papua ruas Bts. Kab. Boven Digoel/Merauke – Muting – Bupul; Bupul – Erambu – Sota • Peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, melalui: - pendampingan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro - fasilitasi penerbitan izin usaha (nomor induk berusaha) • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Selatan - optimalisasi layanan bantuan Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa • Penguatan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan akses dan layanan kesehatan, melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak - penguatan pelayanan promotif serta preventif ibu dan anak - pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit TB - pengendalian penyakit kusta - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), melalui: - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis - perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan - penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK pada keluarga dengan baduta - fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja pada PIK remaja dan BKR

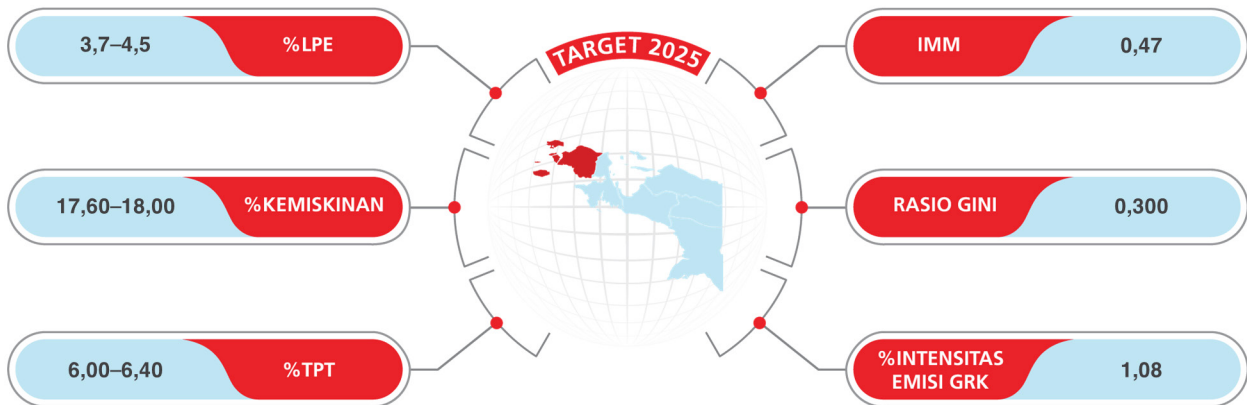
Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga, melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman)
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat • Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat • Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor di Kabupaten Merauke • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Pengembangan Kabupaten Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru, melalui pembangunan gedung kantor gubernur, MRP, dan DPRD • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian Bantuan Sosial Bersyarat dan Bantuan Sosial Sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana • Inventarisasi tanah ulayat • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



➤ Provinsi Papua Barat Daya

Sasaran Pembangunan Daerah



Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka; GRK: Gas Rumah Kaca

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Forum kerukunan umat beragama di level provinsi dan kabupaten/kota • Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan • Pengembangan sektor pertanian, melalui: - penyiapan kawasan pangan lokal dalam rangka pengembangan kemandirian pangan yang didukung oleh prasarana pertanian dan sumber daya manusia unggul dan kompeten - peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan - penguatan prasarana dan sarana pertanian
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, salah satunya melalui pengelolaan penataan kawasan destinasi wisata di KTA Waisai • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan akses dan layanan pendidikan, melalui: - perluasan akses perguruan tinggi keagamaan di IAIN Sorong melalui revitalisasi sarana dan prasarana - pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah - melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar - rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat - peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal - penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat Daya. • Pengembangan talenta potensial dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga, melalui: - penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi - peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN Riset dan Inovasi - pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival - pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya - pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan akses dan layanan kesehatan, melalui: - peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD - pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD - pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna - peningkatan tipe RS di kabupaten/kota yang hanya memiliki RSUD tipe D - penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak - penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak - layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria - pencegahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit TB - pengendalian penyakit kusta - penguatan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), melalui: - perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan - pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis • Peningkatan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta pencegahan perkawinan anak • Peningkatan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, melalui: - pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) pada fasyankes - penguatan kampung keluarga berkualitas - fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK pada keluarga dengan baduta - fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja pada PIK Remaja dan BKR yang mendapat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga, melalui: - pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah - pencegahan perilaku berisiko pemuda - peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Peningkatan perlindungan sosial pada kelompok rentan, melalui: - asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas - asistensi rehabilitasi sosial lansia • Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk mendukung industrialisasi perikanan, melalui: - peningkatan upaya promosi dan pemasaran kawasan pada investor di bidang perikanan - fasilitasi kerja sama antara kawasan dan sentra perikanan • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Preservasi jalan mendukung KEK Sorong ruas Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan minuman) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri kelapa dan rumput laut
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru melalui pembangunan gedung kantor gubernur, MRP, dan DPRP • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, dengan indikasi lokasi di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambora, dan Kabupaten Maybrat • Pembangunan rumah layak huni terutama bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Maybrat • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun di Kabupaten Sorong • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi melalui bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan PSU bidang perumahan • Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian Bantuan Sosial Bersyarat dan Bantuan Sosial Sembako
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif, penguatan basis data potensi objek PDRD, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana • Pelatihan teknis SDM potensi serta dukungan operasi pemeliharaan sarana prasarana peralatan pencarian dan pertolongan • Inventarisasi tanah ulayat • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Keterangan: *) *Highlight* Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif



☐ Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

BAB

5

**Pendanaan
Pembangunan**



☐ Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

5.1 Prioritas Pendanaan Pembangunan

Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadi landasan yang krusial dalam menentukan arah pembangunan negara ke depan. Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional pada periode 2025-2029 sebagai tahap awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045, melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penekanan pada sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, pendanaan RKP Tahun 2025 diutamakan terhadap program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas nasional. Di samping itu, ruang fiskal juga perlu disediakan untuk program yang akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.

Dalam hal untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), pendanaan RKP Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, pendanaan akan diarahkan untuk (a) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara salah satunya melalui penguatan sarana prasarana pertahanan; (b) meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan antara lain melalui pengembangan dan peningkatan lahan pertanian dengan membangun kawasan sentra produksi pangan; serta (c) mewujudkan perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan.



Selain itu, untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif, pendanaan diarahkan untuk (a) melanjutkan pengembangan infrastruktur melalui penguatan konektivitas jaringan transportasi dan energi listrik terbarukan, (b) meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan, (c) meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, serta (d) mengembangkan pariwisata dan industri kreatif.

Kemudian, untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, pendanaan RKP Tahun 2025 akan diarahkan untuk (a) mencapai pendidikan berkualitas yang merata; (b) mewujudkan kesehatan untuk semua melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota; (c) mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; (d) mendorong iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; serta (e) mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Selain itu pendanaan juga diarahkan untuk program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran program peningkatan gizi anak sekolah, balita dan ibu hamil; serta program pembangunan sekolah unggul serta program revitalisasi sekolah. Selanjutnya, pendanaan juga diarahkan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan fokus terhadap meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan serta upaya integrasi ekonomi domestik dan global.

Selanjutnya untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, pendanaan diarahkan untuk (a) mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif; (b) meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; (c) mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; serta (d) mendukung terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan melalui pembangunan wilayah

metropolitan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai bagian dari pencapaian hal-hal di atas, pendanaan juga diarahkan untuk melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Dalam hal untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan diarahkan untuk (a) supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi; (b) mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani melalui menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/Polri; (c) masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) menekan risiko kerugian yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat judi dan penyelundupan; (e) terwujudnya tata kelola badan usaha milik negara yang baik; (f) tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, dengan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto; serta (g) tingkat inflasi yang rendah dan stabil dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pendanaan RKP Tahun 2025 akan diarahkan untuk mendorong kemaslahatan masyarakat beragama yang berkebudayaan maju, dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim.



Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Alokasi (Rp. Miliar)
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1.036,2
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	103.749,1
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	39.158,3
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	212.963,0
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	19.531,0
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	179.496,9
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	20.492,4
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	71.833,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Catatan:

- Pagu belanja kementerian/lembaga berdasarkan Pertemuan Tiga Pihak Pagu Indikatif 2025;
- Sesuai dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu PN;
- Prioritas Nasional mencakup rincian belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, belum mencakup rincian Transfer ke Daerah dan dukungan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta);
- Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi dan sumber pendanaan akan dilakukan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2025 pascapenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

5.2 Pengelolaan Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah tahun 2025 diarahkan agar kualitas belanja menjadi efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belanja pemerintah tersebut dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, dan transfer ke daerah.

Belanja Kementerian/Lembaga

Kebijakan belanja kementerian/lembaga merupakan bagian dari kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan untuk belanja kementerian/lembaga antara lain (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel khususnya pada belanja barang; (2) pemanfaatan belanja kementerian/lembaga sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2025; (3) penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan transformasi ekonomi; (4) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan belanja kementerian/lembaga dengan transfer ke daerah; serta (5) pemanfaatan sumber dana rupiah murni dan non rupiah murni bersifat saling melengkapi untuk mencapai target prioritas nasional.

Pagu anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 saat ini mencakup belanja operasional, belanja wajib, *Multi Years Contract*, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, perlindungan sosial, belanja yang bersumber non rupiah murni, serta tugas dan fungsi esensial kementerian/lembaga sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan prioritas nasional.

Belanja Non Kementerian/Lembaga melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Dalam rangka menjaga kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara tahun 2025 dengan fokus sebagai berikut

- (1) optimalisasi belanja non-kementerian/lembaga yang mencakup (a) pemenuhan kewajiban pemerintah seperti pensiun, akuntabilitas pengelolaan utang, dukungan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pembangunan infrastruktur; (b) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional sertaantisipasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (c) pelaksanaan subsidi yang secara umum diarahkan agar mulai beralih dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima, serta diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta petani;
- (2) optimalisasi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam komponen pembiayaan anggaran dan pembiayaan investasi untuk Badan Usaha Milik Negara. Pembiayaan investasi untuk Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendorong peran Badan Usaha Milik Negara melalui penguatan penciptaan nilai (*value creation*). Hal ini dilakukan



dengan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Badan Usaha Milik Negara, memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development*, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, manajemen risiko serta memperhitungkan *return* yang akan diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara terhadap negara.

Transfer ke Daerah

Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut

- (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan transfer ke daerah yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- (2) meningkatkan peran transfer ke daerah dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian standar pelayanan minimal dan prioritas nasional;
- (3) meningkatkan peran transfer ke daerah dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*;
- (4) mengarahkan penggunaan transfer ke daerah untuk mempercepat konvergensi antardaerah antara lain melalui dana desa;
- (5) memperbaiki mekanisme penyaluran transfer ke daerah dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Arah kebijakan dana bagi hasil tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut

- (1) memperkuat kebijakan pengalokasian dana bagi hasil yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim;
- (2) mempertajam kebijakan penyaluran dana bagi hasil berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- (3) meningkatkan fokus penggunaan dana bagi hasil *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (4) memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan dana bagi hasil.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Arah kebijakan dana alokasi umum tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian dana alokasi umum sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di antaranya kebijakan *holdharmless* sampai dengan 2027;
- (2) memperkuat penggunaan *earmarking* dana alokasi umum pada sektor prioritas untuk

mendorong pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan *mandatory spending*;

- (3) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi dana alokasi umum;
- (4) meningkatkan kualitas tata kelola dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman sumber daya manusia daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi;
- (5) melanjutkan kebijakan penyaluran dana alokasi umum dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi pelayanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik, non-fisik, dan hibah kepada daerah. Kebijakan alokasi dana alokasi khusus ditujukan untuk:

- (1) pencapaian prioritas nasional;
- (2) percepatan pembangunan daerah;
- (3) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
- (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (5) mendukung operasionalisasi pelayanan publik; dan
- (6) mendukung akselerasi pembangunan daerah melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arah kebijakan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut

- (1) Dana alokasi khusus fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Kebijakan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2025 diarahkan untuk:
 - (a) mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak;
 - (b) mendorong pencapaian target prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri;
 - (c) penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan;
 - (d) menerapkan *matching* program antara kegiatan yang didanai dana alokasi khusus fisik dengan sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
 - (e) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
 - (f) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.



Bidang dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- (a) dana alokasi khusus fisik untuk layanan dasar, mencakup bidang: (i) air minum, (ii) sanitasi, (iii) irigasi, (iv) konektivitas (subbidang jalan), (v) pendidikan (termasuk subbidang perpustakaan daerah), (vi) kesehatan (termasuk subbidang keluarga berencana), dan (vii) perlindungan perempuan dan anak;

- (b) dana alokasi khusus fisik dengan tema tertentu, yaitu:

- (i) tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu, mencakup bidang (1) air minum, (2) sanitasi, (3) perumahan dan permukiman;
- (ii) tematik kawasan produksi pangan nasional, mencakup bidang (1) pangan pertanian, (2) konektivitas (subbidang jalan dan subbidang transportasi perairan), (3) irigasi, dan (4) pangan akuatik;
- (iii) tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri, mencakup bidang (1) industri kecil dan menengah, (2) perdagangan, (3) konektivitas (subbidang jalan), (4) air minum, dan (5) sanitasi.

- (2) Dana alokasi khusus nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah, diarahkan untuk

- (a) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya, serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
- (b) mempertajam fokus kegiatan dana alokasi khusus nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*;
- (c) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;

- (d) peningkatan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan;

- (e) mendukung penguatan ekosistem kawasan industri.

Jenis dana alokasi khusus nonfisik terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Penguatan Industri Kecil dan Menengah, serta Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil.

- (3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan hibah kepada daerah diarahkan untuk:

- (a) meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional;
- (b) melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi (*upland*) berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
- (c) mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan;
- (d) mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam;
- (e) melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

Jenis hibah kepada daerah tahun anggaran 2025 meliputi Mass Rapid Transit, The Development of Integrated Farming System at Upland Areas, dan Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape.

Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi khusus. Arah kebijakan dana otonomi khusus adalah sebagai berikut

- (1) mendorong prioritas penggunaan dana otonomi khusus untuk
 - (a) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan;
 - (b) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah;
 - (c) mendukung capaian pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua melalui perwujudan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
- (2) meningkatkan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan;
- (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah pengelola dana otonomi khusus, terutama di daerah otonomi baru melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan;

- (4) mengarahkan penggunaan dana tambahan infrastruktur untuk daerah otonom baru diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus Aceh dan dana otonomi khusus Papua. Arah kebijakan untuk masing-masing dana otonomi khusus sebagai berikut

(1) Dana otonomi khusus Aceh

Arah kebijakan umum dana otonomi khusus Aceh adalah untuk mendanai (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (b) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; (c) pemberdayaan ekonomi rakyat; dan (d) pengentasan kemiskinan. Pendanaan bertujuan untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat Aceh yang berbasis budaya dan syariat Islam, peningkatan mitigasi, ketahanan terhadap bencana, serta mewujudkan sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Modal Manusia, dan rasio gini).

Dalam rangka optimalisasi tata kelola penyaluran dana otonomi khusus Aceh, diperlukan prioritas penyaluran dalam bidang-bidang yang krusial dalam penyelesaian isu strategis di Provinsi Aceh beserta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dana otonomi khusus Aceh di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam mendukung arah kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2025, maka perlu dilakukan beberapa rekomendasi dalam perbaikan dan penguatan tata kelola sebagai berikut:



- (a) penguatan perencanaan penggunaan dana otonomi khusus yang diselenggarakan melalui perencanaan pusat sampai ke dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus);
 - (b) penyusunan dokumen Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh dikonsultasikan dan dikoordinasikan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna mendukung pemanfaatan dana otonomi khusus yang selaras dan sinkron dengan cita-cita pembangunan nasional dan daerah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Aceh yang berlandaskan budaya dan syariat Islam;
 - (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil;
 - (d) perkuatan koordinasi, kerja sama, serta kemitraan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring evaluasi dan pembinaan;
 - (e) perbaikan fokus, kualitas, serta prioritas penggunaan bidang-bidang anggaran khususnya dalam rangka persiapan usainya penyaluran dana otonomi khusus Aceh pada tahun 2028;
 - (f) perencanaan alokasi dana otonomi khusus sesuai bidang yang ditentukan dan selaras dengan isu strategis Provinsi Aceh terutama mengatasi kemiskinan yang tinggi, memperbaiki standar hidup layak, serta menurunkan prevalensi *stunting* bagi bayi;
 - (g) peningkatan pengawasan pelaksanaan dana otonomi khusus dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui perencanaan penggunaan dan otonomi khusus hingga melalui pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil.
- (2) Dana otonomi khusus Papua
- Arah kebijakan umum dana otonomi khusus Papua pada tahun 2025 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut
- (a) dana otonomi khusus yang bersifat umum satu persen dari plafon dana alokasi umum nasional diarahkan untuk mendukung peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kampung, penataan tanah adat/ulayat, penguatan lembaga adat, dan pengembangan pangan lokal;
 - (b) dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional) diarahkan untuk (i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan dan pengembangan kurikulum kontekstual Papua, serta pemenuhan tenaga pendidik yang mengutamakan Orang Asli Papua; (ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen) diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), percepatan penurunan *stunting*, penurunan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit, serta pemenuhan tenaga kesehatan yang mengutamakan Orang Asli Papua; serta (iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan

ekonomi lokal serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan Badan Usaha Milik Kampung;

- (c) dana tambahan infrastruktur diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung pengembangan kawasan pemerintahan dan kawasan perkotaan, termasuk pada ibu kota daerah otonom baru;
- (d) tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi otonomi khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat.

Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mencapai Misi Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Arah kebijakan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025

- (1) mengarahkan penggunaan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan penyediaan layanan dasar publik, serta mengurangi penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi, dan pengawasan;
- (2) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan belanja kementerian/lembaga untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah;
- (3) meningkatkan tata kelola pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

Dana Desa

Dana desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Arah kebijakan dana desa adalah sebagai berikut:

- (1) mempertajam kebijakan pengalokasian dana desa yang mempertimbangkan kinerja desa;
- (2) mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui
 - (a) penurunan kemiskinan dan *stunting*, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa;



- (b) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - (c) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal;
 - (d) perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, konektivitas, dan fasilitas umum desa;
 - (e) pengembangan ekonomi desa sesuai komoditas unggulan desa melalui bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa.
- (3) mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa;
- (4) mendorong peningkatan kualitas belanja barang dan jasa di desa;
- (5) meningkatkan kualitas tata kelola dana desa melalui
- (a) penyaluran dana desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan;
 - (b) penyaluran dana desa secara langsung dari rekening kas umum negara ke rencana kerja desa;
 - (c) pengalokasian insentif dana desa untuk desa yang berkinerja baik;
 - (d) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap dana desa secara optimal setiap tahunnya;
 - (e) penguatan peran supra desa (pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dana desa.

- (6) meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi;
- (7) sinergi penggunaan dana desa dengan sumber pendanaan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Insentif Fiskal

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Insentif fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tetapi tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas bagi aparat pemerintahan daerah. Arah kebijakan insentif fiskal adalah sebagai berikut:

- (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
- (2) melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar;
- (3) melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan;
- (4) mendorong peran insentif fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain;
- (5) melanjutkan keberpihakan pemberian insentif fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

5.3

Optimasi dan Sinergi Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan

Prioritas pendanaan pembangunan bersumber dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Mengingat penerimaan dari sumber-sumber tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan, diperlukan penggunaan dan optimasi sumber-sumber pendanaan lain. Untuk itu, kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dijaga secara hati-hati atau *prudent*, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya, dan berkelanjutan, serta perlu dilakukan penajaman pemanfaatan pembiayaan untuk mengakomodasi pemerintahan selanjutnya pada tahun 2025. Pembiayaan anggaran defisit anggaran dipenuhi dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk surat berharga syariah negara, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, untuk mendukung pendanaan pembangunan akan dimanfaatkan sumber pembiayaan dari swasta/nonpemerintah.

Pendanaan bersumber dari pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi, praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya (*blended finance*). Pada tahun 2025, pinjaman luar negeri akan digunakan untuk kegiatan (1) mendukung pembiayaan program prioritas sistem pertahanan dan keamanan negara, (2) mendukung terwujudnya ketahanan pangan menuju swasembada pangan, (3) pengembangan energi baru terbarukan, (4) peningkatan konektivitas digital, (5) perluasan jaringan irigasi, (6) memperkuat sinergi pembangunan jaringan transportasi darat dan laut termasuk pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor, (7) pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan,

(8) perluasan layanan kesehatan berkualitas, (9) infrastruktur produksi perikanan, (10) pembiayaan perumahan berwawasan hijau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, (11) pembangunan pusat data untuk mendukung transformasi digital termasuk reformasi tata kelola pemerintahan, serta (12) penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini bencana.

Pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri, seperti infrastruktur dan peruntukan lain yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk mendukung industri pertahanan nasional. Dalam RKP Tahun 2025, pinjaman dalam negeri difokuskan untuk mendukung pembiayaan Program Prioritas Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Selain itu, pinjaman dalam negeri akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana perikanan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.

Surat berharga syariah negara digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek/kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas. Dalam RKP Tahun 2025, penerbitan surat berharga syariah negara sebagai sumber pendanaan akan difokuskan untuk (1) mendukung pembiayaan Program Prioritas Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur; (2) perkuatan pendidikan, sains, dan teknologi; (3) penguatan sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (4) penyediaan rumah layak untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pemanfaatan pendanaan Surat Berharga Syariah Negara sebagai pembiayaan proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dukungan terhadap penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (*blended financing*).



Dalam RKP Tahun 2025, peran pendanaan nonpemerintah akan ditingkatkan melalui perluasan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif. Upaya perluasan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam RKP Tahun 2025 dilakukan melalui (1) peningkatan kualitas proyek dan akselerasi proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha mencakup (a) pendampingan penyusunan dokumen studi pendahuluan dan prastudi kelayakan, (b) pembentukan panel badan penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, (c) pengembangan model bisnis kerja sama, (d) pemberian peluang kepada lembaga pembiayaan untuk turut serta dalam proses penyiapan, dan (e) perluasan transaksi investasi dari investor dan lembaga pembiayaan; serta (2) masifikasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di daerah yang mencakup (a) pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan studi pendahuluan dan prastudi kelayakan, dan (b) pembentukan pengaturan teknis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha skala kecil. Dalam rangka menjaga defisit anggaran, pembiayaan kegiatan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha perlu diarahkan sebagai bagian dari pembiayaan investasi (*below the line*).

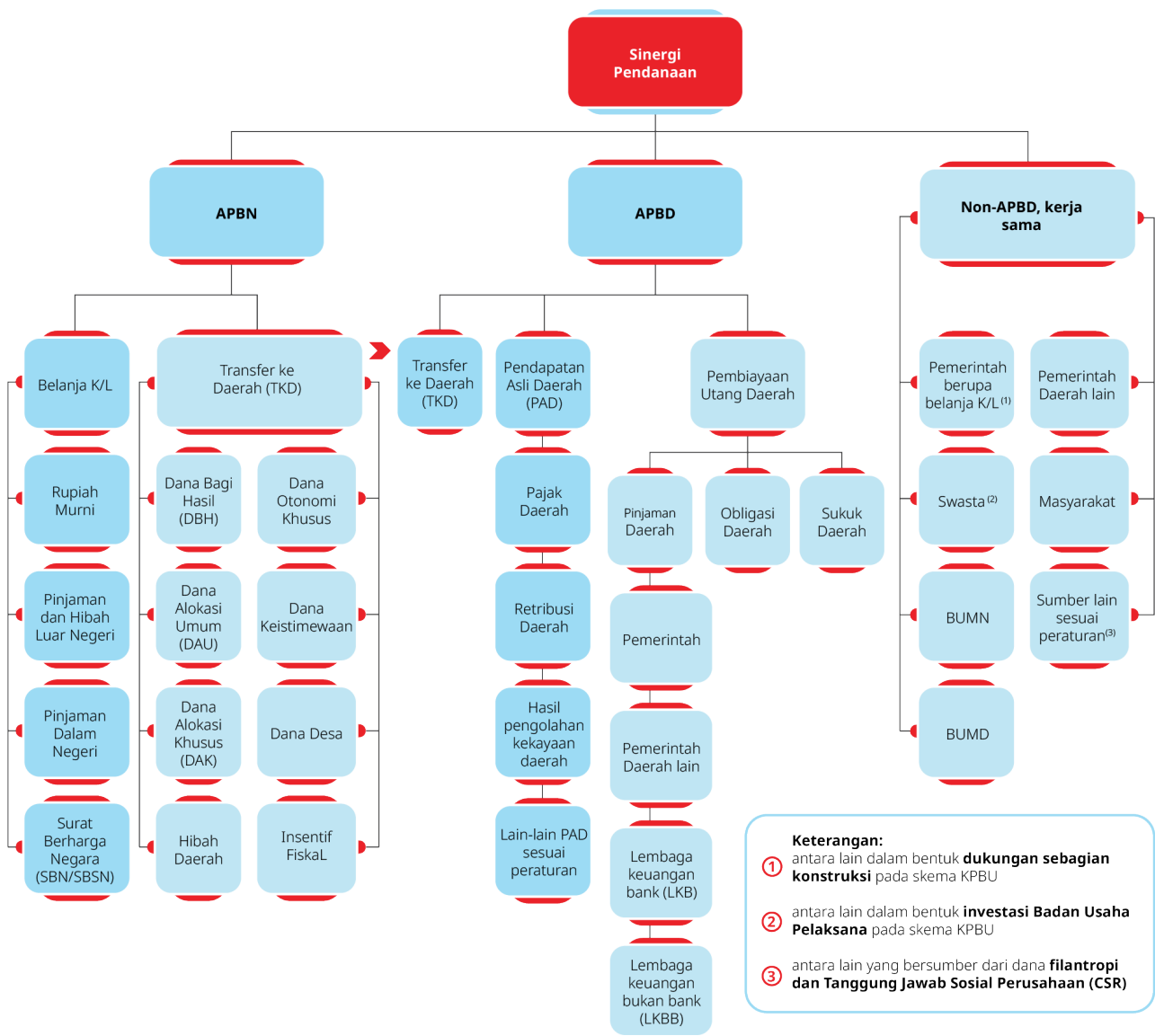
Pada tahun anggaran 2025, proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan penanggung jawab proyek kerja sama kementerian/lembaga yang direncanakan

melaksanakan tahapan transaksi dan konstruksi mencakup 13 proyek untuk perkuatan sistem logistik nasional, percepatan transisi energi, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (hilir). Selain itu, terdapat beberapa proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada akhir Tahun 2025 yaitu Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I, *Proving Ground* (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor), dan Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau.

Dalam rangka pengembangan instrumen pembiayaan inovatif akan dilakukan pemantapan regulasi, kelembagaan, dan skema pengelolaan pembiayaan inovatif, khususnya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk skema pembiayaan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan skema *Public-Private-People Partnership*.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dalam rangka penyediaan infrastruktur dan/atau pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah dapat dilakukan melalui sinergi pendanaan yang dapat meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, serta sumber lain sesuai peraturan.

Sinergi Pendanaan



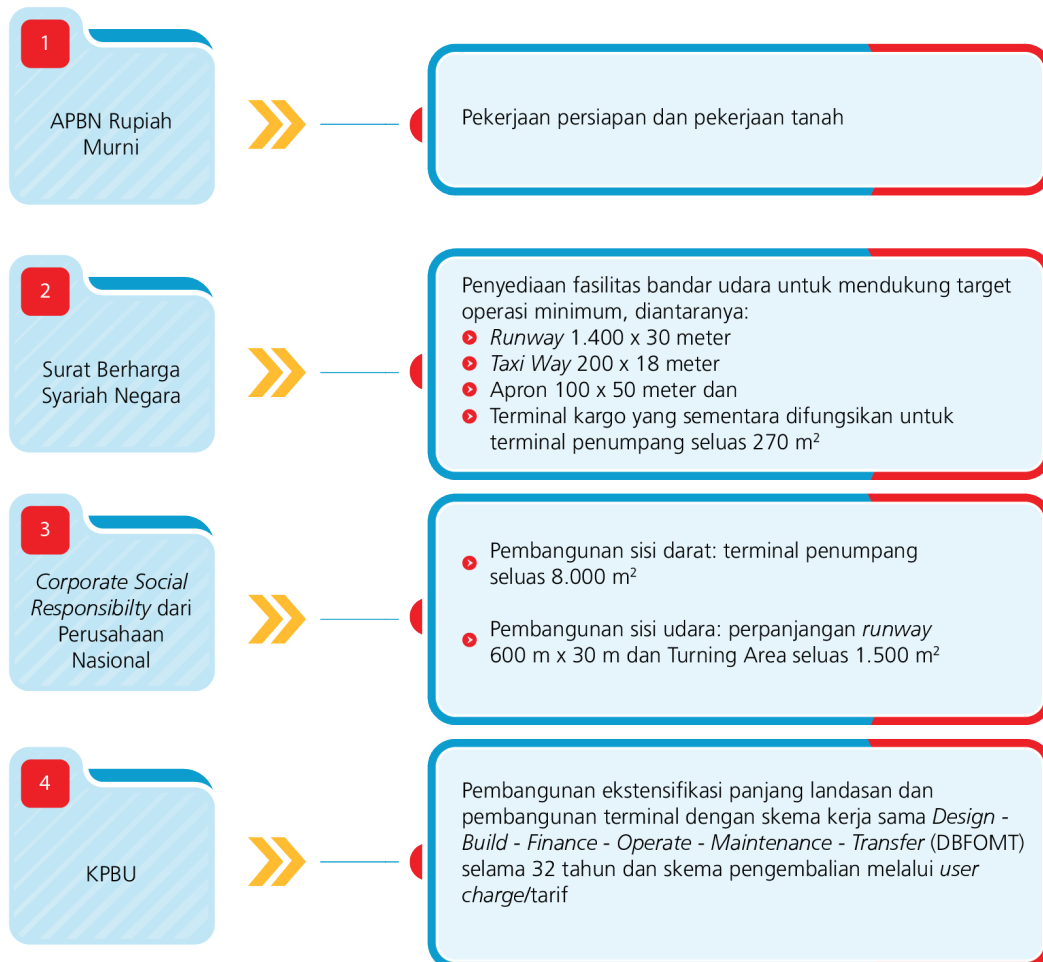
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan, kompleksnya kebutuhan sarana dan prasarana publik yang harus dipenuhi, serta berkembangnya kapasitas keuangan lembaga-lembaga keuangan nonpemerintah, pemerintah mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan bauran sumber-sumber pendanaan (*blended finance*) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sosial dan ekonomi, baik skala kecil, menengah, dan besar. Bauran pendanaan merupakan bentuk konkret dari sinergi dan integrasi dari

sumber-sumber pendanaan dengan melibatkan pendanaan yang bersifat katalistik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, serta kontribusi dari pemerintah daerah. Selain itu, penguatan sinergi pendanaan juga dilakukan antar tingkat pemerintah melalui pengembangan dan perluasan mekanisme hibah kepada daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output-based transfer*) dan meminimalisasi potensi duplikasi dalam pengalokasian kegiatan. Salah satu proyek yang dibiayai dengan bauran pendanaan adalah Bandara Singkawang.



Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, pemerintah dihadapkan pada kemampuan anggaran yang terbatas. Dengan demikian, selain dukungan anggaran pemerintah, dukungan terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi perlu disinergikan dengan investasi Badan Usaha Milik Negara dan investasi swasta, sejalan dengan kebutuhan investasi dalam kerangka ekonomi makro.

Struktur Pembiayaan Bandara Singkawang





Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

BAB

6

**Pengendalian, Evaluasi,
dan Tata Kelola
Data Pembangunan**





Pembangunan nasional dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang berasal dari dinamika global maupun nasional. Fenomena *polycrisis*, krisis simultan dari berbagai peristiwa global, sangat berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tantangan pembangunan juga dapat bersumber dari manajemen pelaksanaan pembangunan antarinstansi dan antarjenjang pemerintah, serta kolaborasi dengan nonpemerintah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka urgensi pengendalian dan evaluasi pembangunan menjadi sangat penting dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memberikan perbaikan kontinu atas proses pembangunan. Aktivitas tersebut juga dilakukan untuk memastikan kebermanfaatan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, dalam proses



pembangunan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dukungan tata kelola data sangat penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence*). Tata kelola data pembangunan tersebut diwujudkan melalui Satu Data Indonesia.

6.1

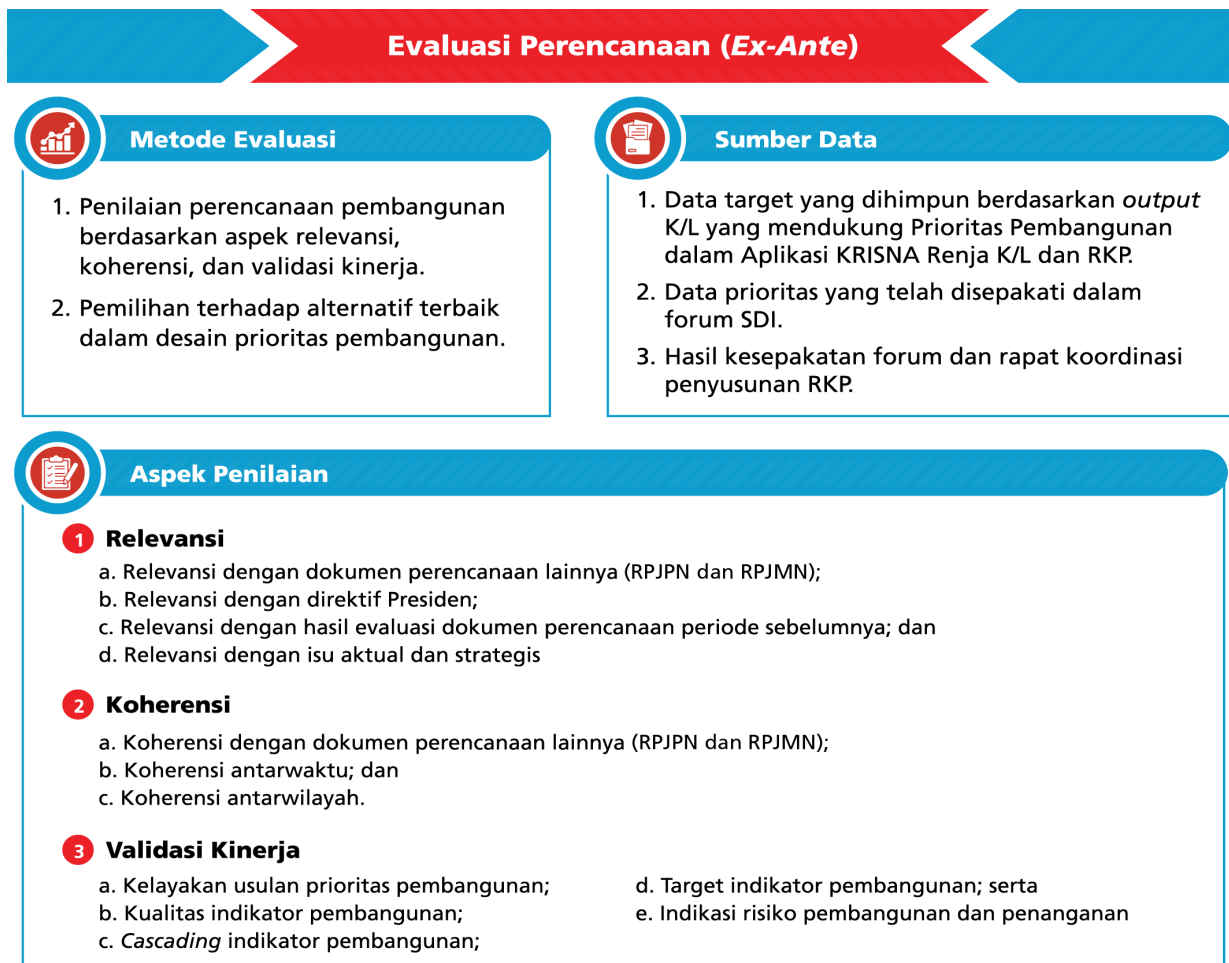
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi pembangunan tidak hanya dilakukan pada tahapan pelaksanaan namun juga dimulai dari tahap perencanaan. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat ditentukan oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah akses, dan dibagi pakaikan dalam kerangka Satu Data Indonesia yang didukung oleh suatu sistem informasi perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan RKP

Pengendalian preventif dilakukan pada saat menyusun kebijakan melalui evaluasi penyusunan rencana (*ex-ante*), yang berperan dalam memastikan (1) arsitektur kinerja memenuhi kaidah kerangka kerja logis dan telah mengacu pada dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah); (2) koherensi antarbab dan antardokumen; (3) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar manfaat proyek pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat; (4) pemetaan pelaksana pembangunan; (5) identifikasi dan penanganan risiko; serta (6) identifikasi kebutuhan data dukung dengan memperhatikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Metode Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah



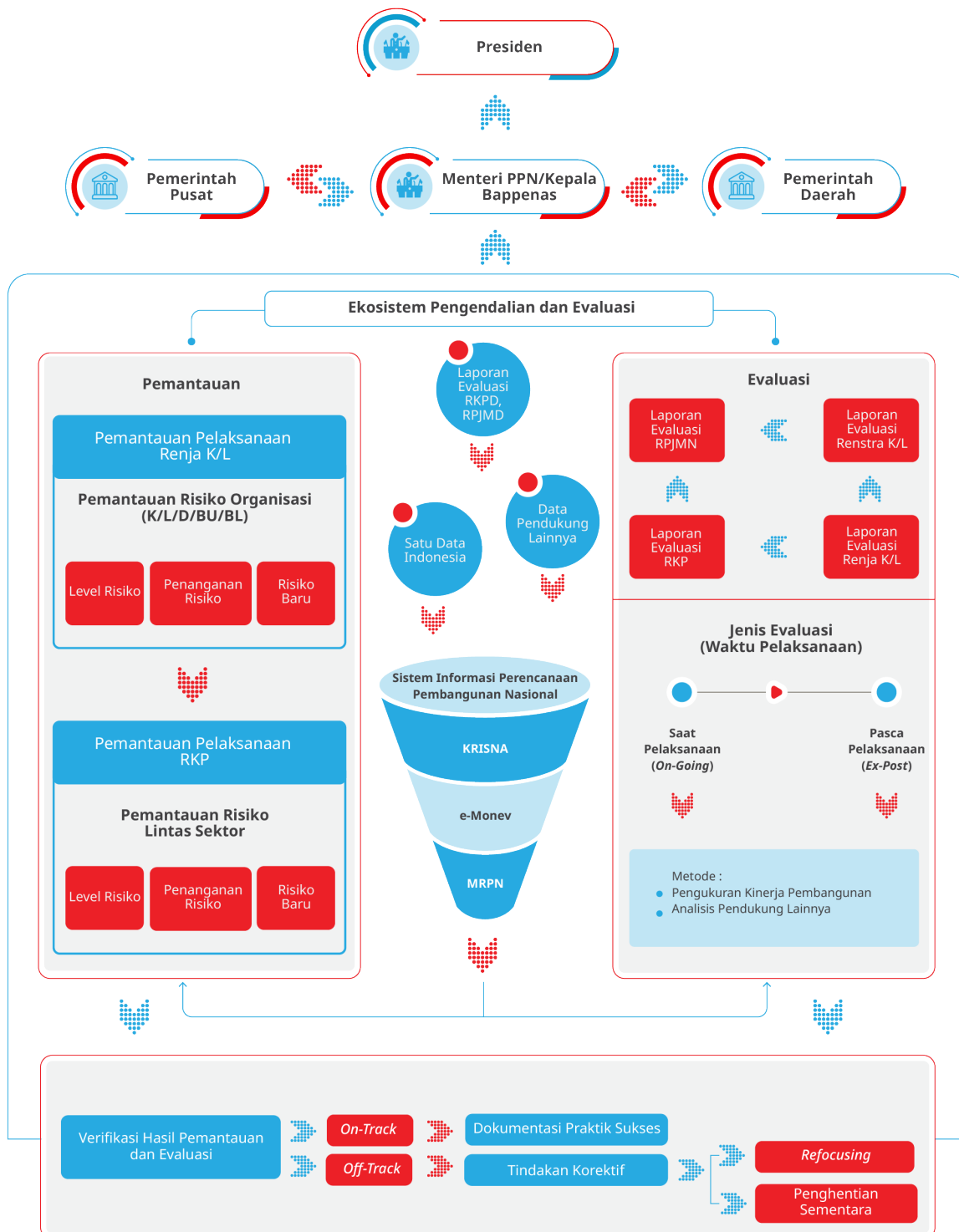
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Pengendalian dan evaluasi yang bersifat korektif dilakukan secara berkesinambungan dan partisipatif sepanjang periode implementasi dengan memanfaatkan data pada Satu Data Indonesia khususnya data prioritas, sistem informasi terpadu perencanaan, serta berbasis manajemen risiko pembangunan nasional. Tujuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP adalah (1) menjaga prioritas pembangunan berjalan sesuai dengan rencana atau *on-track*, (2)

memastikan upaya perbaikan dan penyesuaian berdasarkan tindak lanjut rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta (3) menilai kinerja efektivitas kebijakan/program/kegiatan untuk menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Ekosistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RKP, meliputi pemantauan pelaksanaan RKP serta evaluasi pelaksanaan RKP (*on going* dan *ex-post*).



Ekosistem Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN dan RKP



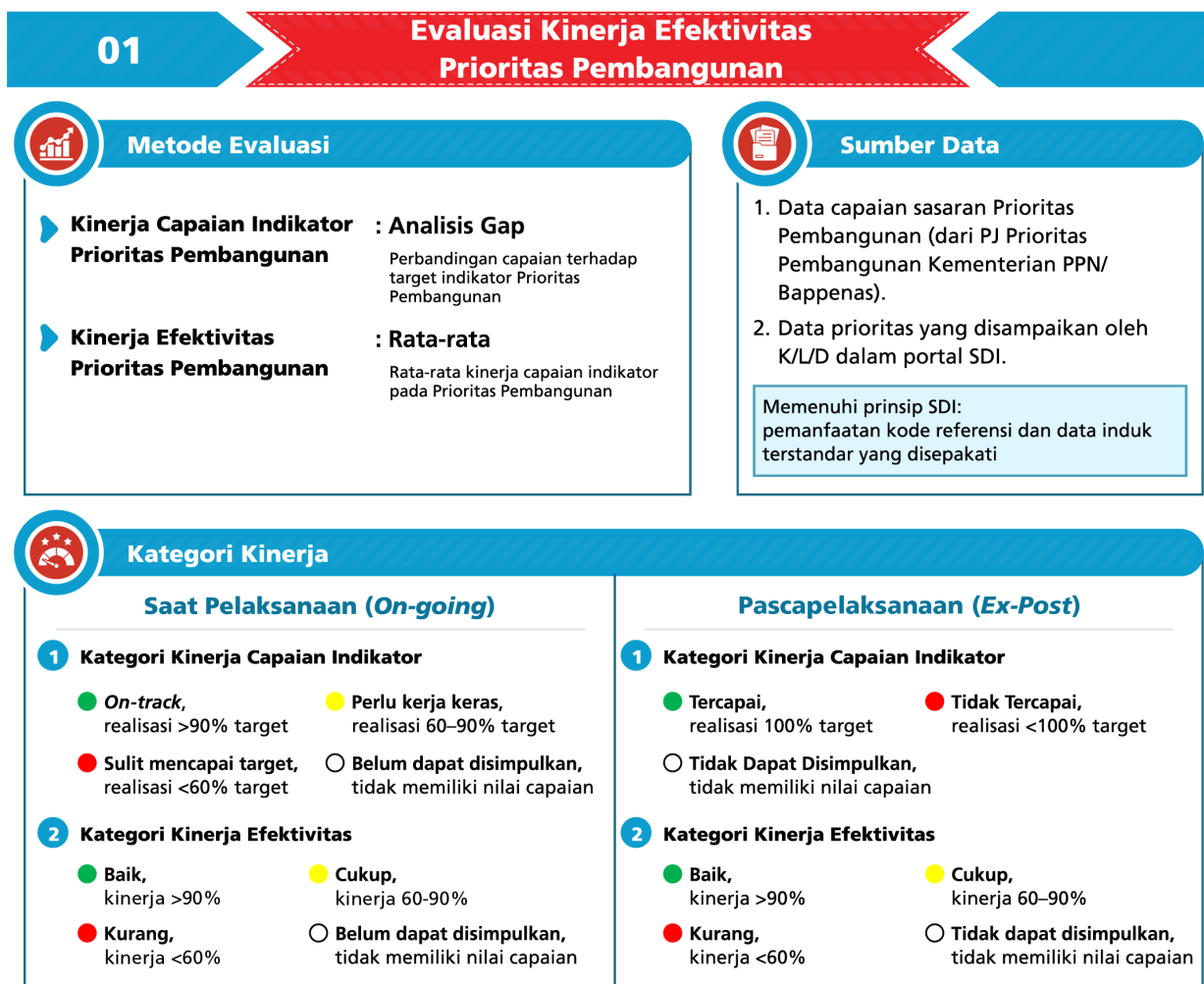
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2025 merupakan tahapan pengendalian kinerja dalam kerangka sistem akuntabilitas kinerja pembangunan nasional. Hal tersebut untuk memastikan capaian kinerja

pembangunan nasional beserta peran dan kontribusi kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Secara umum, pengendalian dan evaluasi RKP Tahun 2025 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan melalui penelaahan hasil pemantauan triwulanan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan informasi pendukung lain (Dana Alokasi Khusus, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, dan sumber lainnya) yang mendukung prioritas pembangunan beserta data capaian sasaran prioritas pembangunan yang telah dilaporkan baik melalui aplikasi e-Monev, portal Satu Data Indonesia, dan sumber data lainnya. Selain itu, sebagai satu rangkaian proses pemantauan turut mencakup pula pemantauan risiko, pelaksanaan penanganan risiko, serta risiko baru pembangunan nasional yang dilakukan secara berkala maupun berkelanjutan.
2. Evaluasi pelaksanaan RKP dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi capaian prioritas pembangunan maupun capaian *output* kementerian/lembaga yang mendukung prioritas pembangunan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan e-Monev. Evaluasi saat pelaksanaan (*on-going*) menilai perkembangan capaian prioritas pembangunan hingga triwulan III-2025, sementara evaluasi pascapelaksanaan (*ex-post*) menilai ketercapaian prioritas pembangunan hingga triwulan IV-2025. Adapun metode evaluasi RKP Tahun 2025 yang dapat digunakan terbagi berdasarkan tahapan (*on going* dan *ex-post*) serta berdasarkan pendekatan alat evaluasi yang digunakan, sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Metode Evaluasi Saat Pelaksanaan (*on-going*) dan Evaluasi Pascapelaksanaan (*ex-post*) RKP





02

Evaluasi Kinerja Efektivitas Output (RO) K/L



Metode Evaluasi

- ▶ **Kinerja Capaian Masing-masing Output (RO) K/L** : Analisis Gap
Perbandingan capaian terhadap target RO K/L
- ▶ **Kinerja Efektivitas Output (RO) K/L** : Rata-rata Tertimbang
Rata-rata seluruh capaian RO terhadap pagu anggaran pada prioritas pembangunan tertentu



Sumber Data

1. Data capaian RO K/L (berdasarkan e-Monev dilengkapi dengan data Kementerian Keuangan dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana).
2. Data prioritas yang disampaikan oleh K/L/D dalam portal SDI.

Memenuhi prinsip SDI:
pemanfaatan kode referensi dan data induk terstandar yang disepakati



Kategori Kinerja

- Baik, kinerja >90%
- Cukup, kinerja 60–90%
- Kurang, kinerja <60%
- Tidak dapat disimpulkan, tidak memiliki nilai capaian

03

Evaluasi Pendukung Lainnya

Sebagai analisis pendukung dalam evaluasi pelaksanaan RKP, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi lainnya yang bertujuan untuk melengkapi dan/atau memperdalam hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKP. Evaluasi tersebut dapat berupa evaluasi optimalisasi, evaluasi tematik, keterkaitan kinerja K/L dengan kinerja prioritas pembangunan, analisis tren, analisis pengelolaan risiko ataupun evaluasi lainnya yang relevan

Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar penerapan sistem insentif bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan nasional. Selain itu, implementasi pengendalian dan evaluasi RKP juga untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan visi-misi dan program presiden terpilih pada tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Pengendalian dan evaluasi yang lebih spesifik akan dilakukan pada program strategis, yaitu melalui (1) pemantauan pelaksanaan program yang juga mencakup pemantauan level dan penanganan risiko serta risiko baru; serta (2) evaluasi capaian dan proses pelaksanaan program strategis. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut dengan memanfaatkan sistem e-Monev.

Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Terpadu RKP

Sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu RKP Tahun 2025 dibangun dengan mengintegrasikan empat elemen yang telah ada, yaitu (1) e-Monev yang merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan; (2) aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang menyediakan data perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga; (3) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang menyediakan data pengelolaan keuangan negara pada satuan-satuan kerja yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporannya; serta (4) aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang merupakan penyedia

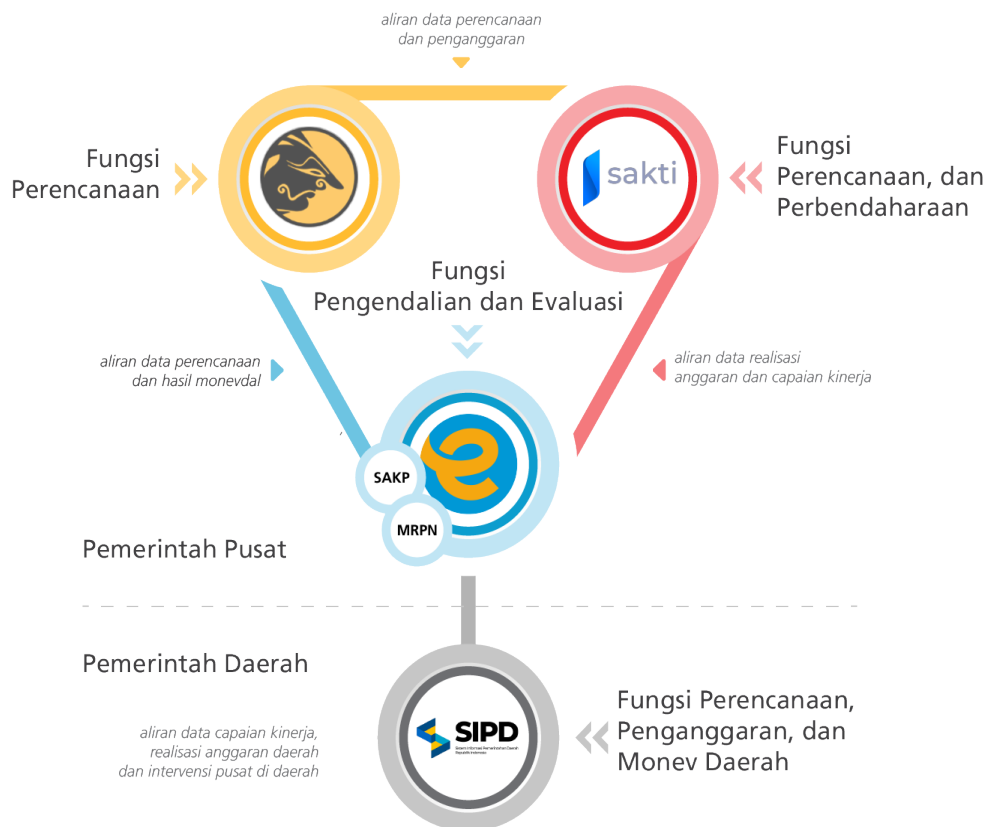
data capaian kinerja, realisasi anggaran daerah, dan intervensi pusat di daerah. Dengan integrasi ini, e-Monev yang berperan sebagai instrumen kunci pengendalian dan evaluasi mendapatkan data perencanaan yang bersumber dari aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran; data penganggaran dan perbendaharaan yang bersumber dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; serta data perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Sistem informasi pengendalian dan evaluasi RKP Tahun 2025 yang dikembangkan sebagai hasil integrasi antara e-Monev, aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dengan sistem bagi pakai data secara *real-time* dan akurat, diharapkan dapat mempermudah pelaporan pelaksanaan pembangunan pusat

dan daerah. Selain itu, sistem informasi pengendalian yang terintegrasi juga diharapkan dapat mempermudah penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Nasional dan laporan lainnya dalam kerangka akuntabilitas pelaksanaan RKP.

Aplikasi e-Monev diharapkan dapat menjadi *backbone system* dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional. Ke depan, aplikasi e-Monev akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi alat yang mampu menyederhanakan aplikasi sejenis. Selain itu, data pelaporan pemantauan pembangunan nasional dan daerah yang terdapat di dalam e-Monev dapat menjadi dasar pemberian insentif bagi instansi yang berkinerja baik dan disinsentif bagi instansi yang berkinerja kurang baik. Pengembangan aplikasi e-Monev sebagai alat mengawal pelaksanaan pembangunan berperan untuk mendukung proses

Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Terintegrasi





pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, dan berkontribusi meningkatkan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah, serta badan usaha milik negara. Dalam jangka menengah, sistem informasi pengendalian dan evaluasi terintegrasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional yang berkualitas sehingga dapat memberikan input bagi proses perencanaan dan penganggaran yang lebih solid.

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan nasional dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antaranjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi serta berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat dalam menjalankan program/kegiatan prioritas selalu melibatkan lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi.

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Sebagai perwujudan kebijakan penerapan manajemen risiko pembangunan nasional terdiri atas lintas sektor dan organisasi. Dalam mengawal RKP, kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RKP. Pada tahun 2025, implementasi manajemen risiko pembangunan nasional akan berfokus pada program strategis presiden terpilih pada level kegiatan prioritas.



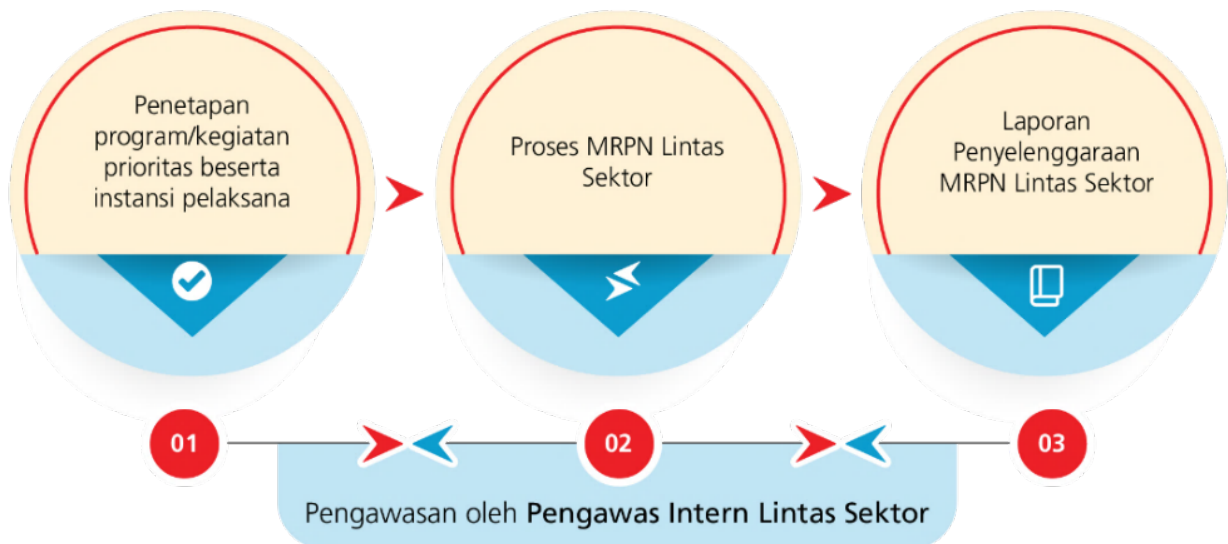
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Pada tahap penyusunan RKP ditetapkan program/kegiatan prioritas beserta unit pemilik risiko yang terdiri atas instansi pelaksana utama, instansi pendukung, dan kementerian koordinator yang terkait. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan tata kelola pelaksanaan RKP. Para pelaksana selanjutnya berkolaborasi dalam mengidentifikasi risiko dan rencana penanganan risiko yang mengacu pada indikasi risiko RKP.

Pada fase pelaksanaan RKP, pemantauan program/kegiatan prioritas juga mencakup pemantauan atas level risiko, pelaksanaan

penanganan risiko, serta indikasi risiko baru yang belum teridentifikasi sebelumnya. Hasil pemantauan menjadi bahan tindakan korektif pemerintah pada saat pelaksanaan, serta menjadi masukan bagi perencanaan periode selanjutnya. Implementasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor tersebut selanjutnya didokumentasikan melalui laporan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor. Penerapan manajemen risiko pembangunan nasional dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, dengan alur seperti pada gambar di bawah ini.

Alur Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.



Dalam mengakselerasi implementasi manajemen risiko pembangunan nasional, dilakukan integrasi proses bisnis manajemen risiko pembangunan nasional sebagaimana yang dijabarkan pada gambar di bawah. Integrasi proses bisnis manajemen risiko pembangunan nasional dengan proses perencanaan dilakukan melalui integrasi manajemen risiko pembangunan nasional dalam regulasi tata cara penyusunan RKP dan tata cara pengendalian RKP. Selain itu, sistem informasi manajemen risiko pembangunan nasional harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional berjalan efektif. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini mengoordinasikan sistem informasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor dan organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko pembangunan nasional kepada pengelola risiko pembangunan nasional di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya.

Adapun penyusunan regulasi terkait sistem insentif diperlukan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif dalam mengelola risiko. Sistem insentif tersebut berbasis penilaian terhadap instansi dalam pengelolaan risiko dan pencapaian kinerja yang masuk pada kerangka reformasi birokrasi. Penguatan kelembagaan juga penting untuk dilakukan terutama bagi unit kerja yang berperan sebagai unit kepatuhan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mengelola risiko pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan melalui pengayaan tugas dan fungsi serta mekanisme lainnya.

Pada tahun 2024, implementasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada proses perencanaan RKP Tahun 2025 akan dilakukan pada kegiatan pembangunan terpilih, antara lain mencakup penyusunan konteks, selera risiko, dan profil risiko, yang melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Berdasarkan profil risiko tersebut akan dilaksanakan pemantauan dan penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan nasional pada tahun 2025.

Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

6.2 Tata Kelola Data Pembangunan

Data menjadi faktor penting dalam pembangunan, meskipun dalam perjalanannya masih terdapat permasalahan dalam tata kelola data. Kebijakan mengenai tata kelola data telah diinisiasi pada tahun 2019 melalui program Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah

diakses, dan dibagi pakaikan antar-instansi pusat dan daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Untuk kepentingan tersebut, data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi, dan data induk.

Satu Data Indonesia sebagai *Enabler* Pembangunan (Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengendalian) hingga Mendukung Program Prioritas

Keberadaan Satu Data Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan di Indonesia, melalui peningkatan koordinasi, integrasi, akses, transparansi, dan interoperabilitas data pemerintah, baik pusat dan daerah. Dengan berkurangnya duplikasi data akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data, serta mengoptimalkan penggunaan sumber

daya yang tersedia untuk perencanaan pembangunan. Hal ini dapat menciptakan hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya Satu Data Indonesia secara langsung akan meningkatkan koordinasi, penetapan prioritas yang lebih tepat, dan evaluasi kinerja yang lebih baik sehingga penggunaan anggaran akan lebih efektif dan hasil pembangunan menjadi lebih optimal.

Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya Tata Kelola Satu Data



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

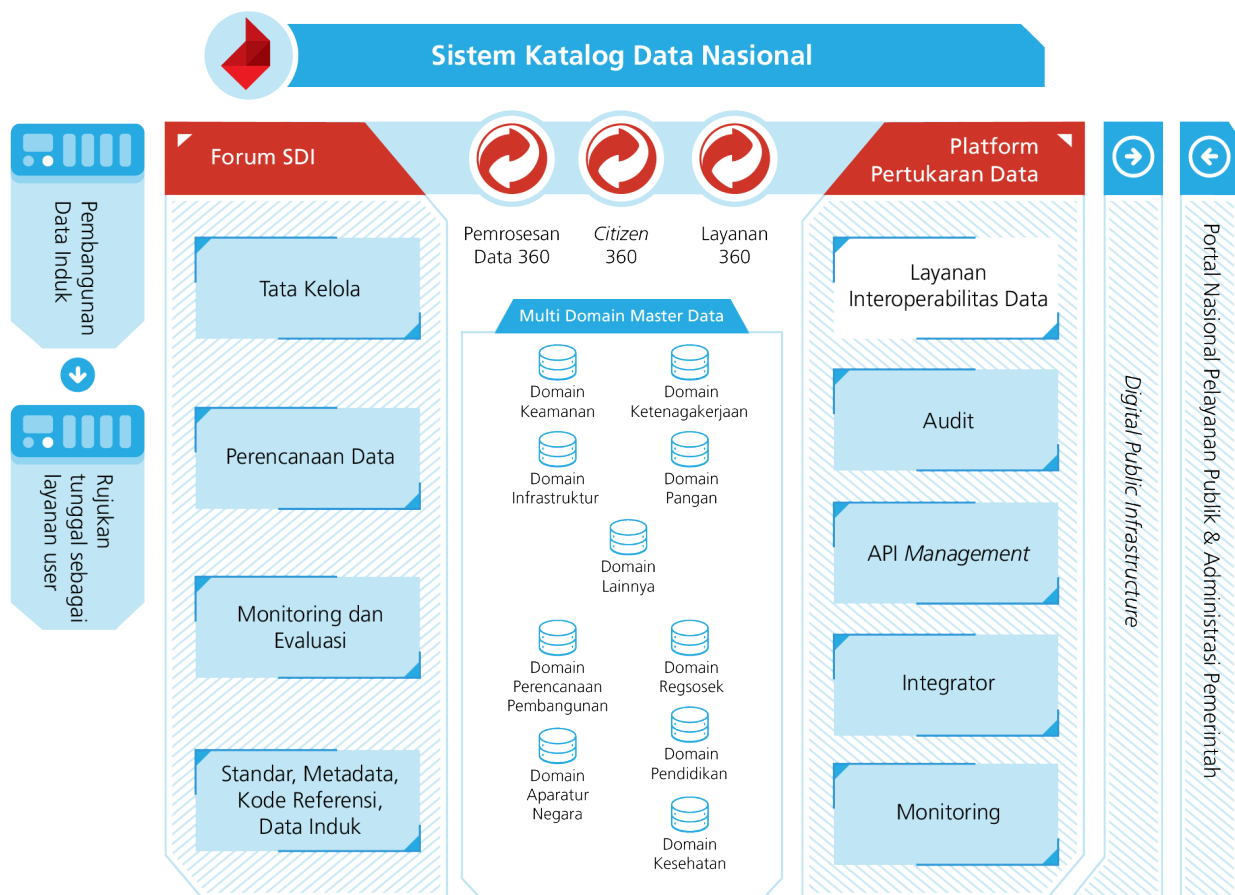


Satu Data Indonesia Mendukung Percepatan Transformasi Digital dan Layanan Terpadu

Dalam rangka percepatan pencapaian transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, Satu Data Indonesia memiliki peran untuk tata kelola platform pertukaran data guna mengintegrasikan dan memadukan data dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi satu sumber informasi terpadu yang akurat, melalui tata kelola pertukaran data. Selain itu, forum Satu Data Indonesia berperan dalam memutuskan kesepakatan penggunaan data induk yang tepat dalam rangka memastikan keakuratan

sumber data mengurangi redundansi data yang akan dipertukarkan, meningkatkan manajemen akses data dan keterbukaan data, mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan layanan publik. Inisiatif ini akan membantu mempercepat pembangunan di berbagai sektor dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Peran SDI dalam Tata Kelola Platform Pertukaran Data



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Penguatan Regulasi Satu Data Indonesia



Meskipun kebijakan Satu Data Indonesia telah memberikan perbaikan dalam tata kelola data, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang dihadapi agar tujuan utama Satu Data Indonesia dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam rangka memperkuat kewenangan terutama dalam mengatur penyelenggaraan data agar

lebih terpadu, baik untuk data pemerintah dan nonpemerintah dengan didukung oleh sumber daya manusia digital dan data yang unggul.

Dengan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tata kelola data, maka data pemerintah dan nonpemerintah dapat ditatakelola dengan efektif, efisien, dan akurat untuk mendorong penyusunan *Data Driven Policy Making*.

Penguatan Regulasi untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.



Kementerian PPN/
Bappenas

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310

 (021) 31936207

www.bappenas.go.id

